

MULTIKULTURALISME DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA

**(Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

OLEH

GITA SELVIA

NIM. 220101110005



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026



MULTIKULTURALISME DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA

**(Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH

GITA SELVIA

NIM. 220101110005



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

MULTIKULTURALISME DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA

(Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Oleh

Gita Selvia

NIM. 220101110005

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang ujian

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag

NIP. 19651112 199403 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Laily Nur Arifa', M.Pd.I

NIP. 19900528 201801 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma’had al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**” oleh Gita Selvia ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan **lulus** pada tanggal 4 Juni 2026.

Dewan Penguji,



Mohammad Karim, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 19840807 202321 1 016

Penguji Utama



Dr. H. Sudirman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19691020 200604 1 001

Ketua



Prof. Dr. Hj. Sulalah., M.Ag.
NIP. 19651112 199403 2 002

Sekretaris

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Prof. Dr. H. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Muhammad Walid, MA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hal : Skripsi Gita Selvia

Malang, 9 Mei 2026

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Gita Selvia
NIM	: 220101110005
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi	: Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama (Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan dan diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag

NIP. 19651112 199403 2 002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Selvia
NIM : 220101110005
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama
(Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 9 Mei 2026

Hormat saya



Gita Selvia

NIM. 220101110005

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al-Qur'an, al-Insyirah [94]: 5-6)¹

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣)

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada Ibu Bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kata “ah” dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya kata yang baik.”

(Al-Qur'an, al-Isra [17]: 23)²

“Setiap langkah adalah pelajaran, setiap rasa adalah guru. Jika luka mengajarkan sakit, maka cinta, rasa syukur, dan keikhlasan selalu mengajarkan cara sembuh”.

(Gita Selvia)

¹ Surat al-Insyirah Ayat 5-6: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 26 April 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=5&to=8>

² Surat al-Isra' Ayat 23: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 26 April 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=23>

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis mampu menapaki setiap proses panjang dalam penyusunan skripsi ini. Tidak ada daya dan upaya selain atas pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., suri teladan sepanjang zaman, pembawa cahaya ilmu dan akhlak bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan segala keterbatasan yang penulis miliki, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Erizal dan Ibu Aswarnida. Dengan segala kerendahan hati dan cinta yang tak mampu dituliskan sepenuhnya oleh kata-kata, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau, dua sosok paling berarti, paling berjasa, sekaligus rumah tempat penulis pulang setelah lelah menghadapi kehidupan. Kepada dua hati yang tak pernah berhenti berjuang bahkan ketika dunia terasa sempit dan berat, terima kasih karena telah menjadi alasan penulis mampu bertahan hingga sampai pada titik ini. Beliau mungkin tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, tetapi keduanya memiliki cita-cita yang jauh lebih tinggi daripada gelar apa pun, memastikan anak-anaknya dapat hidup dan belajar lebih baik dari yang pernah beliau rasakan. Di balik keterbatasan yang diam-diam dipeluk setiap hari, beliau tetap berdiri teguh, menyembunyikan letihnya sendiri demi menjaga mimpi-mimpi anak-anaknya tetap hidup. Sebagai anak kedua, penulis memendam haru yang sulit diungkapkan karena dapat menjadi lulusan sarjana di keluarga. Di balik toga yang kelak dikenakan, ada peluh beliau yang jatuh diam-diam di setiap perjuangan mencari nafkah, ada pundak yang terus dipaksa kuat meski lelah tak pernah benar-benar selesai. Beliau mengajarkan arti tanggung jawab bukan melalui banyak kata, melainkan melalui kerja keras yang tak pernah meminta dipahami. Setiap tetes keringat beliau adalah jalan panjang yang mengantarkan penulis sampai pada pendidikan ini. Dalam setiap sujudnya, selalu ada nama

penulis yang dititipkan kepada langit. Beliau menghadirkan kasih sayang yang tidak mengenal batas, nasihat yang menenangkan, serta pelukan yang selalu menjadi tempat paling aman bagi penulis untuk kembali. Di balik senyumnya, ada begitu banyak pengorbanan yang sering kali tidak terlihat, ada air mata yang disembunyikan agar anak-anaknya tetap merasa kuat. Beliau mencintai tanpa syarat, menjaga tanpa lelah, dan menguatkan tanpa pernah meminta balasan. Seluruh dukungan, perhatian, pengorbanan, dan keikhlasan beliau menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi dan gelar ini bukanlah milik penulis seorang, melainkan juga milik dua orang tua hebat yang telah mengorbankan begitu banyak hal demi masa depan anaknya. Tidak akan pernah cukup ucapan terima kasih untuk membalas seluruh cinta yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, umur yang panjang, serta membalas setiap air mata, do'a, pengorbanan, dan keikhlasan beliau dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat. Semoga setiap langkah beliau selalu dijaga, setiap lelah beliau menjadi pahala, dan setiap do'a beliau dikabulkan oleh Allah SWT.

2. Kepada Abang Muhammad Septria Fadli, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala perhatian, dukungan, serta kehadiran yang senantiasa menjadi penguat dalam perjalanan hidup penulis. Sebagai sosok abang, beliau tidak hanya hadir sebagai keluarga, tetapi juga sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat di tengah berbagai proses yang penulis lalui selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas setiap bantuan, nasihat, do'a, serta kepedulian yang diberikan dengan penuh ketulusan. Di balik sikap sederhana dan perhatian yang mungkin tidak selalu terucap melalui banyak kata, penulis merasakan kasih sayang dan dukungan yang begitu besar. Kehadiran Abang menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan terus melangkah meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan dan rasa lelah selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan Abang,

dan membalas segala kebaikan serta ketulusan dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat.

3. Kepada kedua adik tercinta, Hidayatul Zaki dan Abil Ihsan, penulis menyampaikan rasa sayang dan terima kasih atas kehadiran yang selalu menjadi warna, semangat, dan kebahagiaan di dalam keluarga. Meski sering kali sederhana, kebersamaan, candaan, dan dukungan kecil dari mereka mampu menjadi penguat bagi penulis di tengah lelahnya perjalanan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis berharap dan mendoakan agar kalian kelak dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, menjadi pribadi yang membanggakan, serta tumbuh sebagai anak-anak yang saleh, berilmu, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Semoga setiap langkah keduanya dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan masa depan yang penuh keberkahan, serta mampu meraih cita-cita yang selama ini diimpikan. Semoga hal yang penulis raih hari ini dapat menjadi jalan pembuka dan penyemangat bagi kalian untuk terus berjuang, bermimpi, dan percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia selama disertai do'a dan kesungguhan.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh staf tata usaha atas bantuan, pelayanan, dan kemudahan administrasi yang diberikan sehingga seluruh proses akademik dapat berjalan dengan lancar.
5. Kepada para guru, buya, ummi, ustadz, ustadzah, serta dosen yang telah membimbing, mendidik, dan menjadi perantara bagi penulis untuk mengenal Allah *Rabbul 'Izzati*, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas ilmu, nasihat, doa, kesabaran, serta keteladanan yang telah diberikan selama perjalanan menuntut ilmu. Dari beliau semua, penulis belajar bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga jalan untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memberi manfaat bagi sesama. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengabdian beliau dengan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan,

serta menjadikan setiap ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

6. Kepada seluruh keluarga besar dan sanak saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala do'a, perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup penulis. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga tali *silaturahmi*, melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan, serta membalas seluruh kebaikan dan ketulusan dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Kepada keluarga besar Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, seluruh pengasuh, *murabbi* dan *murabbiah*, *musyrif* dan *musyrifah*, serta seluruh mahasantri, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, doa, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan. Ma'had bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang untuk bertumbuh, memperbaiki diri, serta menanamkan nilai-nilai keislaman, kebersamaan, dan pengabdian. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang diperoleh di Ma'had akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada seluruh keluarga besar Ma'had, serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlimpah.
8. Kepada teman-teman kamar selama penulis mengemban amanah sebagai *musyrifah*, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah diukir bersama dalam setiap fase perjalanan di Ma'had. Kepada teman-teman kamar di Mabna Ummu Salamah, Uni Shofia (Miwa), Uni Qonita, Uni Rizka, Uni Luvi (Naya), Uni Adel, Uni Kirana, Uni Bela, dan Zahro, terima kasih telah menjadi rumah kedua yang menghadirkan hangatnya kebersamaan di tengah lelahnya amanah dan padatnya aktivitas. Setiap cerita, tawa, keluh kesah, hingga momen sederhana yang dilewati bersama menjadi bagian indah yang akan selalu penulis kenang. Kepada teman-teman kamar di Mabna Fatimah Az-Zahra, Kak Astuti, Kak Azizah, Kak Yuli,

Aisyah, Naila, Vinka, Ocha, Naura, dan Akmel, terima kasih karena telah menemani perjalanan penulis dengan begitu banyak warna kehidupan. Di tengah kesibukan dan tanggung jawab sebagai *musyrifah*, kehadiran mereka menjadi tempat pulang, tempat berbagi lelah, sekaligus tempat bertumbuh bersama dalam proses pendewasaan diri. Banyak pelajaran tentang kesabaran, kepedulian, dan arti kebersamaan yang penulis temukan bersama mereka. Begitu pula kepada teman-teman kamar di Mabna Asma' binti Abi Bakar, Kak Disa, Silmi, Alvi, Naila, Khabiza, Azmi, Yupin, dan Callista, terima kasih atas kebersamaan yang penuh cerita dan makna.

9. Kepada teman kamar selama penulis menjadi mahasantri di mabna Asma' binti Abi Bakar, Tiarah, Dawiya, Rizka, Ririz, Naura, Putri, Wikhda, Cantika, Zubed, terima kasih sudah menjadi teman kamar yang saling menyayangi satu sama lain.
10. Kepada seluruh adik-adik dampingan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama mengemban amanah sebagai *musyrifah*, terima kasih atas setiap kebersamaan, cerita, tawa, pelajaran, serta kenangan yang telah diukir bersama. Kehadiran mereka bukan hanya menjadi bagian dari amanah, tetapi juga menjadi warna tersendiri yang mengajarkan penulis tentang kesabaran, keikhlasan, kepedulian, dan arti menjadi keluarga dalam sebuah perantauan. Kepada adik-adik dampingan di Mabna Ummu Salamah, kamar 19 dan 22, almh. Dini, Dinda, Afni, Aulia, Annisa, Dea, Cantika, Iffa, Dina, Zalfa, Mar'a, Alfi, Ainy, Qonita, Riezma, Sabrina, Zidli, Syahda, Salwa, Nabila, Amiliya, dan Tasya, terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari yang penuh cerita dan makna. Teruntuk almh. Dini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kenangan bersama akan selalu hidup dalam do'a dan ingatan. Kepada adik-adik dampingan di Mabna Fatimah Az-Zahra, kamar 52 dan 53, Bariroh, Zahwa, Rostina, Alya, Arina, Devi, Citra, Farah, Gallu, Hilda, Irena, Bella, Irma, Kartika, Khusnul, Naifah, Nike, Vira, Rizqiya, Amel, Syafila, Syifa, Reva, dan Cindy, terima kasih atas kebersamaan yang telah menghadirkan begitu banyak pelajaran

dan kehangatan. Setiap proses yang dilalui bersama menjadi bagian indah yang akan selalu dikenang dalam perjalanan hidup penulis. Begitu pula kepada adik-adik dampingan di Mabna Asma' binti Abi Bakar, kamar 29, Ainika, Alfina, Tasya, Nafisa, Amanda, Nabila, Aulin, Ikvie, Hilya dan Wawa, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita, canda, dan perjuangan. Kehadiran semuanya menghadirkan banyak warna yang menjadikan setiap proses terasa lebih bermakna. Penulis mendo'akan semoga seluruh adik-adik dapat tumbuh menjadi pribadi yang hebat, sukses, dan membanggakan.

11. Kepada keluarga besar Divisi Taklim Afkar '34, Taklim Afkar '45, serta Divisi Ubudiyah '56, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Berbagai amanah dan proses yang dijalani menjadi ruang belajar tentang tanggung jawab, pengabdian, kebersamaan, dan ketulusan dalam melayani sesama. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ukhuwah yang terjalin, melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah, memudahkan segala urusan, serta mengantarkan seluruh anggota menuju cita-cita dan pengabdian terbaik.
12. Kepada keluarga besar UPKM JDFI Pusat Ma'had al-Jami'ah, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan ruang belajar yang berharga selama berproses bersama. Terima kasih karena telah menjadi tempat bertumbuh, berkarya, serta belajar tentang ukhuwah, pengabdian, dan kecintaan terhadap seni dan syiar Al-Qur'an. Secara khusus kepada Abuy Ilham, Miwa Shofia, Biya Latifah, Mas Aldhi, Mas Faisal, Mas Sutris, serta seluruh keluarga Divisi Qiro'ah UPKM JDFI, terima kasih atas arahan, dukungan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga *ukhuwah* yang terjalin, melimpahkan keberkahan dan kesehatan, serta membalas segala kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

13. Kepada seluruh teman-teman Pendidikan Agama Islam angkatan 2022, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Secara khusus kepada Dewi Novia Karlina, terima kasih atas kebaikan, perhatian, dan kehangatan yang diberikan sehingga penulis dapat merasakan makna keluarga di tanah perantauan. Kepada Hasnia, teman-teman MMA, serta seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kenangan yang telah terukir selama ini. Semoga setiap pertemuan dan kebersamaan yang telah dilalui menjadi jalinan silaturahmi yang senantiasa terjaga dan membawa keberkahan bagi kita semua.
14. Kepada keluarga besar H-Family, Wanda, Ninis, Faiqoh, Zita Nabila, Indah, Zahra, Mbak Amel, Anis, Salsa, Siroj, Fariz, Arbi, Berda, Alfian, Andre, dan Firdaus, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat, serta menghadirkan rasa nyaman dan kekeluargaan dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu anugerah yang memperindah proses bertumbuh dan belajar. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ukhuwah yang telah terjalin, melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah, memudahkan segala cita-cita, serta mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang terbaik.
15. Kepada teman-teman asistensi mengajar (AM) di MI Syihabuddin, Ema, Fany, Wilda, Arin, Ucik, Elly, Nana, Muba, dan Naufal, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama selama masa pengabdian dan pembelajaran. Terima kasih atas dukungan, bantuan, serta semangat yang diberikan sehingga setiap proses dapat dijalani dengan lebih ringan dan bermakna. Berbagai cerita dan kenangan yang terukir bersama akan selalu menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup penulis.
16. Kepada seluruh staf dan tenaga kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para petugas keamanan, petugas kebersihan, serta para Ibu yang melayani di kantin kampus, penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan selama

masa perkuliahan. Kehadiran dan kerja keras Bapak serta Ibu telah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, aman, dan kondusif bagi seluruh mahasiswa.

17. Kepada Muhammad Miftah Faridl, penulis mengucapkan terima kasih atas inspirasi, motivasi, dan semangat yang secara tidak langsung telah diberikan selama perjalanan menempuh pendidikan. Melalui ketekunan, karya, dan nilai-nilai yang ditunjukkan, penulis belajar tentang pentingnya kesabaran, istiqamah, serta semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebaikan kepada beliau, serta menjadikan setiap ilmu dan manfaat yang dibagikan sebagai amal jariyah yang terus mengalir.
18. Kepada Anas, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala bantuan, dukungan, yang telah diberikan. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang membantu penulis menemukan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang, serta selalu memberikan semangat di tengah keraguan dan rasa tidak yakin terhadap diri sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya. Semoga seluruh kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dibalas dengan balasan terbaik oleh Allah SWT.
19. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Berkat beasiswa yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. *In syaa Allah*, dengan segenap jiwa dan raga, ilmu dan pengabdian ini akan penulis persembahkan untuk turut mencerdaskan generasi bangsa.
20. Kepada seseorang yang namanya masih Allah rahasiakan entah di belahan takdir yang mana, seseorang yang hingga hari ini masih tertangguh oleh waktu dan doa-doa, penulis ingin menitipkan beberapa kalimat sederhana ini. Jika suatu hari Allah benar-benar mempertemukan kita pada waktu terbaik menurut kehendak-Nya, maafkan apabila penulis datang dengan begitu

banyak kekurangan. Penulis bukan seseorang yang sempurna, bukan pula pribadi yang selalu kuat dan baik-baik saja. Ada luka yang belum sepenuhnya pulih, ada ketakutan yang masih diam-diam disimpan, serta ada bagian-bagian diri yang mungkin masih jauh dari kata layak. Namun di tengah segala kurang itu, penulis terus belajar untuk memperbaiki diri dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Barangkali saat ini kita masih berjalan sendiri-sendiri, saling asing di bawah langit yang sama, tanpa pernah mengetahui bahwa suatu hari nanti Allah mungkin mempertemukan dua perjalanan yang sama-sama lelah dalam penantiannya. Dan apabila hari itu benar-benar tiba, semoga pertemuan tersebut bukan sekadar tentang saling memiliki, melainkan tentang saling menguatkan, saling menerima kekurangan, serta saling bertumbuh menuju kebaikan. Skripsi ini, dengan segala air mata, lelah, doa, dan perjuangan yang menyertainya, diam-diam penulis persembahkan pula untukmu, seseorang yang bahkan namanya belum penulis ketahui. Sebab mungkin suatu hari nanti, ketika kamu membaca halaman-halaman ini, kamu akan memahami bahwa jauh sebelum pertemuan itu terjadi, namamu telah lebih dahulu hadir dalam doa-doa yang diam-diam penulis langitkan kepada Allah.

21. Terakhir, kepada diri sendiri, Gita Selvia, izinkan penulis mengucapkan terima kasih dengan cara yang paling sederhana, sebagaimana selama ini diri ini diam-diam belajar bertahan dalam sunyi. Terima kasih karena telah berjalan sejauh ini, meski berkali-kali merasa lelah, tertinggal, dan tidak cukup baik dibandingkan banyak orang di luar sana. Terima kasih karena tetap memilih melangkah, walau sering kali langkah itu diiringi keraguan, air mata, dan do'a-do'a yang dipanjatkan dengan suara yang nyaris patah. Tidak ada perjalanan yang benar-benar mudah. Ada banyak hal yang selama ini dipendam sendiri, rasa takut gagal, rasa kecewa pada diri sendiri, rasa lelah karena ingin terlihat kuat, hingga rasa ingin berhenti ketika keadaan terasa terlalu sesak untuk dijalani. Namun di antara semua itu, diri ini tetap berusaha bertahan, meskipun sering kali harus merangkak pelan untuk sampai pada hari ini. Penulis sadar, diri ini

bukan seseorang yang paling hebat, bukan pula yang paling pantas untuk dibanggakan. Masih banyak kurangnya, masih sering jatuh pada rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Akan tetapi, di tengah segala kekurangan itu, diri ini tetap mencoba menjadi manusia yang tidak berhenti belajar, tidak berhenti berdoa, dan tidak berhenti berharap kepada Allah SWT. Di balik selesainya perjalanan ini, ada begitu banyak malam yang dihabiskan bersama rasa cemas, ada do'a-do'a panjang yang dipeluk dalam sujud, ada tangis yang sengaja disembunyikan agar tidak menjadi beban bagi siapa pun. Ada hati yang berkali-kali merasa rapuh, tetapi tetap memaksa dirinya berdiri karena sadar bahwa ada banyak harapan orang-orang tercinta yang sedang ditiptkan di pundaknya. Terima kasih telah berusaha.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama (Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”*. Shalawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang selalu kita jadikan teladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah, khususnya pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025 sampai dengan sekarang.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Walid, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025 sampai dengan sekarang.

3. Ibu Dr. Laily Nur Arifa, M.Pd.I selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025 sampai dengan sekarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag selaku dosen pembimbing, yang telah sabar dalam membimbing, memotivasi dan mendo'akan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Ustadz Abdul Fattah, M.Th.I selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku *Mudir* Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan Islam.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL.....	i
LEMBAR LOGO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
ABSTRAK	xxvi
ABSTRACT	xxvii
مستخلص البحث.....	xxviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II PEMBAHASAN.....	26
A. Kajian Teori	26
1. Multikulturalisme	26
2. Moderasi Beragama	37
3. Mahasantri non-Muslim.....	45
4. Pusat Ma'had al-Jami'ah.....	49
5. Hubungan Antarkonsep (Multikulturalisme, Moderasi Beragama, dan Mahasantri Non-Muslim.....	51
B. Perspektif Teori dalam Islam	53
C. Kerangka Berpikir	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Kehadiran Peneliti.....	66
D. Subjek Penelitian.....	68
E. Data dan Sumber Data.....	69
F. Instrumen Penelitian.....	70
G. Teknik Pengumpulan Data.....	72
H. Pengecekan Keabsahan Data	74
I. Analisis Data.....	74
J. Prosedur Penelitian.....	77
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	85
A. Paparan Data	85
1. Gambaran Umum Pusat Ma'had al-Jami'ah.....	85
2. Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	87
B. Hasil Penelitian	92
1. Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Moderasi Beragama dalam Praktik Kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	92

2. Pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim dalam menjalani kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	112
3. Faktor-faktor yang mendorong serta menghambat upaya penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural bagi mahasantri non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	139
BAB V PEMBAHASAN.....	168
A. Implementasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam praktik kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	168
B. Pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim dalam menjalani kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	199
C. Faktor-faktor yang mendorong serta menghambat upaya penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural bagi mahasantri non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	272
BAB VI PENUTUP.....	273
A. Simpulan.....	273
B. Saran.....	275
DAFTAR PUSTAKA	278
LAMPIRAN.....	287
JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI	321
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	323
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	324

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	17
Tabel 2.1 Instrumen Penelitian	71
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	84
Tabel 4.1 <i>Mudir</i> Pusat Ma'had al-Jami'ah	89
Tabel 5.1 Bagan Hasil Penelitian.....	272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	62
--	----

ABSTRAK

Selvia, Gita. 2026. Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.

Kata kunci: *Multikulturalisme, Moderasi Beragama, Mahasantri Non-Muslim*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural, khususnya di lingkungan pendidikan Islam yang tidak hanya dihuni oleh peserta didik Muslim, tetapi juga non-Muslim. Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ruang sosial yang unik karena melibatkan mahasantri non-Muslim dalam kehidupan berasrama yang berbasis nilai-nilai keislaman. Meskipun berbagai penelitian telah membahas moderasi beragama dan multikulturalisme, penelitian ini menghadirkan fokus yang lebih spesifik pada pengalaman langsung mahasantri non-Muslim dalam menjalani kehidupan berasrama serta dinamika sosial, kultural, dan religius yang terbentuk di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk multikulturalisme, pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan moderasi beragama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan mahasantri non-Muslim, mahasantri Muslim, serta pengelola Ma'had. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme terwujud dalam bentuk sikap inklusif, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan tanpa adanya pemaksaan keyakinan. Pengalaman mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya proses adaptasi yang awalnya diwarnai kecanggungan, namun berkembang menjadi interaksi sosial yang harmonis dan penuh saling menghargai. Selain itu, moderasi beragama didukung oleh kebijakan institusi yang inklusif, peran *musyrif/murabbiah* yang humanis, serta iklim sosial yang kondusif, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pemahaman awal tentang keberagaman dan potensi miskomunikasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah multikulturalisme di lingkungan Ma'had terbangun secara nyata melalui praktik kehidupan sehari-hari yang inklusif dan toleran. Kedua, pengalaman mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya proses adaptasi yang berujung pada terbentuknya hubungan sosial yang harmonis lintas agama. Ketiga, keberhasilan penguatan moderasi beragama dipengaruhi oleh dukungan kebijakan institusi, peran pembina, serta iklim sosial yang kondusif, meskipun masih dihadapkan pada beberapa hambatan awal. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pihak Ma'had terus memperkuat kebijakan inklusif, meningkatkan peran pembina dalam pendampingan lintas agama, serta mengembangkan program yang mendukung interaksi multikultural secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Selvia, Gita. 2026. Multiculturalism within the Framework of Religious Moderation: A Case Study of Non-Muslim Students at Pusat Ma'had al-Jami'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.

Keywords: *Multiculturalism, Religious Moderation, Non-Muslim Students*

This study is motivated by the importance of strengthening religious moderation within a multicultural society, particularly in Islamic educational environments that are inhabited not only by Muslim students but also non-Muslim students. Pusat Ma'had al-Jami'ah of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang represents a unique social setting as it involves non-Muslim students in a dormitory life based on Islamic values. Although numerous studies have discussed religious moderation and multiculturalism, this research offers a more specific focus on the lived experiences of non-Muslim students in dormitory life, including the social, cultural, and religious dynamics that emerge within it. Therefore, this study aims to examine the forms of multiculturalism, the social, cultural, and religious experiences of non-Muslim students, as well as the supporting and inhibiting factors in strengthening religious moderation.

This research employs a qualitative approach using a case study method at Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, involving non-Muslim students, Muslim students, and Ma'had administrators. The findings indicate that multiculturalism is manifested through inclusive attitudes, tolerance, and respect for differences without any coercion in matters of belief. The experiences of non-Muslim students reveal an adaptation process that initially involves awkwardness but gradually develops into harmonious and mutually respectful social interactions. Furthermore, religious moderation is supported by inclusive institutional policies, the humanistic roles of *musyrif/murabbiah*, and a conducive social environment, although some obstacles remain, such as limited initial understanding of diversity and potential miscommunication.

The conclusions of this study are as follows: first, multiculturalism within the Ma'had environment is concretely established through inclusive and tolerant daily practices. Second, the experiences of non-Muslim students demonstrate an adaptation process that leads to harmonious interfaith social relationships. Third, the success of strengthening religious moderation is influenced by institutional policy support, the role of mentors, and a conducive social climate, despite some initial challenges. Therefore, it is recommended that the Ma'had further strengthen inclusive policies, enhance the role of mentors in interfaith guidance, and develop programs that sustainably support multicultural interaction.

ملخص البحث

سلفيا، غيتا. ٢٠٢٦. التعددية الثقافية في إطار الاعتدال الديني: دراسة حالة للطلبة غير المسلمين في مركز المعهد الجامعي بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. قسم التربية الإسلامية، كلية علوم التربية والتعليم، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذة الدكتورة الحاجة سلاله، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التعددية الثقافية، الاعتدال الديني، الطلبة غير المسلمين

ينطلق هذا البحث من أهمية تعزيز الاعتدال الديني في سياق مجتمع متعدد الثقافات، لا سيما في البيئات التعليمية الإسلامية التي لا يقتصر فيها الطلاب على المسلمين فقط، بل تشمل أيضاً غير المسلمين. ويُعدّ مركز المعهد الجامعي بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج فضاءً اجتماعياً فريداً، إذ يضم الطلبة غير المسلمين ضمن الحياة السكنية القائمة على القيم الإسلامية. وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الاعتدال الديني والتعددية الثقافية، فإن هذا البحث يركز بشكل خاص على التجارب المباشرة للطلبة غير المسلمين في الحياة السكنية، وما ينشأ فيها من تفاعلات اجتماعية وثقافية ودينية. لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة أشكال التعددية الثقافية، وتجارب الطلبة غير المسلمين الاجتماعية والثقافية والدينية، إضافة إلى العوامل الداعمة والمعوقة في تعزيز الاعتدال الديني.

استخدم هذا البحث المنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة في مركز المعهد الجامعي بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، والملاحظة، والتوثيق، بمشاركة الطلبة غير المسلمين، والطلبة المسلمين، وإدارة المعهد. وأظهرت نتائج البحث أن التعددية الثقافية تتجلى في السلوكيات الشمولية، والتسامح، واحترام الاختلاف دون وجود أي إكراه في المعتقد. كما بيّنت تجارب الطلبة غير المسلمين وجود عملية تكيف بدأت بشيء من الحرج، ثم تطورت إلى علاقات اجتماعية منسجمة يسودها الاحترام المتبادل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الاعتدال الديني وجود سياسات مؤسسية شمولية، ودور إنساني للمشرفين والمشرفات، وبيئة اجتماعية ملائمة، رغم وجود بعض التحديات مثل محدودية الفهم الأولي للتنوع واحتمال حدوث سوء تواصل.

وتتلخص نتائج البحث إلى أن التعددية الثقافية في بيئة المعهد تتجسد بوضوح في الممارسات اليومية القائمة على الشمولية والتسامح. كما أن تجارب الطلبة غير المسلمين تُظهر عملية تكيف تُفضي إلى علاقات اجتماعية منسجمة بين أتباع الأديان المختلفة. ويتأثر نجاح تعزيز الاعتدال الديني بدعم السياسات المؤسسية، ودور المشرفين، والبيئة الاجتماعية المناسبة، رغم وجود بعض المعوقات الأولية. ويوصي البحث بضرورة تعزيز السياسات الشمولية، وتفعيل دور المشرفين في الإرشاد بين الأديان، وتطوير برامج تدعم التفاعل متعدد الثقافات بشكل مستدام.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam proposal skripsi ini mengikuti pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Huruf

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= <u>h</u>	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ‘
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيُّ = ay

أُو = û

إِي = î

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi dengan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang sangat kompleks. Lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, serta 6 agama resmi yang diakui negara menjadikan Indonesia sebagai laboratorium sosial yang unik.³ Keberagaman ini merupakan *sunnatullah* yang diakui dalam ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 13.⁴ Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

Pesan utama ayat ini adalah bahwa perbedaan identitas sosial, etnis, budaya, maupun asal-usul bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain, melainkan sarana untuk membangun interaksi yang harmonis. Ukuran kemuliaan manusia dalam pandangan Allah bukanlah kekayaan, status sosial, atau asal-usul, melainkan tingkat ketakwaannya. Ayat ini mengandung nilai universal tentang pentingnya toleransi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman, yang relevan untuk membangun masyarakat yang multikultural dan moderat. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial, ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap individu harus mampu menerima perbedaan dengan penuh sikap saling menghormati, sehingga terwujud kehidupan bersama yang damai dan penuh keberkahan.

³ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, hlm. 45–47, <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

⁴ Tafsir Al-Misbah. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati, hlm. 615–617.

Dalam realitas sosial, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman tertinggi di dunia, baik dari segi agama, budaya, bahasa, maupun etnis. Keragaman ini seharusnya menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan bangsa, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa perbedaan sering kali menjadi potensi konflik. Kasus diskriminasi, penolakan pembangunan rumah ibadah, hingga tindak kekerasan berbasis agama masih ditemukan di berbagai wilayah. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) kerap menyoroti fakta bahwa intoleransi masih menjadi problem serius di Indonesia, meskipun nilai-nilai agama sejatinya menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan.⁵

Moderasi beragama hadir sebagai konsep yang menawarkan jalan tengah dalam mengelola keragaman. Moderasi tidak dimaknai sebagai upaya melemahkan ajaran agama, melainkan sikap menempatkan keadilan, keseimbangan, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga kohesi sosial, mengurangi potensi konflik, dan membangun masyarakat yang damai. Integrasi nilai moderasi beragama dengan semangat multikulturalisme dapat melahirkan generasi yang inklusif dan mampu menghargai perbedaan.

Salah satu sarana paling efektif untuk menginternalisasikan nilai moderasi dan multikulturalisme adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, kesadaran, dan keterampilan sosial. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik dibekali kemampuan untuk memahami perbedaan, mengembangkan empati, serta membangun toleransi dalam kehidupan bersama. Konsep ini semakin relevan ketika ditempatkan dalam kerangka pendidikan

⁵ SETARA Institute. (2023). *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, hlm. 5–10, <https://setara-institute.org>.

Islam, yang menekankan prinsip *tauhid* (kesatuan), *ummah* (persaudaraan), dan *ta'aruf* (saling mengenal).

Pendidikan Islam berbasis multikultural tidak sekadar mengajarkan keragaman sebagai konsep, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, personal, dan sosial. Tujuannya adalah membentuk pribadi Muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga mampu menjadi warga negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kerukunan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembinaan generasi yang religius sekaligus nasionalis, serta berperan sebagai penopang persatuan bangsa di tengah perbedaan.⁶

Reputasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul turut diperkuat melalui capaian pemeringkatan nasional dan internasional. Berdasarkan pemeringkatan UniRank tahun 2026, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menempati posisi kedua terbaik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia serta berada pada peringkat ke-48 perguruan tinggi terbaik secara nasional.⁷ Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas institusi, baik dalam bidang akademik, tata kelola pendidikan, maupun penguatan kultur kampus yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat yang plural.

Kondisi ini memiliki relevansi dengan penelitian mengenai multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama, sebab lingkungan akademik yang berkualitas tidak hanya diukur dari aspek intelektual, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif, toleran, dan harmonis di tengah keberagaman. Dalam konteks ini, keberadaan mahasantri non-Islam di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN

⁶ H.A.R. Tilaar. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan*. Jakarta: Grasindo, hlm. 95–100.

⁷ UIN Malang Peringkat 2 PTKIN Terbaik Versi UniRank 2026, Perkuat Posisi di Top 100 Nasional, <https://madiun.jatimtimes.com/baca/3331341518/20260409/043600/uin-malang-peringkat-2-ptkin-terbaik-versi-unirank-2026-perkuat-posisi-di-top-100-nasional> , diakses pada 5 Mei 2026, pukul 08.00 WIB.

Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi representasi nyata dari praktik pendidikan multikultural dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama yang dikembangkan oleh institusi. Dengan demikian, capaian institusional UIN Malang tidak dapat dipisahkan dari upaya kampus dalam menciptakan ruang pendidikan Islam yang terbuka, humanis, dan menghargai pluralitas sosial-keagamaan.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kekhasan tersendiri dalam implementasi pendidikan Islam multikultural. Melalui Pusat Ma'had al-Jami'ah, seluruh mahasiswa baru diwajibkan tinggal di asrama yang menampung ribuan mahasiswa dari beragam fakultas, latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan. Walaupun mayoritas mahasiswa beragama Islam, terdapat pula mahasiswa non-Muslim yang ikut serta dalam kehidupan Ma'had. Kehadiran mahasantri non-Muslim inilah yang melahirkan dinamika unik, karena jarang ditemukan di pesantren atau lembaga pendidikan Islam tradisional.

Eksistensi mahasantri non-Muslim menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul dalam bentuk perbedaan budaya religius, keterbatasan fasilitas ibadah, hingga potensi stigma dari lingkungan. Namun, di sisi lain, kehadiran mereka membuka peluang terciptanya dialog lintas iman, penguatan sikap toleran, serta pembentukan karakter inklusif di kalangan mahasiswa. Interaksi sehari-hari di asrama memungkinkan tumbuhnya pengalaman langsung dalam mengelola keragaman, yang sejalan dengan nilai moderasi beragama dan multikulturalisme.

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak terbatas pada pembinaan mahasiswa Muslim saja, tetapi mampu menjadi ruang yang inklusif bagi siapa pun. Dengan mengedepankan pendekatan multikultural, Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi pendidikan Islam moderat yang relevan dengan konteks

masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa pendidikan Islam mampu mengakomodasi keberagaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Dalam sejarah Islam, teladan tentang hidup berdampingan secara damai sudah dicontohkan melalui Piagam Madinah. Dokumen ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun sistem sosial inklusif yang memungkinkan umat Islam, Yahudi, dan Nasrani hidup bersama dalam bingkai keadilan dan persaudaraan. Relevansi nilai Piagam Madinah dapat dijadikan inspirasi bagi implementasi pendidikan multikultural di era sekarang, termasuk dalam konteks Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hingga saat ini, penelitian mengenai Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lebih banyak menyoroti aspek manajerial, pengembangan kurikulum keislaman, atau pembinaan karakter mahasiswa Muslim. Kajian yang secara khusus membahas pengalaman mahasantri non-Muslim masih sangat terbatas. Padahal, eksistensi mereka dapat menjadi indikator sejauh mana nilai inklusivitas, toleransi, dan moderasi benar-benar dijalankan dalam praktik nyata pendidikan Islam kontemporer. Kekosongan penelitian ini menjadi celah penting untuk diteliti lebih dalam.

Selain itu, data administratif menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa baru yang masuk Ma'had terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data rekapitulasi, tercatat sebanyak 4.897 mahasiswa baru telah berhasil melakukan validasi hingga hari terakhir. Rinciannya adalah pada 11 Agustus 2025 sebanyak 321 mahasiswa, 12 Agustus 2025 sebanyak 408 mahasiswa, 13 Agustus 2025 sebanyak 1.309 mahasiswa, 14 Agustus 2025 sebanyak 1.379 mahasiswa, dan 15 Agustus 2025 sebanyak 1.480 mahasiswa. Selain itu, total mahasiswa yang sudah melakukan registrasi kampus mencapai 5.017 orang,

sementara mahasiswa yang telah memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) tercatat 4.971 orang.⁸

Adapun proses validasi bagi mahasiswa yang belum sempat melakukannya tetap dibuka hingga 19 Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa baru dalam menyelesaikan seluruh prosedur administrasi penerimaan di kampus. Selain itu, pada tahun ini terdapat dua orang mahasiswa non-Muslim yang diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Walaupun sedikit berkurang dari tahun sebelumnya, angka ini memperlihatkan besarnya skala Ma'had sebagai lembaga asrama, sehingga dinamika keberagaman yang terjadi di dalamnya memiliki relevansi akademik sekaligus praktis untuk diteliti lebih jauh.

Dengan demikian, penelitian mengenai multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama dengan studi kasus mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi penting dan strategis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya wacana tentang pendidikan Islam multikultural yang belum banyak disentuh dalam literatur. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif, toleran, dan moderat.

Penelitian ini menjadi penting di tengah meningkatnya wacana polarisasi dan isu intoleransi yang mengancam kohesi sosial masyarakat Indonesia modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika keberagaman di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus pada mahasantri non-Muslim tidak hanya akan menjawab kekosongan akademik, tetapi juga menawarkan model bagaimana pendidikan Islam dapat

⁸ “Validasi Kedatangan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Berjalan Tertib dan Lancar”, msaa.uin-malang.ac.id, <https://msaa.uin-malang.ac.id/validasi-kedatangan-mahasiswa-baru-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-berjalan-tertib-dan-lancar/>, diakses pada 1 Januari 2026.

berkontribusi dalam membangun generasi yang moderat, inklusif, dan damai di tengah masyarakat multikultural.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, fokus penelitian yang diformulasikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam praktik kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasiswa non-Muslim dalam menjalani kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
3. Faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambat upaya penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural bagi mahasiswa non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan realisasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam praktik kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mengidentifikasi pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasiswa non-Muslim dalam menjalani kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat upaya penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural bagi mahasiswa non-Muslim di

lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik dalam aspek teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengayaan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam kajian multikulturalisme dan moderasi beragama. Secara konseptual, penelitian ini berpotensi memperkuat teori pendidikan Islam yang relevan dengan isu keberagaman agama dan budaya di perguruan tinggi Islam. Temuan penelitian ini diharapkan melahirkan paradigma pendidikan Islam yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada nilai kebinekaan, serta memperkaya literatur tentang integrasi antara nilai multikulturalisme, moderasi beragama, dan praktik pendidikan Islam di lingkungan Ma'had al-Jami'ah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pusat Ma'had al-Jami'ah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pengasuhan dan pendidikan di lingkungan Ma'had yang lebih adaptif terhadap keragaman agama. Temuan penelitian dapat dijadikan landasan dalam merancang program, kurikulum keasramaan, maupun strategi pembinaan mahasantri yang menekankan nilai inklusivitas, toleransi, serta keharmonisan dalam interaksi sosial.

b. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti di FITK, khususnya yang berkaitan dengan isu

multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menginspirasi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai moderasi beragama dan multikulturalisme sebagai kompetensi penting bagi calon pendidik.

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas literatur ilmiah di bidang pendidikan Islam, khususnya terkait praktik moderasi beragama dan multikulturalisme di lingkungan Ma'had. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi akademik dalam pengembangan model pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan pluralitas masyarakat Indonesia.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rujukan awal bagi studi-studi berikutnya yang berminat mengeksplorasi isu interaksi antaragama, pendidikan berbasis Ma'had, dan praktik moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang berbeda, lokasi yang lebih luas, atau fokus pada variabel tertentu yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

e. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini tidak sekadar memberikan kepuasan intelektual melalui penyelesaian karya ilmiah, tetapi juga menjadi sarana untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam. Hasil temuan penelitian ini dapat menjadi bekal penting bagi pengembangan karier di bidang pendidikan, baik sebagai pendidik, pengajar, maupun perumus kebijakan. Selain itu, proses penelitian turut melatih penulis dalam merancang studi, mengumpulkan serta menganalisis data,

hingga menyusun laporan ilmiah secara sistematis. Keterampilan tersebut menjadi aset berharga yang tidak hanya bermanfaat untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, tetapi juga relevan dalam berbagai bidang profesi yang membutuhkan kemampuan riset dan analisis mendalam.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan berbagai referensi, terdapat beberapa peneliti yang mengkaji topik berikut. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Zuhur Diana tahun 2023 yang berjudul *“Peran Pondok Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama (Studi Tentang Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Manba’ul Ulum Hajasi Kota Batu)”*. Penelitian ini berangkat dari realitas kemajemukan Indonesia yang seringkali memicu konflik intoleransi dan diskriminasi, termasuk meningkatnya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Timur.

Kondisi tersebut menuntut penguatan moderasi beragama sebagai solusi menjaga keharmonisan sosial. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional berperan signifikan, tidak hanya dalam memperdalam ilmu keagamaan, tetapi juga dalam membentuk santri yang memiliki kemampuan bermasyarakat dengan sikap moderat. Fokus penelitian diarahkan pada Pondok Pesantren Manba’ul Ulum Hajasi Kota Batu, pesantren salaf dengan pengajaran kitab kuning sekaligus keterbukaan pada kehidupan sosial, yang menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pesantren tersebut dalam membentuk santri yang toleran, menghargai keberagaman, dan terhindar dari sikap ekstrem, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dipilih

oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih fokus terhadap kajian tentang implementasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya terkait dengan keberadaan mahasantri non-Muslim yang hidup berdampingan dengan mayoritas mahasantri Muslim.

Penelitian ini menitikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, menelaah bagaimana penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme dan kehidupan sehari-hari di Ma'had menjadi ruang aktualisasi nilai moderasi beragama. Kedua, menggali pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim, termasuk proses adaptasi, pola interaksi dengan mahasantri Muslim, serta pandangan mereka terhadap praktik moderasi beragama yang berlangsung. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam penguatan pendidikan multikultural berbasis moderasi beragama, serta merumuskan strategi konseptual dan praktis agar Ma'had dapat berfungsi optimal sebagai ruang pendidikan Islam yang inklusif, toleran, dan *rahmatan lil 'alamin*. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya menjawab kekosongan akademik mengenai dinamika mahasantri non-Muslim di Ma'had, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat peran pendidikan Islam sebagai sarana membangun harmoni dan perdamaian dalam masyarakat majemuk.

2. Penelitian yang ditulis oleh Sakinah Apliana BR. Rangkuti tahun 2023 yang berjudul "*Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Mahasantri Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang*". Fokus penelitian ini diarahkan kepada kajian mengenai penerapan nilai-nilai moderasi beragama di Pesantren Kampus Ainul Yaqin (PKAY) Universitas Islam Malang.

Penelitian ini menitikberatkan pada tiga hal utama. Pertama, bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa PKAY, baik dalam aspek pembelajaran agama, interaksi sosial, maupun pembinaan akhlak. Kedua, bagaimana pengalaman mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda, baik dari sekolah umum maupun lembaga pendidikan berbasis pesantren/madrasah dalam menginternalisasi dan mengamalkan nilai moderasi beragama. Ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan penerapan nilai moderasi beragama di lingkungan PKAY, serta bagaimana strategi yang ditempuh pengasuh dan pengelola pesantren kampus untuk mengoptimalkan peran PKAY sebagai pusat pendidikan Islam yang berorientasi pada penguatan sikap moderat, toleran, dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai dinamika internalisasi moderasi beragama pada mahasiswa PKAY sebagai bagian dari upaya melawan paham radikal, intoleran, maupun liberal yang mengancam keharmonisan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *field research* yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaannya, penelitian tersebut diarahkan pada penerapan moderasi beragama di kalangan sesama mahasiswa Muslim dengan latar belakang pendidikan yang berbeda baik dari pesantren maupun sekolah umum dengan tujuan utama memperkuat sikap moderat agar tidak terpengaruh paham radikal, liberal, maupun ekstrem.

Sementara itu, penelitian yang terbaru lebih menekankan pada implementasi multikulturalisme dan moderasi beragama dalam konteks interaksi

lintas iman, sehingga memperlihatkan dinamika inklusivitas, toleransi, serta dialog antaragama di lingkungan pendidikan Islam.

3. Penelitian yang disusun oleh Faiqatun Nashihah tahun 2023 yang berjudul *“Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Sosiokultural pada Siswa SMK Farmasi Maharani Kota Malang”*. Adapun fokus penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan berbasis sosiokultural dalam membangun sikap toleransi, mencegah konflik, serta memperkuat kerukunan antar peserta didik yang berasal dari latar belakang agama dan kultur yang beragam.

Penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana nilai-nilai moderasi beragama ditanamkan dan dipraktikkan dalam lingkungan sekolah yang memiliki keragaman agama dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *field research*. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan datang adalah terletak pada objek, konteks, dan fokus kajian.

Penelitian ini meneliti lingkungan sekolah menengah (SMK) yang dihuni oleh siswa dengan latar belakang multiagama dan multikultural, sehingga lebih menyoroti interaksi lintas agama di usia remaja yang masih dalam proses pertumbuhan dan rentan dipengaruhi sikap intoleransi. Sementara itu, penelitian yang akan datang berfokus pada Pusat Ma’had al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nuansa pesantren kampus, yang santrinya adalah mahasiswa dan sebagian berasal dari latar belakang non-Muslim. Hal ini lebih menitikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam konteks multikulturalisme dan interaksi lintas iman di lingkungan pendidikan tinggi.

4. Penelitian yang disusun oleh Aurora Marsha Monica tahun 2023 yang berjudul *“Peran Program Wajib Ma’had 1 Tahun dalam Penanaman Nilai-Nilai Agama pada Mahasiswa Baru Ma’had Sunan Ampel al-‘Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”*. Fokus penelitian ini adalah menelaah peran program wajib ma’had satu tahun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada mahasiswa baru.

Penelitian ini menekankan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan jalur formal, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendidikan non formal dan informal agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, melainkan juga memiliki karakter, keterampilan, dan pemahaman agama yang kuat. Dalam hal ini, program ma’had berfungsi sebagai pembinaan keagamaan, penguatan ibadah, dan penanaman nilai Islam yang diharapkan mampu membentuk mahasiswa berilmu, berakhlak, serta menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*.

Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan datang adalah titik tekan kajiannya lebih kepada evaluasi dan analisis fungsi program wajib ma’had sebagai upaya kampus untuk menyeimbangkan pendidikan formal dengan pendidikan nilai dan agama, agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga religius dan berkarakter.

Sementara itu penelitian yang akan datang lebih menekankan pada interaksi sosial, nilai toleransi, dan praktik multikulturalisme di lingkungan pendidikan Islam, khususnya pada konteks eksistensi mahasiswa non-Muslim di ma’had. Jadi titik kajian Anda bukan sekadar pada penanaman nilai agama bagi mahasiswa

Muslim, melainkan pada bagaimana keberagaman agama dan budaya dapat diakomodasi, dipraktikkan, dan diinternalisasi dalam bingkai moderasi beragama.

5. Jurnal ilmiah yang diteliti oleh Hero Prayogo dan Siti Fatimah tahun 2018 yang berjudul *“Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural (Studi Kasus Konsep dan Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Kelas X TAV SMK Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes)”*. Fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah konsep dan implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural di SMK Negeri 1 Bulakamba.

Penelitian diarahkan untuk melihat bagaimana pendidikan agama mampu menanamkan nilai toleransi, sikap terbuka, dan penghargaan terhadap keragaman etnis, budaya, maupun agama di lingkungan sekolah. Fokusnya tidak hanya pada aspek konseptual, tetapi juga pada praktik nyata di kelas X TAV SMK Negeri 1 Bulakamba, dengan tujuan agar PAI tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama peserta didik, tetapi juga membentuk sikap humanis, inklusif, dan bebas dari kecenderungan fanatisme serta intoleransi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode fenomenologis. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah jika penelitian dalam jurnal tersebut berfokus pada konsep dan implementasi pembelajaran PAI berbasis multikultural di SMK Negeri 1 Bulakamba yang mana fokus utamanya adalah bagaimana guru PAI menerapkan pendidikan agama yang menumbuhkan sikap toleran, menghargai perbedaan etnis, budaya, maupun agama, sehingga siswa dapat hidup rukun dalam suasana multikultural di sekolah, maka penelitian yang akan datang berfokus pada multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama berupa studi kasus di Pusat Ma’had al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang cenderung lebih fokus kepada

pengalaman dan interaksi multikultural mahasiswa (termasuk non-Muslim) di lingkungan ma'had, bagaimana nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan dialog antaragama diwujudkan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Jadi, titik tekan penelitian Anda ada pada realitas kehidupan multikultural di dalam asrama/ma'had perguruan tinggi Islam.

Berdasarkan penelitian yang ada saat ini, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama yang menekankan kepada pengalaman langsung kehidupan mahasiswa non-Muslim di lingkungan ma'had, serta bagaimana nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan interaksi multikultural terbangun dalam praktik kehidupan sehari-hari di asrama yang berbasis pendidikan Islam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti menyajikan persamaan dan perbedaan hasil penelitian yang telah dihimpun dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Jenis, Judul, dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Zuhur Diana (2023) – <i>Peran Pondok Pesantren dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama (Studi Tentang Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Hajasi Kota Batu)</i>	Sama-sama menyoroti peran lembaga pendidikan Islam (pesantren/ma'had) dalam menanamkan nilai moderasi beragama dan toleransi.	Objek pada pesantren salaf (Manba'ul Ulum Hajasi), fokus pada moderasi beragama di kalangan santri Muslim.	Meneliti Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Malang, dengan fokus khusus pada interaksi lintas iman (mahasantri Muslim dan non-Muslim) dalam bingkai multikulturalisme.
2	Sakinah Apliana BR. Rangkuti (2023) – <i>Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Mahasantri Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang</i>	Sama-sama mengkaji penerapan nilai moderasi beragama di lingkungan pesantren kampus.	Fokus pada sesama mahasantri Muslim dengan latar pendidikan berbeda, untuk menangkal radikalisme dan liberalisme.	Lebih menekankan multikulturalisme dan moderasi beragama pada interaksi lintas agama (Muslim dan non-Muslim) di ma'had perguruan tinggi Islam.
3	Faiqatun Nashihah (2023) – <i>Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Sosiokultural pada Siswa SMK Farmasi Maharani Kota Malang</i>	Sama-sama membahas pendidikan berbasis moderasi beragama di lingkungan multikultural.	Objek pada siswa SMK (remaja), fokus pada lintas agama di sekolah umum.	Fokus pada mahasiswa di ma'had perguruan tinggi Islam, dengan penekanan pada adaptasi sosial-kultural mahasantri non-Muslim di lingkungan pendidikan Islam.

4	Aurora Marsha Monica (2023) – <i>Peran Program Wajib Ma’had 1 Tahun dalam Penanaman Nilai-Nilai Agama pada Mahasiswa Baru Ma’had Sunan Ampel al-‘Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</i>	Sama-sama meneliti kehidupan ma’had di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Fokus pada pembinaan agama mahasiswa Muslim melalui program wajib ma’had 1 tahun.	Fokus pada interaksi multikultural (Muslim dan non-Muslim), nilai toleransi, inklusivitas, dan dialog antaragama di ma’had.
5	Hero Prayogo dan Siti Fatimah (2018) – <i>Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural (Studi Kasus Konsep dan Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Di Kelas X TAV SMK Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes)</i>	Sama-sama mengangkat isu pendidikan Islam berbasis multikultural, serta nilai toleransi dan inklusivitas.	Objek pada pembelajaran PAI di sekolah menengah (SMK), fokus pada peran guru di kelas.	Objek pada kehidupan ma’had perguruan tinggi Islam, dengan studi kasus mahasiswa Muslim dan non-Muslim dalam interaksi sehari-hari.

Berdasarkan telaah literatur, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang orisinal karena belum ditemukan kajian serupa sebelumnya. Penelitian ini memiliki latar belakang, fokus kajian, waktu, dan tempat yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya dan menjadi poin penting dalam memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks implementasi multikulturalisme di lingkungan Pusat Ma’had al-Jami’ah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru terhadap kajian moderasi beragama, toleransi antarumat beragama, serta penguatan model pendidikan Islam yang inklusif dan relevan dengan tantangan masyarakat multikultural di Indonesia.

F. Definisi Istilah

Bagian definisi istilah dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian berjudul “Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma’had al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.” Definisi berikut disusun agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan dapat memperjelas fokus penelitian. Berikut istilah-istilah yang terkait dengan judul tersebut:

1. Multikulturalisme

Multikulturalisme merujuk pada sebuah pandangan yang mengakui sekaligus menghargai keberagaman dalam masyarakat, baik dari sisi agama, budaya, etnis, maupun tradisi. Dalam konteks penelitian ini, multikulturalisme bermakna adanya realitas keragaman mahasiswa yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada yang berasal dari latar belakang non-Muslim, dan bagaimana mereka dapat hidup bersama, berinteraksi, serta belajar dalam lingkungan pendidikan Islam tanpa menimbulkan gesekan yang berarti. Multikulturalisme di sini bukan hanya sekadar teori, melainkan praktik nyata yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa.

2. Bingkai Moderasi Beragama

Istilah “bingkai moderasi beragama” dapat dipahami sebagai kerangka konseptual, paradigma, atau sudut pandang yang digunakan untuk melihat, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan secara seimbang, adil, serta toleran dalam kehidupan sosial. Kata bingkai di sini mengacu pada perspektif atau wadah pemikiran yang menjadi landasan analisis, sedangkan moderasi beragama merujuk pada sikap beragama yang menghindari ekstremisme dan mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan, praktik, dan interaksi sosial. Dengan demikian, “bingkai moderasi beragama” berarti kerangka berpikir yang menjadikan prinsip moderasi sebagai acuan

utama dalam menilai, mengelola, dan merespons dinamika keberagamaan. Dalam konteks akademik, bingkai ini digunakan untuk memahami fenomena sosial-keagamaan seperti toleransi, harmoni antarumat beragama, serta hubungan agama dengan negara.

Moderasi beragama yang dijadikan bingkai analisis menekankan empat prinsip utama, yaitu *tawasuth* (sikap tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). Prinsip-prinsip inilah yang menjadi standar dalam membingkai berbagai fenomena keberagamaan di masyarakat majemuk. Dengan kata lain, “bingkai moderasi beragama” bukan sekadar konsep normatif, melainkan paradigma penelitian yang dapat membantu peneliti menjelaskan realitas keberagamaan secara lebih objektif, kontekstual, dan solutif, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

3. Studi Kasus

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan menggali secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk meneliti secara khusus pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasiswa non-Muslim yang tinggal di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika interaksi antaragama, bentuk-bentuk penerapan nilai multikulturalisme, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat praktik moderasi beragama di lingkungan ma'had. Dengan demikian, studi kasus ini berfungsi untuk menampilkan gambaran yang mendalam dan kontekstual tentang praktik kehidupan multikultural di lembaga pendidikan Islam.

4. Mahasantri non-Muslim

Mahasantri non-Muslim merupakan istilah yang menunjukkan subjek penelitian utama. Mahasantri adalah mahasiswa yang tinggal di asrama Ma'had al-Jami'ah, di mana mereka bukan hanya menempuh pendidikan akademik di universitas, tetapi juga mendapatkan pembinaan keagamaan, disiplin, serta kebiasaan hidup Islami. Adapun yang menjadi menarik adalah keberadaan mahasantri non-Muslim, yaitu mahasiswa yang beragama selain Islam tetapi ikut tinggal, belajar, dan berinteraksi di lingkungan ma'had. Hal ini menimbulkan fenomena unik karena mereka berada di ruang pendidikan berbasis Islam, tetapi tetap mempertahankan identitas keagamaannya. Keberadaan mereka menjadi gambaran konkret dari praktik multikulturalisme yang hidup dalam dunia pendidikan Islam.

5. Pusat Ma'had al-Jami'ah

Pusat Ma'had al-Jami'ah merujuk pada lembaga pendidikan berbasis asrama yang berada di bawah naungan universitas Islam. Pusat Ma'had al-Jami'ah berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter, penguatan pemahaman keislaman, serta tempat pembiasaan ibadah bagi mahasiswa, khususnya yang melanjutkan pendidikan program sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya mahasantri dari berbagai latar belakang agama, Pusat Ma'had al-Jami'ah menjadi wadah interaksi multikultural yang sangat penting untuk diteliti. Dari sinilah peneliti dapat melihat bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam menyikapi perbedaan, bagaimana mekanisme adaptasi dilakukan oleh mahasantri non-Muslim, serta bagaimana tercipta harmoni sosial dan akademik di tengah keragaman.

Berdasarkan definisi istilah yang telah diuraikan, penelitian berjudul "Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang” dapat dipahami sebagai suatu kajian ilmiah yang berupaya menganalisis secara mendalam realitas kehidupan multikultural di lingkungan Pusat Ma’had al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui keberadaan dan pengalaman mahasiswa non-Muslim yang tinggal di dalam lingkungan pendidikan berbasis Islam. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana nilai-nilai multikulturalisme diwujudkan dalam bentuk penerimaan terhadap keberagaman agama, interaksi sosial antarindividu yang berbeda keyakinan, serta pola kehidupan bersama yang berlangsung secara harmonis dalam lingkungan ma’had.

Dalam penelitian ini, moderasi beragama dijadikan sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika hubungan sosial-keagamaan yang terjadi di antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim. Kerangka tersebut menekankan prinsip *tawasuth* (sikap moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i’tidal* (keadilan) sebagai dasar dalam melihat praktik keberagaman di lingkungan yang plural. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara kontekstual pengalaman sosial, bentuk adaptasi, pola interaksi, serta respons institusi terhadap keberadaan mahasiswa non-Muslim di Pusat Ma’had al-Jami’ah.

Melalui penelitian ini, Pusat Ma’had al-Jami’ah diposisikan tidak hanya sebagai lembaga pembinaan keislaman, tetapi juga sebagai ruang pendidikan multikultural yang merepresentasikan implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana praktik multikulturalisme dan moderasi beragama diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terciptanya harmoni sosial dan keberagaman di tengah keberagaman latar belakang mahasiswa.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan terbaru yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan pedoman akademik fakultas, yang secara umum terdiri atas:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal penelitian, di mana penulis menjelaskan pentingnya mengkaji fenomena keberagaman agama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya terkait kehadiran mahasiswa non-Islam. Dengan demikian, pembaca memperoleh gambaran awal mengenai konteks multikulturalisme dan moderasi beragama yang menjadi fokus penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan uraian teori-teori yang relevan, hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka berpikir yang mendasari penelitian. Kajian pustaka akan menyoroti konsep multikulturalisme, moderasi beragama, serta pendidikan inklusif dalam perspektif Islam, yang menjadi dasar konseptual penelitian ini. Dengan adanya landasan teori yang kokoh, penelitian memiliki pijakan akademis yang kuat untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana nilai-nilai moderasi beragama diterapkan di lingkungan ma'had yang multikultural.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di Pusat Ma'had al-Jami'ah, subjek penelitian yang mencakup mahasantri non-Muslim serta pengelola ma'had, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta prosedur analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh peneliti untuk memahami dinamika interaksi multikultural dan praktik moderasi beragama di lingkungan ma'had.

4. Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi deskripsi data lapangan yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap mahasantri non-Muslim dan pihak pengelola ma'had. Paparan disusun berdasarkan fokus penelitian, seperti pola interaksi sosial, pengalaman belajar, dan bentuk penerapan nilai-nilai moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Bagian ini memberikan gambaran empiris tentang realitas kehidupan multikultural di lingkungan pendidikan Islam tersebut.

5. Bab V Pembahasan

Bab ini membahas secara mendalam hasil penelitian dengan menghubungkannya pada teori, konsep, dan penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada makna dan implikasi penerapan moderasi beragama dalam kehidupan mahasantri non-Islam di Pusat Ma'had al-Jami'ah, serta sejauh mana hal itu mencerminkan prinsip multikulturalisme dalam bingkai pendidikan Islam. Bagian ini berfungsi menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori dan praktik moderasi beragama di lembaga pendidikan tinggi Islam.

6. Bab VI Penutup

Bagian ini menyajikan kesimpulan sebagai rangkuman hasil penelitian secara singkat dan jelas, serta saran yang dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, seperti pengelola ma'had, dosen pembina, maupun peneliti selanjutnya. Kesimpulan menegaskan temuan utama tentang dinamika multikulturalisme dan moderasi beragama, sedangkan saran membuka ruang untuk pengembangan pendidikan ma'had yang lebih inklusif dan berkeadilan.

7. Daftar Pustaka dan Lampiran

Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian, disusun sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Sementara itu, lampiran berisi dokumen pendukung seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, transkrip hasil wawancara, serta foto atau bukti dokumentasi lapangan yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Multikulturalisme

Multikulturalisme secara etimologis berasal dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (paham atau aliran). Dengan demikian, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah paham atau pandangan yang mengakui adanya keragaman budaya yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menghargai martabat manusia yang membawa serta identitas budaya mereka masing-masing. Esensi dari multikulturalisme adalah kesadaran bahwa setiap manusia lahir, tumbuh, dan berinteraksi dalam suatu komunitas dengan sistem budaya yang khas, dan karena itu keberagaman merupakan realitas yang tidak bisa dihindarkan.

Menurut catatan M. Ainul Yaqin, sejumlah ilmuwan dunia telah memberikan definisi mengenai konsep kultur. Di antaranya, Elizabeth B. Taylor (1832–1917) dan L.H. Morgan (1818–1881) memandang kultur sebagai budaya yang bersifat universal bagi umat manusia dengan berbagai tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya, Emile Durkheim (1858–1917) bersama Marcel Maus (1872–1950) menekankan bahwa kultur merupakan sekelompok masyarakat yang mengikat dirinya pada simbol-simbol tertentu untuk diterapkan dalam kehidupan bersama.⁹

Sementara itu, Franz Boas (1858–1942) bersama A.L. Kroeber (1876–1960) mengartikan kultur sebagai hasil dari rangkaian sejarah khusus yang dijalani manusia secara kolektif dalam komunitasnya. A.R. Radcliffe-Brown (1881–1955) bersama Bronislaw Malinowski (1884–1942) memandang kultur sebagai praktik sosial yang

⁹ M. Ainul Yaqin. (2005), *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 27-28.

berfungsi menopang struktur sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan individu. Ruth Benedict (1887–1948) dan Margaret Mead (1901–1978) mendefinisikan kultur sebagai kepribadian kolektif yang tercermin secara luas, di mana bentuk dan perkembangan kepribadian tersebut dibentuk oleh anggota masyarakatnya. Julian Steward (1902–1972) dan Leslie White (1900–1975) menjelaskan kultur sebagai mekanisme manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya demi menjamin kelangsungan hidup.¹⁰

Bersamaan dengan itu, Morton Fried (1923–1986) dan Mavis Harris (1972) menekankan bahwa kultur dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan ekonomis yang tidak hanya melahirkan kebudayaan, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan di dalamnya. Claude Levi-Strauss (1908) berpendapat bahwa seluruh kultur pada dasarnya merupakan refleksi dari struktur biologis universal yang terdapat dalam pola pikir manusia.¹¹

Adapun, Harold Conklin (1926) dan Stephen Tyler (1932) memandang kultur sebagai perangkat mental yang berfungsi mengatur cara individu dalam suatu kelompok memahami dunianya. E.O. Wilson (1929) bersama Jeromen Barko (1944) menegaskan bahwa kultur merupakan ekspresi tak kasat mata dari karakteristik genetik tertentu. Sherry Ortner (1941) dan Michelle Rosaldo (1944–1981) mengartikan kultur sebagai seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan sekaligus mekanisme yang digunakan masyarakat untuk memahami konstruksi gender.¹²

¹⁰ M. Ainul Yaqin. (2005), *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 27-28.

¹¹ M. Ainul Yaqin. (2005), *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 27-28.

¹² M. Ainul Yaqin. (2005), *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 27-28.

Di samping itu, Mary Douglas (1921) dan Clifford Geertz (1926–2006) memandang kultur sebagai suatu cara yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk memahami jati diri mereka sekaligus memberikan makna bagi kehidupan. Renato Rosaldo (1941) dan Vincent Crapanzano (1939) menegaskan bahwa kultur tidak pernah dapat digambarkan secara utuh dan jelas, sebab setiap pemahaman mengenai kultur pasti merefleksikan bias atau sudut pandang penelitiannya.¹³

Meski definisi kultur bervariasi, terdapat kesamaan yang dapat diidentifikasi. Conrad P. Kottak, misalnya, menyebutkan tujuh ciri penting kultur: ia bersifat umum sekaligus khusus, dipelajari, bersimbol, melengkapi hal-hal alami, dilakukan secara kolektif, merupakan model pola hidup, serta bersifat adaptif. Dari karakteristik ini, dapat ditarik pemahaman bahwa multikulturalisme sejatinya merupakan kesadaran kolektif tentang keragaman budaya, sekaligus mekanisme adaptif untuk menjaga harmoni dalam masyarakat majemuk.¹⁴

Multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada pentingnya penghargaan terhadap keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan agama dalam kehidupan sosial. Menurut James A. Banks, pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Banks (2006) mengemukakan lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu: *content integration*, *knowledge construction process*, *prejudice reduction*, *equity pedagogy*, dan *empowering school culture and social structure*.¹⁵

¹³ M. Ainul Yaqin. (2005), *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 27-28.

¹⁴ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. (2017), *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 123.

¹⁵ James A. Banks. (2008), *An Introduction to Multicultural Education*, 4th ed. Boston: Pearson, hlm. 3-15.

Melalui kelima dimensi ini, pendidikan diharapkan tidak hanya mengajarkan toleransi secara teoritis, tetapi juga membangun sistem dan lingkungan yang adil serta bebas diskriminasi. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, konsep Banks sangat relevan untuk diterapkan, sebab lembaga seperti Pusat Ma'had al-Jami'ah berfungsi tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai arena sosialisasi nilai-nilai multikultural, tempat peserta didik dari latar belakang berbeda dapat berinteraksi dan belajar menghargai perbedaan.

Selain Banks, tokoh lain yang berpengaruh dalam pengembangan teori multikulturalisme adalah John Rawls. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menjelaskan prinsip "*justice as fairness*" yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi setiap individu tanpa memandang identitas budaya atau agama.¹⁶

John Rawls juga memperkenalkan konsep *overlapping consensus*, yaitu kesepakatan moral yang dapat dijadikan dasar bagi kohesi sosial di tengah pluralitas pandangan dunia dan keyakinan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, teori Rawls dapat dipahami sebagai dasar filosofis untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan menghargai keberagaman, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di lembaga pendidikan Islam, teori ini mendorong terwujudnya perlakuan setara bagi semua mahasiswa, termasuk bagi mereka yang berasal dari latar belakang non-Muslim.

Sementara itu, Will Kymlicka memperluas pemikiran multikulturalisme melalui konsep *multicultural citizenship* yang menekankan pengakuan terhadap hak-hak kolektif kelompok minoritas.¹⁷ Bagi Kymlicka, hak-hak kultural harus dilindungi agar

¹⁶ John Rawls. (1971), *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60.

¹⁷ Will Kymlicka. (1995), *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 75.

semua kelompok dapat mempertahankan identitas mereka dalam kerangka negara demokratis. Teori ini relevan untuk konteks Indonesia yang terdiri atas beragam etnis dan agama, di mana pengakuan terhadap kelompok minoritas merupakan wujud nyata implementasi sila kedua dan kelima Pancasila. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini memperkuat pentingnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan tanpa kehilangan identitas keagamaan yang dimiliki oleh mayoritas.

Dalam ranah akademik, Abdullah menjelaskan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah paradigma yang menekankan prinsip kesetaraan antarbudaya lokal, dengan tetap menghargai hak serta eksistensi budaya lain yang hidup berdampingan. Artinya, multikulturalisme bukan sekadar mengakui perbedaan, melainkan juga memastikan adanya ruang yang setara bagi semua identitas budaya untuk berkembang. Hal ini penting dalam membangun tatanan sosial yang adil, egaliter, dan inklusif.¹⁸

Indonesia sering dipandang sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Kemajemukan ini tercermin dari adanya perbedaan baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi keberadaan berbagai kesatuan sosial yang dibangun atas dasar suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Adapun perbedaan vertikal berkaitan dengan stratifikasi masyarakat yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya antara kelompok lapisan atas dan bawah.¹⁹

Dalam ranah pendidikan, multikulturalisme memiliki arti strategis. Pendidikan tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk kesadaran peserta didik tentang pentingnya toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Lingkungan pendidikan harus mampu menciptakan ruang

¹⁸ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. (2017), *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 123.

¹⁹ Sulalah. (2011), *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 1.

inklusif yang memberi kesempatan sama bagi semua peserta didik, tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, atau budaya. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai persaudaraan, keadilan, dan harmoni sosial.

Konsep multikulturalisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberagaman etnis atau budaya yang menjadi ciri dari masyarakat majemuk. Multikulturalisme menegaskan pentingnya keberagaman budaya yang berada pada posisi yang setara. Ia dipandang sebagai sebuah ideologi yang tidak hanya mengakui keberadaan perbedaan, tetapi juga menghormati serta memuliakan keragaman tersebut dalam bingkai kesederajatan, baik pada tingkat individu maupun dalam ranah kebudayaan.²⁰

Pluralitas keagamaan merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Interaksi antar komunitas dengan latar belakang budaya yang berbeda semakin intensif dari waktu ke waktu. Saat ini hampir tidak ada kelompok masyarakat di dunia yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan kelompok lain yang berbeda budaya. Perkembangan jaringan komunikasi telah menembus sekat-sekat yang dahulu membatasi serta mengisolasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar bila pluralitas keagamaan, sebagaimana pluralitas etnik, budaya, maupun bahasa, dipandang sebagai suatu hukum alam. Artinya, menolak atau mengingkari pluralitas keagamaan sama saja dengan menolak keberadaan hukum alam itu sendiri.²¹

Dalam kehidupan di zaman ini, realitas keragaman budaya, agama, bahasa, dan identitas sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, masyarakat hidup dalam suasana multikultural

²⁰ Parsudi Suparlan. (2002), "*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*", dalam *Makalah* yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Denpasar Bali, 16-21 Juli, hlm.1.

²¹ Sulalah. (2011), *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 1-2.

yang kompleks. Perbedaan tersebut sering kali menjadi tantangan sekaligus peluang. Jika disikapi dengan bijaksana, keragaman dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun keharmonisan sosial, sebaliknya, jika diabaikan, ia dapat menimbulkan gesekan dan konflik horizontal. Oleh sebab itu, multikulturalisme hadir sebagai paradigma penting yang berusaha memandang perbedaan bukan sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai anugerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik.

Multikulturalisme tidak sekadar dimaknai sebagai ide atau sikap untuk menghargai perbedaan, melainkan juga sebagai kesadaran yang mendalam untuk senantiasa menjaga keharmonisan, menegakkan etika dalam menyampaikan pendapat terhadap individu maupun kelompok lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, dalam perspektif pendidikan multikultural, setiap kebudayaan dan peradaban dipandang memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya hierarki yang menempatkan suatu budaya lebih tinggi dari yang lain.

Hal ini penting, sebab penilaian superioritas terhadap satu budaya justru berpotensi menimbulkan sikap fasisme, nativisme, maupun chauvinisme. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog yang terbuka di tengah keberagaman, sehingga tercipta proses saling berbagi perspektif yang pada akhirnya memperkaya kebudayaan dan peradaban manusia.²²

Dalam konteks akademik, multikulturalisme bukan hanya istilah yang menggambarkan keberagaman masyarakat, melainkan juga sebuah paham dan pendekatan yang menekankan pentingnya kesetaraan, penghormatan, serta pengakuan terhadap hak-hak budaya. Dengan demikian, multikulturalisme menekankan bahwa setiap budaya, tradisi, dan identitas memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak dibenarkan adanya diskriminasi maupun dominasi satu budaya atas budaya lainnya.

²² Amin, Muh. (2018). Pendidikan Multiikultural. *Jurnal Pilar*, 9 (1), hlm. 25.

Paradigma ini menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada dinamika masyarakat Indonesia yang dikenal plural dan heterogen. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk membahas multikulturalisme secara lebih mendalam, baik dari sisi filosofis, prinsip-prinsipnya, hingga relevansinya dalam pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam.

a. Dasar Filosofis Multikulturalisme

Multikulturalisme lahir dari kesadaran filosofis bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (paham), sehingga mengandung makna pengakuan terhadap keragaman budaya sebagai realitas sosial. Dari sudut pandang filsafat sosial, multikulturalisme merupakan paradigma yang menekankan pada pengakuan, penghormatan, dan kesetaraan antarbudaya. Dengan kata lain, multikulturalisme tidak sekadar menggambarkan realitas plural, tetapi juga memandu cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi perbedaan.

b. Prinsip-Prinsip Multikulturalisme

Dalam kajian akademis, multikulturalisme memiliki sejumlah prinsip pokok, antara lain:

- 1) Kesetaraan budaya, yaitu pengakuan bahwa setiap budaya memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya anggapan superioritas atau inferioritas di antara satu budaya dengan budaya lainnya.
- 2) Keadilan sosial, yaitu setiap kelompok budaya memperoleh hak yang sama dalam ruang publik.
- 3) Inklusivitas, yang menuntut keterbukaan untuk menerima perbedaan dan mengintegrasikannya dalam kehidupan bersama.

- 4) Toleransi, sebagai sikap menerima dan menghargai perbedaan tanpa diskriminasi.

c. Dimensi Multikulturalisme dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai keberagaman peserta didik, melainkan juga diwujudkan dalam tiga dimensi utama:

- 1) Kurikulum yang harus mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan identitas.
- 2) Metode pembelajaran yang menekankan pada pendekatan yang partisipatif, dialogis, dan menghargai perbedaan pendapat.
- 3) Lingkungan sekolah yang diciptakan sebagai ruang yang inklusif, bebas diskriminasi, dan mendukung interaksi harmonis antar peserta didik.

d. Landasan Teologis Multikulturalisme dalam Islam

Dalam perspektif Islam, multikulturalisme sejalan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keberagaman bangsa dan suku agar saling mengenal. Islam juga menekankan keadilan, persaudaraan, dan penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Dengan demikian, keberagaman adalah *sunnatullah* yang wajib diterima dengan sikap toleran dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Al-Qur’an, Yusuf [10]:99)²³

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang pasti (niscaya) dalam kehendak Allah SWT. Keberagaman ini menjadi bagian dari *sunnatullah* sekaligus cerminan kebesaran serta kekuasaan-Nya dalam menciptakan makhluk. Hal ini juga menunjukkan perbedaan mendasar antara keterbatasan manusia dengan kekuasaan Allah SWT yang tanpa batas. Bahkan dalam hal yang sangat kecil sekalipun, tidak ada ciptaan-Nya di seluruh dunia ini yang benar-benar sama.

e. Multikulturalisme sebagai Landasan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tujuan ini selaras dengan semangat multikulturalisme yang menekankan kesetaraan, penghormatan, dan toleransi. Dengan mengintegrasikan prinsip multikulturalisme, PAI dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga mampu hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk.

f. Relevansi Multikulturalisme dalam Kehidupan di Indonesia

Indonesia sebagai bangsa majemuk membutuhkan pendidikan berbasis multikultural. Keragaman etnis, bahasa, adat, dan agama harus dipandang sebagai kekayaan, bukan pemicu konflik. Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan beragama yang harmonis, diperlukan sikap moderasi beragama, yakni cara beragama yang berada pada posisi tengah, seimbang, dan tidak berlebihan.

²³ Surat Yusuf Ayat 99: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=99&to=99>

Moderasi ini tercermin dari sikap yang tidak mengklaim kebenaran mutlak hanya pada diri atau kelompoknya, tidak menggunakan legitimasi teologis secara ekstrem, serta menghindari paksaan maupun tindakan kekerasan. Selain itu, moderasi juga menuntut netralitas, bebas dari afiliasi kepentingan politik ataupun kekuatan tertentu. Oleh karena itu, sikap moderat ini harus terus disosialisasikan, diajarkan, dan ditumbuhkan melalui keteladanan nyata, terutama oleh para penyuluh agama.

Salah satu persoalan multikultural yang kerap terjadi di Indonesia ialah munculnya konflik antarumat beragama maupun perselisihan internal di dalam suatu agama. Realitas tersebut telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk. Dalam konteks ini, multikulturalisme kerap dijadikan sebagai wacana sekaligus komoditas yang memiliki dampak positif maupun negatif. Munculnya problematika tersebut dapat ditelusuri dari dua sumber utama, yakni: (1) faktor internal yang bersumber dari agama itu sendiri, misalnya sikap fanatisme berlebihan serta pemahaman teologis yang ekstrem; (2) faktor eksternal yang berasal dari luar agama, meliputi aspek ekonomi, sosial, maupun politik.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, konsep multikulturalisme menjadi sangat relevan karena kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan miniatur masyarakat multikultural. Di sana, mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan daerah hidup dalam satu lingkungan pembinaan. Kehadiran mahasiswa non-Muslim di lingkungan Ma'had menunjukkan praktik nyata dari multikulturalisme pendidikan Islam, di mana nilai-

²⁴ Aretsa Zana Ayunda et al., (2022), "Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik," *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1, hlm. 8, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys>

nilai kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan inklusivitas dijalankan secara konkret melalui interaksi sehari-hari antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim.

2. Moderasi Beragama

a. Etimologi dan Terminologi

Secara etimologis, istilah moderasi dalam bahasa Indonesia berasal dari adaptasi kata bahasa Inggris “*moderation*”. Kata ini umumnya digunakan untuk menunjuk makna *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), maupun *non-aligned* (tidak berpihak). Dalam Oxford Dictionary, *moderation* diartikan sebagai sifat yang wajar, masuk akal, serta tidak berlebihan atau ekstrem. Lebih dalam lagi, istilah ini berakar dari bahasa Latin “*moderatio*” yang bermakna keadaan pertengahan, yakni tidak berlebih dan tidak pula berkekurangan.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi memiliki dua pengertian utama, yaitu pengurangan tingkat kekerasan dan upaya untuk menghindari sikap ekstrem.²⁶ Apabila seseorang disebut bersikap moderat, hal itu menunjukkan bahwa ia berperilaku wajar, tidak berlebihan, serta berada pada posisi tengah. Individu yang moderat biasanya mengutamakan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keyakinan, moral, watak, maupun hal-hal lainnya.²⁷

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah *wasathiyyah*. Kata ini berasal dari akar kata (وسط) yang bermakna sesuatu yang berada di tengah antara dua ujung, sesuatu yang lurus (*mu’tadil*), adil (*al-‘adl*), sekaligus baik (*al-khair*).²⁸

²⁵ Amran Suadi. (2022). *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*. Jakarta: Kencana, hlm. 151.

²⁶ Pengertian Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

²⁷ Amran Suadi. (2022). *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*. Jakarta: Kencana, hlm. 151.

²⁸ Tim Penyusun. *Al-Mu’jam al-Wasith, Juz II*. Kairo: Dar al-Da’wah, hlm. 1031.

Secara terminologis, sebagaimana dijelaskan dalam buku Moderasi Beragama terbitan Kementerian Agama, *wasathiyyah* atau moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi tengah, menegakkan keadilan, serta menjauhi sikap ekstrem dalam beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama dimaknai sebagai sikap yang seimbang, yakni antara pengamalan keyakinan secara eksklusif dengan penghormatan terhadap praktik keberagamaan pihak lain secara inklusif.²⁹

Lawan dari moderasi adalah sikap berlebihan, yang dalam bahasa Arab disebut *tatharruf*. Istilah ini bermakna ekstrem, radikal, dan berlebihan (*excessive*) dalam bahasa Inggris. Secara etimologis, *tatharruf* dapat diartikan sebagai tindakan yang keterlaluan, berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya, berputar arah, atau mengambil jalan yang berlawanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ekstrem diartikan sebagai sesuatu yang paling ujung, paling tinggi, atau paling keras. Dalam bahasa Arab sendiri, terdapat dua istilah lain yang memiliki makna serupa dengan ekstrem, yaitu *al-ghuluw* dan *tasyaddud*. Dalam konteks keberagamaan, sikap berlebihan ini merujuk pada perilaku seseorang yang ekstrem, melampaui batas, serta tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama.³⁰

b. Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam (*Wasathiyyah*)

Menurut Abror, moderasi beragama merupakan sikap yang menekankan pada pengurangan kekerasan serta penghindaran dari sikap ekstrem dalam menjalankan agama. Prinsip ini menjadi hal penting dalam menjaga kerukunan serta menciptakan kedamaian di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Istilah moderasi beragama sering disebut dengan *al-wasathiyyah*, yang berarti jalan

²⁹ Aksin Wijaya. (2020). *Berislam di Jalur Tengah*. Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 134.

³⁰ Amran Suadi. (2022). *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*. Jakarta: Kencana, hlm. 152-153.

tengah, tidak berlebihan dan tidak pula ekstrem. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta sikap yang proporsional dalam beragama.³¹

Muhammad al-Maidani mengibaratkan falsafah moderasi atau *wasathiyyah* sebagai titik puncak pertengahan pada sebuah piramida. Titik tersebut menjadi pertemuan dua garis miring yang sekaligus bergerak dari arah berlawanan dan menuju ke titik tengah. Kedua garis itu dapat berfungsi sebagai jalur mendekat ke titik puncak maupun jalur yang menjauh darinya. Mencapai titik pertengahan dengan sempurna memang sulit, namun usaha untuk selalu mendekat ke sana sangat diperlukan. Semakin menjauh dari titik tengah, maka seseorang akan terseret ke arah ekstrem yang justru menjauhkannya dari kesempurnaan, baik ke arah ekstrem kanan (*tafriith*) maupun ekstrem kiri (*ifrath*).³²

Dalam praktik keberagamaan, sikap moderat atau memilih jalan tengah dapat menghindarkan seseorang dari perilaku ekstrem, berlebihan, maupun fanatisme buta. Moderasi beragama hadir sebagai solusi terhadap munculnya dua kutub ekstrem, yaitu kelompok ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan kelompok liberal atau ekstrem kiri di sisi lainnya. Kecenderungan liberalisme dan konservatisme ini dapat ditemui dalam setiap agama.

Dalam Islam, *wasathiyyah* merupakan karakter mendasar yang melandasi seluruh ajarannya, baik dalam aspek akidah, ibadah (syariat), maupun akhlak. Secara fitrah, seorang Muslim akan merasakan nilai *wasathiyyah* dalam Islam secara alami, tanpa memerlukan analisis yang rumit, cukup dengan menghayati

³¹ Nurlaili, dkk. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. (Islam & Lhokseumawe, t.t.), *Journal of Religious Harmony*, Vol. 1, No. 1, hlm. 21.

³² Amran Suadi. (2022). *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*. Jakarta: Kencana, hlm. 153.

ajaran-ajaran pokok yang terkandung dalam akidah, pemikiran, moral (akhlak), maupun syariat yang dibawa oleh Islam itu sendiri.³³

Moderasi beragama adalah konsep penting dalam wacana keislaman kontemporer yang merujuk pada praktik keberagamaan yang seimbang, tidak condong pada ekstremitas kanan berupa fundamentalisme, maupun ke ekstremitas kiri berupa liberalisme berlebihan. Dalam literatur Islam, konsep ini sering diidentikkan dengan istilah *wasathiyyah* yang bermakna pertengahan atau seimbang. Konsep *wasathiyyah* muncul dari pemahaman terhadap Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143 yang menegaskan bahwa umat Islam digolongkan sebagai *ummatan wasathan*, yakni umat yang bersikap adil dan menempuh jalan tengah dalam segala aspek kehidupan.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, moderasi atau *wasathiyyah* dalam Islam mengandung makna keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah.³⁴ Sikap ini menghendaki agar umat Islam menjauhi sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap meremehkan (*tafrith*), sehingga dapat menjalani kehidupan secara harmonis sesuai tuntunan agama.

c. Moderasi Beragama di Indonesia

Di Indonesia, moderasi beragama telah menjadi bagian penting dari kebijakan Kementerian Agama sejak tahun 2019. Pemerintah menekankan moderasi beragama sebagai strategi untuk menjaga kerukunan umat beragama di tengah keberagaman yang tinggi.³⁵ Hal ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya menjadi isu keagamaan, tetapi juga bagian dari kebijakan publik.

³³ Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani. (1996). *Al-Wasathiyyah fi al-Islam*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan, hlm. 9.

³⁴ Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Wasathiyyah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Shuruq.

³⁵ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Menurut Azyumardi Azra, moderasi beragama di Indonesia memiliki akar sejarah panjang. Sejak era Walisongo hingga perkembangan organisasi Islam modern seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik beragama di Indonesia cenderung menampilkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan akomodatif terhadap budaya lokal.³⁶ Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dikatakan sudah menjadi identitas keagamaan bangsa.

d. Komponen dan Implementasi Moderasi Beragama

Komponen utama dalam moderasi beragama, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama, meliputi sikap *tawasuth* (pertengahan), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (tegak lurus/ adil), dan *tasamuh* (toleransi).³⁷ Keempat komponen ini menjadi landasan dalam membentuk kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, moderasi beragama juga menuntut adanya penghormatan terhadap konstitusi dan komitmen kebangsaan. Hal ini menegaskan bahwa praktik keberagamaan harus sejalan dengan semangat menjaga persatuan nasional, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya terkait hubungan antarumat beragama, tetapi juga hubungan agama dengan negara.

Secara praktis, moderasi beragama dapat diterapkan melalui pendidikan. Sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi kepada peserta didik. Menurut penelitian Sajjad Ahmad, kurikulum berbasis *wasathiyyah* mampu membentuk karakter muslim moderat yang menjunjung nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial.³⁸

³⁶ Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.

³⁷ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*.

³⁸ Ahmad, A. S. (2021). Religious Moderation in Islamic Religious Practices Through Wasathiyah Concept. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 2(2), hlm. 131–146.

Penelitian Abdulloh Sajjad Ahmad menunjukkan bahwa pendekatan *wasathiyyah* dapat menjadi strategi efektif untuk menekan penyebaran ideologi ekstrem yang sering muncul di kalangan generasi muda melalui media sosial. Dengan demikian, moderasi bukan hanya konsep teoretis, melainkan strategi preventif menghadapi ancaman nyata.³⁹

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam konteks pluralisme. Pluralitas agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Hashas menyatakan bahwa pluralisme dalam konteks Islam tidak berarti mencampuradukkan akidah, tetapi mengakui keberadaan agama lain dan menghormati hak-hak pemeluknya. Dari sini terlihat bahwa moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni sosial.⁴⁰

Moderasi beragama merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mereduksi polarisasi sekaligus membangun keharmonisan sosial dalam masyarakat yang multikultural. Konsep ini menekankan urgensi sikap toleransi, keterbukaan dalam berdialog antarumat beragama, serta penghormatan terhadap keragaman yang ada. Meski demikian, penerapan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat agar dapat terwujud secara optimal.⁴¹

Dalam konteks kehidupan minoritas agama, moderasi beragama menjadi mekanisme untuk menjaga eksistensi mereka di tengah dominasi mayoritas. Penelitian di lingkungan pendidikan Islam menunjukkan bahwa penerapan

³⁹ Ahmad, A. S. (2021). Religious Moderation in Islamic Religious Practices Through Wasathiyah Concept. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 2(2), hlm. 131–146.

⁴⁰ Hashas, M. (2021). *Pluralism in Islamic Contexts: Ethics, Politics and Modern Challenges*. Cham: Springer.

⁴¹ Bangkit Adi Saputra. (2025). Moderasi Beragama dalam Perspektif Realisme Hobbes: Jalan Menuju Harmoni Sosial di Indonesia, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 10, No.1, hlm. 73. (Saputra, t.t.)

moderasi beragama dapat menciptakan ruang aman bagi mahasiswa non-Muslim untuk tetap mempertahankan identitasnya tanpa mengalami diskriminasi.⁴²

e. Moderasi Beragama dan Tantangan Kontemporer

Tantangan besar moderasi beragama terletak pada penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Beberapa kelompok menjadikan agama sebagai instrumen politik identitas yang dapat menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat. Moderasi dalam hal ini menjadi penting untuk mengembalikan agama pada fungsinya sebagai sumber etika sosial dan moral, bukan sebagai alat politik praktis.⁴³

Epistemologi moderasi dalam era digital juga menjadi pembahasan penting. Menurut penelitian di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, literasi digital yang rendah membuat generasi muda rentan terhadap provokasi keagamaan di media sosial.⁴⁴ Oleh karena itu, moderasi perlu dipadukan dengan pendidikan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis.

Moderasi beragama juga terkait erat dengan konsep *maqashid al-syari'ah*. Nilai-nilai pokok syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta hanya dapat terlaksana apabila umat menjalankan agama secara moderat. Dengan kata lain, moderasi merupakan jalan untuk mewujudkan kemaslahatan universal.⁴⁵ Beberapa kritik terhadap istilah moderasi menyebut bahwa konsep ini berpotensi dijadikan sebagai “kontrol sosial” oleh negara. Menurut sebagian akademisi, moderasi beragama terkadang lebih dilihat sebagai agenda politik ketimbang

⁴² Biyanto, B. (2023). *Islam Wasathiyah dalam Perdebatan Ulama dan Cendekiawan Muslim*. Depok: Pena Salsabila.

⁴³ Tambunan, A. (2019). *Islam Wasathiyah: Solusi Indonesia untuk Perdamaian Afghanistan*. Jakarta: MUI Press.

⁴⁴ Sajjad, A. (2021). Developing Wasathiyah Epistemology in the Digital Era. *Journal of Islamic Education Research*, 3(1), hlm 45–60.

⁴⁵ al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyah*. Cairo: Maktabah Wahbah.

gerakan sosial.⁴⁶ Kritik ini penting agar moderasi tidak dipahami secara bias, melainkan tetap mengutamakan nilai substantifnya.

Meskipun demikian, mayoritas literatur menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan jalan tengah yang paling realistis untuk masyarakat multikultural seperti Indonesia. Tanpa moderasi, potensi konflik sosial berbasis agama akan semakin tinggi. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya dialog antaragama. Dialog bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk saling memahami dan mengurangi prasangka. Di sinilah nilai *tasamuh* menjadi nyata dalam interaksi sehari-hari.

Dalam dunia pendidikan tinggi Islam, moderasi beragama semakin relevan karena mahasiswa berasal dari latar belakang yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa mahasiswa non-Muslim yang tinggal di lingkungan Islami, seperti ma'had, dapat merasakan pengalaman multikultural yang memperkuat sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.⁴⁷

Moderasi beragama bukanlah sikap kompromi dalam akidah, melainkan sikap terbuka dalam muamalah sosial. Artinya, seorang muslim tetap dapat berpegang teguh pada keyakinannya sambil menghormati keyakinan orang lain. Pemahaman ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Moderasi juga berkaitan dengan spiritualitas Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam hanya dapat diwujudkan melalui sikap moderat, karena sikap ekstrem cenderung menghasilkan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan.

⁴⁶ Suharto, T. (2020). Moderasi Beragama: Antara Konsep dan Praktik. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 43(2), hlm. 245–260.

⁴⁷ Alfaini, S. (2022). Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama. *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, 3(1), hlm. 55–70.

Dengan demikian, moderasi beragama merupakan kerangka normatif sekaligus praktis untuk menjaga harmoni keberagamaan. Dalam konteks kehidupan mahasiswa non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah, moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan bersama. Program pembinaan yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan dialog menjadi bentuk konkret dari penerapan moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam. Penelitian ini akan menelaah bagaimana nilai-nilai *wasathiyyah* tersebut diwujudkan dalam perilaku, interaksi sosial, dan pola komunikasi antara santri Muslim dan non-Muslim di Ma'had al-Jami'ah

3. Mahasantri non-Muslim

Islam pada dasarnya memandang manusia dan nilai-nilai kemanusiaan secara positif dan optimistis. Menurut ajaran Islam, seluruh manusia berasal dari asal yang sama, yakni Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa. Meskipun memiliki nenek moyang yang sama, manusia kemudian berkembang menjadi berbagai suku, kaum, dan bangsa, masing-masing dengan kebudayaan dan peradaban khasnya. Perbedaan-perbedaan ini mendorong manusia untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu sama lain. Perspektif inilah yang oleh Islam dijadikan dasar konsep “kesatuan umat manusia” (*universal humanity*), yang pada akhirnya mendorong terwujudnya solidaritas antarindividu.⁴⁸

Dalam pandangan Islam, setiap manusia sejak lahir telah berada dalam kondisi suci atau yang disebut fitrah. Fitrah ini mengandung potensi bawaan yang melekat pada diri manusia untuk mengenali, mencari, serta memahami kebenaran. Potensi tersebut juga mendorong manusia untuk mengarahkan akal dan hatinya dalam menemukan

⁴⁸ Ruslani. (2000), *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: Bentang, hlm. 2.

hakikat keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kebenaran. Dengan demikian, fitrah manusia tidak hanya sekadar keadaan suci secara lahiriah, tetapi juga merupakan perangkat spiritual dan intelektual yang menuntun manusia menuju pengakuan akan keesaan Tuhan.

Kecenderungan untuk selalu berpaling kepada kebenaran ini disebut dengan sikap *hanif*, yakni orientasi hati yang lurus, condong kepada kebaikan, dan menjauhi kebatilan. *Hanif* merupakan karakter bawaan yang melekat pada diri manusia, meskipun dalam perjalanannya bisa terpengaruh oleh lingkungan, pendidikan, maupun kebudayaan yang melingkupinya. Karena itulah Islam memandang penting peran keluarga, masyarakat, dan pendidikan dalam menjaga serta mengarahkan fitrah tersebut agar tetap konsisten pada jalan yang benar.

Berdasarkan prinsip ini, Islam menekankan bahwa pada hakikatnya setiap manusia merupakan makhluk yang religius (*homo religiosus*), makhluk yang secara kodrati memiliki kebutuhan spiritual dan dorongan untuk beragama. Konsep homo religius menunjukkan bahwa keimanan bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari potensi dasar yang telah Allah anugerahkan. Oleh sebab itu, sekalipun manusia dapat berbeda keyakinan akibat pengaruh eksternal, pada dasarnya dalam lubuk hatinya tetap tersimpan fitrah untuk kembali kepada kebenaran dan ketauhidan.

Dengan demikian, Islam memberikan dasar filosofis yang kuat mengenai hubungan manusia dengan agama. Fitrah dan sikap *hanif* menjadi fondasi teologis bahwa agama bukan sekadar institusi sosial, melainkan kebutuhan eksistensial manusia. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan agama dalam Islam berfungsi mengarahkan, memelihara, dan mengembangkan fitrah agar tidak menyimpang dari jalur ketauhidan.

Mahasantri non-Muslim adalah sebutan bagi mahasiswa yang secara formal beragama selain Islam, namun turut mengikuti kegiatan kepesantrenan atau pembinaan keagamaan di Pusat Ma'had al-Jami'ah (pesantren kampus) suatu perguruan tinggi Islam. Istilah ini lahir dari konteks inklusivitas pendidikan Islam di perguruan tinggi yang membuka ruang bagi seluruh mahasiswa, terlepas dari latar belakang agama, dalam rangka tinggal, menimba ilmu, dan berinteraksi di lingkungan pesantren. Secara terminologis, kata mahasantri menunjukkan status mahasiswa yang menjalani proses pembinaan ala pesantren, baik dalam aspek kedisiplinan, pengembangan karakter, maupun penguatan akademik.

Sementara penambahan kata non-Muslim menegaskan bahwa identitas keagamaan mahasiswa tersebut berbeda dari mayoritas santri yang beragama Islam. Dengan demikian, istilah ini lebih menekankan pada konteks keikutsertaan dalam sistem pendidikan pesantren kampus, bukan pada identitas agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah “mahasantri” dalam konteks ini tidak semata menunjuk pada identitas keagamaan Islam, melainkan lebih pada status keikutsertaan mahasiswa dalam sistem pembinaan asrama pesantren kampus. Penambahan kata “non-Muslim” menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut berasal dari agama lain, namun tetap mendapat kesempatan untuk berproses, baik dalam aspek kedisiplinan, pembinaan karakter, maupun pengembangan akademik, di lingkungan pesantren.

a) Landasan Teoretis

1) Perspektif Multikulturalisme Pendidikan

Eksistensi mahasantri non-Muslim sejalan dengan paradigma pendidikan multikultural, yakni suatu pendekatan yang menekankan penghargaan terhadap keragaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Multikulturalisme menolak adanya diskriminasi dan mengakui setiap individu sebagai subjek pendidikan yang

memiliki hak setara. Dengan membuka ruang bagi mahasiswa non-Muslim di lingkungan pesantren kampus, pendidikan Islam menunjukkan komitmennya pada nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan.

2) Konsep *Living Together in Diversity*

Pendidikan pesantren yang diikuti oleh mahasiswa non-Muslim mencerminkan praktik nyata hidup bersama dalam keberagaman (*living together in diversity*). Eksistensi mereka menjadi bagian dari proses dialog lintas iman, di mana perbedaan dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperkaya pengalaman sosial dan kultural dalam kehidupan kampus.

3) Relevansi dengan Ajaran Islam

Dalam Islam, prinsip universal seperti *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *musawah* (kesetaraan) menjadi dasar hubungan antarumat manusia. Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah telah mencontohkan model masyarakat multikultural yang mengakui eksistensi kelompok berbeda agama dalam satu komunitas yang setara. Oleh karena itu, keberadaan mahasantri non-Muslim di pesantren kampus dapat dipandang sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam yang menghargai keragaman.

4) Implikasi Akademik dan Sosial

Dari sudut pandang akademik, eksistensi mahasantri non-Muslim memperkaya kajian interaksi sosial keagamaan di lembaga pendidikan Islam. Sementara secara sosial, hal ini menjadi sarana pembinaan karakter berbasis toleransi, memperkuat rasa kebangsaan, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pusat Ma'had al-Jami'ah

Pendirian Ma'had Sunan Ampel al-Aly berawal dari gagasan yang muncul pada masa kepemimpinan KH. Usman Manshur, namun baru terealisasi pada era Prof. Dr. H. Imam Suprayogo saat menjabat Rektor STAIN Malang. Peletakan batu pertama dilakukan pada 4 April 1999, dan dalam jangka waktu satu tahun berhasil dibangun empat unit gedung yang dilengkapi fasilitas hunian dan rumah pengasuh.⁴⁹

Pada 26 Agustus 2000, Ma'had secara resmi mulai beroperasi dengan jumlah mahasantri lebih dari seribu orang, dan pada 17 April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan penggunaannya. Seiring waktu, unit hunian terus bertambah, baik untuk putra maupun putri, seperti mabna al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Sina, Ibn Khaldun, al-Farabi, hingga mabna-mabna baru seperti Ummu Salamah, Asma' bint Abi Bakar, Fatimah al-Zahra, Khadijah al-Kubra, Ar-Razi, dan al-Muhasibi, bahkan sejak tahun 2024 hingga saat ini, sudah ada hunian yang berlokasi di kampus tiga, yaitu al-Khawarizmi dan Rabi'ah al-adawiyah. Perkembangan ini menunjukkan komitmen Ma'had dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi para mahasantri. Selain itu, pembangunan prasasti dengan pesan religius berbahasa Arab serta penanaman tanah dari makam Wali Songo menjadi simbol visi, misi, sekaligus peneguhan nilai spiritual dan historis perjuangan Islam di Jawa.⁵⁰

Pusat Ma'had al-Jami'ah yang masyhur disebut dengan Ma'had Sunan Ampel al-Aly adalah sebuah unit atau lembaga resmi yang berada dalam struktur organisasi perguruan tinggi Islam dan bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan kepesantrenan mahasiswa. Istilah *ma'had* sendiri berasal dari tradisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam klasik, sedangkan *al-jami'ah* berarti universitas. Dengan

⁴⁹ (Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), diakses pada 7 Oktober 2025.

⁵⁰ (Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), diakses pada 7 Oktober 2025.

demikian, Pusat Ma'had al-Jami'ah dapat dipahami sebagai integrasi antara sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan tinggi modern.

Pusat Ma'had al-Jami'ah lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang mampu menghasilkan mahasiswa unggul secara akademik sekaligus berkepribadian religius, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan. Sebab, pendidikan tinggi Islam di era kontemporer dituntut untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral.

Dalam hal ini, pusat ma'had bertindak sebagai lembaga yang memberikan pembinaan intensif melalui pola kehidupan pesantren kampus. Secara fungsional, Pusat Ma'had al-Jami'ah menjalankan peran penting sebagai pengelola kegiatan mahasiswa yang meliputi pembinaan keagamaan, pengembangan karakter, kedisiplinan, pembiasaan ibadah, serta penanaman nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama.

Kegiatan yang diselenggarakan biasanya mencakup pembiasaan salat berjama'ah, kajian kitab dan Al-Qur'an, pelatihan dan pembiasaan berbahasa asing, pembinaan tahfiz, pelatihan bakat dan minat, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan. Semua ini dirancang agar mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari sekaligus siap menghadapi tantangan global.

Selain itu, Pusat Ma'had al-Jami'ah juga berfungsi sebagai ruang interaksi multikultural, terbukti dari keberadaan mahasiswa yang berasal dari beragam latar belakang etnis, budaya, bahkan agama, yang tinggal bersama dalam satu lingkungan pesantren. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berperan dalam penguatan religiusitas, tetapi juga menjadi laboratorium sosial yang menanamkan sikap toleransi, kebersamaan, dan keterbukaan.

Dari perspektif kelembagaan, Pusat Ma'had al-Jami'ah berfungsi sebagai koordinator utama yang menjembatani hubungan antara pihak universitas dengan

mahasiswa dalam hal pembinaan non-akademik. Lembaga ini juga memiliki fungsi administratif, seperti mengatur jadwal kegiatan, menetapkan kurikulum kepesantrenan, mengelola tenaga pendamping atau *musyrif/ah*, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa.

Secara historis, gagasan pendirian Ma'had al-Jami'ah di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia terinspirasi oleh semangat untuk mengintegrasikan keilmuan umum dengan tradisi keilmuan Islam. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan modern tidak boleh tercerabut dari akar religiusitas dan moralitas bangsa. Oleh karena itu, Pusat Ma'had al-Jami'ah hadir sebagai wadah penguatan spiritualitas mahasiswa sekaligus sebagai benteng moral di tengah deras arus globalisasi, sekularisasi, dan pergeseran nilai.

Dengan demikian, Pusat Ma'had al-Jami'ah dapat didefinisikan sebagai lembaga pusat pembinaan kepesantrenan di perguruan tinggi Islam yang berfungsi mengintegrasikan tradisi pesantren dengan pendidikan tinggi modern, membentuk mahasiswa yang berilmu, berakhlak, religius, toleran, serta memiliki karakter kebangsaan yang kokoh.

5. Hubungan Antarkonsep (Multikulturalisme, Moderasi Beragama, dan Mahasantri Non-Muslim)

Dalam lingkungan pendidikan Islam seperti Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sinergi antara multikulturalisme dan moderasi beragama menemukan bentuk konkretnya. Ma'had tidak hanya menjadi tempat pembinaan spiritual dan moral mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai latar belakang agama, budaya, dan daerah. Kehadiran mahasantri non-Muslim di tengah sistem pembinaan berbasis Islam merupakan manifestasi nyata dari penerapan multikulturalisme yang berlandaskan

nilai-nilai moderasi beragama. Fenomena ini menghadirkan dinamika unik di satu sisi, mahasantri non-Muslim berupaya menyesuaikan diri dengan nilai dan kebiasaan Islami, sementara itu civitas Ma'had berusaha membangun sikap terbuka dan inklusif terhadap keberadaan mereka.

Interaksi sosial antara mahasantri Muslim dan non-Muslim di lingkungan Ma'had al-Jami'ah mencerminkan praktik multikulturalisme yang hidup di bawah kerangka moderasi beragama. Nilai-nilai toleransi, saling menghormati, empati, dan keterbukaan menjadi dasar terjalinnya harmoni sosial di tengah perbedaan keyakinan. Melalui kegiatan keasramaan, pembelajaran nilai, serta bimbingan moral, terjadi proses internalisasi nilai moderasi beragama yang memperkuat semangat multikulturalisme di lingkungan tersebut. Dalam hal ini, Ma'had berperan sebagai laboratorium sosial bagi pembentukan karakter mahasiswa yang moderat dan mampu hidup berdampingan dalam keragaman.

Lebih jauh, hubungan antara ketiga konsep ini dapat dipahami secara dialektis. Multikulturalisme menyediakan ruang dan realitas sosial bagi keberagaman, moderasi beragama memberikan pedoman nilai dalam mengelola keberagaman tersebut, sedangkan keberadaan mahasantri non-Muslim menjadi entitas empiris yang memperlihatkan sejauh mana kedua konsep tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan Islam. Ketika multikulturalisme dihidupi dengan semangat moderasi, maka hubungan antaragama dapat terjalin dalam suasana saling menghormati tanpa kehilangan identitas keagamaan masing-masing.

Dengan demikian, hubungan antarkonsep ini memperlihatkan bahwa keberadaan mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks multikultural. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana tiga aspek

tersebut saling berinteraksi, saling memperkuat, sekaligus menghadapi tantangan dalam praktiknya di lingkungan pendidikan Islam yang bercorak pesantren kampus. Melalui pemahaman terhadap hubungan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan model pendidikan Islam yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada nilai kebinekaan.

B. Perspektif Teori dalam Islam

Dalam Islam, konsep multikulturalisme memiliki dasar yang kuat karena ajaran Islam sejak awal telah menekankan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap keragaman manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan budaya bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan sarana untuk saling mengenal (*ta'aruf*) dan bekerja sama dalam kebaikan. Hal ini mempertegas bahwa Islam berperan tidak hanya dalam aspek vertikal dengan Tuhan, tetapi juga dalam menciptakan harmoni sosial yang berlandaskan keadilan, persamaan, dan kasih sayang di tengah keragaman. Al-Qur'an menegaskan bahwa keberagaman adalah *sunnatullah*, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Al-Qur'an, al-Hujurat [49]: 13)⁵¹

⁵¹ Surat Al-Hujurat Ayat 13: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>

Ayat tersebut menegaskan bahwa pluralitas adalah ketetapan Allah untuk menciptakan harmoni sosial. Islam juga menekankan penghormatan dalam perbedaan keyakinan. Islam juga menekankan penghormatan dalam perbedaan keyakinan. Sejak awal, ajarannya telah mengajarkan bahwa keberagaman keyakinan adalah bagian dari realitas sosial yang harus dihadapi dengan bijak, bukan dijadikan alasan untuk bermusuhan. Sikap saling menghormati antara pemeluk agama menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis di tengah masyarakat yang plural. Dengan begitu, Islam menghadirkan nilai-nilai universal yang dapat mendukung terciptanya tatanan sosial yang inklusif dan berkeadaban. Allah telah berfirman:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (Al-Qur’an, al-Kafirun [109]: 6)⁵²

Ayat ini mengajarkan toleransi dan menjadi prinsip dasar interaksi Muslim dengan non-Muslim, sesuai nilai multikulturalisme.

Praktik konkret multikulturalisme ditunjukkan Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah. Dokumen ini menegaskan persamaan hak seluruh warga Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam membangun kehidupan bersama yang damai.⁵³ Piagam tersebut menjadi bukti penerapan nyata nilai multikultural dalam sejarah Islam. Hadis Rasulullah SAW juga menekankan kasih sayang universal. Beliau bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

⁵² Surat Al-Kafirun Ayat 1-6: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/109?from=1&to=6>

⁵³ Lihat Munawwir, A. (2001). *Piagam Madinah: Konstitusi Pertama di Dunia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim).⁵⁴

Kata saudara di sini dipahami tidak hanya sebatas Muslim, tetapi juga seluruh manusia. Dalam pendidikan Islam, keberagaman adalah sarana pembentukan akhlak. Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Qur'an. al-Maidah, [5]: 2)⁵⁵

⁵⁴ Al-Bukhari, M. I., & Muslim, I. H. (2002). *Shahih Bukhari Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

⁵⁵ Surat Al-Maidah Ayat 2: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>

Ayat ini mengajarkan kerja sama lintas perbedaan, sangat relevan dengan pendidikan multikultural.

Konsep *ummatan wasathan* serta konsep *wasathiyyah* itu menegaskan keseimbangan serta merupakan penjelmaan dari konstitusi Ilahi (*dustur ilahi*) yang diamanatkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

“Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atasmu” (Al-Qur'an, al-Baqarah [2]: 143)⁵⁶

dan juga firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qur'an, al-Qasash [28]: 77)⁵⁷

serta firman Allah SWT:

⁵⁶ Surat Al-Baqarah Ayat 143: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=143&to=143>

⁵⁷ Surat Al-Qasash Ayat 77: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=77>

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖۙ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِۙ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِۗ كَذٰلِكَ نَفْصِلُ الْاٰلِیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (٣٢) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّۙ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖۙ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٣)

“(31) Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (32) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. (33) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Qur’an, al-A’raf [7]: 31-33)⁵⁸

Begitu pula dalam ajaran serta tradisi luhur yang diwariskan Rasulullah, prinsip *wasathiyyah* tampak jelas tercermin dalam sunnah beliau. Ketika dihadapkan pada

⁵⁸ Surat Al-A’raf Ayat 31-33: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=31&to=33>

berbagai pilihan, Rasulullah senantiasa memilih jalan yang lebih mudah dan tidak memberatkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ فَضَيْلِ ابْنِ شِهَابٍ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ حَدَّثَنِي حُرْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’i dari Malik bin Anas dari apa yang telah dibacakan kepadanya. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: “Aku membaca Hadits Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dia berkata: “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diberi pilihan dari dua urusan atau pekerjaan, maka beliau memilih yang termudah, selama yang termudah itu tidak mengandung dosa. Jika pekerjaan itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri dari padanya. Dan beliau tidak pernah marah, melainkan apabila beliau melihat larangan Allah ‘azza wajalla dilanggar.” Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim seluruhnya dari Jarir: Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami

Ahmad bin 'Abdah: Telah menceritakan kepada kami Fudhail bin 'Iyadh keduanya dari Manshur dari Muhammad menurut riwayat Fudhail Ibnu Syihab. Sedangkan menurut riwayat Jarir adalah dari Muhammad Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah: Dan telah menceritakannya kepada ku Harmalah bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab melalui jalur ini yang serupa dengan Hadits Malik.” (Hadits Riwayat Imam Muslim, nomor hadits 4.924)⁵⁹

Umat Islam dituntut adil, seimbang, dan terbuka dalam menyikapi perbedaan. Dengan demikian, perspektif Islam menekankan bahwa multikulturalisme selaras dengan Al-Qur'an, hadis, dan praktik Rasulullah. Eksistensi mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi bukti nyata penerapan nilai Islam yang menghargai pluralitas. Penelitian ini tidak hanya akademis, tetapi juga berkontribusi pada wacana pendidikan Islam yang inklusif.⁶⁰

Secara konseptual, multikulturalisme dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip *wasathiyyah* (moderasi) yang menuntun umat Islam untuk bersikap adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama berperan sebagai jembatan yang menuntun bagaimana nilai-nilai multikulturalisme dipraktikkan tanpa kehilangan identitas keislaman. Dengan kata lain, multikulturalisme memberikan ruang bagi perbedaan, sedangkan moderasi beragama memberikan arah bagi pengelolaan perbedaan agar tetap dalam koridor keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks kehidupan kampus keagamaan seperti Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, prinsip-prinsip ini menemukan relevansinya secara konkret. Kehadiran mahasantri non-Muslim bukan sekadar fenomena sosial, melainkan

⁵⁹ *Hadits riwayat Imam Muslim nomor hadits 4.924*, Hadits Tazkia Online, diakses pada 8 Oktober 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:1062>

⁶⁰ Fitri Nur Hidayat. (2023). Multikulturalisme dalam pendidikan Islam. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 6(2), hlm. 67-75.

wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Ma'had, yang berorientasi pada pembinaan spiritual dan karakter, menjadi ruang interaksi lintas agama yang menuntut penerapan sikap *wasathiyyah* dari seluruh civitas akademika, terutama para mahasiswa Muslim. Mereka dituntut untuk menampilkan wajah Islam yang santun, terbuka, dan menghargai perbedaan keyakinan.

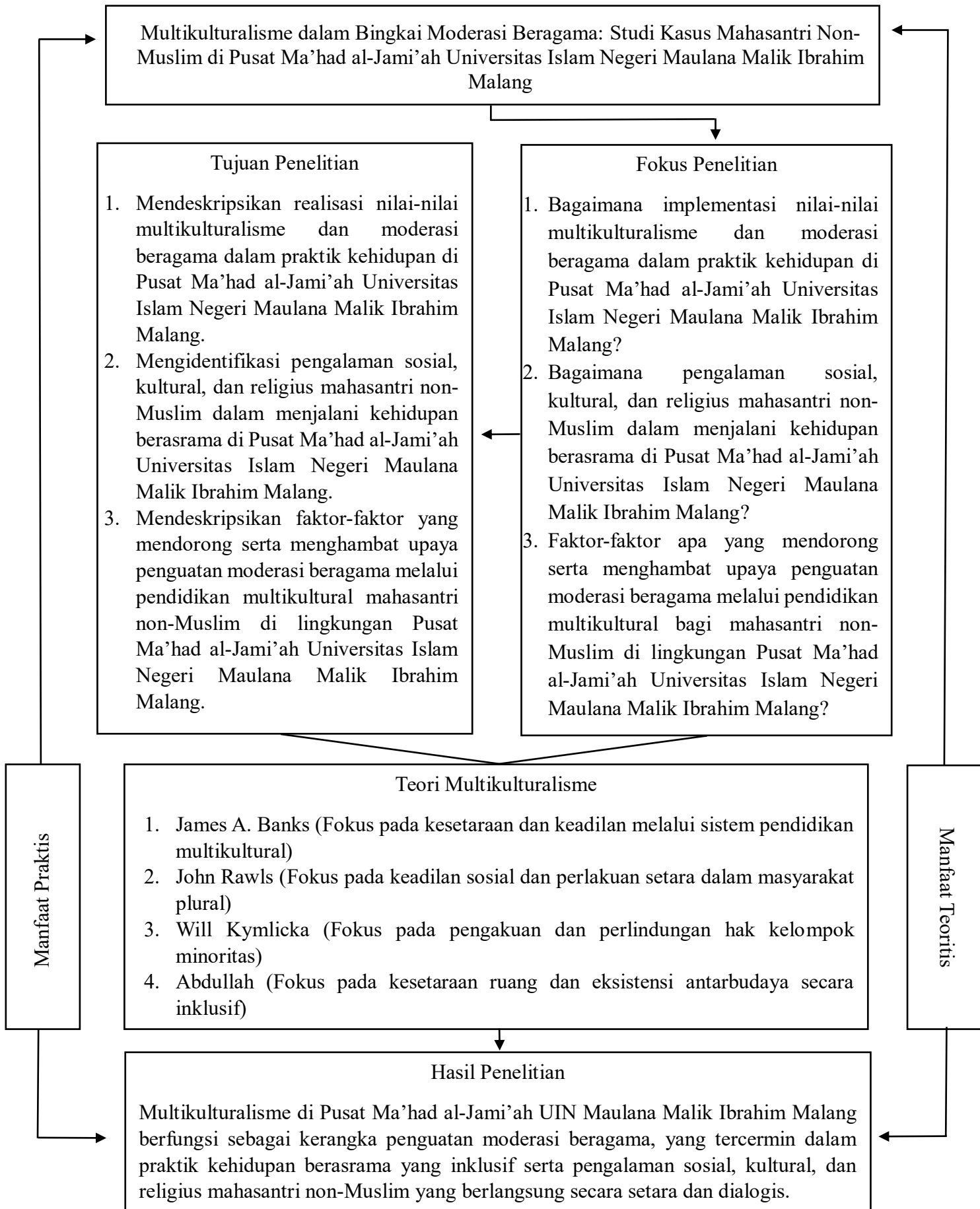
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana moderasi beragama menjadi instrumen pedagogis dalam pendidikan multikultural, sekaligus menjadi sarana dakwah *bil hal*, yakni dakwah melalui perilaku. Mahasiswa non-Muslim yang hidup dalam lingkungan bernafaskan keislaman dapat merasakan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, mahasiswa Muslim belajar menyeimbangkan identitas keislamannya dengan sikap toleran dan empati sosial.

Dengan demikian, integrasi antara multikulturalisme, moderasi beragama, dan keberadaan mahasiswa non-Muslim membentuk sistem relasi yang saling menguatkan. Multikulturalisme menyediakan kerangka sosial, moderasi beragama menyediakan pedoman normatif, dan kehadiran mahasiswa non-Muslim menjadi realitas empiris yang menguji sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata di lingkungan pendidikan Islam. Inilah bukti bahwa ajaran Islam sejatinya bukan hanya seruan teologis, melainkan sistem nilai yang mampu membangun kehidupan bersama yang damai dan berkeadaban lintas agama.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul “Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasiswa Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena mampu menggambarkan realitas lapangan secara mendalam melalui penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif. Data yang diperoleh selama proses penelitian akan diuraikan dalam bentuk teks yang kaya makna, sehingga dapat merefleksikan pengalaman nyata partisipan maupun konteks sosial tempat penelitian berlangsung.

Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan strategi penelitian yang berangkat dari paradigma konstruktivis. Artinya, pengetahuan dibangun melalui beragam makna yang lahir dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan latar belakang historis, sehingga tujuan akhirnya adalah menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena. Selain itu, pendekatan kualitatif juga dapat digunakan dalam perspektif partisipatori, yaitu dengan melibatkan kecenderungan pada isu-isu tertentu, mendorong kolaborasi, menghadirkan perubahan sosial, bahkan menyentuh aspek politik. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif sering kali memadukan kedua perspektif tersebut, sehingga memberikan hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh.⁶¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada satu fenomena tertentu secara detail, mendalam, dan kontekstual. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam setting nyata, memahami interaksi antar faktor yang memengaruhi, serta menggali makna di balik peristiwa yang diteliti. Studi kasus berfokus pada eksplorasi intensif terhadap suatu kasus dalam konteks

⁶¹ Feny Rita Fiantika et al., (2022), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatr Novita, *Rake Sarasin*, 1st ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3-4.

kehidupan nyata, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor-faktor yang melingkupinya.

Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islam yang moderat diterjemahkan dalam perilaku, komunikasi, dan kebijakan kelembagaan. Melalui metode ini, penelitian dapat menggambarkan dengan rinci proses terjadinya akulturasi nilai, penerimaan, dan adaptasi sosial di lingkungan ma'had. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga berusaha menafsirkan makna multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama secara komprehensif. Dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara holistik.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area spesifik yang dijadikan objek kajian, tempat peneliti melakukan observasi, pengumpulan informasi, serta analisis sesuai fokus penelitian. Pemilihan lokasi penelitian tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada pertimbangan relevansi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, ketersediaan data, serta kemungkinan untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam.

Dalam konteks metodologi penelitian, lokasi penelitian berfungsi sebagai ruang empiris yang memungkinkan peneliti menghubungkan teori dengan realitas. Melalui lokasi tersebut, peneliti dapat menemukan fenomena, interaksi sosial, serta dinamika yang sesuai dengan fokus kajian. Oleh karena itu, kejelasan lokasi penelitian sangat penting agar

⁶² Feny Rita Fiantika et al., (2022), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatr Novita, *Rake Sarasin*, 1st ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3-4.

penelitian memiliki batasan yang jelas, tidak melebar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian juga mencerminkan pertimbangan strategis peneliti dalam menemukan fenomena yang unik, khas, atau representatif. Lokasi penelitian bisa berupa lembaga pendidikan, komunitas sosial, organisasi keagamaan, lingkungan masyarakat, bahkan ruang virtual, bergantung pada kebutuhan penelitian yang dijalankan.

Dalam kesempatan ini, penelitian dilakukan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah:

1. Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan lembaga khas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang membuka ruang bagi mahasiswa non-Muslim untuk tinggal dan berinteraksi bersama mahasiswa yang beragama Islam. Fenomena ini jarang ditemui di lembaga sejenis, sehingga relevan sebagai objek penelitian tentang moderasi beragama.
2. Pusat Ma'had al-Jami'ah juga dihuni oleh mahasiswa non-Muslim. Fenomena ini jarang terjadi di lingkungan perguruan tinggi Islam di Indonesia, sehingga menjadi objek yang unik untuk diteliti, khususnya dalam konteks moderasi beragama dan interaksi multikultural. Interaksi antar mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda di dalam ma'had mencerminkan praktik moderasi beragama secara nyata. Kehidupan sehari-hari mereka menjadi laboratorium sosial untuk melihat bagaimana sikap toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan dapat diwujudkan dalam bingkai multikulturalisme.
3. Di Pusat Ma'had al-Jami'ah ini, mahasiswa Muslim dan non-Muslim berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut melahirkan dinamika sosial, dialog

antaragama, serta praktik toleransi yang bisa dijadikan data empiris dalam penelitian mengenai multikulturalisme.

4. Pusat Ma'had al-Jami'ah adalah lokasi yang relevan dengan judul penelitian "Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama". Hal ini karena lingkungan tersebut dapat memberikan data empiris mengenai penerapan nilai moderasi beragama melalui interaksi lintas iman.
5. Sebagai lembaga resmi di bawah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pusat Ma'had al-Jami'ah memiliki struktur, program, dan data yang terorganisir. Hal ini memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi, melakukan wawancara, serta mengobservasi langsung fenomena yang terjadi.
6. Hasil penelitian di lokasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam moderasi beragama di perguruan tinggi Islam, sekaligus memberi masukan praktis bagi pengelola ma'had dalam membangun iklim kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di lapangan sebagai instrumen utama penelitian. Kehadiran peneliti di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data mengenai praktik multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama. Posisi peneliti bersifat sebagai pengamat-partisipan (*participant observer*), di mana peneliti tidak hanya mencatat fenomena, tetapi juga turut berinteraksi secara terbatas dengan subjek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual.

Fokus penelitian diarahkan kepada dua orang mahasantri non-Muslim, masing-masing beragama Katolik dan Protestan. Kehadiran mereka dalam lingkungan yang

mayoritas Muslim menghadirkan fenomena unik untuk dikaji, khususnya terkait dinamika moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari di ma'had. Untuk menggali pengalaman mereka, peneliti akan melakukan wawancara mendalam mengenai pandangan, perasaan, dan interaksi sosial yang mereka alami.

Selain kedua mahasantri non-Muslim tersebut, peneliti juga melibatkan teman sekamar mereka sebagai informan tambahan. Kehadiran teman sekamar dinilai penting karena mereka berinteraksi secara intens dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih objektif terkait sikap saling menghargai, toleransi, dan pengalaman kebersamaan di kamar maupun di lingkungan ma'had.

Untuk memperluas perspektif, peneliti juga akan mewawancarai dua orang *musyrif* yang bertugas sebagai pendamping, serta seorang *murabbiah* yang terlibat dalam pengasuhan mahasantri. Pandangan mereka diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi pembinaan dan peran pendampingan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Selanjutnya, peneliti akan melakukan wawancara dengan *Mudir* Ma'had sebagai pimpinan lembaga untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait kebijakan, visi, dan arah pembinaan multikultural di Pusat Ma'had al-Jami'ah.

Dari sisi etika penelitian, peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan identitas para informan. Semua data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademis dan akan diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum melakukan wawancara atau observasi, peneliti terlebih dahulu meminta izin resmi dari pihak ma'had serta persetujuan informan (*informed consent*). Selain itu, peneliti juga berusaha menjaga sikap netral, tidak memihak, serta menghargai nilai-nilai yang berlaku di lingkungan penelitian. Dengan demikian, kehadiran peneliti diharapkan mampu menjamin kualitas data yang diperoleh sekaligus menjunjung tinggi prinsip etis penelitian ilmiah.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang secara langsung terlibat dalam dinamika kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan memiliki relevansi dengan tema multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama. Subjek utama penelitian adalah dua orang mahasantri non-Muslim, masing-masing beragama Katolik dan Protestan. Kedua mahasantri ini dipilih karena kehadiran mereka di lingkungan ma'had yang mayoritas Muslim menjadi fenomena unik yang merepresentasikan praktik moderasi beragama dalam kehidupan nyata.

Selain subjek utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung untuk memperkaya data. Informan pendukung tersebut terdiri dari:

1. Teman sekamar mahasantri non-Muslim yang berfungsi memberikan perspektif langsung mengenai interaksi sehari-hari, dinamika sosial, serta bentuk toleransi yang terjadi di kamar maupun lingkungan ma'had.
2. Dua orang *musyrif* yang bertugas sebagai pendamping dan pengasuh mahasantri, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai strategi, pendekatan, serta tantangan dalam menumbuhkan sikap moderat di lingkungan ma'had.
3. Seorang *murabbiah* yang juga terlibat dalam proses pengasuhan, guna melengkapi sudut pandang tentang pembinaan yang dilakukan terhadap mahasantri.
4. *Mudir* Ma'had sebagai pimpinan utama lembaga, yang akan memberikan informasi terkait visi, misi, kebijakan, serta peran ma'had dalam membangun suasana multikultural dan moderat.

Pemilihan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran

komprehensif mengenai praktik multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama di Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi, dengan tujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu maupun kelompok yang terkait dengan fenomena sosial yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif bersifat deskriptif dan eksploratif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih mendalam dinamika multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama yang berlangsung di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang diperoleh dalam proses mengambil data di lapangan:

a) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari para informan yang dipilih secara purposive karena relevansinya dengan fokus penelitian. Informan utama adalah dua orang mahasantri non-Muslim, masing-masing beragama Katolik dan Protestan, yang tinggal di ma'had. Kehadiran mereka di tengah komunitas mayoritas Muslim menjadi fenomena penting untuk memahami praktik moderasi beragama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peneliti juga melibatkan teman sekamar kedua mahasantri tersebut, yang berperan memberikan perspektif tambahan mengenai interaksi sosial, sikap toleransi, serta dinamika multikultural yang terjalin di ruang tinggal bersama.

Sumber data primer lainnya adalah dua orang *musyrif*, seorang *murabbiah*, dan *mudir* Ma'had al-Jami'ah. Para *musyrif* dan *murabbiah* dipilih karena keterlibatan mereka langsung dalam proses pembinaan dan pendampingan mahasantri, sehingga dapat memberikan pandangan mengenai strategi, tantangan, dan praktik moderasi yang diterapkan. Sementara itu, *mudir* ma'had menjadi informan kunci yang dapat menjelaskan visi, misi, serta kebijakan lembaga dalam membangun kultur keberagamaan yang moderat dan inklusif.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan, seperti tata tertib ma'had, pedoman pembinaan, laporan kegiatan, arsip administrasi, serta publikasi resmi lembaga. Data sekunder ini penting untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, sekaligus memberikan dasar kelembagaan yang dapat mendukung analisis. Dengan memadukan data primer dan data sekunder melalui triangulasi sumber maupun teknik, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana praktik multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama dijalankan, dialami, dan dimaknai oleh berbagai pihak di lingkungan Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun seperangkat instrumen yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data di lapangan. Instrumen tersebut dirancang untuk memandu peneliti dalam menggali informasi yang relevan, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian dalam studi ini disusun berdasarkan variabel, dimensi, dan indikator yang relevan dengan fokus penelitian. Variabel utama yang ditetapkan adalah Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama di Pusat Ma'had

al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Variabel ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa dimensi yang merepresentasikan aspek-aspek penting, yaitu: toleransi, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, inklusivitas, serta kebijakan kelembagaan. Dari setiap dimensi, diturunkan sejumlah indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan pedoman wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Adapun instrumen yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama	Toleransi	1. Sikap menerima keberadaan mahasantri non-Muslim di lingkungan ma'had. 2. Kemauan untuk hidup berdampingan secara damai. 3. Kesiediaan menghormati ibadah dan keyakinan yang berbeda.
	Kerja Sama	1. Partisipasi mahasantri non-Muslim dalam kegiatan sosial di ma'had. 2. Dukungan teman sekamar maupun <i>musyrif</i> dalam aktivitas bersama. 3. Keterlibatan dalam kegiatan non-ritual keagamaan.
	Penghargaan terhadap Perbedaan	1. Sikap teman sekamar terhadap praktik keagamaan yang berbeda. 2. Upaya <i>musyrif/murabbiah</i> dalam menjaga kerukunan. 3. Penerimaan terhadap budaya dan identitas berbeda.

	Inklusivitas	1. Kebijakan ma'had terkait penerimaan mahasantri non-Muslim. 2. Perlakuan adil terhadap seluruh mahasantri tanpa diskriminasi. 3. Kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan tertentu.
	Kebijakan Kelembagaan	1. Visi dan misi ma'had terkait moderasi beragama. 2. Aturan yang mendukung terciptanya suasana multikultural.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan beberapa teknik yang dipandang relevan untuk memperoleh informasi secara mendalam. Teknik-teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta interpretasi informan terkait dinamika kehidupan multikultural di lingkungan ma'had. Informan utama adalah dua mahasantri non-Muslim (Katolik dan Protestan) yang tinggal di ma'had, untuk mengetahui bagaimana pengalaman mereka hidup di tengah komunitas mayoritas Muslim. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada teman sekamar, dua *musyrif*, seorang *murabbiah*, dan *mudir* ma'had. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh data tentang praktik moderasi beragama, bentuk toleransi, dukungan kelembagaan, serta tantangan yang muncul dalam interaksi sosial.⁶³

⁶³ Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

b. Observasi

Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi sosial yang terjadi antara mahasantri Muslim dan non-Muslim di lingkungan ma'had. Peneliti mengamati kegiatan sehari-hari, seperti kebersamaan di kamar, kegiatan belajar, aktivitas sosial, serta peran *musyrif*, *musyrifah* dan *murabbiah* dalam mendampingi mahasantri. Melalui observasi ini, peneliti dapat mencatat bentuk kerja sama, sikap toleransi, dan suasana keberagamaan yang tercipta dalam kehidupan sehari-hari di ma'had.⁶⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan untuk melengkapi data wawancara dan observasi. Dokumen tersebut antara lain tata tertib ma'had, pedoman pembinaan, jadwal kegiatan, laporan evaluasi, arsip administrasi, serta publikasi resmi Ma'had al-Jami'ah. Melalui dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami kebijakan kelembagaan yang mendukung terciptanya iklim multikultural dan moderat di lingkungan ma'had.⁶⁵

Pengumpulan data dalam bentuk visual maupun tertulis disebut dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari data-data primer hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dimanfaatkan antara lain profil Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tata tertib dan pedoman pembinaan mahasantri. Selain itu, dokumentasi juga mencakup transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, serta foto kegiatan yang mendukung deskripsi penelitian.

⁶⁴ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

⁶⁵ Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Dalam tahap dokumentasi ini, peneliti memanfaatkan perangkat sederhana seperti handphone untuk merekam wawancara serta mengambil dokumentasi visual, dan laptop untuk menyimpan, mengelola, serta menganalisis data yang terkumpul. Teknik dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pendukung, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat validitas temuan penelitian mengenai praktik multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya, akurat, dan sesuai dengan realitas di lapangan. Menurut Moleong, keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup empat kriteria utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁶⁶ Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari mahasantri non-Muslim, teman sekamar, *musyrif*, *murabbiah*, dan *mudir* ma'had. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang valid mengenai praktik multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah.

I. Analisis Data

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah tahap awal analisis yang melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna.⁶⁷

⁶⁶ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 324.

⁶⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, hlm. 31.

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi jumlahnya cukup besar, sehingga perlu dilakukan reduksi agar fokus tetap pada tema multikulturalisme dan moderasi beragama. Misalnya, dari hasil wawancara dengan mahasantri non-Muslim, peneliti menyeleksi informasi yang relevan terkait pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan teman Muslim, praktik toleransi, serta tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, data-data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan. Misalnya, informasi mengenai kegiatan akademik umum yang tidak berkaitan langsung dengan pengalaman keberagamaan di ma'had. Dengan demikian, kondensasi membantu peneliti menjaga fokus penelitian agar sesuai dengan rumusan masalah. Kondensasi juga memungkinkan peneliti melihat pola tertentu, seperti bentuk kerukunan yang sering muncul atau peran dominan *musyrif* dalam membangun suasana moderat.

Proses kondensasi bersifat berkelanjutan, artinya dilakukan sepanjang proses penelitian, bukan hanya setelah data terkumpul. Setiap kali data baru diperoleh, peneliti kembali melakukan seleksi dan kategorisasi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengelompokkan data ke dalam dimensi tertentu, misalnya “interaksi antaragama”, “strategi pembinaan *musyrif* dan *murabbiah*”, atau “kebijakan ma'had tentang multikulturalisme”.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Menurut Miles, penyajian data merupakan cara peneliti menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.⁶⁸ Dalam penelitian ini, penyajian

⁶⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, hlm. 33.

data dilakukan terutama dalam bentuk deskriptif naratif yang memaparkan hasil wawancara, hasil observasi, serta dokumen-dokumen pendukung.

Selain dalam bentuk naratif, peneliti juga dapat menyajikan data dengan tabel atau matriks sederhana. Penyajian semacam ini membantu menampilkan perbedaan maupun kesamaan pandangan yang muncul. Dengan begitu, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola dan tema besar dalam penelitian.

Lebih jauh, penyajian data juga memungkinkan peneliti memvisualisasikan hubungan antar unsur penelitian. Dengan tampilan seperti ini, analisis menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awalnya, lalu diverifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian.⁶⁹ Pada penelitian ini, peneliti mulai menarik kesimpulan awal sejak tahap pengumpulan data. Misalnya, ketika menemukan adanya sikap saling menghormati antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim dalam kegiatan harian.

Namun, kesimpulan sementara tersebut tidak langsung dianggap final. Peneliti kembali memverifikasi data dengan membandingkannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Jika kesimpulan awal konsisten dengan data yang terus dikumpulkan, maka kesimpulan tersebut semakin kuat. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin muncul akibat bias peneliti.

Pada akhirnya, peneliti menarik kesimpulan umum mengenai bagaimana multikulturalisme dijalankan dalam bingkai moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Kesimpulan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga

⁶⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, hlm. 35.

memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam yang inklusif di tengah masyarakat multikultural.

J. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data secara ilmiah, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong, prosedur penelitian kualitatif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi sebagai strategi agar peneliti tetap konsisten dengan fokus masalah yang sedang diteliti.⁷⁰ Dalam konteks penelitian ini, prosedur penelitian dirancang untuk menelaah secara mendalam pengalaman dua mahasiswa non-Muslim (Kristen Katolik dan Protestan) yang tinggal di Pusat Ma'had al-Jami'ah, serta bagaimana dinamika multikulturalisme terjalin dalam bingkai moderasi beragama melalui peran teman sekamar, *musyrif*, *murabbiah*, dan *mudir* ma'had.

Dengan adanya prosedur yang terencana, penelitian ini dapat dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tahap akhir. Hal ini penting mengingat penelitian kualitatif berbasis studi kasus menekankan pada kedalaman data, sehingga setiap tahapan harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Prosedur penelitian dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta metode penelitian yang digunakan. Rancangan ini menjadi pedoman konseptual sekaligus peta kerja penelitian di lapangan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif studi kasus, rancangan yang disusun lebih bersifat fleksibel namun tetap berfokus pada

⁷⁰ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 127.

penggalan data tentang multikulturalisme dan moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah.

b. Melakukan Perizinan Penelitian

Langkah berikutnya adalah mengurus perizinan resmi. Peneliti mengajukan surat permohonan penelitian dari kampus asal kepada pihak Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses perizinan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap etika akademik sekaligus cara untuk memperoleh legitimasi agar peneliti dapat melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan informan yang telah ditentukan.

c. Observasi Lapangan

Sebelum terjun penuh ke lapangan, peneliti melakukan observasi awal atau *preliminary observation*. Observasi ini bertujuan mengenali kondisi lingkungan ma'had, memahami pola aktivitas mahasantri, serta menjalin komunikasi awal dengan pengurus seperti *musyrif*, *murabbiah*, maupun *mudir*. Observasi awal juga berguna untuk memetakan potensi informan, serta memastikan kelayakan data yang akan dikumpulkan nantinya.

d. Menyiapkan Perlengkapan serta Instrumen Penelitian

Tahap akhir pra-lapangan adalah menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara mendalam, lembar observasi, dan format dokumentasi. Selain itu, perlengkapan teknis seperti alat perekam suara, buku catatan lapangan, *handphone* untuk dokumentasi visual, serta laptop untuk pengelolaan data juga dipersiapkan. Instrumen ini dirancang sedemikian rupa agar peneliti dapat menggali data yang relevan, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mulai terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap dua mahasantri non-Muslim, teman sekamar, *musyrif*, *murabbiah*, dan *mudir* ma'had. Wawancara ini dirancang terbuka agar informan dapat menjelaskan pengalaman serta pandangan mereka terkait praktik toleransi, kerukunan, dan kehidupan multikultural di lingkungan ma'had. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati aktivitas keseharian mahasantri, mulai dari interaksi sosial hingga kegiatan pembinaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer, berupa arsip, profil lembaga, serta foto kegiatan.

b. Mengidentifikasi Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan identifikasi dengan cara memilah dan mengklasifikasikan data sesuai tema yang relevan dengan fokus penelitian. Misalnya, data dikelompokkan ke dalam tema “toleransi beragama”, “peran *musyrif* dalam pembinaan”, “dukungan *mudir* terhadap multikulturalisme”, dan “pengalaman personal mahasantri non-Muslim”. Identifikasi data ini bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah menyusun pola, kategori, dan menemukan hubungan antar unsur dalam penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

Tahap akhir penelitian berfokus pada analisis dan penyusunan laporan. Setelah data teridentifikasi, peneliti melakukan proses analisis melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang dengan memperhatikan prinsip keabsahan data, baik melalui triangulasi maupun *member check*. Kesimpulan

yang dihasilkan bersifat reflektif dan komprehensif, menjawab bagaimana multikulturalisme dijalankan di ma'had dalam bingkai moderasi beragama.

Selain analisis, tahap akhir juga mencakup refleksi terhadap pengalaman peneliti selama berada di lapangan. Refleksi ini penting untuk menilai objektivitas peneliti dan menyadari keterbatasan penelitian. Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis agar dapat dijadikan rujukan akademis maupun praktis dalam pengembangan wacana moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam multikultural.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan sesuai dengan fokus penelitian adalah:

1. Langkah Penelitian Fokus Pertama: Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Moderasi Beragama dalam Praktik Kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - a. Melakukan observasi terhadap kehidupan sosial mahasiswa di lingkungan asrama untuk melihat bentuk interaksi antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim.
 - b. Melakukan wawancara mendalam dengan mahasiswa non-Muslim, mahasiswa Muslim, *musyrif*, *musyrifah*, *murabbiah*, dan *mudir* guna memperoleh informasi mengenai praktik toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, pola pembinaan, serta kebijakan yang mendukung kehidupan multikultural.
 - c. Mengumpulkan dokumen pendukung berupa tata tertib ma'had, program pembinaan, profil lembaga, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama.
 - d. Mengidentifikasi data yang berkaitan dengan implementasi nilai toleransi (*tasamuh*), keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), penghormatan terhadap

keberagaman, serta bentuk interaksi sosial yang mencerminkan nilai multikulturalisme.

- e. Melakukan triangulasi data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di lingkungan Ma'had.

2. Langkah Penelitian Fokus Kedua: Pengalaman Sosial, Kultural, dan Religius Mahasantri Non-Muslim dalam Menjalani Kehidupan Berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- a. Menentukan informan utama yang terdiri atas mahasantri non-Muslim yang tinggal di Ma'had.
- b. Melakukan wawancara mendalam mengenai alasan memilih tinggal di Ma'had, proses adaptasi, pengalaman sosial, pengalaman religius, bentuk interaksi dengan mahasantri Muslim, serta pengalaman menerima perlakuan yang inklusif maupun tantangan yang dihadapi selama tinggal di Ma'had.
- c. Melakukan observasi terhadap aktivitas keseharian mahasantri non-Muslim dalam kehidupan asrama, termasuk pola interaksi, partisipasi dalam kegiatan, dan bentuk hubungan sosial yang terjalin dengan warga Ma'had lainnya.
- d. Mengumpulkan dokumentasi yang mendukung data pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim.
- e. Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema pengalaman sosial, pengalaman kultural, pengalaman religius, proses adaptasi, penerimaan terhadap perbedaan, serta pengalaman hidup dalam lingkungan pendidikan Islam yang multikultural.
- f. Melakukan konfirmasi data kepada informan (*member check*) guna memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan pengalaman yang dimaksud oleh informan.

3. Langkah Penelitian Fokus Ketiga: Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Upaya Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendidikan Multikultural bagi Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - a. Melakukan wawancara dengan mahasantri non-Muslim, mahasantri Muslim, *musyrif*, *musyrifah*, *murabbiah*, dan *mudir* untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terciptanya kehidupan multikultural dan moderat di Ma'had.
 - b. Melakukan observasi terhadap berbagai aktivitas pembinaan, interaksi sosial, serta budaya kehidupan asrama yang berpotensi menjadi faktor pendukung maupun penghambat moderasi beragama.
 - c. Mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, program pembinaan, aturan kelembagaan, dan kegiatan yang mendukung implementasi moderasi beragama.
 - d. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung seperti budaya toleransi, keteladanan pembina, keterbukaan komunikasi, dukungan kebijakan institusi, serta lingkungan sosial yang inklusif.
 - e. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat seperti perbedaan latar belakang pemahaman keagamaan, keterbatasan pedoman pembinaan, potensi kesalahpahaman komunikasi, serta hambatan struktural lainnya yang ditemukan di lapangan.
 - f. Menganalisis hubungan antara faktor pendukung dan penghambat untuk memahami efektivitas penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural di lingkungan Ma'had.

- g. Menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung maupun menghambat penguatan moderasi beragama bagi mahasiswa non-Muslim.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

[illegible]

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pusat Ma'had al-Jami'ah

Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan lembaga pendukung pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai wahana pembinaan keagamaan, karakter, dan kepribadian mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Keberadaan Ma'had al-Jami'ah tidak hanya dimaksudkan sebagai tempat tinggal mahasiswa, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran integral yang memadukan aspek akademik, spiritual, sosial, dan kultural dalam satu lingkungan pendidikan.

Secara institusional, Pusat Ma'had al-Jami'ah berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki visi integrasi keilmuan dan keislaman. Visi tersebut tercermin dalam berbagai program Ma'had yang menekankan penguatan nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia serta memiliki wawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

Dalam konteks kehidupan berasrama, Pusat Ma'had al-Jami'ah menerapkan seperangkat aturan dan tata tertib yang mengatur aktivitas harian mahasantri, mulai dari kegiatan akademik, pembinaan keagamaan, hingga kehidupan sosial. Meskipun berlandaskan nilai-nilai Islam, kebijakan Ma'had dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang mahasiswa, termasuk keberadaan mahasantri non-Muslim

yang juga menjadi bagian dari komunitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷¹

Mahasantri non-Muslim yang tinggal di Pusat Ma'had al-Jami'ah umumnya merupakan mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang budaya. Keberadaan mereka di lingkungan Ma'had menciptakan dinamika sosial yang khas, di mana interaksi antarindividu berlangsung dalam kerangka keberagaman agama dan budaya. Kondisi ini menjadikan Ma'had al-Jami'ah sebagai ruang pertemuan multikultural yang menuntut adanya sikap saling menghormati, toleransi, dan keterbukaan antarwarga asrama.⁷²

Dalam praktiknya, pengelolaan Ma'had al-Jami'ah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh mahasantri tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan tertentu yang memberikan ruang aman bagi mahasantri non-Muslim untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus mendorong terbangunnya relasi sosial yang harmonis antara mahasantri Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembinaan keislaman, tetapi juga sebagai laboratorium sosial bagi praktik multikulturalisme dan moderasi beragama dalam konteks pendidikan tinggi Islam.⁷³

⁷¹ Observasi yang dilakukan peneliti di Pusat Ma'had al-Jami'ah, Kampus 1 UIN Malang, Kota Malang, tanggal 19 Februari 2026.

⁷² Observasi yang dilakukan peneliti di Mabna Ar-Razi, Kampus 2 UIN Malang, Kota Batu, tanggal 28 Februari 2026.

⁷³ Observasi yang dilakukan peneliti di Pusat Ma'had al-Jami'ah, Kampus 1 UIN Malang, Kota Malang, tanggal 28 Februari 2026.

2. Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

a. Sejarah dan Latar Belakang

Pusat Ma'had al-Jami'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bermula dari gagasan pembentukan lembaga pembinaan keagamaan yang terintegrasi dengan perguruan tinggi. Ide awal tersebut telah dipikirkan sejak periode kepemimpinan KH. Usman Manshur, namun realisasinya baru dapat terjadi ketika Prof. Dr. H. Imam Suprayogo menjabat sebagai Ketua STAIN Malang, sebelum institusi berkembang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembangunan Ma'had dimulai pada 4 April 1999 dengan pendirian beberapa unit bangunan hunian yang kemudian diresmikan penggunaannya pada 26 Agustus 2000, diikuti oleh serangkaian pembangunan fasilitas hunian untuk mahasantri putra dan putri hingga tahun 2006 serta penambahan unit Mabna pada tahun 2019. Keberadaan Ma'had ini kemudian ditandai dengan upaya memperkuat nilai sejarah keulamaan melalui penanaman tanah dari Wali Songo di area prasasti sebagai simbol urgensi perjuangan spiritual.⁷⁴

b. Landasan dan Peran dalam Pendidikan Islam

Secara kelembagaan, Ma'had al-Jami'ah merupakan bentuk penerapan kebijakan Kementerian Agama RI yang menetapkan bahwa setiap perguruan tinggi Islam menyelenggarakan Ma'had sebagai pusat pembinaan spiritual dan keagamaan bagi mahasiswa. Di UIN Malang, Ma'had ini berfungsi sebagai *platform* pendidikan nonformal yang bertujuan memperkuat fondasi nilai Islam pada mahasiswa baru melalui kegiatan asrama yang bersifat wajib selama dua semester di awal studi mereka. Fungsi ini menjadikan Ma'had bukan sekadar fasilitas hunian, tetapi sebagai wahana

⁷⁴ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

pembentukan karakter religius, pemahaman nilai keislaman yang moderat, dan kesiapan sosial spiritual mahasiswa dalam konteks masyarakat plural.⁷⁵

c. Implementasi Moderasi Beragama dan Pembinaan Qur'ani

Dalam kajian akademik, Ma'had al-Jami'ah diposisikan sebagai laboratorium alami penyemaian nilai moderasi beragama di lingkungan kampus. Konsep ini tercermin dalam pendekatan holistik yang menggabungkan pengkajian doktrin keislaman, pembiasaan ibadah, interaksi sosial lintas latar belakang, serta keterlibatan dalam aksi sosial. Melalui struktur aktivitas harian seperti *talaqqi*, diskusi, dan berbagai program keagamaan, mahasiswa tidak hanya dilatih secara kognitif dalam hal pengetahuan agama, tetapi juga spiritual dan sosial untuk membentuk pribadi yang moderat, toleran, dan inklusif.⁷⁶

d. Visi dan Misi Ma'had

1) Visi

Ma'had al-Jamiah unggul, modern dan terkemuka dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman dengan mempertahankan kekhasan tradisi pesantren tradisional yang moderat dan mengedepankan akhlak mulia.⁷⁷

2) Misi

- a) Melaksanakan pembelajaran al-Qur'an, bagi mahasantri, dengan pendekatan dan metode yang membisakan dan menyenangkan,
- b) Melaksanakan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, bagi mahasantri, dengan model dan pendekatan pesantren tradisional, yang mengutamakan pemahaman yang moderat,

⁷⁵ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁷⁶ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁷⁷ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

- c) Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang keagamaan, keilmuan dan seni,
- d) Mahasiswa berinteraksi sosial antar sesama dengan mengedepankan akhlak mulia.⁷⁸

e. Struktur Kepemimpinan dan Pengelolaan

Pusat Ma'had al-Jami'ah memiliki struktur kepengurusan yang dipimpin oleh seorang *Mudir*, yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan asrama serta program pendidikan keagamaan. Pengelolaan ini mencakup bidang-bidang yang ditugaskan secara fungsional, antara lain taklim keagamaan yang terdiri dari Taklim Afkar dan Taklim Qur'an, bidang bahasa seperti Shobahul Lughah, Shobahul Qur'an, serta aspek ibadah seperti shalat berjamaah, monitoring sosial keagamaan, *irsyadat*, yang masing-masing bidang memegang peran strategis dalam mengoperasionalkan visi pembentukan karakter dan kesiapan spiritual mahasiswa. Struktur ini berperan penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program pembinaan sesuai dengan tujuan pendidikan lembaga.⁷⁹

Tabel 4.1 *Mudir* Pusat Ma'had al-Jami'ah

Periode	<i>Mudir</i> Ma'had
2000 – 2006	TGB. Lalu A. Busyairi, MA
2006 – 2008	Drs. KH. Chamzawi, M.HI
2008 – 2017	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
2017 – 2021	Dr. H. Akhmad Muzakki, MA
2022 – 2024	Dr. H. Badruddin Muhammad, M. HI
2024 – Sekarang	Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

⁷⁸ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁷⁹ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Adapun struktur pengurus Pusat Ma'had Al-Jami'ah tahun akademik 2023-2024 sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Unsur Pimpinan Ma'had
- 2) Pimpinan Ma'had adalah *Mudir* yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 3) *Mudir* sebagai pimpinan Ma'had mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui model pendidikan pesantren di lingkungan Universitas.
- 4) Dalam menjalankan tugas-tugas di Ma'had, *Mudir* dibantu oleh para Pengasuh (Kiai dan Bu Nyai) yang bertugas sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ta'lim Afkar, Kabid Ta'lim al-Qur'an, Kabid Bahasa, Kabid Keamanan, Kabid Kesantrian, Kabid Ubudiyah dan Kabid Kerumahtanggaan.
- 5) Pengasuh (Kiai dan Bu Nyai) bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ma'had di masing-masing mabna.
- 6) Kepala Bidang Ta'lim Afkar bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ta'lim Afkar di Ma'had.
- 7) Kepala Bidang Ta'lim al-Qur'an bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ta'lim al-Qur'an di Ma'had.
- 8) Kepala Bidang Bahasa bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebahasaan di Ma'had.
- 9) Kepala Bidang Keamanan bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban di Ma'had.
- 10) Kepala Bidang Kesantrian bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesantrian di Ma'had.

⁸⁰ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

11) Kepala Bidang Ubudiyah bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ubudiyah di Ma'had.

12) Kepala Bidang Kerumahtanggaan bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerumahtanggaan di Ma'had.

f. Kegiatan Pembinaan dan Kultura Keislaman

Pusat Ma'had al-Jami'ah secara periodik melaksanakan kegiatan yang mendukung perkembangan karakter religius mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pembekalan awal (*ta'aruf Ma'had, ta'aruf mabna dan irsyadat*), *tashhih* dan *tahsin* al-Qur'an pembekalan moral keagamaan, pelatihan bahasa Arab dan Qur'ani, lomba kompetensi bahasa (Pemilihan Duta Bahasa), pemilihan *Muharrrik* dan *Muharrrikah*, hingga aksi sosial seperti penanaman pohon dan do'a bersama untuk korban bencana. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, kedisiplinan, serta rasa peduli terhadap segenap lapisan masyarakat, sehingga meneguhkan peran mahasantri dalam konteks nilai kemasyarakatan selain pengembangan keagamaan.⁸¹

g. Lingkungan Fasilitas dan Pembiasaan Asrama

Fasilitas yang disediakan oleh Ma'had al-Jami'ah berupa kompleks hunian asrama yang dirancang untuk mendukung kebiasaan hidup religius dan interaksi sosial yang intens di antara mahasantri. Lingkungan ini secara sengaja menciptakan suasana belajar yang kondusif dan kekeluargaan sehingga mahasiswa dapat berlatih disiplin, kepemimpinan, kerjasama, serta nilai-nilai keagamaan sehari-hari yang saling menopang dalam proses pembinaan karakter. Pendampingan oleh pengajar kompeten juga menjadi bagian integral dalam membentuk karakter mahasiswa yang unggul secara spiritual dan akademik.

⁸¹ Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

h. Relevansi terhadap Penelitian Moderasi Beragama

Pusat Ma'had al-Jami'ah berfungsi sebagai ruang praktis di mana nilai-nilai moderasi diuji dan diinternalisasi. Interaksi antara praktik ritual, kajian nilai, pembiasaan sosial, serta dialog antaranggota asrama menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana pembinaan lembaga ini berkontribusi terhadap pembentukan sikap moderat pada mahasiswa, terutama dalam mengharmoniskan identitas keagamaan dengan kehidupan akademik dan sosial kampus.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Moderasi Beragama dalam Praktik Kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak dapat dilepaskan dari berbagai aktivitas keagamaan Islam yang menjadi bagian integral dari kultur institusi. Aktivitas seperti shalat berjama'ah, taklim, maupun kajian keislaman merupakan bagian dari sistem pembinaan yang dijalankan dalam kehidupan asrama. Dalam konteks tersebut, keberadaan mahasantri non-Muslim menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan Ma'had. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana mahasantri non-Muslim memaknai serta merespons pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Ma'had.

a. Respons Mahasantri Non-Muslim terhadap Kegiatan Keagamaan Islam

Berdasarkan hasil wawancara, mahasantri non-Muslim menunjukkan sikap menghormati terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang berlangsung di lingkungan Ma'had. Sikap tersebut tercermin dari kesediaan mereka untuk memahami identitas Ma'had sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam serta

menyesuaikan diri dengan kultur yang berlaku dalam kehidupan asrama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Saya menanggapi kegiatan keagamaan Islam dengan sikap menghormati. Saya memahami bahwa Ma’had merupakan lingkungan berbasis Islam, sehingga saya menyesuaikan diri tanpa harus terlibat langsung dalam ibadah yang bersifat khusus, (RM. RM01. 01)”⁸²

“Menurut saya baik, karena itu sudah menjadi hak atau kewajiban bagi umat Muslim dan saya sebagai umat Kristiani harus menghargai itu, (AV. RM01. 02)”⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahasantri non-Muslim memandang kegiatan keagamaan Islam sebagai bagian dari hak sekaligus kewajiban umat Muslim. Kesadaran ini mendorong mereka untuk menempatkan diri secara proporsional dalam kehidupan bersama, yaitu dengan tetap menghormati pelaksanaan kegiatan keagamaan tanpa harus terlibat dalam praktik ibadah yang bersifat ritual.

Dalam perspektif moderasi beragama, sikap tersebut mencerminkan prinsip toleransi, yaitu kemampuan untuk menghargai praktik keagamaan orang lain tanpa harus mengikutinya. Mahasantri non-Muslim tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap kegiatan keagamaan Islam, namun juga tidak memaksakan diri untuk berpartisipasi dalam aktivitas ibadah yang bersifat eksklusif. Sikap ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap keyakinan orang lain dan konsistensi terhadap keyakinan pribadi, yang menjadi indikator penting dalam praktik moderasi beragama.

Di sisi lain, respons yang tampak harmonis tersebut juga tidak terlepas dari proses adaptasi sosial dalam lingkungan Ma’had yang didominasi oleh kultur Islam. Penyesuaian yang dilakukan oleh mahasantri non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan, di mana mereka

⁸² Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁸³ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

berupaya menjaga relasi sosial yang baik tanpa harus mengorbankan identitas keagamaannya.

Dengan demikian, respons mahasantri non-Muslim terhadap kegiatan keagamaan Islam tidak hanya bersifat pasif, tetapi mencerminkan bentuk moderasi beragama yang kontekstual. Sikap saling menghormati yang terbangun dalam kehidupan sehari-hari tersebut berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial serta memperkuat praktik multikulturalisme di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah.

Sebagai bagian dari dinamika tersebut, penting untuk melihat lebih lanjut bagaimana nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan Ma'had.

b. Pengalaman Mahasantri Non-Muslim terhadap Praktik Moderasi Beragama

Pengalaman hidup di lingkungan Ma'had memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, mahasantri non-Muslim merasakan suasana kehidupan asrama yang kondusif dan inklusif, di mana mereka dapat menjalani aktivitas tanpa adanya tekanan untuk mengikuti praktik keagamaan Islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Menurut saya, nilai moderasi beragama sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta tidak adanya pemaksaan keyakinan kepada non-Muslim, (RM. RM01. 03)”⁸⁴

“Kalau menurut saya bagus sekali, Kak. Kenapa saya katakan seperti itu, karena yang paling penting dalam hidup beragama itu harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, (AV. RM01. 04)”⁸⁵

⁸⁴ Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁸⁵ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahasantri non-Muslim tidak hanya menjadi objek dari kebijakan institusional, tetapi juga merasakan secara langsung praktik nilai-nilai moderasi beragama dalam interaksi sehari-hari. Tidak adanya pemaksaan keyakinan, disertai dengan sikap saling menghormati, menciptakan ruang sosial yang aman bagi mereka untuk menjalani kehidupan berasrama tanpa tekanan maupun perlakuan diskriminatif.

Dalam perspektif moderasi beragama, kondisi ini mencerminkan prinsip anti-pemaksaan dan penghormatan terhadap identitas keagamaan, yang menjadi fondasi penting dalam membangun relasi antarumat beragama yang sehat. Mahasantri non-Muslim dapat hidup berdampingan dengan mahasantri Muslim tanpa harus mengorbankan keyakinannya, sekaligus tetap terlibat dalam kehidupan sosial yang setara.

Namun demikian, pengalaman yang tampak harmonis tersebut juga perlu dipahami secara lebih kritis. Absennya pemaksaan secara formal tidak serta-merta meniadakan adanya proses penyesuaian sosial yang bersifat implisit. Dalam konteks lingkungan yang didominasi oleh kultur Islam, mahasantri non-Muslim secara tidak langsung tetap berhadapan dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap norma yang berlaku. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi sosial yang wajar dalam kehidupan komunitas yang plural.

Dengan demikian, praktik moderasi beragama di Ma'had dapat dikatakan berjalan secara efektif dalam menciptakan harmoni sosial, meskipun tetap menyimpan dinamika adaptasi yang tidak selalu tampak di permukaan. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi, anti-pemaksaan, dan penghormatan terhadap perbedaan tidak hanya hadir sebagai wacana normatif, tetapi telah terinternalisasi dalam pengalaman sosial mahasantri. Pada akhirnya, kondisi tersebut memperkuat

terbentuknya lingkungan yang inklusif serta mendukung terwujudnya kehidupan multikultural yang harmonis di Pusat Ma'had al-Jami'ah.

c. Perspektif Mahasantri Muslim terhadap Keberadaan Mahasantri Non-Muslim

Selain pengalaman mahasantri non-Muslim, penting untuk melihat bagaimana mahasantri Muslim memandang keberadaan rekan mereka yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Perspektif ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana nilai toleransi dan moderasi beragama terinternalisasi dalam komunitas mahasantri Muslim di lingkungan Ma'had.

Berdasarkan hasil wawancara, mahasantri Muslim pada umumnya memandang keberadaan mahasantri non-Muslim sebagai bagian dari realitas keberagaman yang bersifat positif. Keberadaan mereka tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keislaman, melainkan sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengalaman sosial.

“Saya melihat mereka sebagai saudara dalam kemanusiaan yang memperkaya warna intelektual dan spiritual di Ma'had, (FH. RM01. 05)”⁸⁶

“Aman saja menurut saya, dan saya dapat mengenal agama yang dianut teman saya seperti apa, dan begitu pun sebaliknya dia tahu seperti apa agama yang saya anut, (JI. RM01. 06)”⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi lintas agama dipahami sebagai ruang saling mengenal dan belajar, bukan sebagai sumber perbedaan yang harus dihindari. Pandangan ini kemudian tercermin dalam praktik hubungan sosial sehari-hari yang dilandasi oleh sikap empati, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

⁸⁶ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁸⁷ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

“Kami selalu mengedepankan adab, keramahan, dan empati dalam menghargai keyakinan mereka, yang mana itu adalah wujud nyata dari kematangan iman saya, (FH. RM01. 07)”⁸⁸

“Untuk menjaga hubungan baik, saya sangat-sangat toleran terhadap agama yang dianut teman saya, serta tidak ada paksaan untuk mengajak dia mengenal Islam, (JM. RM01. 08)”

Selain itu, suasana kehidupan Ma’had juga dipersepsikan sebagai lingkungan yang inklusif, di mana keberagaman dirangkul dalam semangat kebersamaan tanpa adanya pemaksaan dalam aspek keagamaan.

“Gaya hidup dan kegiatan di Ma’had sudah sangat mencerminkan keragaman latar belakang, semuanya dirangkul dalam semangat kebersamaan, (FH. RM01. 09)”

“Iya, karena Ma’had di sini tidak memaksa non-Muslim untuk mengikuti kegiatan Ma’had yang mengandung unsur-unsur Islam, (JI. RM01. 10)”⁸⁹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai toleransi tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi telah terimplementasi dalam praktik sosial yang nyata. Mahasantri Muslim tidak hanya menerima keberadaan mahasantri non-Muslim, tetapi juga berupaya aktif menjaga hubungan yang harmonis melalui sikap saling menghormati dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Dalam perspektif moderasi beragama, sikap ini mencerminkan prinsip *tasamuh* (toleransi) dan *i’tidal* (keseimbangan), yaitu kemampuan untuk tetap teguh dalam keyakinan agama sekaligus bersikap terbuka dalam relasi sosial lintas iman. Hal ini juga tampak dari pemahaman bahwa komitmen keagamaan tidak harus diwujudkan

⁸⁸ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁸⁹ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

dalam bentuk eksklusivitas, melainkan dapat berjalan beriringan dengan sikap inklusif dalam kehidupan bersama.

“Telah mendarah daging. Kami diajarkan teguh dalam keyakinan, namun lembut dalam pergaulan lintas iman, (FH. RM01. 11)”⁹⁰

“Iya, sangat baik, karena tidak ada paksaan atau penekanan untuk mengikuti, (JI. RM01. 12)”⁹¹

Namun demikian, jika ditinjau secara lebih kritis, pola toleransi yang berkembang cenderung berada pada ranah sosial-kultural dan belum sepenuhnya menyentuh dialog teologis yang lebih mendalam. Relasi yang terbangun lebih menekankan harmoni dan koeksistensi damai, dibandingkan dengan upaya pertukaran pemahaman keagamaan secara kritis dan reflektif.

Dengan demikian, perspektif mahasantri Muslim terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya penerimaan yang positif, yang diwujudkan dalam sikap toleran, empatik, dan inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai moderasi beragama, tetapi juga berkontribusi dalam membangun lingkungan Ma’had yang harmonis dan berlandaskan semangat multikulturalisme.

d. Peran *Musyrif* dan *Musyrifah* dalam Pendampingan Mahasantri

Dinamika hubungan sosial yang harmonis di lingkungan Ma’had tidak terlepas dari peran strategis para pembina asrama, seperti *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah*. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga kedisiplinan, tetapi juga berperan dalam membentuk pola interaksi sosial yang inklusif dan kondusif di tengah keberagaman latar belakang mahasantri.

⁹⁰ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁹¹ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, mahasantri non-Muslim merasakan adanya sikap profesional, terbuka, dan tidak diskriminatif dari para *musyrif* dan *musyrifah* dalam proses pendampingan.

“Musyrif dan musyrifah bersikap profesional, terbuka, dan menghargai keberadaan saya. Mereka memberikan arahan yang jelas terkait aturan Ma’had tanpa memaksakan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan saya, (RM. RM01. 13)”⁹²

“Sikap musyrif dan musyrifah sangat baik dan peduli terhadap saya tanpa adanya pilih kasih atau dibeda-bedakan karena berbeda keyakinan, (AV. RM01. 14)”⁹³

Selain itu, dari perspektif *musyrif* sendiri, keberadaan mahasantri non-Muslim dipandang sebagai bagian dari keterbukaan institusi sekaligus peluang untuk memahami realitas keberagaman secara lebih luas.

“Jujur, awalnya mungkin agak kaget, ya. Tapi, kalau menurutku pribadi, keberadaan mereka itu justru keren banget. Ma’had jadi tidak eksklusif. Ini bukti kalau kampus kita emang terbuka buat siapa saja. Malah jadi kesempatan buat kita semua belajar kalau perbedaan itu nyata, (MA. RM01. 15)”⁹⁴

“Tentu bagi saya ini informasi yang membanggakan untuk UIN dan Ma’had tersendiri, yang di mana kampus kita ini sangat welcome untuk non-Muslim, (MH. RM01. 16)”⁹⁵

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, prinsip kesetaraan juga tampak dalam penerapan aturan dan fasilitas asrama yang berlaku sama bagi seluruh mahasantri, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

“Kalau soal fasilitas, aturan kamar, atau kebersihan, semuanya sama rata. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Cuma memang ada penyesuaian di ibadah. Mahasantri Muslim kayak biasa ada jamaah dan taklim, nah yang non-Muslim kita kasih ruang buat beribadah sesuai keyakinannya dengan tidak ikut kegiatan jamaah

⁹² Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁹³ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁹⁴ M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁹⁵ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

dan juga taklim. Jadi, bedanya cuma di ranah ibadah saja, sisanya sama-sama saudara sekamar, (MA. RM01. 17)”⁹⁶

“Untuk peraturan tetap sama, tidak ada yang dibedakan, mungkin untuk kegiatan sehari-hari mereka baru berbeda dengan teman-temannya yang Muslim, (MH. RM01. 18)”⁹⁷

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *musyrif* dan *musyrifah* tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan ruang sosial yang adil dan inklusif. Pendampingan yang dilakukan tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan keberagaman latar belakang mahasantri, terutama dalam aspek keyakinan keagamaan. Arahan yang diberikan bersifat proporsional, tanpa adanya pemaksaan terhadap praktik keagamaan tertentu.

Dalam perspektif moderasi beragama, sikap ini mencerminkan prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan, dan toleransi aktif. Keadilan terlihat dari perlakuan setara dalam aspek sosial dan fasilitas, sementara keseimbangan tampak pada pembedaan yang tepat antara ranah sosial dan ranah ibadah. Adapun toleransi aktif tercermin dari upaya memberikan ruang bagi mahasantri non-Muslim untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan. Hal ini sejalan dengan prinsip multikulturalisme yang menekankan pengakuan (*recognition*) dan penerimaan terhadap keberagaman dalam kehidupan bersama.

Namun demikian, jika ditinjau secara kritis, respons awal berupa keterkejutan dari *musyrif* menunjukkan bahwa keberagaman agama masih merupakan fenomena yang relatif baru dalam konteks Ma'had. Meskipun demikian, proses adaptasi yang berlangsung cepat menunjukkan adanya fleksibilitas institusional dalam merespons perubahan sosial, sehingga potensi resistensi tidak berkembang menjadi sikap eksklusif.

⁹⁶ M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁹⁷ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Dengan demikian, peran *musyrif* dan *musyrifah* dapat dipahami sebagai faktor kunci dalam membangun iklim Ma'had yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendampingan yang profesional, terbuka, dan adaptif, mereka tidak hanya menjaga keteraturan kehidupan asrama, tetapi juga berkontribusi dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme dalam kehidupan mahasantri sehari-hari.

e. Dinamika Interaksi Sosial dalam Kehidupan Asrama

Kehidupan bersama dalam asrama membentuk dinamika interaksi sosial yang khas di antara mahasantri. Keharmonisan hubungan tidak terjadi secara otomatis, melainkan dibangun melalui komunikasi yang terbuka serta kesepakatan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kamar tidak sekadar dipahami sebagai ruang fisik, tetapi dimaknai sebagai “rumah bersama” yang menuntut adanya tanggung jawab kolektif untuk menjaga kenyamanan dan kebersamaan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Intinya atau kuncinya cuma satu sih, yakni komunikasi dan saling menghargai. Aku selalu tekankan di kamar kalau kamar ini adalah rumah bersama. Kita buat aturan main yang disepakati bareng, misalnya saling menjaga ketenangan pas ada yang lagi ibadah atau berdo’a, (MA. RM01. 19)”⁹⁸

“Sering menanyakan kabarnya hari ini, dan jika ada mahasantri yang membutuhkan tempat cerita, ya kita harus siap mendengarkannya, (MH. RM01. 20)”⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi fondasi utama dalam membangun relasi sosial yang sehat di lingkungan asrama. Melalui komunikasi yang terbuka, mahasantri dapat menyampaikan kebutuhan, perasaan, serta potensi permasalahan secara dialogis, sehingga mampu mencegah

⁹⁸ M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

⁹⁹ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

terjadinya kesalahpahaman. Di sisi lain, kesepakatan bersama yang dibangun dalam lingkup kamar, seperti menjaga ketenangan saat ibadah, mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk saling menghormati praktik keagamaan masing-masing.

Selain itu, interaksi sosial juga diperkuat melalui sikap saling peduli dalam bentuk perhatian sederhana, seperti menanyakan kabar dan kesediaan untuk menjadi tempat berbagi. Praktik ini menunjukkan bahwa relasi yang terbangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi emosional yang mempererat kebersamaan antar mahasantri.

Dalam perspektif multikulturalisme, pola interaksi ini mencerminkan adanya dialog, empati, dan pengakuan terhadap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Sementara itu, dalam kerangka moderasi beragama, praktik tersebut menunjukkan implementasi toleransi dalam bentuk penghormatan terhadap praktik keagamaan tanpa tuntutan keseragaman. Dengan demikian, keharmonisan sosial di Ma'had tidak dibangun melalui penyeragaman identitas, melainkan melalui komunikasi yang inklusif dan kesepakatan sosial yang disepakati bersama.

Lebih lanjut, dinamika interaksi ini juga tercermin dalam pengalaman konkret yang menunjukkan praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

“Ada, pas suatu malam acara muhadhoroh atau pendampingan bersama pengasuh yang bertempat di masjid, dampinganku yang non-Muslim ini juga ikut hadir dan menyimak hal-hal yang disampaikan oleh pengasuh. Ada juga saat di mana kami ada kumpul yang mengharuskan mengenakan baju putih dan sarung, lalu dampinganku yang non-Muslim ini dengan senang hati juga ikut menaati aturan itu, dan yang paling sering tidak mengajak teman-temannya yang Muslim ke hal-hal yang tidak-tidak, (MA. RM01. 21)”¹⁰⁰

“Ada, yaitu saling mengingatkan untuk beribadah, (MH. RM01. 22)”¹⁰¹

¹⁰⁰ M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹⁰¹ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk partisipasi sosial, penghormatan terhadap aturan bersama, serta pengendalian diri dalam interaksi lintas agama. Kesiapan mahasiswa non-Muslim untuk terlibat dalam kegiatan bersama, tanpa harus mengadopsi keyakinan yang berbeda, mencerminkan bentuk adaptasi sosial yang berorientasi pada keharmonisan. Sebaliknya, mahasiswa Muslim juga menunjukkan sikap toleran dengan tidak memaksakan keyakinan ataupun mengarahkan temannya pada aktivitas yang bertentangan dengan prinsip agama yang dianut.

Dalam konteks moderasi beragama, interaksi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk toleransi aktif, yaitu sikap saling menghormati yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Namun demikian, jika ditinjau secara lebih kritis, praktik tersebut juga membuka kemungkinan adanya konformitas sosial terhadap norma mayoritas. Oleh karena itu, batas antara toleransi dan penyesuaian sosial menjadi aspek yang perlu dipahami secara kontekstual dalam kehidupan komunitas yang plural.

Selain itu, praktik moderasi beragama di Ma'had juga dinilai telah terinternalisasi secara alami dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

“Menurutku sudah berjalan alami. Di sini moderasi itu bukan cuma seminar, tapi dipraktikkan langsung. Kita diajarin buat tetap teguh sama agama sendiri, tapi tetap bisa jadi teman yang asyik buat yang beda keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, tapi tetap bisa ngopi bareng, (MA. RM01. 23)”¹⁰²

“Dengan melihat keseharian mahasiswa tersebut, apakah sudah memenuhi dalam kriteria yang telah kita tentukan, (MH. RM01. 24)”¹⁰³

Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya hadir sebagai konsep normatif, tetapi telah menjadi bagian dari praktik sosial yang berkelanjutan. Mahasiswa mampu menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan

¹⁰² M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹⁰³ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

pribadi dan keterbukaan dalam interaksi sosial. Penilaian terhadap moderasi beragama pun tidak hanya didasarkan pada kepatuhan formal, tetapi juga pada perilaku nyata dan konsistensi sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dinamika interaksi sosial di Ma'had mencerminkan praktik moderasi beragama yang bersifat substantif dan aplikatif. Keharmonisan yang terbangun tidak hanya didukung oleh kebijakan institusional, tetapi juga oleh kesadaran kolektif mahasantri dalam mengelola perbedaan secara dewasa. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kehidupan asrama menjadi ruang strategis dalam menginternalisasikan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama secara nyata.

f. Peran *Murabbiah* dalam Pembinaan Mahasantri

Praktik moderasi beragama yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari mahasantri tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses pembinaan yang sistematis. Dalam konteks ini, *murabbiah* memiliki peran strategis sebagai pembina yang berinteraksi langsung dengan mahasantri, termasuk dalam membimbing mereka menghadapi keberagaman latar belakang keagamaan di lingkungan Ma'had.

Berdasarkan hasil wawancara, pendampingan yang dilakukan *murabbiah* bersifat inklusif dan menekankan pada pembinaan karakter serta kedisiplinan, tanpa mengabaikan perbedaan keyakinan.

“Pendampingan terhadap mahasantri non-Muslim dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan humanis. Mereka tetap mengikuti aturan umum kehidupan di Ma'had seperti disiplin waktu, kebersihan, dan kegiatan sosial bersama. Namun, dalam kegiatan yang bersifat ritual keagamaan Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti secara langsung. Pendampingan lebih diarahkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, serta penanaman nilai saling menghormati antaragama, (SA. RM01. 25)”¹⁰⁴

¹⁰⁴ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah* Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Malang, 30 Maret 2026.

Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang bersifat kontekstual, khususnya dalam membedakan kewajiban antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim.

“Tentu ada, pada kegiatan yang bersifat khusus keagamaan seperti shalat berjamaah atau kajian keislaman tertentu, diberikan penyesuaian. Jika mahasiswa Muslim mendapat kewajiban mengikuti shalat berjamaah di masjid, namun mahasiswa non-Muslim tidak mendapat kewajiban tersebut. Hanya saja, kami melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut, (SA. RM01. 26)”¹⁰⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *murabbiah* tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan dalam mengelola keberagaman secara proporsional. Penyesuaian dalam kegiatan keagamaan bukan dimaknai sebagai bentuk pembedaan yang diskriminatif, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap keyakinan individu dan keteraturan kehidupan bersama di Ma’had.

Lebih lanjut, *murabbiah* juga mengamati bahwa interaksi sosial antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim berlangsung secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

“Mahasantri Muslim menunjukkan sikap yang cukup baik dan terbuka terhadap teman-teman non-Muslim. Mereka dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga etika pergaulan. Biasanya mereka makan di kantin bareng-bareng, nongkrong dengan menyanyi beberapa lagu sambil main gitar, dan bahkan sering main futsal bareng. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan dalam kemanusiaan, (SA. RM01. 27)”¹⁰⁶

“Secara umum kehidupan sosial di Ma’had berjalan cukup harmonis. Mahasantri dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi dengan baik dalam kegiatan sehari-hari. Meski demikian, tetap diperlukan pembinaan yang

¹⁰⁵ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

¹⁰⁶ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

berkelanjutan agar nilai kebersamaan, toleransi, dan kedisiplinan terus terjaga, (SA. RM01. 28)”¹⁰⁷

Temuan ini menunjukkan bahwa peran *murabbiah* tidak hanya terbatas pada pembinaan individual, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap dinamika sosial yang berkembang di lingkungan Ma’had. Keharmonisan yang terbangun dipahami sebagai hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, bukan sebagai kondisi yang terbentuk secara alami tanpa intervensi.

Dalam perspektif moderasi beragama, pola pembinaan ini mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi aktif. *Murabbiah* tidak memaksakan praktik keagamaan tertentu, namun tetap memastikan bahwa setiap mahasantri menjalankan kewajiban sesuai keyakinannya. Hal ini sejalan dengan nilai multikulturalisme yang menekankan pengakuan terhadap perbedaan sekaligus menjaga kohesi sosial dalam kehidupan bersama.

Namun demikian, jika ditinjau secara kritis, pendekatan pembinaan yang menekankan harmoni sosial berpotensi lebih dominan dibandingkan dengan pengembangan dialog keagamaan yang lebih reflektif. Artinya, interaksi yang terbangun cenderung berorientasi pada kebersamaan dan stabilitas sosial, sementara ruang untuk pertukaran pemahaman keagamaan secara mendalam masih relatif terbatas.

Dengan demikian, peran *murabbiah* dapat dipahami sebagai elemen kunci dalam menginternalisasikan nilai moderasi beragama di Ma’had. Melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, *murabbiah* tidak hanya membentuk kedisiplinan dan karakter mahasantri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, toleran, dan berlandaskan semangat

¹⁰⁷ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah* Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

multikulturalisme. Sebagai implikasinya, penting untuk meninjau lebih lanjut landasan nilai keislaman yang menjadi dasar dalam praktik penerimaan terhadap keberagaman tersebut.

g. Landasan Nilai Islam dalam Penerimaan Keberagaman

Kehidupan multikultural di Ma'had tidak hanya terbentuk melalui praktik sosial, tetapi juga berakar pada landasan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan dan keterbukaan terhadap keberagaman. Prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menjadi pijakan utama dalam membangun relasi sosial yang inklusif, yang kemudian diterjemahkan dalam konsep etis seperti *ukhuwah insaniyah* sebagai dasar persaudaraan universal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Sebenarnya prinsip dasarnya kan رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (QS. al-Anbiya ayat 107) sebagai prinsip naqlinya, bahwa Islam itu harus menjadi rahmat bagi semesta. Selain itu, UIN ini kan institusi negeri, kita dapat anggaran dari negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka siapa pun setiap individu yang memenuhi kualifikasi akademik menjadi mahasiswa di UIN ya diterima, (AI. RM01. 29)”¹⁰⁸

Selain itu, pemaknaan terhadap konsep *ukhuwah insaniyah* juga ditegaskan sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial di lingkungan Ma'had.

“Konsep ukhuwah insaniyah dimaknai oleh Ma'had sebagai prinsip persaudaraan kemanusiaan yang menempatkan seluruh manusia pada derajat yang setara tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang budaya. Dalam konteks kehidupan pesantren kampus yang multikultural, prinsip ini diwujudkan melalui penciptaan ruang hidup bersama yang berlandaskan saling menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengedepankan akhlak dalam interaksi sosial, (AI. RM01. 30)”¹⁰⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap keberagaman di Ma'had tidak bersifat pragmatis semata, tetapi memiliki landasan teologis dan etis

¹⁰⁸ Ahmad Izzuddin (Mudir Pusat Ma'had al-Jami'ah), Wawancara, Kota Malang, 19 Februari 2026.

¹⁰⁹ Ahmad Izzuddin (Mudir Pusat Ma'had al-Jami'ah), Wawancara, Kota Malang, 19 Februari 2026.

yang kuat. Prinsip *rahmatan lil 'alamin* menegaskan bahwa ajaran Islam mendorong sikap inklusif dan penghormatan terhadap seluruh manusia, sementara konsep *ukhuwah insaniyah* menjadi kerangka praktis dalam mewujudkan relasi sosial yang setara di tengah perbedaan.

Dalam perspektif multikulturalisme, landasan ini mencerminkan adanya pengakuan (*recognition*) terhadap pluralitas serta penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Sementara itu, dalam kerangka moderasi beragama, prinsip tersebut menunjukkan keseimbangan antara komitmen terhadap nilai keislaman dan keterbukaan terhadap realitas sosial yang beragam. Dengan demikian, penerimaan mahasiswa non-Muslim tidak dipandang sebagai penyimpangan dari nilai keislaman, melainkan sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam yang inklusif dan humanis.

Lebih lanjut, sebagai institusi pendidikan negeri, Ma'had juga mengintegrasikan nilai keislaman dengan tanggung jawab kebangsaan dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh mahasiswa. Hal ini memperkuat bahwa praktik keberagaman di Ma'had tidak hanya berlandaskan nilai religius, tetapi juga nilai konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, jika ditinjau secara kritis, penerapan nilai-nilai tersebut masih lebih banyak berorientasi pada pembentukan harmoni sosial dan belum sepenuhnya diarahkan pada pengembangan dialog lintas agama yang lebih reflektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun landasan nilai sudah kuat, ruang penguatan pemahaman antaragama secara lebih mendalam masih dapat dikembangkan dalam konteks pendidikan multikultural di Ma'had.

Dengan demikian, landasan nilai Islam seperti *rahmatan lil 'alamin* dan *ukhuwah insaniyah* menjadi fondasi utama dalam membangun penerimaan terhadap

keberagaman di Ma'had. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah diimplementasikan dalam kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat praktik moderasi beragama dalam lingkungan pesantren kampus.

h. Pandangan Pimpinan Ma'had terhadap Kehidupan Multikultural

Pandangan pimpinan Ma'had menjadi aspek penting dalam memahami arah kebijakan dan praktik kehidupan multikultural di lingkungan asrama. Perspektif kelembagaan ini tidak hanya menentukan pola penerimaan terhadap keberagaman, tetapi juga memengaruhi bagaimana nilai moderasi beragama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mahasantri.

Berdasarkan hasil wawancara, pimpinan Ma'had memandang keberadaan mahasantri non-Muslim sebagai bagian dari misi pendidikan Islam yang inklusif, bukan sebagai sarana dakwah yang berorientasi pada konversi keyakinan.

“Penerimaan mahasantri non-Muslim di Ma'had lebih diposisikan sebagai bagian dari misi pendidikan Islam yang inklusif, bukan dakwah dalam pengertian konversi keyakinan. Ma'had memandang pendidikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, karakter, dan akhlak mulia yang tidak dibatasi oleh identitas agama tertentu. Nilai-nilai Islam dihadirkan melalui pendekatan kultural yang humanis, keteladanan sikap, serta keterbukaan terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, keberadaan mahasantri non-Muslim justru menjadi bagian dari dakwah kultural yang menampilkan Islam sebagai agama yang ramah, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara universal, (AI. RM01. 31)”¹¹⁰

Selain itu, dalam praktik kelembagaan, belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) khusus yang secara teknis mengatur pembinaan mahasantri non-Muslim.

¹¹⁰ Ahmad Izzuddin (Mudir Pusat Ma'had al-Jami'ah), Wawancara, Kota Malang, 19 Februari 2026.

“Pernah ada dari Wakil Rektor 1, sudah pernah ditanyakan tapi tidak disebar bagaimana teknisnya. Sampai sekarang kita tidak punya teknis bagaimana memperlakukan mahasantri non-Muslim di Ma’had. Tapi mengalir saja, apa yang harus mereka lakukan dan mereka tidak lakukan, tidak bisa kita paksa mereka untuk mengikuti taklim atau sebagainya, (AI. RM01. 31)”¹¹¹

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman di Ma’had lebih bersifat fleksibel dan kontekstual. Ketiadaan SOP khusus tidak serta-merta menghambat praktik kehidupan multikultural, karena terdapat prinsip umum yang menjadi acuan, seperti non-pemaksaan dalam aktivitas keagamaan serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.

Lebih lanjut, prinsip tersebut tercermin dalam pengaturan aktivitas keagamaan yang bersifat proporsional.

“Pada prinsipnya, Ma’had tidak memberikan pembatasan yang bersifat represif terhadap aktivitas keagamaan non-Muslim. Namun, aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap nilai, norma, dan kultur Ma’had sebagai lembaga pendidikan Islam. Mahasantri non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ibadah Islam, tetapi juga diharapkan menjaga sensitivitas sosial serta tidak melakukan aktivitas keagamaan yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan bersama di lingkungan asrama, (AI. RM01. 32)”¹¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya institusional dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dengan pemeliharaan tatanan sosial. Mahasantri non-Muslim diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya, namun tetap diharapkan menjaga sensitivitas sosial agar tidak mengganggu harmoni kehidupan bersama.

Dalam perspektif moderasi beragama, pendekatan ini mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawazun*) antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Sementara itu, dalam kerangka multikulturalisme, praktik ini menunjukkan adanya

¹¹¹ Ahmad Izzuddin (*Mudir Pusat Ma’had al-Jami’ah*), *Wawancara*, Kota Malang, 19 Februari 2026.

¹¹² Ahmad Izzuddin (*Mudir Pusat Ma’had al-Jami’ah*), *Wawancara*, Kota Malang, 19 Februari 2026.

pengakuan terhadap keberagaman yang diiringi dengan pengaturan sosial untuk menjaga kohesi komunitas. Dengan demikian, kehidupan multikultural di Ma'had tidak hanya bersifat permisif, tetapi juga terkelola dalam batas-batas normatif yang disepakati bersama.

Di sisi lain, pimpinan Ma'had juga menilai bahwa kehidupan sosial antar mahasantri telah berjalan secara harmonis tanpa konflik yang berarti.

“Saya pantau betul, saya tanya musyrif dan musyrifah itu apakah ada problem terkait mahasantri non-Muslim, baik antara mahasantri Muslim kepada non-Muslim, atau sebaliknya. Sampai saat ini tidak ada kendala sama sekali, dan insyaallah mahasantri kita sudah mengerti bagaimana mereka harus berinteraksi dan membangun komunikasi persahabatan dengan mahasiswa lintas kultural bahkan lintas agama, (AI. RM01. 33)”¹¹³

Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai moderasi beragama telah terinternalisasi dalam pola interaksi mahasantri. Relasi sosial yang terbangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kemampuan adaptasi dan komunikasi lintas budaya yang baik.

Namun demikian, jika ditinjau secara kritis, ketiadaan SOP khusus berpotensi menimbulkan variasi praktik pembinaan di lapangan, tergantung pada interpretasi masing-masing pembina. Fleksibilitas yang ada memang memberi ruang adaptasi, tetapi juga memerlukan penguatan dalam bentuk pedoman yang lebih sistematis agar keberhasilan yang telah dicapai dapat terjaga secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pandangan pimpinan Ma'had menunjukkan bahwa kehidupan multikultural dipahami sebagai bagian integral dari misi pendidikan Islam yang inklusif dan humanis. Praktik pengelolaan yang fleksibel, didukung oleh prinsip non-pemaksaan dan penghormatan terhadap perbedaan, telah berhasil menciptakan

¹¹³ Ahmad Izzuddin (*Mudir Pusat Ma'had al-Jami'ah*), *Wawancara*, Kota Malang, 19 Februari 2026.

relasi sosial yang harmonis di lingkungan Ma'had. Ke depan, penguatan aspek kelembagaan melalui perumusan kebijakan yang lebih terstruktur menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan praktik moderasi beragama dalam konteks pendidikan berbasis asrama.

2. Pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim dalam menjalani kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

a. Alasan Memilih Tinggal di Ma'had Meskipun Berstatus Non-Muslim

Keputusan mahasantri non-Muslim untuk tinggal di Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan aspek penting dalam memahami pengalaman sosial, kultural, dan religius mereka di lingkungan berbasis keislaman. Pilihan ini tidak semata-mata didorong oleh kewajiban institusional, tetapi juga melibatkan pertimbangan personal yang berkaitan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pengalaman hidup dalam keberagaman. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Saya memilih tinggal di Ma'had al-Jami'ah karena pertimbangan fasilitas, kedisiplinan, dan lingkungan akademik yang mendukung pembentukan karakter. Selain itu, saya melihat Ma'had sebagai ruang belajar toleransi dan keberagaman, sehingga menjadi pengalaman sosial yang berharga bagi saya sebagai non-Muslim, (RM. RM02. 34)”¹¹⁴

Senada dengan pernyataan tersebut, informan lain juga menyampaikan bahwa:

“Alasannya yang pertama karena diwajibkan selama satu tahun, dan yang kedua kalau memang tidak diwajibkan, saya juga tetap memilih tinggal di Ma'had karena menurut saya dengan tinggal di asrama itu kita bisa belajar mengatur waktu, dan kita juga belajar tentang toleransi karena di mana kita berasal dari daerah, suku, ras, dan agama yang berbeda, (AV. RM02. 35)”¹¹⁵

¹¹⁴ Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹¹⁵ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Berdasarkan data tersebut, dapat dideskripsikan bahwa alasan tinggal di Ma'had tidak hanya bersifat struktural, seperti kewajiban, fasilitas, dan sistem kedisiplinan, tetapi juga mencerminkan dimensi edukatif yang lebih luas. Mahasantri non-Muslim memandang Ma'had sebagai ruang yang mendukung pengembangan karakter, kemampuan manajemen waktu, serta tanggung jawab personal. Selain itu, keberagaman latar belakang penghuni asrama menciptakan ruang interaksi sosial yang intens dan beragam, yang memperkaya pengalaman hidup mereka.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan adanya dua motif utama, yaitu motif struktural-instrumental (kewajiban institusional, fasilitas, dan kedisiplinan) serta motif reflektif-edukatif (pembelajaran toleransi dan pengalaman multikultural). Keberadaan motif kedua menandakan bahwa mahasantri non-Muslim tidak hanya bersikap adaptif terhadap sistem, tetapi juga memiliki kesadaran reflektif dalam memaknai Ma'had sebagai ruang pembelajaran sosial.

Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini menunjukkan bahwa Ma'had dipersepsikan sebagai ruang interaksi lintas identitas yang inklusif, bukan sebagai ruang dominasi kelompok mayoritas. Interaksi yang terjadi memungkinkan proses saling memahami (*mutual understanding*) dan pengakuan terhadap perbedaan sebagai realitas sosial. Sementara itu, dalam kerangka moderasi beragama, pilihan untuk tetap tinggal di Ma'had, bahkan di luar kewajiban mencerminkan adanya kepercayaan terhadap iklim sosial yang toleran dan tidak eksklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi yang menekankan keseimbangan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan bahwa praktik moderasi beragama di lingkungan Ma'had tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi telah terinternalisasi dalam pengalaman keseharian mahasantri. Keputusan tinggal di Ma'had menjadi

bentuk konkret dari penerimaan terhadap ruang hidup yang plural sekaligus menunjukkan adanya rasa aman sosial (*social trust*) di tengah perbedaan identitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan mahasantri non-Muslim memilih tinggal di Ma'had merupakan kombinasi antara tuntutan struktural dan kesadaran personal yang bersifat edukatif. Hal ini sekaligus menegaskan peran Ma'had sebagai ruang pembelajaran karakter dan laboratorium sosial bagi praktik multikulturalisme dan moderasi beragama. Temuan ini menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut bagaimana pengalaman hidup di Ma'had membentuk sikap dan interaksi mahasantri dalam konteks keberagaman.

b. Kesan Pertama ketika Memasuki Lingkungan Ma'had

Kesan pertama mahasantri non-Muslim ketika memasuki lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan fase awal yang krusial dalam proses adaptasi terhadap kehidupan berasrama yang berciri religius. Tahap ini menjadi titik awal terbentuknya persepsi, rasa aman, serta kesiapan individu dalam menghadapi perbedaan lingkungan sosial dan keagamaan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Kesan pertama saya adalah lingkungan Ma'had terasa religius, tertib, dan terstruktur. Awalnya saya merasa canggung karena perbedaan keyakinan, namun suasana yang ramah dan sikap terbuka dari penghuni Ma'had membuat saya merasa lebih tenang dan diterima, (RM. RM02. 36)”¹¹⁶

Informan lain juga menyampaikan pengalaman serupa:

“Kesan saya jujur, saya merasa senang, nyaman, karena kakak musyrif/ah di asrama menyambut kedatangan saya dengan sangat ramah, dan juga suasana di asrama juga sungguh menyenangkan, (AV. RM02. 37)”¹¹⁷

¹¹⁶ Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹¹⁷ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Berdasarkan data tersebut, kesan awal yang muncul didominasi oleh persepsi terhadap lingkungan yang religius, tertib, dan terstruktur. Kondisi ini pada tahap awal memunculkan rasa canggung, terutama karena adanya perbedaan keyakinan. Namun demikian, kesan tersebut tidak berkembang menjadi hambatan yang signifikan, melainkan mengalami pergeseran seiring dengan pengalaman interaksi awal yang positif.

Secara deskriptif, sikap ramah dan keterbukaan dari *musyrif/musyrifah* serta penghuni asrama menjadi faktor kunci dalam membentuk rasa nyaman dan diterima. Proses penyambutan yang humanis menciptakan suasana yang kondusif bagi mahasantri non-Muslim untuk menyesuaikan diri. Interaksi awal ini berperan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan psikososial di tengah lingkungan yang berbeda secara identitas keagamaan.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa fase awal adaptasi tidak hanya ditentukan oleh karakter lingkungan (religius dan terstruktur), tetapi juga oleh kualitas relasi sosial yang terbangun. Dalam perspektif moderasi beragama, kondisi ini mencerminkan praktik inklusivitas yang menekankan keseimbangan antara identitas keagamaan dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sementara dalam kerangka multikulturalisme, interaksi awal yang positif merepresentasikan proses pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara konstruktif.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa lingkungan religius tidak secara otomatis melahirkan eksklusivitas. Sebaliknya, ketika nilai-nilai keterbukaan diinternalisasikan dalam praktik sosial sehari-hari, lingkungan tersebut justru mampu menghadirkan proses adaptasi yang inklusif. Fenomena ini dapat dipahami sebagai

bentuk *soft landing*, di mana individu dari latar belakang berbeda dapat memasuki ruang sosial baru tanpa mengalami tekanan identitas yang berlebihan.

Dengan demikian, kesan pertama mahasantri non-Muslim di Ma'had menunjukkan pergeseran dari rasa canggung menuju kenyamanan melalui interaksi sosial yang positif. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi awal sangat dipengaruhi oleh praktik penerimaan sosial yang inklusif. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika pengalaman selanjutnya, khususnya dalam proses interaksi dan internalisasi nilai-nilai keberagaman di lingkungan Ma'had.

c. Bentuk Interaksi Sehari-Hari dengan Mahasantri Muslim

Interaksi sehari-hari antara mahasantri non-Muslim dan mahasantri Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan bagian penting dalam membentuk pengalaman sosial dalam konteks keberagaman. Intensitas pertemuan yang tinggi dalam kehidupan berasrama menjadikan interaksi ini sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai sosial, khususnya terkait sikap saling menghormati dan hidup berdampingan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Interaksi saya dengan mahasantri Muslim berjalan dengan baik dan bersifat saling menghormati. Kami berkomunikasi secara normal dalam kegiatan sehari-hari seperti belajar, diskusi, dan aktivitas sosial tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan, (RM. RM02. 38)”¹¹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya:

“Bentuk interaksi, di mana salah satunya saling menghargai dan menghormati satu sama lain karena di mana kita berbeda keyakinan dan masih banyak lagi, (AV. RM02. 39)”¹¹⁹

¹¹⁸ Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹¹⁹ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Berdasarkan data tersebut, interaksi yang terjalin berlangsung secara natural dalam berbagai aktivitas keseharian, seperti belajar, diskusi akademik, dan kegiatan sosial di asrama. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang dalam membangun komunikasi maupun kerja sama, melainkan dikelola sebagai bagian dari realitas kehidupan bersama. Relasi yang terbentuk menunjukkan pola hubungan yang setara dan tidak hierarkis.

Secara analitis, temuan ini menegaskan bahwa interaksi sosial di Ma'had tidak berhenti pada toleransi pasif, tetapi berkembang menuju penerimaan aktif terhadap keberagaman. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan adanya pengakuan (*recognition*) dan penghormatan terhadap identitas yang berbeda dalam ruang sosial yang sama. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, pola interaksi tersebut menunjukkan praktik keseimbangan (*tawazun*) dan sikap tengah (*wasathiyah*), di mana perbedaan tidak dihilangkan, tetapi dikelola secara konstruktif dalam kehidupan bersama.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa keharmonisan interaksi ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan dibentuk oleh kesadaran kolektif untuk menjaga kenyamanan bersama. Sikap saling menghargai berfungsi sebagai norma sosial yang diinternalisasikan, sehingga interaksi berlangsung tanpa ketegangan yang berarti. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang sosial yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberagaman itu sendiri, tetapi oleh bagaimana keberagaman tersebut dikelola dalam praktik keseharian.

Dengan demikian, bentuk interaksi sehari-hari antara mahasantri non-Muslim dan Muslim di Ma'had mencerminkan relasi sosial yang harmonis, setara, dan inklusif. Interaksi ini menjadi bukti konkret bahwa lingkungan asrama mampu berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang efektif dalam menumbuhkan sikap moderat

dan menghargai perbedaan. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk memahami dinamika yang lebih kompleks dalam relasi sosial dan pengalaman keberagaman di lingkungan Ma'had.

d. Pengalaman Penerimaan dan Penghargaan terhadap Perbedaan di Lingkungan Ma'had

Pengalaman penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan merupakan aspek penting dalam menggambarkan kualitas relasi sosial di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Bagi mahasantri non-Muslim, pengalaman ini menjadi indikator utama sejauh mana lingkungan asrama mampu menghadirkan ruang yang aman, adil, dan inklusif di tengah perbedaan identitas keagamaan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Ya, saya merasa diterima dan dihargai. Hal ini terlihat dari sikap teman-teman dan pengelola Ma'had yang tidak membedakan perlakuan, serta tetap memberikan ruang bagi saya untuk menjalankan keyakinan pribadi, (RM. RM02. 40)”¹²⁰

Informan lain juga menyatakan:

“Iya, saya merasa sangat dihargai karena saya diperlakukan dengan baik dan adil oleh kakak-kakak musyrif/ah maupun sesama teman tanpa adanya pilih kasih, dan tanpa memandang latar belakang dan perbedaan, (AV. RM02. 41)”¹²¹

Mahasantri non-Muslim merasakan adanya penerimaan dan penghargaan yang nyata terhadap perbedaan identitas keagamaan di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Pengalaman tersebut tercermin dari perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, baik dari sesama mahasantri maupun dari pihak pengelola Ma'had. Kesetaraan dalam perlakuan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mahasantri non-Muslim dalam menjalani kehidupan asrama.

¹²⁰ Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹²¹ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Berdasarkan data tersebut, penerimaan terhadap mahasantri non-Muslim diwujudkan melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam penerapan aturan asrama. Selain itu, adanya ruang bagi individu untuk menjalankan keyakinan pribadi menunjukkan bahwa penghormatan terhadap perbedaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga terimplementasi dalam praktik keseharian.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa relasi sosial di Ma'had dibangun di atas prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak individu. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan adanya pengakuan (*recognition*) terhadap identitas yang berbeda sekaligus jaminan kesetaraan dalam ruang sosial bersama. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, pengalaman ini merepresentasikan sikap inklusif dan non-diskriminatif yang menjadi inti dari praktik keberagamaan yang moderat, di mana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas yang harus dihormati.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa penerimaan yang dirasakan tidak berhenti pada level interpersonal, tetapi juga didukung oleh sikap institusional yang memberi ruang kebebasan beragama. Hal ini penting, karena tanpa dukungan struktur sosial yang adil, penerimaan cenderung bersifat sporadis. Dalam konteks ini, Ma'had menunjukkan adanya keselarasan antara nilai yang dianut dan praktik yang dijalankan, sehingga menciptakan rasa aman (*sense of belonging*) bagi mahasantri non-Muslim sebagai bagian dari komunitas.

Dengan demikian, pengalaman penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan di Ma'had mencerminkan terciptanya lingkungan sosial yang inklusif, adil, dan menghormati hak individu. Kondisi ini tidak hanya memperkuat kenyamanan mahasantri non-Muslim, tetapi juga menegaskan peran Ma'had sebagai ruang

pendidikan yang mampu menginternalisasikan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama secara nyata. Temuan ini selanjutnya menjadi pijakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dipertahankan dan dikembangkan dalam dinamika kehidupan asrama.

e. Peran Teman Muslim dalam Membantu atau Mendukung Aktivitas di Ma’had

Dalam proses adaptasi kehidupan berasrama di Pusat Ma’had al-Jami’ah, keberadaan teman-teman Muslim menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kenyamanan dan keberhasilan mahasantri non-Muslim dalam menyesuaikan diri. Interaksi sehari-hari yang intens membuka ruang bagi terbentuknya relasi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga suportif dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

“Teman-teman Muslim cukup membantu, baik dalam hal akademik maupun kehidupan sehari-hari. Mereka sering memberi penjelasan tentang aturan Ma’had dan membantu saya beradaptasi dengan lingkungan baru, (RM. RM02. 42)”¹²²

Informan lain juga menyampaikan bahwa:

“Mereka meyakinkan saya bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang bagi masa depan kita, (AV. RM02. 43)”¹²³

Berdasarkan data tersebut, peran teman Muslim tampak dalam dua bentuk utama, yaitu dukungan praktis dan dukungan psikososial. Secara praktis, bantuan diberikan dalam bentuk penjelasan mengenai aturan, kebiasaan, dan sistem kehidupan di Ma’had, yang memudahkan proses adaptasi mahasantri non-Muslim. Sementara itu, secara psikososial, dukungan tercermin dalam sikap yang menenangkan, meyakinkan, dan mendorong kepercayaan diri, sehingga individu tidak merasa terpinggirkan dalam lingkungan yang berbeda secara identitas.

¹²² Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹²³ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa relasi antarmahasantri tidak bersifat netral, melainkan memiliki fungsi fasilitatif dalam proses integrasi sosial. Dalam perspektif multikulturalisme, peran tersebut mencerminkan praktik solidaritas lintas identitas yang menempatkan perbedaan sebagai dasar untuk saling menguatkan, bukan memisahkan. Adapun dalam kerangka moderasi beragama, sikap yang menegaskan bahwa perbedaan bukan penghalang menunjukkan internalisasi nilai inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman dalam relasi horizontal.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi mahasantri non-Muslim tidak hanya ditentukan oleh kebijakan institusional, tetapi juga oleh kualitas interaksi interpersonal di tingkat akar rumput. Teman sebaya berperan sebagai “agen sosial” yang menjembatani pemahaman, mengurangi kecanggungan, dan mempercepat proses penerimaan. Hal ini menegaskan bahwa praktik moderasi beragama tidak hanya berlangsung secara struktural, tetapi juga dihidupi melalui relasi sehari-hari yang konkret.

Dengan demikian, peran teman Muslim dalam mendukung aktivitas mahasantri non-Muslim di Ma’had mencerminkan adanya relasi yang suportif, setara, dan inklusif. Dukungan yang diberikan, baik secara praktis maupun psikososial, berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi adaptasi dan partisipasi aktif. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa interaksi antarmahasantri merupakan elemen kunci dalam membangun iklim multikultural dan moderat di lingkungan Ma’had.

f. Pengalaman Mahasantri Muslim Berinteraksi dengan Mahasantri Non-Muslim dalam Kehidupan Sehari-Hari

Interaksi antara mahasantri Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan sehari-hari di Pusat Ma’had al-Jami’ah tidak hanya mencerminkan keberadaan relasi sosial,

tetapi juga menunjukkan kualitas hubungan yang terbangun dalam konteks keberagaman. Aktivitas bersama, baik yang bersifat akademik maupun informal, menjadi ruang utama terjadinya interaksi lintas identitas tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

*“Interaksi kami sangat cair dan hangat, kami berteman tanpa sekat, saling bantu dalam akademik, dan berbagi tawa dalam keseharian asrama, (FH. RM02. 44)”*¹²⁴

Informan lain juga menambahkan:

*“Sangat asyik, baik, tidak ada rasis di antara kita, dan kita saling mengingatkan satu sama lain ketika waktunya beribadah, (JI. RM02. 45)”*¹²⁵

Berdasarkan data tersebut, interaksi yang terjalin ditandai oleh suasana yang cair, hangat, dan tidak berjarak. Mahasantri Muslim dan non-Muslim terlibat dalam berbagai aktivitas bersama, seperti belajar, berdiskusi, hingga kegiatan informal, tanpa menjadikan perbedaan keyakinan sebagai batas sosial. Bahkan, interaksi tersebut berkembang dalam bentuk saling membantu dan berbagi pengalaman keseharian.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk telah melampaui tahap koeksistensi menuju hubungan yang inklusif dan partisipatif. Istilah “tanpa sekat” dan “tidak ada rasis” mengindikasikan bahwa identitas keagamaan tidak menjadi dasar pembentukan jarak sosial. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan interaksi integratif yang menempatkan perbedaan sebagai bagian dari relasi sosial yang saling menguatkan. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, pola interaksi tersebut menunjukkan internalisasi nilai *wasathiyah*, di mana

¹²⁴ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹²⁵ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

sikap terbuka dan penghormatan terhadap perbedaan diwujudkan dalam praktik keseharian.

Menariknya, terdapat bentuk dukungan lintas identitas religius, seperti praktik saling mengingatkan waktu ibadah. Fenomena ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap agama tidak berhenti pada sikap pasif, tetapi berkembang menjadi empati aktif. Mahasantri tidak hanya menerima keberadaan perbedaan, tetapi juga turut menjaga keberlangsungan praktik keagamaan dalam kehidupan bersama.

Secara kritis, narasi “tanpa sekat” dan “tidak ada rasis” perlu dipahami bukan sebagai ketiadaan perbedaan, melainkan sebagai indikasi bahwa perbedaan telah dinormalisasi dalam kesadaran kolektif. Harmoni yang terbangun merupakan hasil dari proses interaksi yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai inklusivitas dan saling menghormati diinternalisasikan dalam kehidupan asrama.

Dengan demikian, pengalaman mahasantri Muslim dalam berinteraksi dengan mahasantri non-Muslim menunjukkan terbentuknya relasi sosial yang inklusif, egaliter, dan berorientasi pada harmoni. Interaksi ini menegaskan bahwa lingkungan Ma’had tidak hanya menjadi ruang hidup bersama, tetapi juga menjadi ruang praksis bagi penguatan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sekaligus memperkaya pemahaman tentang bagaimana relasi lintas identitas dikelola secara konstruktif di lingkungan asrama.

g. Pengalaman yang Menunjukkan Sikap Saling Menghargai Antarmahasantri Lintas Agama

Salah satu indikator penting dalam praktik multikulturalisme di lingkungan pendidikan adalah adanya pengalaman nyata yang mencerminkan sikap saling menghargai antar individu dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Dalam

konteks kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, interaksi keseharian antara mahasantri Muslim dan non-Muslim tidak hanya menunjukkan keberadaan toleransi, tetapi juga memperlihatkan praktik penghormatan yang bersifat aktif terhadap aktivitas keagamaan masing-masing.

Sikap saling menghargai antar mahasantri lintas agama merupakan indikator penting dalam melihat praktik multikulturalisme di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Dalam konteks kehidupan berasrama, pengalaman konkret yang dialami mahasantri menjadi cerminan sejauh mana nilai toleransi tidak hanya dipahami, tetapi juga diimplementasikan dalam interaksi sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Saat Ramadan, mereka sangat menghormati kami yang berpuasa. Sebaliknya, kami memberi ruang nyaman bagi mereka untuk beribadah. Itulah harmoni, (FH. RM02. 46)”¹²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya relasi resiprokal (timbal balik) dalam penghormatan antar umat beragama. Artinya, sikap menghargai tidak berjalan satu arah, melainkan terbentuk melalui kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial di tengah perbedaan keyakinan. Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh informan lain yang menunjukkan adanya bentuk kepedulian antar mahasantri dalam menjalankan kewajiban ibadah masing-masing.

“Ada ketika saya ketiduran dan di waktu itu sudah waktunya sholat, dia membangunkan saya untuk sholat dan saya membangunkan dia ketika dia telat bangun untuk beribadah, (JI. RM02. 47)”¹²⁷

¹²⁶ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹²⁷ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Berdasarkan data tersebut, sikap saling menghargai tidak hanya diwujudkan dalam bentuk tidak mengganggu, tetapi berkembang menjadi tindakan aktif, seperti memberikan ruang ibadah dan saling mengingatkan dalam menjalankan kewajiban religius. Relasi yang terbangun bersifat timbal balik (*resiprokal*), di mana masing-masing pihak menunjukkan kepedulian terhadap praktik keagamaan pihak lain.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari toleransi pasif menuju toleransi aktif. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan interaksi yang dialogis dan integratif, di mana perbedaan tidak sekadar diterima, tetapi dijadikan dasar untuk membangun hubungan sosial yang saling menguatkan. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, praktik tersebut menunjukkan internalisasi nilai inklusivitas dan keseimbangan, yang tercermin dalam sikap empati terhadap kebutuhan religius orang lain.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa praktik saling mengingatkan ibadah lintas agama mengandung makna empati lintas identitas (*cross-religious empathy*). Hal ini menandakan bahwa penghormatan terhadap perbedaan telah melampaui batas formal dan berkembang menjadi kepedulian substantif. Namun demikian, kondisi ini tidak dapat dipahami sebagai hilangnya batas identitas, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi yang berkelanjutan, di mana perbedaan dinormalisasi dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, pengalaman mahasantri dalam menunjukkan sikap saling menghargai lintas agama mencerminkan terbentuknya relasi sosial yang empatik, dialogis, dan berorientasi pada harmoni. Praktik ini menjadi bukti konkret bahwa kehidupan di Ma'had mampu menginternalisasikan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama secara nyata. Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa

penghargaan terhadap perbedaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah dihidupi dalam praktik keseharian mahasiswa.

h. Perbedaan Pendapat atau Gesekan karena Perbedaan Keyakinan

Dalam kehidupan sosial yang melibatkan individu dari latar belakang agama yang berbeda, potensi munculnya perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun demikian, aspek yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola dalam interaksi sehari-hari, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang merusak relasi sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Nyaris tidak ada. Jika ada beda pendapat, kami menyelesaikannya dengan tabayyun (klarifikasi) dan dialog santai sambil minum kopi, (FH. RM02.48)”¹²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik serius, karena mahasiswa memiliki kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan melalui klarifikasi dan komunikasi yang baik. Prinsip *tabayyun* yang disebutkan oleh informan juga mencerminkan nilai moderasi beragama yang menekankan pentingnya klarifikasi sebelum mengambil kesimpulan terhadap suatu persoalan. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain yang menyatakan bahwa hampir tidak terdapat konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama di lingkungan Ma’had.

“Tidak ada konflik di antara kami, sebab kami merasa bersaudara, (JI. RM02.49)”¹²⁹

Jawaban singkat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi sumber permasalahan yang berarti dalam kehidupan bersama di Ma’had.

¹²⁸ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹²⁹ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa lingkungan sosial di Ma'had telah mampu membangun budaya interaksi yang inklusif dan saling menghargai.

Berdasarkan data tersebut, perbedaan pendapat yang muncul tidak berkembang menjadi konflik yang signifikan. Mahasantri cenderung menyelesaikan perbedaan melalui klarifikasi (*tabayyun*) dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, adanya rasa kebersamaan yang kuat turut berkontribusi dalam meredam potensi gesekan, sehingga hubungan sosial tetap terjaga dalam suasana yang harmonis.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan adanya mekanisme sosial yang efektif dalam mengelola potensi konflik. Praktik *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai nilai keagamaan, tetapi juga sebagai strategi resolusi konflik berbasis dialog. Dalam perspektif moderasi beragama, hal ini mencerminkan prinsip keterbukaan, kehati-hatian dalam menilai perbedaan, serta penolakan terhadap sikap ekstrem dalam menyikapi konflik. Sementara dalam kerangka multikulturalisme, kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman dikelola melalui komunikasi yang konstruktif, sehingga relasi sosial tetap seimbang dan inklusif.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa minimnya konflik tidak serta-merta menandakan ketiadaan perbedaan, melainkan mengindikasikan adanya budaya dialog yang telah terinternalisasi. Penggunaan pendekatan “dialog santai” memperlihatkan bahwa penyelesaian perbedaan dilakukan secara cair, egaliter, dan non-konfrontatif. Namun demikian, kemungkinan adanya konflik laten tetap perlu diakui, meskipun telah diredam oleh norma sosial dan budaya harmoni yang kuat di lingkungan Ma'had.

Dengan demikian, perbedaan pendapat akibat latar belakang keyakinan tidak berkembang menjadi konflik yang berarti, melainkan dikelola melalui komunikasi terbuka, klarifikasi, dan rasa kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan

Ma'had memiliki kapasitas dalam membangun budaya dialog yang sehat serta menginternalisasikan nilai moderasi beragama dan multikulturalisme dalam praktik kehidupan sehari-hari. Temuan ini selanjutnya menguatkan gambaran bahwa harmoni yang terbangun merupakan hasil dari proses pengelolaan perbedaan yang konstruktif dan berkelanjutan.

i. Bentuk Interaksi Mahasantri Non-Muslim dengan Teman-Teman Muslim di Ma'had

Interaksi antara mahasantri non-Muslim dan teman-teman Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan bagian penting dalam melihat bagaimana hubungan lintas agama dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi tersebut, proses saling mengenal, memahami, dan membangun kedekatan sosial berlangsung secara langsung dalam konteks kehidupan berasrama. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Dampinganku sama teman sekamarnya itu Alhamdulillah akur, meski kadang ada saja berantem karena salah pemahaman dan kurang perhatian terhadap sesama, tapi selebihnya kadang malah kita tidak ingat kalau ada perbedaan agama kalau lagi mengerjakan tugas bareng. Mahasantri non-Muslim ini sering banget tanya-tanya soal kebiasaan kita, dan yang teman Muslim dengan senang hati menjelaskan tanpa maksud menggurui, (MA. RM02. 50)”¹³⁰

Informan lain juga menambahkan:

“Interaksinya itu mereka dengan mengerjakan tugas bareng dan mereka berkumpul nongkrong bareng di kafetaria, (MH. RM02. 51)”¹³¹

Berdasarkan data tersebut, interaksi yang terjalin berlangsung secara alami melalui berbagai aktivitas bersama, seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga berkumpul dalam suasana informal. Kedekatan yang terbentuk bahkan membuat

¹³⁰ M. Amir Fariq (Musyrif Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹³¹ Muhammad Hanif (Musyrif Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

perbedaan agama tidak selalu menjadi batas yang disadari dalam relasi pertemanan. Meskipun demikian, interaksi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari dinamika, karena masih terdapat kesalahpahaman kecil yang muncul dalam hubungan sehari-hari.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa relasi yang terbangun bersifat integratif dan dinamis. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan proses normalisasi keberagaman, di mana perbedaan identitas tidak dihilangkan, tetapi tidak lagi menjadi penghalang utama dalam interaksi sosial. Aktivitas saling bertanya mengenai kebiasaan keagamaan juga menunjukkan adanya dialog informal yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran lintas agama tanpa nuansa dominasi atau doktrinasi. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, pola interaksi ini merefleksikan sikap terbuka, saling menghormati, dan kemampuan mengelola perbedaan secara proporsional dalam kehidupan bersama.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa keberadaan konflik kecil akibat kesalahpahaman merupakan bagian wajar dari interaksi sosial yang intens. Namun, konflik tersebut tidak berkembang menjadi ketegangan yang berkepanjangan, melainkan menjadi bagian dari proses penyesuaian dan pendewasaan relasi. Selain itu, ruang-ruang informal seperti kamar dan kafetaria berperan sebagai arena penting dalam membangun kedekatan melalui pengalaman kebersamaan (*shared experiences*), yang secara perlahan memperkuat ikatan sosial lintas identitas.

Dengan demikian, bentuk interaksi antara mahasantri non-Muslim dan Muslim di Ma'had mencerminkan hubungan yang cair, setara, dan berbasis pengalaman bersama. Interaksi ini tidak hanya menunjukkan harmoni sosial, tetapi juga menggambarkan proses integrasi yang berlangsung secara alami dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kehidupan berasrama di Ma'had menjadi

ruang efektif dalam menginternalisasikan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama melalui praktik keseharian.

j. Penyelesaian Konflik yang Disebabkan oleh Perbedaan Agama

Dalam kehidupan sosial yang melibatkan keberagaman latar belakang agama, potensi konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, yang menjadi penentu kualitas relasi sosial bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola dan diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama hampir tidak ditemukan secara signifikan. Interaksi yang terjalin di antara mahasiswa lebih banyak diwarnai oleh sikap saling memahami dan komunikasi yang terbuka, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi sejak awal.

Salah satu informan menjelaskan bahwa perbedaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari lebih sering berkaitan dengan hal-hal teknis dalam kehidupan bersama, seperti pengaturan waktu tidur atau kebiasaan penggunaan alarm. Namun, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang santai dan dialog secara langsung antar penghuni kamar.

“Sejauh ini sih tidak ada konflik besar. Paling cuma salah paham kecil, misal soal suara alarm atau jam tidur. Cara selesainnya langsung diajak ngobrol di sidang kamar yang santai. Pokoknya kami selesaikan pakai hati, bukan pakai emosi, (MA. RM02. 52)”¹³²

¹³² M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama di lingkungan Ma'had.

*“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada konflik perbedaan agama, (MH. RM02. 53)”*¹³³

Berdasarkan data tersebut, konflik yang muncul dalam kehidupan berasrama cenderung bersifat teknis dan situasional, seperti perbedaan kebiasaan sehari-hari, bukan konflik yang berbasis pada perbedaan agama. Permasalahan yang muncul umumnya diselesaikan melalui komunikasi langsung dan dialog santai antar mahasantri, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan adanya mekanisme resolusi konflik yang efektif pada level mikro. Praktik yang disebut sebagai “sidang kamar” mencerminkan bentuk musyawarah informal yang berfungsi sebagai ruang negosiasi sosial. Dalam forum ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam suasana yang egaliter dan tidak konfrontatif. Pendekatan dialogis semacam ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik lebih bertumpu pada komunikasi interpersonal daripada intervensi otoritas formal.

Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan pengelolaan perbedaan secara konstruktif melalui proses negosiasi sosial yang berkelanjutan. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, praktik dialog santai, musyawarah, dan penyelesaian masalah “dengan hati” menunjukkan internalisasi nilai-nilai moderasi, seperti keseimbangan, keterbukaan, dan penolakan terhadap sikap ekstrem dalam menyikapi perbedaan.

¹³³ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa narasi “tidak ada konflik” perlu dipahami sebagai indikasi keberhasilan mekanisme preventif, bukan ketiadaan potensi konflik itu sendiri. Budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai memungkinkan potensi gesekan dikelola sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat destruktif. Dengan demikian, harmoni yang terbangun merupakan hasil dari proses pengelolaan konflik yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan asrama.

Dengan demikian, penyelesaian konflik di lingkungan Ma’had bersifat dialogis, partisipatif, dan berbasis musyawarah. Mekanisme ini tidak hanya efektif dalam meredam konflik, tetapi juga memperkuat relasi sosial yang inklusif dan harmonis. Temuan ini menegaskan bahwa Ma’had tidak hanya menjadi ruang hidup bersama dalam keberagaman, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial dalam mengelola perbedaan secara dewasa dan konstruktif.

k. Pandangan *Murabbiah* tentang Keberadaan Mahasantri Non-Muslim di Ma’had

Keberadaan mahasantri non-Muslim di Pusat Ma’had al-Jami’ah menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana institusi ini memaknai keberagaman dalam konteks pendidikan Islam. Sebagai ruang pembinaan berbasis keagamaan, Ma’had tidak hanya berfungsi sebagai tempat penguatan religiusitas, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial lintas identitas. Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan salah seorang *murabbiah* berikut:

“Keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma’had merupakan bagian dari realitas keberagaman di lingkungan kampus. Hal ini dapat menjadi sarana pembelajaran bersama untuk membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan memahami perbedaan keyakinan. Selama mereka dapat mengikuti aturan umum yang

berlaku di Ma'had, keberadaan mereka justru memperkaya pengalaman sosial dan nilai-nilai kebersamaan di lingkungan mahasantri, (SA. RM02. 54)”¹³⁴

Berdasarkan data tersebut, keberadaan mahasantri non-Muslim dipandang sebagai bagian yang wajar dari dinamika kehidupan kampus. Tidak hanya diterima, keberagaman tersebut juga dimaknai sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman sosial dan membangun sikap saling menghormati di antara mahasantri.

Secara analitis, pandangan *murabbiah* menunjukkan bahwa keberagaman tidak diposisikan sebagai penyimpangan dari fungsi Ma'had, melainkan sebagai elemen yang memiliki nilai pedagogis. Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini mencerminkan pendekatan inklusif yang mengakui keberadaan identitas berbeda sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, sikap tersebut menunjukkan orientasi keberagamaan yang terbuka, tidak eksklusif, serta mampu menjaga keseimbangan antara identitas institusi dan penghormatan terhadap perbedaan.

Pernyataan “selama mengikuti aturan umum” mengindikasikan adanya batas normatif yang bersifat integratif. Artinya, penerimaan terhadap mahasantri non-Muslim tetap berada dalam kerangka aturan bersama yang berlaku universal, tanpa menuntut penghilangan identitas keagamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya menjaga keteraturan sekaligus membuka ruang inklusivitas dalam kehidupan Ma'had.

Secara kritis, pandangan ini juga mengindikasikan adanya legitimasi institusional terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim, sehingga penerimaan tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga terstruktur. Hal ini penting, karena dukungan

¹³⁴ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah* Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

institusional berperan dalam memastikan bahwa nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dapat berlangsung secara konsisten dalam praktik keseharian.

Dengan demikian, pandangan *murabbiah* mencerminkan sikap yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada pembelajaran sosial dalam keberagaman. Keberadaan mahasantri non-Muslim tidak hanya diterima, tetapi juga dimaknai sebagai bagian dari proses pendidikan yang memperkuat nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di lingkungan Ma'had. Temuan ini sekaligus menegaskan peran institusi dalam membentuk budaya inklusif yang berkelanjutan dalam kehidupan berasrama.

l. Kebijakan Awal yang Membuat Ma'had Menerima Mahasantri Non-Muslim

Keterbukaan Pusat Ma'had al-Jami'ah terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim tidak terlepas dari kebijakan kelembagaan yang dilandasi oleh prinsip moderasi beragama dan inklusivitas. Dalam konteks perguruan tinggi Islam negeri, nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan akademik yang mampu mengakomodasi keberagaman latar belakang mahasiswa. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

*“Kebijakan ini berangkat dari prinsip moderasi beragama di bawah lingkungan Kementerian. Sehingga hal ini membuat UIN Malang yang notabenenya kampus Islam negeri membuka lebar pintu diterimanya mahasiswa dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, secara otomatis Ma'had menaungi mahasantri tidak hanya yang beragama Islam saja, tapi juga yang non-Islam, (SA. RM02. 55)”*¹³⁵

Berdasarkan data tersebut, penerimaan mahasantri non-Muslim merupakan konsekuensi dari kebijakan institusional yang lebih luas, yang berorientasi pada penerapan nilai moderasi beragama di lingkungan kampus. Kebijakan ini tidak bersifat

¹³⁵ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah* Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

insidental, melainkan bagian dari arah strategis lembaga dalam merespons realitas keberagaman mahasiswa.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan Ma'had merupakan hasil dari kebijakan *top-down* yang bersifat sistemik. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan proses institusionalisasi keberagaman, di mana nilai inklusivitas tidak hanya hadir dalam praktik sosial, tetapi juga dilegitimasi melalui kebijakan formal. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, kebijakan tersebut menunjukkan implementasi konkret dari prinsip toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam struktur pendidikan.

Lebih lanjut, kebijakan ini mengindikasikan adanya perluasan fungsi Ma'had, dari yang semula berfokus pada pembinaan religius mahasiswa Muslim, menjadi ruang pendidikan yang juga memfasilitasi interaksi lintas agama. Dengan demikian, Ma'had tidak hanya berperan sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mengintegrasikan nilai multikultural dalam kehidupan berasrama.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat *top-down* memerlukan dukungan praktik sosial di tingkat mikro agar dapat berjalan secara efektif. Tanpa interaksi sehari-hari yang inklusif, kebijakan tersebut berpotensi berhenti pada tataran normatif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi moderasi beragama di Ma'had ditentukan oleh sinergi antara kebijakan institusional dan praktik sosial yang dihidupi oleh mahasantri.

Dengan demikian, kebijakan penerimaan mahasantri non-Muslim di Ma'had mencerminkan desain pendidikan yang inklusif dan moderat, yang mengintegrasikan nilai keberagaman ke dalam struktur kelembagaan sekaligus praktik kehidupan sehari-hari. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberagaman di Ma'had tidak hanya dikelola secara sosial, tetapi juga ditopang oleh legitimasi kebijakan yang kuat.

m. Cara *Murabbiah* Mendampingi Mahasantri Non-Muslim dalam Proses Adaptasi Kehidupan Berasrama

Proses adaptasi merupakan tahap krusial bagi mahasantri yang memasuki kehidupan berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Bagi mahasantri non-Muslim, proses ini memiliki kompleksitas tersendiri karena mereka berada dalam lingkungan yang didominasi oleh aktivitas keagamaan Islam. Dalam konteks ini, peran *murabbiah* menjadi penting sebagai fasilitator yang membantu proses penyesuaian tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

*“Dalam kegiatan keseharian tentu mereka didampingi sama halnya dengan mahasantri lain, seperti kegiatan olahraga, kebersihan lingkungan mabna, kedisiplinan, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas sosial, (SA. RM02. 56)”*¹³⁶

Berdasarkan data tersebut, pendampingan yang dilakukan oleh *murabbiah* tidak menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda secara signifikan antara mahasantri Muslim dan non-Muslim. Pendampingan difokuskan pada aktivitas keseharian yang bersifat umum, seperti kegiatan sosial, kedisiplinan, dan kebersihan, yang menjadi bagian dari sistem kehidupan bersama di Ma'had.

Secara analitis, temuan ini mencerminkan strategi inklusi berbasis normalisasi, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan mahasantri non-Muslim ke dalam kehidupan asrama tanpa menonjolkan perbedaan identitas. Pendekatan ini berkontribusi dalam membangun rasa kesetaraan dan menghindari potensi marginalisasi, karena mahasantri non-Muslim diposisikan sebagai bagian utuh dari komunitas.

Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini sejalan dengan model integrasi tanpa asimilasi, di mana individu tetap mempertahankan identitasnya sekaligus

¹³⁶ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

berpartisipasi aktif dalam kehidupan bersama. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap perbedaan dan pembentukan kebersamaan sosial.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa ketiadaan perlakuan khusus bukan berarti mengabaikan kebutuhan adaptasi, melainkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang setara dan tidak eksklusif. Keterlibatan dalam aktivitas kolektif, seperti olahraga dan kebersihan, berfungsi sebagai media interaksi yang mempercepat proses adaptasi, baik secara struktural (memahami aturan) maupun kultural (menginternalisasi nilai dan kebiasaan). Dengan demikian, proses adaptasi berlangsung secara natural melalui pengalaman keseharian, bukan melalui pendekatan yang bersifat formal atau terpisah.

Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan *murabbiah* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat. *Murabbiah* berperan sebagai fasilitator integrasi yang menciptakan lingkungan adaptif dan inklusif bagi mahasantri non-Muslim. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi di Ma'had tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh pola pendampingan yang mampu mengelola keberagaman secara konstruktif dalam kehidupan berasrama.

n. Forum Dialog atau Ruang Curhat Khusus bagi Mahasantri Non-Muslim

Dalam konteks kehidupan berasrama yang multikultural, keberadaan ruang dialog menjadi elemen penting untuk menyalurkan pengalaman, aspirasi, serta refleksi mahasantri dari latar belakang yang beragam. Forum semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penguatan pemahaman dan pengelolaan keberagaman secara lebih terarah.

Berdasarkan hasil wawancara, belum terdapat forum dialog yang secara khusus dan terstruktur diperuntukkan bagi mahasiswa non-Muslim di lingkungan Ma'had. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Pernah sekali di ruang podcast diminta untuk berbagi pengalaman menjadi mahasiswa non-Muslim di Ma'had. Kalau ruang dialog yang lebih luas atau lebih spesifik untuk mahasiswa non-Muslim kayaknya belum pernah dilakukan, (AI. RM02. 57)”¹³⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa ruang berbagi pengalaman memang ada, namun masih bersifat terbatas dan insidental. Kegiatan seperti *podcast* menjadi satu-satunya media yang memungkinkan mahasiswa non-Muslim menyampaikan pengalaman mereka, tetapi belum berkembang menjadi forum dialog yang berkelanjutan dan terlembagakan.

Secara analitis, kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara praktik inklusivitas pada level interaksi sosial dengan dukungan struktural yang tersedia. Di satu sisi, kehidupan sehari-hari di Ma'had telah menunjukkan relasi yang harmonis dan terbuka. Namun di sisi lain, belum adanya forum dialog khusus menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman masih lebih dominan berlangsung secara informal dan belum sepenuhnya diperkuat melalui program institusional.

Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas telah tercapai pada level interaksi, tetapi belum sampai pada tahap pengakuan struktural terhadap kebutuhan ekspresi kelompok minoritas. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, kondisi ini menandakan bahwa nilai moderasi telah hidup dalam praktik sosial, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk ruang dialog yang sistematis.

¹³⁷ Ahmad Izzuddin (*Mudir Pusat Ma'had al-Jami'ah*), *Wawancara*, Kota Malang, 19 Februari 2026.

Secara kritis, ketiadaan forum dialog yang terstruktur berpotensi membatasi proses refleksi kolektif terhadap pengalaman keberagaman. Tanpa ruang komunikasi yang berkelanjutan, pengalaman mahasantri non-Muslim cenderung bersifat sporadis dan kurang terdokumentasi, sehingga peluang untuk menjadikannya sebagai dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan menjadi terbatas. Dengan kata lain, harmoni yang telah terbentuk secara sosial belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme artikulasi pengalaman secara formal.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Ma'had telah berhasil membangun lingkungan sosial yang inklusif, masih terdapat ruang penguatan pada aspek kelembagaan. Penyediaan forum dialog yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi penting sebagai langkah integratif, agar nilai multikulturalisme dan moderasi beragama tidak hanya dihidupi dalam praktik keseharian, tetapi juga diperkuat dalam sistem dan kebijakan institusi.

3. Faktor-faktor yang mendorong serta menghambat upaya penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural bagi mahasantri non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak hanya dipengaruhi oleh program pembinaan yang bersifat formal, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, kultural, dan kelembagaan yang berkembang dalam kehidupan mahasantri sehari-hari. Kehidupan berasrama yang mempertemukan mahasiswa dari latar belakang agama, budaya, dan daerah yang berbeda menciptakan dinamika interaksi yang kompleks. Dalam konteks tersebut, keberhasilan penguatan moderasi beragama sangat ditentukan oleh sejauh mana lingkungan Ma'had mampu mengelola keberagaman secara konstruktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasantri Muslim, mahasantri non-Muslim, *musyrif/musyrifah*, *murabbiah*, serta pimpinan Ma'had, ditemukan bahwa penguatan moderasi beragama di lingkungan Ma'had dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan sebagai pendorong maupun tantangan. Faktor-faktor tersebut meliputi iklim sosial yang inklusif, peran pembina dalam membangun hubungan lintas agama, dukungan kebijakan kelembagaan, serta sinergi antara Ma'had dan pihak universitas dalam pengelolaan keberagaman. Di sisi lain, terdapat pula beberapa tantangan yang berkaitan dengan proses adaptasi psikologis mahasantri non-Muslim serta keterbatasan ruang dialog lintas agama yang lebih terstruktur.

a. Iklim Sosial yang Inklusif dalam Kehidupan Berasrama

Iklim sosial yang inklusif merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung penguatan moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Lingkungan yang terbuka dan tidak diskriminatif memungkinkan mahasantri dari latar belakang keyakinan yang berbeda untuk berinteraksi secara wajar serta membangun relasi sosial yang harmonis dalam kehidupan berasrama.

Berdasarkan hasil wawancara, mahasantri non-Muslim pada umumnya tidak mengalami perlakuan diskriminatif selama tinggal di Ma'had. Pengalaman yang muncul lebih berkaitan dengan proses adaptasi awal terhadap lingkungan yang memiliki karakter religius, bukan karena adanya penolakan sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Secara umum tidak ada pengalaman yang signifikan. Jika pun ada, lebih berupa rasa canggung di awal karena perbedaan budaya dan kebiasaan, bukan karena adanya sikap diskriminatif atau penolakan secara langsung, (RM. RM03. 58)”¹³⁸

¹³⁸ Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain yang menyatakan bahwa ia tidak pernah merasakan ketidaknyamanan yang berkaitan dengan perbedaan agama selama tinggal di Ma'had.

“Kalau soal merasa kurang nyaman karena adanya perbedaan keyakinan, jujur itu tidak pernah sama sekali, (AV. RM03. 59)”¹³⁹

Data tersebut menunjukkan bahwa ketidaknyamanan yang muncul bersifat temporer dan kontekstual, terutama pada fase awal adaptasi. Rasa canggung yang dialami lebih merupakan respon alami terhadap perbedaan budaya dan kebiasaan, yang kemudian mereda seiring dengan intensitas interaksi sosial yang berlangsung secara positif.

Secara analitis, temuan ini mengindikasikan terbentuknya iklim sosial inklusif berbasis penerimaan kolektif. Tidak berkembangnya rasa canggung menjadi eksklusi sosial menunjukkan adanya mekanisme sosial yang bekerja secara preventif melalui interaksi terbuka dan sikap saling menghargai. Dalam hal ini, ketiadaan pengalaman diskriminatif tidak hanya mencerminkan toleransi pasif, tetapi juga mengarah pada penerimaan aktif (*active acceptance*), di mana keberagaman diintegrasikan secara wajar dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan pola integrasi yang memungkinkan partisipasi setara tanpa meniadakan identitas. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, hal ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai moderat pada level praksis, seperti keadilan, keterbukaan, dan anti-diskriminasi.

Secara kritis, kondisi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan membangun iklim inklusif tidak semata ditentukan oleh aturan formal, tetapi oleh kualitas interaksi sosial sehari-hari yang konsisten. Dengan kata lain, harmoni sosial yang terbentuk

¹³⁹ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

merupakan hasil dari proses internalisasi nilai yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan berasrama.

Dengan demikian, iklim sosial yang inklusif di Ma'had tidak hanya berfungsi sebagai konteks interaksi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam penguatan moderasi beragama. Lingkungan yang aman dan terbuka memungkinkan mahasantri non-Muslim beradaptasi secara optimal, sekaligus memperkuat relasi sosial yang harmonis dalam keberagaman. Subbab ini menjadi dasar untuk memahami faktor-faktor pendukung lainnya dalam membangun praktik moderasi beragama di Ma'had.

b. Peran *Musyrif*, *Musyrifah*, dan *Murabbiah* dalam Membina Hubungan Lintas Agama

Peran *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* merupakan faktor penting dalam membentuk dan menjaga hubungan lintas agama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Dalam kehidupan berasrama yang multikultural, pembina tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kedisiplinan, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang mengarahkan interaksi mahasantri agar tetap harmonis dan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara, pembina asrama dipersepsikan sebagai figur teladan dalam menanamkan nilai saling menghargai tanpa memandang perbedaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

*“Mereka adalah teladan dalam menanamkan kasih sayang tanpa memandang perbedaan, selalu menengahi dengan bijak, (FH. RM03. 60)”*¹⁴⁰

Selain itu, pendekatan pembinaan yang diterapkan tidak bersifat diskriminatif, sebagaimana disampaikan informan lain:

*“Tidak ada bimbingan yang bersifat membedakan, (JI. RM03. 61)”*¹⁴¹

¹⁴⁰ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹⁴¹ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Temuan ini diperkuat oleh harapan mahasantri agar iklim multikultural yang telah terbentuk dapat terus dikembangkan:

“Saya berharap kehidupan multikultural di Ma’had semakin berkembang, dengan ruang dialog yang lebih terbuka antaragama, serta kebijakan yang terus mendukung toleransi dan keharmonisan dalam keberagaman, (RM. RM03. 62)”¹⁴²

“Harapan saya semoga ke depannya kita bisa mempertahankan kebaikan yang sudah kita jalankan, dan yang kurang baik kita buat menjadi lebih baik lagi, (AV. RM03. 63)”¹⁴³

Secara deskriptif, data tersebut menunjukkan bahwa pembina berperan aktif dalam menciptakan suasana yang adil, terbuka, dan harmonis. Keteladanan dan pendekatan non-diskriminatif menjadi ciri utama dalam proses pembinaan yang dirasakan langsung oleh mahasantri.

Secara analitis, peran ini mencerminkan fungsi kepemimpinan sosial yang inklusif. *Musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membentuk pola relasi sosial yang setara melalui keteladanan. Nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan diinternalisasikan melalui praktik nyata, bukan sekadar penyampaian normatif.

Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini menunjukkan model kepemimpinan inklusif yang mampu mengelola keberagaman sebagai kekuatan sosial. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, peran pembina mencerminkan implementasi nilai moderasi pada level praksis, terutama dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan sikap anti-diskriminasi.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa efektivitas peran pembina terletak pada kombinasi antara keteladanan dan fungsi mediasi. Kemampuan untuk menengahi

¹⁴² Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹⁴³ Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

secara bijak serta menerapkan prinsip kesetaraan mencegah terbentuknya relasi mayoritas–minoritas yang eksklusif. Dengan demikian, harmoni yang tercipta tidak bersifat kebetulan, melainkan hasil dari pengelolaan sosial yang terarah dan konsisten.

Dengan demikian, *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* berperan sebagai aktor kunci dalam membangun dan menjaga iklim sosial yang inklusif di Ma’had. Peran ini tidak hanya memperkuat hubungan lintas agama, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam kehidupan berasrama. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan moderasi beragama di Ma’had sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan sosial para pembinaanya.

c. Pandangan terhadap Kehadiran Mahasantri Non-Muslim dalam Suasana Kehidupan di Ma’had

Persepsi mahasantri terhadap keberadaan individu dengan latar belakang agama yang berbeda merupakan faktor penting dalam membentuk kualitas interaksi sosial di lingkungan Pusat Ma’had al-Jami’ah. Persepsi yang positif tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial yang mendukung terciptanya hubungan lintas agama yang harmonis dalam kehidupan berasrama.

Berdasarkan hasil wawancara, kehadiran mahasantri non-Muslim dipandang memberikan kontribusi positif terhadap dinamika sosial di Ma’had. Keberagaman tidak dimaknai sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman sosial. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kehadiran mereka justru memperluas cakrawala berpikir kami, menjadikan suasana Ma’had lebih dewasa, inklusif, dan penuh toleransi, (FH. RM03. 64)”¹⁴⁴

¹⁴⁴ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Pandangan tersebut diperkuat oleh informan lain yang menyatakan bahwa relasi yang terjalin berlangsung tanpa hambatan berarti:

*“Tidak sama sekali, karena mereka juga sangat toleran, (JI. RM03. 65)”*¹⁴⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mahasantri non-Muslim diterima secara wajar dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi lintas agama tidak hanya berlangsung tanpa konflik, tetapi juga menghadirkan pengalaman sosial yang memperkaya cara pandang mahasantri.

Secara analitis, persepsi positif ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial terhadap keberagaman. Penerimaan kolektif tersebut memungkinkan interaksi berlangsung secara natural tanpa dibayangi prasangka atau resistensi. Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan berkembangnya kesadaran multikultural, di mana perbedaan tidak hanya ditoleransi, tetapi dimaknai sebagai sumber pembelajaran.

Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini menunjukkan terbentuknya budaya penerimaan (*culture of acceptance*) yang menopang relasi sosial yang setara. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, temuan ini mengindikasikan internalisasi nilai moderasi pada level kognitif dan afektif, yang kemudian tercermin dalam sikap terbuka dan inklusif.

Pendalaman kritis menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui interaksi berulang yang memungkinkan proses refleksi dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, penerimaan terhadap keberagaman bukan sekadar sikap normatif, tetapi merupakan hasil dari pengalaman sosial yang terus berkembang dalam kehidupan berasrama.

¹⁴⁵ Jamalul Il Alfani (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Dengan demikian, pandangan positif terhadap kehadiran mahasantri non-Muslim berperan sebagai fondasi sekaligus penggerak dalam membangun iklim sosial yang inklusif di Ma'had. Persepsi ini memperkuat integrasi sosial serta mendukung terwujudnya kehidupan multikultural yang harmonis dan berkelanjutan. Subbab ini menegaskan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh struktur dan kebijakan, tetapi juga oleh cara pandang kolektif yang berkembang di kalangan mahasantri.

d. Harapan Mahasantri Muslim untuk Meningkatkan Suasana Toleransi dan Kerukunan di Ma'had

Selain persepsi positif terhadap keberagaman, hasil penelitian juga menunjukkan adanya harapan dari mahasantri Muslim agar suasana toleransi dan kerukunan di Pusat Ma'had al-Jami'ah terus berkembang secara berkelanjutan. Harapan ini mencerminkan kesadaran reflektif mahasantri dalam menjaga kualitas hubungan sosial di tengah keberagaman. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Semoga Ma'had terus menjadi asrama yang menyejukkan, di mana perbedaan tidak diperdebatkan melainkan disyukuri sebagai kekayaan, (FH. RM03. 66)”¹⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya cara pandang yang konstruktif terhadap keberagaman, di mana perbedaan dimaknai sebagai aset sosial yang memperkaya pengalaman kolektif, bukan sebagai sumber potensi konflik. Di sisi lain, terdapat pula harapan yang bersifat antisipatif:

¹⁴⁶ Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

“Jangan sampai terjadinya rasis hanya karena perbedaan agama, dan saya sangat berharap mudah-mudahan sangat tinggi sikap toleransi di Ma’had ini, (Jl. RM03. 67)”¹⁴⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kondisi sosial di Ma’had relatif harmonis, mahasantri tetap menyadari adanya potensi gesekan yang perlu diantisipasi. Dengan demikian, harmoni tidak dipandang sebagai kondisi yang statis, melainkan sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Secara analitis, keberadaan harapan ini menunjukkan bahwa mahasantri berperan sebagai subjek reflektif dalam kehidupan sosial, bukan sekadar penerima kondisi yang ada. Harapan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang mendorong individu untuk tetap menjaga sikap toleran dan menghargai perbedaan.

Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini menunjukkan berkembangnya kesadaran kolektif untuk merawat keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, orientasi untuk mempertahankan dan meningkatkan toleransi mencerminkan internalisasi nilai moderasi pada level normatif, yang tidak hanya diwujudkan dalam tindakan, tetapi juga dalam harapan dan komitmen sosial.

Secara kritis, harapan yang bersifat preventif ini menunjukkan adanya kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya konflik laten. Hal ini menandakan kematangan sosial, di mana individu tidak hanya merespons konflik yang terjadi, tetapi juga berupaya mencegahnya melalui penguatan nilai dan sikap sejak dini.

¹⁴⁷ Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Dengan demikian, harapan mahasantri Muslim terhadap peningkatan toleransi dan kerukunan menjadi indikator penting dari berkembangnya kesadaran multikultural dan moderasi beragama di Ma'had. Harapan tersebut tidak hanya merefleksikan kondisi yang sudah baik, tetapi juga menunjukkan orientasi jangka panjang dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan moderasi beragama sangat ditopang oleh kesadaran kolektif yang terus dipelihara di kalangan mahasantri.

e. Tantangan yang Dihadapi dalam Membimbing Mahasantri Non-Muslim

Dalam proses pembinaan mahasantri non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah, terdapat sejumlah tantangan yang terutama berkaitan dengan aspek psikologis dan komunikasi interpersonal. Tantangan ini umumnya muncul pada fase awal interaksi, ketika mahasantri non-Muslim masih dalam tahap penyesuaian dengan lingkungan yang didominasi oleh aktivitas keagamaan Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“Tantangan terbesarnya lebih ke rasa ‘tidak enak hati’ di awal. Aku harus pastikan kalau dia tidak merasa terasing pas teman-temannya lagi bahas soal agama atau pas lagi jadwal ibadah padat. Aku juga harus rajin-rajin tanya kabar, takutnya dia sungkan mau cerita kalau ada apa-apa. Soalnya anaknya lumayan pendiam kalau sama aku, (MA. RM03. 68)”¹⁴⁸

Informan lain juga menambahkan:

“Mungkin dari saya itu untuk mengingatkan mereka pergi beribadah, (MH. RM03. 69)”¹⁴⁹

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi pembina terletak pada munculnya perasaan tidak nyaman yang bersifat implisit, seperti rasa sungkan, canggung, dan potensi keterasingan pada mahasantri

¹⁴⁸ M. Amir Fariq (Musyrif Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹⁴⁹ Muhammad Hanif (Musyrif Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026.

non-Muslim. Kondisi ini terutama muncul dalam situasi yang berkaitan dengan intensitas aktivitas keagamaan maupun interaksi sosial yang didominasi oleh mahasiswa Muslim.

Secara analitis, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *invisible barrier* (hambatan tak kasat mata) dalam interaksi lintas agama. Meskipun tidak terdapat diskriminasi secara eksplisit, dominasi kultural dan religius tetap berpotensi menimbulkan tekanan psikologis halus bagi kelompok minoritas. Dalam konteks ini, tantangan pembina bukan sekadar mengelola aktivitas, tetapi juga memastikan terciptanya rasa aman secara emosional bagi mahasantri non-Muslim.

Lebih lanjut, kecenderungan mahasantri non-Muslim untuk bersikap lebih pendiam atau sungkan menunjukkan adanya keterbatasan komunikasi yang bersifat laten. Hal ini menuntut pembina untuk mengambil peran proaktif dalam membangun komunikasi interpersonal yang terbuka, misalnya melalui pendekatan personal, pengecekan kondisi secara berkala, serta penciptaan ruang dialog yang aman dan tidak menghakimi.

Di sisi lain, aspek pengingat ibadah juga menghadirkan dilema tersendiri. Pembina perlu berhati-hati agar bentuk perhatian tersebut tidak dipersepsikan sebagai tekanan atau pemaksaan keyakinan. Dalam hal ini, diperlukan sensitivitas dan batas etis yang jelas, sehingga pendampingan tetap berada dalam kerangka kepedulian, bukan intervensi terhadap ranah keyakinan.

Dalam perspektif multikulturalisme, tantangan ini menunjukkan bahwa integrasi sosial tidak hanya bergantung pada penerimaan eksternal, tetapi juga pada kemampuan mengelola dinamika psikologis kelompok minoritas. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, kondisi ini menegaskan pentingnya sikap empatik, proporsional, dan tidak eksekutif dalam praktik pembinaan lintas agama.

Secara kritis, temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan menciptakan lingkungan inklusif tidak otomatis menghilangkan hambatan yang bersifat halus dan personal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih reflektif dan berbasis sensitivitas sosial menjadi kunci dalam menyempurnakan praktik pembinaan yang sudah berjalan.

Dengan demikian, tantangan dalam membimbing mahasantri non-Muslim di Ma'had tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi psikososial yang kompleks. Hal ini menuntut pembina untuk memiliki kompetensi empatik, komunikatif, dan moderat dalam mengelola keberagaman, sehingga proses adaptasi dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mengantar pada pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat yang lebih luas dalam penguatan moderasi beragama di lingkungan Ma'had.

f. Kebijakan Ma'had dalam Mendukung Peran *Musyrif* dan *Musyrifah* dalam Pembinaan

Kebijakan kelembagaan merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas peran *musyrif* dan *musyrifah* dalam membina kehidupan berasrama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Dalam konteks kehidupan yang multikultural, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang mengarahkan praktik pembinaan agar tetap inklusif dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

“Ma'had sendiri sangat mendukung sih. Pengasuh dan murabbi/ah selalu pesan ke kita para pendamping buat jaga kenyamanan semua mahasantri tanpa terkecuali. Aturannya jelas, tidak ada paksaan dalam hal akidah, tapi tetap harus ikut aturan kedisiplinan Ma'had, (MA. RM03. 70)”¹⁵⁰

Informan lain juga menegaskan:

¹⁵⁰ M. Amir Fariq (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

“Kebijakan Ma’had sangat mendukung saya dalam pembinaan mahasantri dengan seluruh kegiatan yang ada di Ma’had ini, (MH. RM03. 71)”¹⁵¹

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan Ma’had memberikan dukungan yang jelas dan konsisten terhadap peran *musyrif/musyrifah*, terutama dalam menjaga kenyamanan dan keharmonisan antar mahasantri tanpa membedakan latar belakang agama.

Secara analitis, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai *normative framework* yang menegaskan dua prinsip utama, yaitu kebebasan beragama dan kesetaraan dalam kedisiplinan. Tidak adanya paksaan dalam aspek akidah menunjukkan komitmen institusi terhadap penghormatan hak individu, sementara kewajiban mengikuti aturan Ma’had mencerminkan adanya standar kolektif yang mengikat seluruh mahasantri secara setara. Diferensiasi ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap perbedaan dan keteraturan kehidupan bersama.

Dalam perspektif moderasi beragama, kebijakan ini mencerminkan prinsip *tawassuth* (jalan tengah) dan *i’tidal* (keadilan), di mana institusi tidak bersikap eksklusif, tetapi juga tidak mengabaikan norma bersama. Sementara dalam kerangka multikulturalisme, kondisi ini menunjukkan adanya upaya institusionalisasi nilai inklusivitas, di mana keberagaman tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga dilindungi melalui aturan formal.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial formal yang memberikan legitimasi bagi *musyrif/musyrifah* dalam menjalankan peran

¹⁵¹ Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

pembinaan. Kejelasan aturan membantu pendamping bersikap tegas dalam aspek kedisiplinan, sekaligus tetap sensitif dalam menghadapi perbedaan keyakinan.

Namun demikian, secara kritis dapat dicermati bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan interpretasi dan implementasi di tingkat pelaksana. Batas antara pembinaan dan intervensi terhadap ranah personal, khususnya dalam isu keagamaan, berpotensi menjadi kabur apabila tidak diimbangi dengan sensitivitas sosial dan pemahaman yang memadai dari para pendamping.

Dengan demikian, kebijakan Ma'had tidak hanya berperan sebagai landasan administratif, tetapi juga sebagai fondasi struktural dalam membangun lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis. Dukungan kebijakan ini sekaligus memperkuat peran *musyrif/musyrifah* sebagai aktor kunci dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dan multikulturalisme dalam kehidupan berasrama. Subbab ini selanjutnya mengantar pada pembahasan mengenai keterkaitan antara kebijakan, praktik pembinaan, dan efektivitas penguatan moderasi beragama secara keseluruhan.

g. Penguatan Suasana Multikultural di Lingkungan Ma'had

Suasana multikultural di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah pada dasarnya telah terbentuk secara kondusif, yang ditandai dengan relasi sosial yang harmonis serta minimnya konflik berbasis perbedaan agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama telah terimplementasi dalam praktik interaksi sehari-hari antar mahasantri.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya kesadaran reflektif dari mahasantri mengenai pentingnya penguatan kualitas interaksi multikultural agar tidak berhenti pada level stabilitas sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

“Mungkin perlu lebih banyak kegiatan bersama yang sifatnya umum atau hobi, biar tidak melulu soal kegiatan akademik atau agama. Jadi, ikatan emosionalnya makin kuat lewat olahraga atau seni bareng. Makin banyak interaksi, makin tipis sekat perbedaannya, (MA. RM03. 72)”¹⁵²

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa kondisi yang ada saat ini telah berjalan dengan baik:

“Menurut saya sejauh ini sudah sangat bagus untuk menciptakan suasana multikultural di Ma’had kita ini, (MH. RM03. 73)”¹⁵³

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan dua kecenderungan: pertama, pengakuan terhadap kondisi sosial yang sudah harmonis; kedua, adanya dorongan untuk memperkuat kualitas hubungan melalui intensifikasi interaksi sosial yang lebih beragam.

Secara analitis, dialektika tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan multikultural di Ma’had telah mencapai tahap harmoni sosial, tetapi belum sepenuhnya berkembang menuju kohesi sosial yang lebih mendalam. Harmoni yang ada saat ini cenderung berbasis pada penerimaan dan minim konflik, sementara kohesi sosial menuntut adanya kedekatan emosional dan keterikatan yang lebih kuat antarindividu.

Usulan penguatan melalui kegiatan berbasis minat dan hobi menunjukkan pentingnya ruang interaksi informal yang bersifat egaliter dan non-sektarian. Berbeda dengan kegiatan akademik atau keagamaan yang memiliki kerangka struktural tertentu, ruang informal memungkinkan interaksi yang lebih cair, sehingga mahasiswa dapat berelasi sebagai individu, bukan semata sebagai representasi identitas keagamaan. Dalam konteks ini, interaksi berulang dalam ruang informal berperan dalam membangun *emotional bonding* yang memperkuat kualitas relasi sosial.

¹⁵² M. Amir Fariq (Musyrif Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

¹⁵³ Muhammad Hanif (Musyrif Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Batu, 28 Februari 2026.

Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan pergeseran dari tahap koeksistensi menuju interaksi integratif yang lebih substantif. Sementara dalam kerangka moderasi beragama, hal ini menunjukkan perkembangan dari sikap toleransi pasif menuju toleransi aktif yang diwujudkan dalam relasi sosial yang lebih bermakna.

Secara kritis, kebutuhan akan penguatan ini juga menegaskan bahwa harmoni sosial tidak bersifat final, melainkan harus terus dirawat dan dikembangkan. Tanpa adanya ruang interaksi yang memperdalam relasi, harmoni yang ada berpotensi stagnan dan kurang resilien dalam menghadapi dinamika sosial di masa depan.

Dengan demikian, penguatan suasana multikultural di Ma'had tidak dimaknai sebagai koreksi atas kondisi yang kurang, melainkan sebagai strategi pengembangan untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dari yang sekadar harmonis menjadi lebih kohesif dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya integrasi antara praktik sosial dan desain kegiatan dalam memperkuat implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di lingkungan Ma'had.

h. Tantangan yang Dihadapi *Murabbiah* dalam Membina Kehidupan Multikultural di Ma'had

Dalam membina kehidupan multikultural di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah, keberagaman latar belakang mahasantri tidak hanya menghadirkan peluang pembelajaran sosial, tetapi juga memunculkan tantangan yang perlu dikelola secara tepat. Tantangan ini terutama berkaitan dengan perbedaan budaya, pemahaman keagamaan, serta dinamika psikologis yang muncul pada fase awal interaksi lintas agama. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Beberapa tantangan yang muncul antara lain perbedaan latar belakang budaya dan pemahaman keagamaan para mahasantri. Selain itu, terkadang masih ada kesalahpahaman atau rasa canggung dalam interaksi awal antara mahasantri

Muslim dan non-Muslim. Namun, melalui pembinaan dan komunikasi yang baik, tantangan tersebut biasanya dapat diatasi, (SA. RM03. 74)”¹⁵⁴

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi *murabbiah* tidak selalu berupa konflik terbuka, melainkan lebih banyak muncul dalam bentuk ketegangan laten, seperti rasa canggung, miskomunikasi, dan perbedaan cara pandang dalam memahami praktik sosial maupun keagamaan.

Secara analitis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai fase awal penyesuaian dalam interaksi multikultural (*initial cultural adjustment*), yang secara umum merupakan bagian wajar dari proses pembentukan relasi sosial di tengah keberagaman. Perbedaan latar belakang budaya dan pemahaman keagamaan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang efektif dan sensitivitas sosial yang memadai.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi gesekan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang destruktif. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme pengelolaan perbedaan yang berjalan secara efektif, di mana *murabbiah* berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi yang menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman bersama.

Dalam perspektif moderasi beragama, kemampuan mengelola perbedaan secara konstruktif tanpa eskalasi konflik mencerminkan internalisasi nilai-nilai moderat, seperti sikap adil, terbuka, dan tidak ekstrem. Sementara dalam kerangka multikulturalisme, kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak dihindari, melainkan diolah melalui proses interaksi dan komunikasi yang berkelanjutan.

¹⁵⁴ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah* Mabna Ar-Razi), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

Secara kritis, penting dicermati bahwa ketegangan laten seperti rasa canggung dan miskomunikasi, meskipun tidak tampak sebagai konflik, tetap memerlukan perhatian serius. Apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, potensi ini dapat berkembang menjadi hambatan dalam pembentukan relasi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peran *murabbiah* dalam menjaga intensitas komunikasi dan membangun ruang interaksi yang aman menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembinaan.

Dengan demikian, tantangan dalam membina kehidupan multikultural di Ma'had bersifat dinamis sekaligus konstruktif. Keberagaman memang menghadirkan potensi gesekan pada tahap awal, tetapi melalui pembinaan yang komunikatif dan inklusif, tantangan tersebut dapat dikelola menjadi proses pembelajaran sosial yang memperkuat sikap toleransi, empati, dan keterbukaan antar mahasiswa. Subbab ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan kehidupan multikultural di Ma'had tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses pembinaan yang sadar dan berkelanjutan.

i. Cara *Murabbiah* Mengajarkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama kepada Semua Mahasiswa

Penanaman nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan yang terintegrasi dalam keseluruhan kehidupan berasrama. Nilai-nilai tersebut tidak hanya disampaikan dalam ruang formal, tetapi juga diinternalisasikan melalui interaksi sosial sehari-hari yang dialami langsung oleh mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara, *murabbiah* menjelaskan bahwa proses penanaman nilai moderasi beragama dilakukan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi, sebagaimana diungkapkan berikut:

“Nilai moderasi beragama diajarkan melalui berbagai cara, seperti pembinaan karakter, kajian keislaman yang menekankan nilai rahmatan lil ‘alamin, serta kegiatan yang mendorong dialog dan kerja sama antar mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan agar para mahasiswa memahami bahwa Islam mengajarkan sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan, (SA. RM03. 75)”

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan bahwa penanaman nilai moderasi beragama mencakup tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan sosial. Pada dimensi kognitif, nilai moderasi disampaikan melalui kajian keislaman yang menekankan prinsip *rahmatan lil ‘alamin*. Pada dimensi afektif, pembinaan karakter diarahkan untuk membentuk sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Sementara pada dimensi sosial, nilai-nilai tersebut dipraktikkan melalui kegiatan bersama yang mendorong interaksi lintas latar belakang.

Secara analitis, pendekatan ini menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama di Ma’had bersifat integratif dan kontekstual. Nilai tidak hanya ditransmisikan sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga dihidupkan melalui praktik sosial yang berulang. Dalam kerangka moderasi beragama, strategi ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara pemahaman keagamaan yang inklusif dan praktik sosial yang toleran, sehingga nilai moderasi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi kebiasaan kolektif.

Dalam perspektif multikulturalisme, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *experiential learning*, di mana pembelajaran nilai berlangsung melalui pengalaman langsung dalam menghadapi keberagaman. Interaksi sehari-hari, seperti kerja sama, dialog informal, dan kehidupan bersama yang berfungsi sebagai media efektif untuk membangun kesadaran multikultural yang bersifat praktis dan berkelanjutan.

Secara lebih kritis, efektivitas pendekatan ini terletak pada konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktik yang ditampilkan oleh *murabbiah*. Ketika nilai moderasi tidak hanya diajarkan, tetapi juga dicontohkan dalam sikap dan interaksi, maka proses internalisasi menjadi lebih kuat dan tidak bersifat simbolik semata. Sebaliknya, tanpa keteladanan, nilai yang disampaikan berpotensi berhenti pada level kognitif.

Dengan demikian, cara *murabbiah* dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama di Ma'had bersifat holistik, aplikatif, dan berbasis pengalaman sosial. Pendekatan ini memungkinkan nilai moderasi beragama terinternalisasi secara mendalam sebagai budaya hidup mahasantri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Ma'had tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang praksis dalam membangun kehidupan multikultural yang inklusif dan berkelanjutan.

j. Bentuk Dukungan Khusus dari Pengelola Ma'had untuk Keberadaan Mahasantri Non-Muslim

Dukungan terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak hanya tampak dalam relasi sosial yang harmonis, tetapi juga diformalkan melalui kebijakan kelembagaan yang berorientasi pada prinsip inklusivitas dan keadilan. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam menjamin kenyamanan serta perlindungan hak mahasantri non-Muslim selama menjalani kehidupan berasrama.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola Ma'had memberikan dukungan yang bersifat struktural melalui kebijakan dan arahan pembinaan, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Pengelola Ma’had memberikan dukungan berupa kebijakan yang menjamin kenyamanan dan keamanan mereka selama tinggal di asrama. Selain itu, pengelola juga memberikan arahan kepada musyrif dan musyrifah agar melakukan pendampingan secara bijak serta menghindari tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa non-Muslim, (SA. RM03. 76)”¹⁵⁵

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan bahwa dukungan pengelola tidak hanya berupa prinsip umum, tetapi juga diwujudkan dalam mekanisme pembinaan yang konkret melalui peran *musyrif* dan *musyrifah*. Arahan untuk menghindari diskriminasi menegaskan adanya standar perilaku yang harus dijaga dalam interaksi sehari-hari.

Secara analitis, kebijakan tersebut mencerminkan adanya peran institusi sebagai pengarah sekaligus pengontrol praktik sosial di lingkungan Ma’had. Moderasi beragama, dalam hal ini, tidak diletakkan semata sebagai nilai individual, tetapi diinstitusionalisasikan dalam bentuk aturan dan pedoman pembinaan. Dalam kerangka moderasi beragama, hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan (*tawazun*), di mana penghormatan terhadap perbedaan berjalan seiring dengan penegakan aturan bersama.

Lebih lanjut, kebijakan Ma’had juga memperlihatkan adanya diferensiasi yang jelas antara ranah akidah dan ranah sosial. Mahasiswa non-Muslim diberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinannya, sementara pada saat yang sama tetap terikat pada aturan kedisiplinan yang berlaku umum. Pendekatan ini mencerminkan model inklusivitas yang tidak menghapus identitas, tetapi mengintegrasikannya dalam sistem kehidupan bersama secara proporsional.

¹⁵⁵ Shofia Alif Masruroh (*Murabbiah Mabna Ar-Razi*), *Wawancara*, Kota Malang, 30 Maret 2026.

Selain dukungan yang bersifat struktural, pengelola Ma'had juga menunjukkan orientasi pengembangan ke depan melalui berbagai langkah strategis, sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Langkah yang dapat dilakukan antara lain memperbanyak kegiatan dialog lintas budaya dan agama, memperkuat pendidikan karakter berbasis toleransi, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka antar mahasiswa. Dengan demikian, kehidupan multikultural di Ma'had dapat semakin harmonis dan menjadi contoh praktik moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, (SA. RM03. 77)”¹⁵⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan pengelola tidak bersifat statis, melainkan berkembang secara reflektif dan berorientasi jangka panjang. Upaya seperti dialog lintas agama dan penguatan pendidikan karakter mengindikasikan adanya strategi untuk meningkatkan kualitas interaksi multikultural, bukan sekadar mempertahankan kondisi yang sudah ada.

Dalam perspektif multikulturalisme, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *institutional reinforcement*, yaitu penguatan nilai melalui kebijakan dan program yang dirancang secara sistematis. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa praktik inklusivitas tidak hanya bergantung pada relasi interpersonal, tetapi juga ditopang oleh struktur kelembagaan yang konsisten.

Secara kritis, efektivitas dukungan ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat praktik. Kebijakan yang inklusif memerlukan konsistensi dalam penerapan oleh para aktor pelaksana agar tidak berhenti pada level normatif. Tanpa implementasi yang selaras, potensi kesenjangan antara kebijakan dan praktik tetap dapat terjadi.

Dengan demikian, bentuk dukungan pengelola Ma'had terhadap mahasiswa non-Muslim mencakup dimensi struktural, normatif, dan strategis. Dukungan ini tidak

¹⁵⁶ Shofia Alif Masruroh (Murabbiah Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Malang, 30 Maret 2026.

hanya menjamin kenyamanan dan keamanan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, dialogis, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama di Ma'had telah terintegrasi dalam kebijakan institusi dan praktik kehidupan berasrama secara menyeluruh.

k. Koordinasi dengan Pihak Universitas dalam Pengelolaan Keberagaman

Pengelolaan keberagaman di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak berdiri sendiri sebagai tanggung jawab internal lembaga, tetapi melibatkan koordinasi dengan pihak universitas sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang lebih luas. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan sosial dan spiritual seluruh mahasiswa, termasuk non-Muslim, terpenuhi secara proporsional dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, sejak awal penerimaan mahasiswa non-Muslim telah terdapat kebijakan yang melibatkan kerja sama lintas institusi, khususnya dalam pembinaan aspek spiritual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Ada kebijakan khusus. Dulu, setahu Mudir, pertama kali kita menerima mahasiswa non-Muslim oleh Wakil Rektor I, yaitu Prof. Umi Sumbulah. Waktu itu ada kerja sama dengan pemuka agama Kristen Katolik untuk membina aspek spiritualitas mahasiswa dari NTT, (AI. RM03. 78)”¹⁵⁷

Secara deskriptif, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman telah direspons melalui kebijakan yang melibatkan aktor di luar Ma'had, khususnya tokoh agama sesuai dengan latar belakang keyakinan mahasiswa non-Muslim. Keterlibatan ini menjadi bentuk fasilitasi terhadap kebutuhan spiritual yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh internal Ma'had.

¹⁵⁷ Ahmad Izzuddin (Mudir Pusat Ma'had al-Jami'ah), Wawancara, Kota Malang, 19 Februari 2026.

Secara analitis, kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan akomodasi struktural terhadap keberagaman. Institusi tidak hanya bersikap toleran secara pasif, tetapi secara aktif menyediakan ruang pembinaan yang relevan dengan kebutuhan masing-masing individu. Dalam kerangka moderasi beragama, langkah ini menunjukkan prinsip keadilan (*i'tidal*) dan keseimbangan (*tawazun*), yakni memberikan perlakuan setara tanpa mengabaikan perbedaan konteks keagamaan.

Lebih lanjut, koordinasi antara Ma'had dan universitas menunjukkan adanya integrasi kebijakan pada level makro dan mikro. Universitas berperan sebagai perumus arah kebijakan yang inklusif, sementara Ma'had mengimplementasikannya dalam praktik kehidupan berasrama. Sinergi ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus memastikan implementasi berjalan kontekstual di lapangan. Dalam perspektif multikulturalisme, pola ini mencerminkan pengelolaan keberagaman berbasis sistem, bukan semata relasi interpersonal.

Secara kritis, temuan ini juga menunjukkan bahwa kerja sama lintas institusi masih cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya terlembagakan dalam program yang berkelanjutan. Tanpa sistematisasi yang jelas, terdapat potensi bahwa dukungan terhadap kebutuhan spiritual mahasiswa non-Muslim menjadi tidak konsisten dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan dalam bentuk program yang terstruktur menjadi penting untuk menjaga kesinambungan praktik inklusivitas tersebut.

Dengan demikian, koordinasi antara Pusat Ma'had al-Jami'ah dan pihak universitas merupakan faktor strategis dalam penguatan moderasi beragama. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas cakupan pembinaan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan keberagaman dilakukan secara komprehensif, terarah, dan

berkeadilan. Hal ini sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan institusional dan praktik sosial dalam membangun kehidupan multikultural yang inklusif dan berkelanjutan.

I. Pandangan terhadap Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pandangan terhadap keberagaman merupakan aspek fundamental dalam membentuk arah dan pendekatan Pendidikan Islam, terutama dalam konteks masyarakat yang plural. Cara memaknai keberagaman akan menentukan apakah pendidikan bersifat eksklusif atau justru inklusif dan dialogis. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman dipahami sebagai potensi strategis yang dapat memperkuat proses pendidikan apabila dikelola secara tepat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Sebenarnya ini jadi kekuatan kalau dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi kelemahan. Tapi pada prinsipnya, multikulturalisme adalah kekuatan dan itu merupakan kekuatan manusia dan sunnatullah, dan Islam adalah agama yang pertama kali mungkin yang dianut oleh orang dari berbagai suku dan ras di dunia ini, sehingga Islam itu tidak identik dengan satu suku tertentu atau satu bangsa tertentu. Dia meluas di setiap peradaban, di situ ada jejak sejarah Islam, di India, Mongol, Cina, Eropa, Asia Timur, Asia Barat, Afrika, ada di semua tempat, (AI. RM03. 79)”¹⁵⁸

Secara deskriptif, pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberagaman dipahami sebagai realitas kodrati (*sunnatullah*) sekaligus sebagai potensi sosial yang memiliki nilai strategis. Keberagaman tidak diposisikan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian inheren dari kehidupan manusia yang memiliki dimensi historis dan universal dalam perkembangan Islam.

¹⁵⁸ Ahmad Izzuddin (*Mudir Pusat Ma’had al-Jami’ah*), *Wawancara*, Kota Malang, 19 Februari 2026.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma Pendidikan Islam menuju pendekatan inklusif-transformatif. Pendidikan tidak lagi berorientasi pada homogenisasi nilai, tetapi diarahkan sebagai ruang dialog yang memungkinkan pertukaran perspektif antar individu dengan latar belakang berbeda. Dalam kerangka moderasi beragama, pandangan ini mencerminkan sikap terbuka, adil, dan proporsional dalam menyikapi perbedaan, sehingga keberagaman menjadi bagian dari proses pembentukan keberagamaan yang dewasa.

Dalam perspektif multikulturalisme, keberagaman diposisikan sebagai *pedagogical resource*, yaitu sumber pembelajaran yang memperkaya pengalaman dan wawasan peserta didik. Perbedaan latar belakang agama, budaya, dan pengalaman tidak dihapus, tetapi dimanfaatkan untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, serta kemampuan hidup berdampingan secara harmonis.

Secara kritis, informan juga menegaskan bahwa keberagaman memiliki dua potensi yang berlawanan, yakni sebagai kekuatan sekaligus kelemahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman bersifat kondisional, bergantung pada bagaimana ia dikelola. Tanpa pendekatan pendidikan yang sensitif terhadap nilai multikultural, perbedaan berpotensi memicu kesalahpahaman. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang reflektif dan sistematis, keberagaman justru menjadi fondasi penguatan moderasi beragama.

Implikasinya, Pendidikan Islam tidak cukup bersifat normatif, tetapi harus adaptif terhadap realitas sosial. Proses pendidikan perlu diarahkan pada pengembangan nilai inklusivitas, dialogis, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa.

Dengan demikian, keberagaman dalam perspektif Pendidikan Islam dipahami sebagai realitas kodrati sekaligus aset strategis dalam proses pendidikan. Pengelolaan yang tepat menjadikan keberagaman sebagai sarana pembentukan sikap toleran, inklusif, dan berkeadaban. Hal ini menegaskan peran Pendidikan Islam sebagai fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis serta memperkuat praktik moderasi beragama secara berkelanjutan.

m. Harapan *Mudir* terhadap Masa Depan Ma'had sebagai Ruang Pendidikan Islam yang Multikultural

Harapan terhadap masa depan Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan adanya orientasi strategis dalam mengembangkan Ma'had sebagai ruang Pendidikan Islam yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap realitas keberagaman. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola kelembagaan menjadi aspek penting, khususnya dalam mengatur kehidupan mahasantri yang berasal dari latar belakang agama yang beragam.

Berdasarkan hasil wawancara, *Mudir* menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif terkait hak dan kewajiban mahasantri non-Muslim. Hal ini sebagaimana diungkapkan berikut:

“Memang perlu membuat regulasi tentang hak dan kewajiban mahasantri non-Muslim ketika berada di Ma'had supaya ada kesinambungan dan keselarasan bahwa di Ma'had, baik Muslim maupun non-Muslim, kedalaman spiritualitas dan keagungan akhlak itu menjadi nafas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira, kalau masing-masing punya kedalaman spiritualitas yang bagus, akhlak yang agung, ya masalah-masalah di dunia ini sebenarnya selesai. Untuk benar dan tidaknya, absolutnya nanti Allah yang akan memberikan pengaturan, (AI. RM03. 80)”¹⁵⁹

¹⁵⁹ Ahmad Izzuddin (*Mudir* Pusat Ma'had al-Jami'ah), *Wawancara*, Kota Malang, 19 Februari 2026.

Secara deskriptif, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah pengembangan Ma'had ke depan menekankan dua aspek utama, yaitu penguatan regulasi dan peneguhan nilai spiritualitas serta akhlak sebagai landasan kehidupan bersama. Regulasi dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan, sementara spiritualitas dan akhlak menjadi fondasi etis yang menyatukan mahasantri dari berbagai latar belakang.

Secara analitis, temuan ini mencerminkan upaya institusional untuk mentransformasikan praktik multikultural yang telah berjalan ke dalam kerangka yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas berfungsi sebagai *normative framework* yang memastikan bahwa prinsip inklusivitas tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga terjaga melalui aturan yang mengikat. Dalam kerangka moderasi beragama, langkah ini menunjukkan keseimbangan antara penguatan struktur kelembagaan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Lebih lanjut, penekanan pada spiritualitas dan akhlak sebagai nilai bersama menunjukkan adanya pencarian titik temu (*common ground*) di tengah perbedaan keyakinan. Pendekatan ini tidak mengarah pada penyeragaman identitas keagamaan, tetapi pada pembentukan nilai universal yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam perspektif multikulturalisme, hal ini mencerminkan strategi integrasi berbasis nilai bersama yang berfungsi sebagai perekat sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Secara kritis, gagasan penguatan regulasi juga mengandung implikasi bahwa praktik inklusivitas yang selama ini berjalan secara kultural perlu diperkuat secara struktural agar lebih konsisten dan berkelanjutan. Tanpa kerangka regulatif yang jelas, terdapat potensi terjadinya ketidaksinambungan dalam implementasi nilai-nilai multikultural di masa depan.

Selain itu, pernyataan mengenai kebenaran absolut sebagai ranah Tuhan menunjukkan adanya kesadaran teologis yang inklusif. Perspektif ini mendorong sikap rendah hati dalam beragama serta membuka ruang bagi penghormatan terhadap perbedaan, yang merupakan inti dari moderasi beragama dalam konteks kehidupan multikultural.

Dengan demikian, harapan *Mudir* mengarah pada pengembangan Ma'had sebagai institusi Pendidikan Islam yang integratif, yang memadukan kekuatan regulasi, kedalaman spiritualitas, dan keluhuran akhlak dalam mengelola keberagaman. Arah ini menegaskan bahwa Ma'had tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembinaan religius, tetapi juga sebagai ruang praksis dalam membangun pendidikan Islam yang inklusif, moderat, dan berorientasi pada harmoni sosial yang berkelanjutan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam praktik kehidupan di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga tampak dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Keberadaan mahasiswa dengan latar belakang agama yang beragam, termasuk non-Muslim, menciptakan ruang interaksi lintas agama yang nyata dalam kehidupan berasrama.

Sebagai lingkungan berbasis asrama, Ma'had memiliki pola interaksi yang intens dan berkelanjutan. Kondisi ini memungkinkan nilai-nilai pendidikan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasi melalui pengalaman hidup bersama. Dalam perspektif James A. Banks, pendidikan multikultural tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial dan budaya.¹⁶⁰

Sejalan dengan itu, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan dalam masyarakat plural diwujudkan melalui perlakuan yang setara serta penghormatan terhadap kebebasan dasar setiap individu.¹⁶¹ Hal tersebut tercermin dalam kehidupan Ma'had yang tidak menunjukkan praktik diskriminatif serta memberikan ruang bagi setiap mahasiswa untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

¹⁶⁰ James A. Banks. (2015), *Cultural Diversity and Education*, New York: Routledge, hlm. 3–7, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

¹⁶¹ John Rawls. (1999), *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 52–57, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas dalam ruang sosial bersama. Dalam pandangan Will Kymlicka, kelompok minoritas memiliki hak untuk mempertahankan identitasnya tanpa tekanan untuk melebur ke dalam budaya mayoritas.¹⁶² Sementara itu, Abdullah Saeed menekankan bahwa pendidikan Islam yang inklusif harus membuka ruang dialog antaragama tanpa adanya pemaksaan keyakinan tertentu. Hal ini tampak dalam interaksi sehari-hari mahasantri yang berlangsung terbuka dan tidak eksklusif.

Dalam praktiknya, moderasi beragama tidak hanya hadir sebagai konsep, tetapi tercermin dalam pola komunikasi, interaksi sosial, serta cara menyikapi perbedaan di antara mahasantri. Nilai *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun kolektif di lingkungan asrama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut hadir dalam berbagai bentuk pengalaman sosial, seperti hubungan yang harmonis, kemampuan mengelola perbedaan, serta adaptasi lintas agama yang berlangsung secara alami. Dengan demikian, implementasi multikulturalisme dan moderasi beragama di Ma'had dapat dipahami sebagai praktik sosial yang hidup, bukan sekadar konsep teoritis.

1. Respons Mahasantri Non-Muslim terhadap Kegiatan Keagamaan Islam

Kegiatan keagamaan Islam di Pusat Ma'had al-Jami'ah merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan karakter berbasis nilai keislaman. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, etika sosial, dan internalisasi nilai moderasi beragama.

Dalam konteks ini, kehadiran mahasantri non-Muslim menciptakan interaksi lintas agama dalam ruang hidup yang sama. Kondisi tersebut menjadikan respons mereka sebagai

¹⁶² Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship*. Oxford University Press, hlm. 10-18, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

indikator empiris untuk melihat implementasi nilai multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasantri non-Muslim merespons kegiatan keagamaan Islam secara positif dan adaptif. Mereka tidak menunjukkan penolakan, tetapi tetap menghormati jalannya kegiatan sambil mempertahankan batas keyakinan pribadi. Sikap tidak mengikuti ibadah, namun tetap menghargai pelaksanaan kegiatan keagamaan, menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas keagamaan. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

“*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*” (Al-Qur’an, al-Kafirun [109]: 6)¹⁶³

Ayat ini menunjukkan prinsip penghormatan terhadap perbedaan keyakinan tanpa adanya paksaan ataupun penghilangan identitas keagamaan masing-masing. Dalam konteks kehidupan di Ma’had, prinsip tersebut tercermin dalam sikap mahasantri yang tetap menjaga hubungan sosial yang harmonis meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi sosial di Ma’had tidak bersifat asimilatif, melainkan koeksistensial, di mana perbedaan identitas tetap dipertahankan dalam ruang sosial yang sama. Dalam perspektif Will Kymlicka, hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas untuk mempertahankan identitasnya tanpa tekanan dari kelompok mayoritas.

Selain itu, James A. Banks menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus menjamin kesetaraan tanpa menghilangkan identitas peserta didik.¹⁶⁴ Hal ini tercermin dari

¹⁶³ Surat Al-Kafirun Ayat 1-6: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/109?from=1&to=6>

¹⁶⁴ James A. Banks. (2019). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. New York: Wiley. hlm. 45–47, <https://ucarecdn.com/d82827b2-9e39-40fe-a717-alaca81ce4a9/>

tidak adanya dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas dalam interaksi sosial di Ma'had.

Dari perspektif John Rawls, kondisi tersebut menunjukkan penerapan prinsip *justice as fairness*, di mana setiap individu memiliki kebebasan dasar yang setara untuk mempertahankan keyakinannya tanpa tekanan sosial.¹⁶⁵ Sementara itu, Abdullah Saeed menekankan bahwa pendidikan Islam yang inklusif harus bersifat dialogis dan terbuka, sebagaimana terlihat dalam pola interaksi mahasantri di Ma'had.¹⁶⁶

Dalam perspektif moderasi beragama, sikap tersebut mencerminkan nilai *tasamuh* yang bersifat aktif, yaitu penghormatan terhadap perbedaan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Sikap mahasantri non-Muslim yang tidak mengikuti ibadah, tetapi tetap menghormati pelaksanaannya menunjukkan keseimbangan antara identitas pribadi dan kehidupan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat tekanan struktural maupun kultural dalam proses interaksi tersebut. Dengan demikian, relasi yang terbentuk bersifat dialogis, bukan dominatif, sehingga toleransi yang berkembang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif.

Pada akhirnya, respons mahasantri non-Muslim terhadap kegiatan keagamaan Islam tidak hanya mencerminkan penerimaan sosial, tetapi juga menunjukkan implementasi nyata nilai multikulturalisme dan moderasi beragama. Sikap saling menghormati, kemampuan menjaga identitas, serta terciptanya kehidupan yang harmonis menunjukkan bahwa keberagaman di Ma'had telah dikelola secara konstruktif dan berkeadaban.

¹⁶⁵ John Rawls (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 52–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

¹⁶⁶ Abdullah Saeed (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge. hlm. 34–39, <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/102482/1/9781134215928.pdf>

2. Pengalaman Mahasantri Non-Muslim terhadap Praktik Moderasi Beragama

Pengalaman hidup mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan asrama yang berlangsung secara intens memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang berkelanjutan, sehingga membentuk proses pembelajaran sosial yang lebih mendalam.

Dalam perspektif pendidikan multikultural, kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak hanya terjadi melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui pengalaman hidup bersama. James A. Banks menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus mampu membangun kesadaran keadilan dan kesetaraan dalam praktik sosial. Hal tersebut tampak dalam kehidupan Ma'had yang memberikan ruang interaksi inklusif bagi mahasantri dari latar belakang agama yang berbeda.¹⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian, mahasantri non-Muslim merasakan bahwa lingkungan Ma'had menyediakan ruang sosial yang aman dan terbuka. Mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa tekanan untuk mengikuti praktik keagamaan Islam. Pernyataan informan mengenai “tidak adanya pemaksaan keyakinan” menunjukkan bahwa prinsip kebebasan beragama diterapkan secara nyata dalam kehidupan asrama. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

¹⁶⁷ James A. Banks. (2015). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 30–32, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, sudah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Qur’an, al-Baqarah [2]: 256)¹⁶⁸

Kondisi tersebut mencerminkan prinsip *justice as fairness* dari John Rawls, yaitu adanya kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu dalam mempertahankan keyakinannya tanpa tekanan dari kelompok mayoritas. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui sikap sosial maupun kebijakan yang tidak mewajibkan mahasantri non-Muslim mengikuti aktivitas keagamaan Islam, sekaligus tetap memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan keyakinannya sendiri.¹⁶⁹

Dalam perspektif Abdullah Saeed, kondisi tersebut menunjukkan praktik pendidikan Islam yang inklusif dan dialogis, yaitu pendidikan yang mampu menerima keberagaman sebagai bagian dari realitas sosial. Dengan demikian, moderasi beragama di Ma’had tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi hadir dalam bentuk pengalaman sosial yang nyata.¹⁷⁰

Lebih lanjut, pengalaman tersebut menunjukkan berkembangnya toleransi aktif (*active tolerance*), yaitu sikap saling menghormati yang lahir dari kesadaran sosial, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal. Toleransi dalam konteks ini tumbuh secara alami melalui interaksi sosial sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses social learning, di mana individu belajar memahami dan menghargai perbedaan melalui pengalaman hidup bersama.

¹⁶⁸ Surat Al-Baqarah Ayat 256: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online, diakses pada 5 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=256>

¹⁶⁹ John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 61–63, <https://giuseppcapograssi.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/rawls99.pdf>

¹⁷⁰ Abdullah Saeed. (2014). *Reading the Qur’an in the Twenty-First Century*. London: Routledge, hlm. 115–118, <https://library.oapen.org/bitstream/id/9c999c2e-ad95-4799-81fd-d24cc6ebd8f/9781317974154.pdf>

Pernyataan informan yang menekankan pentingnya “saling menghargai dan menghormati satu sama lain” menunjukkan bahwa relasi sosial di Ma’had dibangun atas dasar kesadaran etis. Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas, sehingga mereka tetap dapat mempertahankan keyakinannya tanpa tekanan untuk berasimilasi dengan budaya mayoritas.¹⁷¹

Dari perspektif sosiologis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai terbentuknya *inclusive social space*, yaitu ruang sosial yang memungkinkan individu dari latar belakang berbeda hidup berdampingan tanpa mengalami marginalisasi. Mahasantri non-Muslim tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga diakui sebagai bagian dari komunitas Ma’had.

Meskipun demikian, secara kritis perlu dipahami bahwa inklusivitas tersebut juga dapat dipengaruhi oleh proses penyesuaian terhadap norma mayoritas. Oleh karena itu, diperlukan sikap reflektif agar relasi sosial yang terbentuk tetap berada dalam prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh mahasantri.

Lebih jauh, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama di Ma’had telah mencapai tahap internalisasi nilai dalam kehidupan individu. Hal ini terlihat dari cara mahasantri memaknai pengalaman hidup di lingkungan yang berbeda secara keagamaan. Mereka tidak hanya merasakan kenyamanan sosial, tetapi juga memperoleh pengalaman yang memperluas cara pandang terhadap keberagaman.

Dalam konteks ini, Ma’had tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang edukatif yang membentuk sikap dan cara pandang mahasantri terhadap kehidupan multikultural. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep moderasi beragama yang

¹⁷¹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 113–115, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara komitmen beragama dan penghormatan terhadap keberagaman.¹⁷²

Pengalaman mahasantri non-Muslim juga menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak selalu menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi sarana pembelajaran sosial yang konstruktif. Hal ini selaras dengan pandangan Azyumardi Azra yang menegaskan bahwa Islam Indonesia memiliki karakter moderat dan inklusif yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dalam keberagaman.¹⁷³

Dengan demikian, pengalaman mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan bahwa moderasi beragama telah diimplementasikan secara substantif dan aplikatif. Nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, anti-pemaksaan, dan keterbukaan sosial tidak hanya hadir dalam wacana, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa Ma'had berhasil membangun lingkungan pendidikan Islam yang religius, inklusif, dan multikultural, sehingga berpotensi menjadi model praktik moderasi beragama berbasis asrama.

3. Perspektif Mahasantri Muslim terhadap Keberadaan Mahasantri Non-Muslim

Perspektif mahasantri Muslim terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi aspek penting dalam melihat implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama. Sebagai kelompok mayoritas, mahasantri Muslim memiliki posisi yang cukup dominan dalam membentuk kultur, norma, dan pola interaksi sosial di lingkungan asrama.

Dalam perspektif sosiologis, kelompok mayoritas memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah relasi sosial, baik yang bersifat inklusif maupun eksklusif. Oleh karena

¹⁷² Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 15–17. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

¹⁷³ Azyumardi Azra. (2012). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana, hlm. 45–47.

itu, cara pandang mahasantri Muslim terhadap kelompok minoritas menjadi indikator penting untuk menilai apakah nilai toleransi telah terinternalisasi secara substantif atau masih berada pada tataran normatif. Dalam perspektif John Rawls, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip *justice as fairness*, yaitu adanya tanggung jawab untuk menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu dalam ruang sosial bersama.¹⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, mahasantri Muslim pada umumnya memandang keberadaan mahasantri non-Muslim secara positif dan inklusif. Mereka tidak memandang perbedaan agama sebagai ancaman terhadap identitas keislaman, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang harus diterima dan disikapi secara dewasa. Pernyataan informan yang menyebut mahasantri non-Muslim sebagai “saudara dalam kemanusiaan” menunjukkan adanya cara pandang yang humanis dan terbuka terhadap perbedaan.

Sebagaimana di dalam hadits yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang universal yang tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan mencakup seluruh manusia:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Basysyar), telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Isma'il bin Abu Khali, telah menceritakan kepada kami (Qais), Telah menceritakan kepada kami (Jarir bin Abdullah) ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan

¹⁷⁴ John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60–63, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

mengasihinya.” Abu Isa berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'id, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr.” (Hadits Riwayat Imam at-Tirmidzi, nomor hadits 1845)¹⁷⁵

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak dijadikan sebagai batas pemisah dalam relasi sosial. Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian penting dalam kehidupan bersama. Will Kymlicka menjelaskan bahwa masyarakat plural harus memberikan ruang yang adil bagi kelompok minoritas untuk mempertahankan identitasnya tanpa mengalami diskriminasi maupun tekanan sosial.¹⁷⁶

Selain itu, interaksi antara mahasantri Muslim dan non-Muslim menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial lintas agama. Mahasantri Muslim memandang keberadaan teman yang berbeda agama sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan sosial dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di Ma'had tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga edukatif.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural telah berjalan secara efektif karena mampu menjadikan keberagaman sebagai sumber pembelajaran sosial. Pengalaman hidup bersama dalam lingkungan yang beragam membentuk cara pandang mahasantri menjadi lebih terbuka dan inklusif.¹⁷⁷

Dari sudut pandang moderasi beragama, sikap tersebut mencerminkan nilai *tasamuh* (toleransi) dan *tawazun* (keseimbangan). Mahasantri Muslim tetap menjaga komitmen terhadap ajaran Islam yang dianut, tetapi tidak bersikap eksklusif dalam

¹⁷⁵ Bab kasih sayang sesama manusia, *Hadits Tazkia*, diakses pada 5 Juni 2026, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/3:1277>

¹⁷⁶ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–110, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

¹⁷⁷ James A. Banks. (2015). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 45–47, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya pendekatan Islam yang inklusif dalam masyarakat multikultural.¹⁷⁸

Sikap inklusif tersebut juga tampak dalam praktik sehari-hari melalui sikap empati, keramahan, dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Penekanan pada nilai adab dalam interaksi menunjukkan bahwa etika Islam menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini juga sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara komitmen beragama dan penghormatan terhadap keberagaman.¹⁷⁹

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa mahasantri Muslim menghindari sikap proselitisme yang bersifat memaksa. Pernyataan informan yang menyebutkan bahwa mereka “tidak memaksakan untuk mengenalkan Islam” menunjukkan adanya kesadaran etis dalam praktik dakwah. Dengan demikian, dakwah lebih dipahami sebagai keteladanan perilaku (*dakwah bil hal*) daripada pendekatan yang bersifat koersif.

Sikap “teguh dalam keyakinan namun lembut dalam pergaulan” menunjukkan adanya kematangan beragama dalam kehidupan mahasantri. Dalam perspektif pendidikan Islam, kondisi ini menunjukkan keberhasilan internalisasi nilai moderasi beragama melalui pengalaman sosial sehari-hari.¹⁸⁰

Meskipun demikian, secara kritis perlu dipahami bahwa posisi mayoritas tetap memiliki potensi dominasi simbolik dalam relasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran reflektif agar hubungan sosial yang terbentuk tetap berada dalam prinsip keadilan dan kesetaraan, bukan sekadar harmoni yang bersifat formal.

¹⁷⁸ Abdullah Saeed. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London: Routledge, hlm. 112–115, <https://library.oapen.org/bitstream/id/9c999c2e-ad95-4799-81fd-d24cc6ebed8f/9781317974154.pdf>

¹⁷⁹ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 18–20. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

¹⁸⁰ Ainul Yaqin. (2005). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 25–27.

Di sisi lain, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai toleransi di Ma'had telah mencapai tahap internalisasi kultural. Nilai tersebut tidak lagi hadir karena tuntutan aturan formal, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran sosial mahasantri. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa sikap moderat tersebut telah “mendarah daging” dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, perspektif mahasantri Muslim terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan adanya internalisasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama yang cukup kuat. Sikap inklusif, penghormatan terhadap perbedaan, dan kemampuan membangun relasi sosial yang harmonis menunjukkan bahwa keberagaman dipandang sebagai kekayaan sosial, bukan ancaman. Temuan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh kebijakan institusi, tetapi juga oleh kesadaran individu yang terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.

4. Peran *Musyrif* dan *Musyrifah* dalam Pendampingan Mahasantri

Terwujudnya kehidupan multikultural yang harmonis di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak dapat dilepaskan dari peran strategis *musyrif* dan *musyrifah*. Dalam sistem pendidikan berbasis asrama, mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas kedisiplinan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi nilai yang membentuk pola interaksi sosial, budaya kolektif, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan yang moderat di kalangan mahasantri.

Dalam perspektif pendidikan multikultural, peran pendidik sangat menentukan keberhasilan pembentukan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman. James A. Banks menjelaskan bahwa pendidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber pembelajaran sosial yang konstruktif. Dalam konteks Ma'had, peran

tersebut tampak melalui pola pendampingan *musyrif* dan *musyrifah* yang adaptif terhadap latar belakang religius mahasantri, termasuk mahasantri non-Muslim.

Berdasarkan hasil penelitian, *musyrif* dan *musyrifah* menunjukkan sikap profesional, terbuka, dan inklusif dalam mendampingi mahasantri non-Muslim. Pendampingan dilakukan tanpa diskriminasi dengan tetap menghormati batas keyakinan masing-masing individu. Pernyataan informan yang menyebutkan bahwa pembina “memberikan arahan tanpa memaksakan hal yang bertentangan dengan keyakinan” menunjukkan adanya sensitivitas religius dalam proses pendampingan.

Kondisi tersebut menciptakan rasa aman secara sosial dan psikologis bagi mahasantri non-Muslim dalam menjalani kehidupan asrama. Dalam perspektif multikulturalisme Will Kymlicka, hal ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya dalam ruang sosial bersama.¹⁸¹

Dalam perspektif moderasi beragama, praktik tersebut mencerminkan nilai *al-‘adl* (keadilan) dan *tawazun* (keseimbangan). Keadilan terlihat dari perlakuan yang setara terhadap seluruh mahasantri tanpa membedakan latar belakang agama, sedangkan keseimbangan tampak pada kemampuan *musyrif* dan *musyrifah* dalam menempatkan antara norma institusi berbasis nilai Islam dengan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya. Hal ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang menekankan keseimbangan antara komitmen beragama dan penghormatan terhadap keberagaman.¹⁸²

Lebih lanjut, pola pendampingan yang dilakukan *musyrif* dan *musyrifah* menunjukkan praktik kepemimpinan multikultural, yaitu kepemimpinan yang mampu

¹⁸¹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 110–112, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

¹⁸² Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 18–20. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

mengelola keberagaman secara dialogis, empatik, dan inklusif. Dalam praktiknya, mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi fasilitator sosial yang mampu menjembatani perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis antarmahasantri.

Hal tersebut terlihat dari kemampuan *musyrif* dan *musyrifah* dalam memahami latar belakang mahasantri, membangun komunikasi interpersonal yang baik, serta menciptakan ruang interaksi yang egaliter. Dalam perspektif Abdullah Saeed, pendekatan tersebut mencerminkan praktik pendidikan Islam yang inklusif dan dialogis, di mana keberagaman dipandang sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara etis dan konstruktif.¹⁸³

Selain itu, peran *musyrif* dan *musyrifah* juga tampak dalam upaya membangun struktur sosial yang inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya perlakuan diskriminatif maupun eksklusi sosial terhadap mahasantri non-Muslim. Mereka diposisikan sebagai bagian dari komunitas Ma'had, bukan sebagai kelompok luar. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi sosial yang terbentuk bersifat egaliter dan berkeadilan.

Di sisi lain, perspektif *musyrif* dan *musyrifah* terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap keberagaman. Keberagaman tidak lagi dipandang sebagai tantangan, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat memperkaya proses pendidikan. Pandangan tersebut sejalan dengan teori multikulturalisme Will Kymlicka yang memandang keberagaman sebagai aset sosial yang harus dikelola secara konstruktif.

Dalam praktik sehari-hari, *musyrif* dan *musyrifah* menerapkan prinsip kesetaraan dalam aspek sosial dan penyesuaian dalam aspek ibadah. Seluruh mahasantri memperoleh perlakuan yang sama dalam fasilitas, aturan sosial, dan interaksi keseharian. Namun, dalam aspek ibadah terdapat penyesuaian sesuai dengan keyakinan masing-masing mahasantri.

¹⁸³ Abdullah Saeed. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London: Routledge, hlm. 112–115, <https://library.oapen.org/bitstream/id/9c999c2e-ad95-4799-81fd-d24cc6ebd8f/9781317974154.pdf>

Pendekatan ini menunjukkan praktik keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kesamaan perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu.

Selain sebagai pembina, *musyrif* dan *musyrifah* juga berperan sebagai teladan (*role model*) dalam internalisasi nilai moderasi beragama. Nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterbukaan tidak hanya disampaikan melalui nasihat, tetapi juga dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan Islam, keteladanan (*uswah hasanah*) merupakan metode yang efektif dalam pembentukan karakter peserta didik.

Dalam konteks Indonesia, hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Abuddin Nata yang menekankan pentingnya keteladanan dalam membentuk sikap inklusif dan moderat dalam pendidikan Islam.¹⁸⁴

Meskipun demikian, secara kritis masih terdapat tantangan struktural dalam praktik pendampingan mahasiswa non-Muslim, terutama terkait belum adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur pembinaan mereka. Ketiadaan pedoman tertulis berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik pendampingan, terutama ketika terjadi pergantian pengelola atau pembina asrama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan agar praktik inklusivitas tidak hanya bergantung pada pendekatan personal, tetapi juga didukung oleh kebijakan institusi yang lebih sistematis.

Dengan demikian, *musyrif* dan *musyrifah* memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan multikultural yang harmonis di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pendidik, mediator, fasilitator, dan agen internalisasi nilai moderasi beragama. Keberhasilan implementasi multikulturalisme dan moderasi beragama di Ma'had tidak

¹⁸⁴ Abuddin Nata. (2012). *Pendidikan Islam Multikultural*. Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 60–62.

terlepas dari kemampuan mereka dalam mengelola keberagaman secara inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

5. Dinamika Interaksi Sosial dalam Kehidupan Asrama

Kehidupan asrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ruang sosial yang mempertemukan mahasantri dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan kebiasaan dalam satu lingkungan yang intensif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, interaksi sosial tidak hanya menjadi aktivitas keseharian, tetapi juga menjadi sarana pembentukan relasi sosial, identitas, dan pemahaman bersama antarmahasantri. Oleh karena itu, dinamika interaksi sosial di lingkungan asrama menjadi indikator penting dalam melihat implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, keharmonisan hubungan antarmahasantri dibangun melalui dua mekanisme utama, yaitu komunikasi dialogis dan kesepakatan kolektif. Komunikasi menjadi sarana utama dalam mengelola keberagaman, sebagaimana tercermin dalam pernyataan informan bahwa “kuncinya cuma satu, yakni komunikasi dan saling menghargai.” Dalam perspektif sosiologis, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses membangun pemahaman bersama yang memungkinkan terciptanya keteraturan sosial.

Dalam perspektif teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, dialog yang terbuka dan setara menjadi fondasi penting dalam membangun konsensus sosial tanpa dominasi.¹⁸⁵ Dalam konteks Ma'had, praktik komunikasi yang dialogis menunjukkan adanya ruang interaksi yang memungkinkan setiap mahasantri menyampaikan pandangan, memahami perspektif orang lain, dan membangun kesepahaman secara bersama.

¹⁸⁵ Jurgen Habermas. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, hlm. 86–101, <https://teddykw2.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/jurgen-habermas-theory-of-communicative-action-volume-1.pdf>

Kondisi tersebut juga mencerminkan prinsip *justice as fairness* dari John Rawls, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang sosial tanpa mengalami diskriminasi. Praktik komunikasi dialogis di Ma'had menunjukkan bahwa kebebasan dasar setiap mahasiswa dihormati, sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih adil dalam lingkungan yang plural.¹⁸⁶

Selain komunikasi, pembentukan kesepakatan bersama dalam lingkup kamar juga menjadi strategi penting dalam menjaga harmoni sosial. Mahasiswa memaknai kamar sebagai “rumah bersama” yang menuntut adanya tanggung jawab kolektif dalam menjaga kenyamanan dan keteraturan. Kesepakatan seperti menjaga ketenangan saat ibadah maupun menghormati waktu istirahat menunjukkan adanya praktik toleransi yang dibangun melalui kesadaran bersama.

Dalam perspektif James A. Banks, praktik tersebut menunjukkan bentuk konkret pendidikan multikultural yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial. Kesepakatan bersama tidak hanya berfungsi sebagai aturan informal, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial yang membentuk kesadaran multikultural secara praktis.¹⁸⁷

Lebih lanjut, dinamika interaksi sosial di Ma'had juga ditandai dengan berkembangnya empati dan kepedulian sosial. Interaksi yang terjalin tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga emosional, sebagaimana terlihat dari kebiasaan saling menyapa, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan antarmahasiswa. Relasi semacam ini memperkuat kohesi sosial dan membangun solidaritas yang melampaui batas identitas keagamaan.

¹⁸⁶ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 52–65, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

¹⁸⁷ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 3–25, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

Dalam perspektif Emile Durkheim, kondisi tersebut mencerminkan terbentuknya solidaritas sosial, yaitu keterikatan antarmanusia yang lahir dari pengalaman dan kehidupan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman di Ma'had tidak melahirkan jarak sosial, tetapi justru memperkuat hubungan antarmahasantri.¹⁸⁸

Selain itu, terdapat praktik toleransi yang bersifat konkret dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan mahasantri non-Muslim dalam kegiatan kolektif seperti *muhadharah* maupun kepatuhan terhadap norma sosial asrama menunjukkan adanya integrasi sosial tanpa harus menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial daripada asimilasi.

Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas dalam ruang sosial bersama. Mahasantri non-Muslim tetap dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial Ma'had tanpa kehilangan identitas keyakinannya.¹⁸⁹

Di sisi lain, mahasantri Muslim juga menunjukkan sikap toleran dengan tidak melibatkan mahasantri non-Muslim dalam aktivitas yang bersifat ritual keagamaan. Sikap ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap batas keyakinan masing-masing individu. Dalam perspektif Abdullah Saeed, kondisi tersebut mencerminkan praktik kehidupan bersama (*shared space*) yang inklusif, di mana setiap individu memiliki ruang untuk menjalankan identitasnya tanpa mengalami marginalisasi.¹⁹⁰

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa toleransi di Ma'had bersifat timbal balik (*reciprocal tolerance*), yaitu seluruh anggota komunitas memiliki peran aktif dalam menjaga harmoni sosial. Dalam perspektif Talcott Parsons, kondisi ini menunjukkan

¹⁸⁸ Emile Durkheim. (1997). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, hlm. 60–75, <https://mypaperhub.com/Durkheim-Emile-The-Division-of-Labour-in-Society.pdf>

¹⁸⁹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 10–30, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

¹⁹⁰ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 120–135.

adanya integrasi sosial, yaitu kemampuan suatu sistem sosial untuk menjaga keseimbangan melalui penyesuaian antarindividu.¹⁹¹

Lebih jauh, praktik saling mengingatkan dalam konteks ibadah menunjukkan adanya dimensi moral dalam relasi sosial antarmahasantri. Meskipun berbeda keyakinan, interaksi tetap dilandasi oleh kepedulian dan penghormatan terhadap aspek spiritual individu lain. Dalam perspektif pendidikan Islam, kondisi ini mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tasamuh* (toleransi) sebagai dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis.¹⁹²

Dalam perspektif moderasi beragama, dinamika tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara komitmen keagamaan dan keterbukaan sosial. Mahasantri tetap menjalankan ajaran agamanya masing-masing secara konsisten, tetapi tidak menutup diri terhadap interaksi lintas agama. Pernyataan informan bahwa moderasi beragama “dipraktikkan langsung, bukan hanya seminar” menunjukkan bahwa nilai tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, secara kritis perlu dipahami bahwa harmoni sosial yang terbentuk tetap memiliki potensi ketegangan laten apabila tidak dikelola secara reflektif. Dalam perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial merupakan hasil proses interaksi yang terus berlangsung antara individu dan struktur sosial. Oleh karena itu, harmoni sosial perlu terus dijaga agar praktik multikulturalisme tidak berhenti pada level simbolik, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh mahasantri.¹⁹³

¹⁹¹ Talcott Parsons. (1951). *The Social System*. New York: Free Press, hlm. 36–45, <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/The-Social-System-by-Talcott-Parsons.pdf>

¹⁹² Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 145–160.

¹⁹³ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, hlm. 110–125, <https://amstudugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/social-construction-of-reality.pdf>

Dengan demikian, dinamika interaksi sosial di Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan adanya praktik multikulturalisme dan moderasi beragama yang hidup, dialogis, dan aplikatif. Keharmonisan tidak dibangun melalui penyeragaman, melainkan melalui komunikasi dialogis, kesepakatan kolektif, empati sosial, dan toleransi timbal balik. Interaksi sosial yang terbentuk tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran sosial dalam membentuk karakter mahasantri yang inklusif, moderat, dan berkeadaban.

6. Peran *Murabbiah* dalam Pembinaan Mahasantri

Peran *murabbiah* dalam sistem pembinaan di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki posisi yang penting dalam proses internalisasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama. Dalam konteks pendidikan berbasis asrama, *murabbiah* tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai pembina yang membentuk kesadaran religius, moral, dan sosial mahasantri secara menyeluruh.

Berbeda dengan *musyrif* dan *musyrifah* yang lebih berfokus pada pendampingan teknis keseharian, *murabbiah* memiliki peran yang lebih substantif dalam pembinaan karakter dan penguatan nilai. Melalui interaksi yang intensif dengan mahasantri, *murabbiah* menjadi salah satu aktor penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang religius sekaligus inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan pembinaan yang dilakukan *murabbiah* terhadap mahasantri non-Muslim bersifat inklusif, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman. *Murabbiah* tidak mewajibkan mahasantri non-Muslim mengikuti aktivitas ritual keagamaan Islam, tetapi tetap melibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan edukatif yang bersifat universal. Pendekatan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam kehidupan asrama.

Dalam perspektif moderasi beragama, praktik tersebut mencerminkan prinsip *non-coercion* atau anti-pemaksaan dalam beragama. Hal ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang menekankan pentingnya keseimbangan antara komitmen keagamaan dan penghormatan terhadap perbedaan.¹⁹⁴ Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan *murabbiah* tidak diarahkan pada penyeragaman keyakinan, tetapi pada penguatan nilai universal seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Lebih lanjut, *murabbiah* berperan dalam menjaga keseimbangan antara identitas keislaman institusi dan realitas sosial yang plural. Dalam praktiknya, mahasantri Muslim tetap diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan Islam, sedangkan mahasantri non-Muslim diberikan ruang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Pendekatan ini menunjukkan adanya praktik keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu secara proporsional.

Dalam perspektif John Rawls, kondisi tersebut mencerminkan prinsip *difference principle*, yaitu perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menciptakan keadilan bagi semua pihak, khususnya kelompok minoritas.¹⁹⁵ Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan *murabbiah* bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keadilan yang proporsional dalam kehidupan bersama.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan pemikiran James A. Banks yang menekankan bahwa pendidikan multikultural harus mampu mengakomodasi keberagaman tanpa menghilangkan identitas dasar institusi.¹⁹⁶ Dalam konteks ini, *murabbiah* berperan

¹⁹⁴ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 18–25, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

¹⁹⁵ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 65–75, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

¹⁹⁶ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 20–35, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

sebagai fasilitator yang menjembatani antara nilai normatif Islam dan realitas sosial yang plural sehingga tercipta ruang pembelajaran yang inklusif dan dialogis.

Selain itu, *murabbiah* juga menjalankan fungsi monitoring terhadap kehidupan sosial dan keagamaan mahasantri secara berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa mahasantri non-Muslim tetap memiliki ruang untuk menjalankan ibadahnya. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi yang dibangun di Ma'had bersifat aktif, yaitu adanya keterlibatan dalam menjaga hak dan kenyamanan pihak lain dalam menjalankan keyakinannya.

Dalam perspektif Will Kymlicka, praktik tersebut mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak kelompok minoritas dalam ruang institusional. Mahasantri non-Muslim tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga diberikan ruang yang adil untuk mempertahankan identitas keagamaannya.¹⁹⁷

Peran *murabbiah* dalam membangun relasi sosial yang harmonis juga terlihat melalui upaya menciptakan interaksi yang inklusif dan egaliter antarmahasantri. Aktivitas keseharian seperti makan bersama, diskusi informal, dan interaksi sosial lainnya menjadi sarana penting dalam menumbuhkan nilai *ukhuwah insaniyah* atau persaudaraan kemanusiaan. Dalam konteks ini, keberagaman tidak dipandang sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus dikelola secara konstruktif.¹⁹⁸

Dalam perspektif Abdullah Saeed, kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya ruang sosial inklusif yang memungkinkan setiap individu hadir sebagai subjek yang setara tanpa kehilangan identitasnya.¹⁹⁹ Dengan demikian, relasi sosial yang dibangun *murabbiah* tidak bersifat eksklusif, tetapi membuka ruang interaksi yang dialogis dan terbuka.

¹⁹⁷ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–125, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

¹⁹⁸ Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 160–170.

¹⁹⁹ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 135–150.

Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai melalui interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi dan internalisasi yang berkelanjutan.²⁰⁰ Dalam konteks ini, *murabbiah* berperan sebagai aktor penting dalam menanamkan nilai moderasi beragama melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari.

Di sisi lain, *murabbiah* juga melakukan evaluasi terhadap dinamika kehidupan sosial di Ma'had. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial dan implementasi nilai toleransi di lingkungan asrama. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter sosial mahasantri.²⁰¹

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan struktural berupa belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait pembinaan mahasantri non-Muslim. Ketiadaan pedoman tertulis berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik pembinaan, terutama dalam jangka panjang atau ketika terjadi pergantian pengelola.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan multikultural belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem pendidikan. Tanpa adanya kebijakan formal, praktik inklusivitas berisiko bergantung pada pendekatan personal individu, bukan pada sistem yang berkelanjutan.

Namun, di sisi lain, fleksibilitas yang ada memberikan ruang bagi *murabbiah* untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif sesuai kebutuhan

²⁰⁰ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, hlm. 120–135, <https://amstudugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/social-construction-of-reality.pdf>

²⁰¹ Nanang Fattah. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 90–105.

mahasantri. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas pendekatan dan standarisasi kebijakan agar pembinaan tetap konsisten tanpa kehilangan sensitivitas sosial terhadap keberagaman.

Dengan demikian, *murabbiah* memiliki peran sentral dalam keberhasilan implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Melalui pendekatan yang inklusif, humanis, dan adaptif, *murabbiah* tidak hanya menjaga identitas keislaman institusi, tetapi juga mampu mengelola keberagaman secara konstruktif. Hal tersebut menjadikan Ma'had sebagai ruang pendidikan yang tidak hanya membentuk religiusitas, tetapi juga membangun kematangan sosial dan kesadaran multikultural mahasantri secara berkelanjutan.

7. Landasan Nilai Islam dalam Penerimaan Keberagaman

Penerimaan terhadap keberagaman di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, nilai multikulturalisme dan moderasi beragama tidak dipandang sebagai konsep yang berasal dari luar Islam, melainkan sebagai bagian yang selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, praktik kehidupan multikultural di Ma'had memiliki legitimasi teologis sekaligus sosiologis.

Secara normatif, penerimaan terhadap keberagaman berakar pada prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Anbiya ayat 107. Selain itu, pengakuan terhadap keberagaman juga tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal (*lita'arafu*), bukan saling meniadakan.²⁰² Ayat tersebut

²⁰² Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 517, <https://quran.kemenag.go.id>

menunjukkan bahwa keberagaman merupakan *sunnatullah* yang harus dikelola secara bijaksana dan berkeadaban.

Dalam perspektif Islam, seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan. Prinsip kesetaraan (*al-musawah*) menjadi dasar penting dalam membangun sikap inklusif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas keislaman, tetapi sebagai realitas sosial yang harus disikapi dengan adil, proporsional, dan penuh penghormatan.

Dalam perspektif John Rawls, prinsip tersebut sejalan dengan konsep *justice as fairness*, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.²⁰³ Dengan demikian, nilai kesetaraan dalam Islam memiliki relevansi dengan prinsip keadilan dalam teori sosial modern.

Dalam konteks pendidikan Islam, paradigma tersebut menjadi penting dalam menghadapi masyarakat yang plural. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan membentuk identitas keagamaan, tetapi juga menumbuhkan sikap terbuka, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Azyumardi Azra menegaskan bahwa pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai keislaman dengan prinsip pluralisme, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰⁴ Dalam konteks ini, penerimaan terhadap mahasiswa non-Muslim di Ma'had menunjukkan bentuk aktualisasi pendidikan Islam yang inklusif dan transformatif.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Ma'had tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga telah diwujudkan dalam praktik sosial yang nyata. Pendidikan tidak hanya mengakui

²⁰³ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²⁰⁴ Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 180–195.

keberagaman, tetapi juga menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh mahasantri tanpa membedakan latar belakang agama.²⁰⁵

Lebih lanjut, konsep *ukhuwah insaniyah* atau persaudaraan kemanusiaan yang berkembang di lingkungan Ma'had memperluas makna persaudaraan dalam Islam. Relasi sosial tidak hanya dibangun atas dasar kesamaan agama, tetapi juga atas dasar kemanusiaan. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang melampaui batas identitas keagamaan.²⁰⁶

Dalam praktiknya, konsep tersebut tampak dalam sikap saling menghormati, empati, dan kesadaran bersama untuk menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Dalam perspektif Abdullah Saeed, kondisi ini menunjukkan terbentuknya ruang sosial yang inklusif, di mana setiap individu dapat hadir secara setara tanpa kehilangan identitasnya.²⁰⁷

Selain itu, penerapan nilai-nilai tersebut juga menunjukkan adanya integrasi antara nilai keislaman dan nilai kebangsaan. Sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi negeri, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial.²⁰⁸ Oleh karena itu, penerimaan terhadap mahasantri non-Muslim tidak hanya dilandasi nilai teologis, tetapi juga komitmen kebangsaan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep Islam *wasathiyah* yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*al-'adl*), dan toleransi (*tasamuh*) dalam kehidupan

²⁰⁵ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 25–40, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁰⁶ Nurcholish Madjid. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina, hlm. 45–60, http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Cak_Nur_-_Islamkosmodern.pdf

²⁰⁷ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140–155.

²⁰⁸ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 69–80, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

sosial. Dalam perspektif Will Kymlicka, praktik tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralitas sebagai syarat penting dalam membangun masyarakat multikultural yang adil.²⁰⁹

Lebih jauh, integrasi antara nilai Islam dan praktik sosial di Ma'had menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi diinternalisasikan melalui pola pembinaan dan interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.

Dalam perspektif sosiologi agama, kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan proses internalisasi nilai dalam kehidupan sosial. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi dan internalisasi nilai yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, nilai moderasi beragama di Ma'had telah menjadi bagian dari budaya sosial yang hidup di lingkungan asrama.²¹⁰

Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut tetap memerlukan penguatan dalam aspek struktural dan kebijakan agar tidak hanya bergantung pada kesadaran individu. Tanpa dukungan sistem yang kuat, praktik inklusivitas berpotensi mengalami inkonsistensi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara landasan teologis, praktik sosial, dan kebijakan institusional agar nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dapat terjaga secara berkelanjutan. Dengan demikian, landasan nilai Islam dalam penerimaan keberagaman di Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kebijakan, pola

²⁰⁹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 26–35, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

²¹⁰ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, hlm. 120–130, <https://amstudugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/social-construction-of-reality.pdf>

pembinaan, dan interaksi sosial sehari-hari sehingga Ma'had mampu menjadi model pendidikan Islam yang inklusif, moderat, dan responsif terhadap keberagaman.

8. Pandangan Pimpinan Ma'had terhadap Kehidupan Multikultural

Pandangan pimpinan Ma'had terhadap kehidupan multikultural menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa keberagaman merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks pendidikan tinggi Islam. Dalam perspektif ini, keberadaan mahasiswa non-Muslim tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas keislaman institusi, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus dikelola secara bijaksana dan konstruktif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan Islam dari pendekatan yang cenderung eksklusif menuju pendekatan yang lebih inklusif, dialogis, dan kontekstual. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Azyumardi Azra yang menegaskan bahwa pendidikan Islam modern harus mampu merespons pluralitas secara terbuka dan demokratis.²¹¹

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bentuk pendidikan multikultural yang bersifat transformatif, yaitu pendidikan yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam struktur dan praktik institusi.²¹² Dengan demikian, pandangan pimpinan Ma'had mencerminkan upaya sistematis dalam membangun lingkungan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif.

Lebih lanjut, pimpinan Ma'had memandang keberadaan mahasiswa non-Muslim bukan sebagai objek dakwah dalam arti konversi agama, melainkan sebagai bagian dari praktik dakwah kultural. Dakwah dalam konteks ini diwujudkan melalui keteladanan (*dakwah bil hal*), yaitu penyampaian nilai-nilai Islam melalui perilaku, etika, dan budaya

²¹¹ Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 190–200.

²¹² James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 30–45, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dakwah dipahami secara humanis dan dialogis, bukan koersif.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan bahwa dakwah dalam masyarakat plural seharusnya dilakukan melalui keteladanan dan nilai kemanusiaan universal, bukan melalui pemaksaan keyakinan.²¹³ Dalam perspektif Abdullah Saeed, pendekatan tersebut juga mencerminkan terbentuknya ruang sosial inklusif yang memungkinkan interaksi lintas agama berlangsung secara setara tanpa dominasi.²¹⁴

Pendekatan dakwah kultural tersebut memiliki pengaruh terhadap pola pembinaan di Ma'had. Meskipun tidak terdapat pemaksaan dalam aspek teologis, mahasantri non-Muslim tetap dapat menginternalisasi nilai-nilai Islam yang bersifat universal, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Ma'had tidak hanya berorientasi pada dimensi ritual, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial yang bersifat universal.

Dalam perspektif John Rawls, pendekatan tersebut mencerminkan prinsip *justice as fairness*, yaitu institusi memberikan ruang yang adil bagi setiap individu untuk berkembang sesuai keyakinannya tanpa tekanan dari kelompok mayoritas.²¹⁵ Dengan demikian, internalisasi nilai dilakukan melalui pengalaman sosial dan keteladanan, bukan melalui pemaksaan.

Dalam perspektif moderasi beragama, kebijakan pimpinan Ma'had mencerminkan prinsip *non-coercion* atau anti-pemaksaan dalam beragama. Mahasantri non-Muslim diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya selama tetap menghormati

²¹³ Nurcholish Madjid. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina, hlm. 70–85, http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Cak_Nur_-_Islamkosmodern.pdf

²¹⁴ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 150–165.

²¹⁵ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60–70, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

norma sosial yang berlaku di lingkungan asrama. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial, yang menjadi inti dari konsep Islam *wasathiyah*. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menekankan bahwa moderasi beragama harus diwujudkan melalui sikap tengah (*tawassuth*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan (*i'tidal*) dalam merespons perbedaan²¹⁶

Dalam perspektif Will Kymlicka, kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak kelompok minoritas dalam ruang institusional. Keadilan dalam masyarakat multikultural tidak cukup hanya dengan toleransi pasif, tetapi juga memerlukan jaminan terhadap hak kelompok minoritas untuk mempertahankan identitasnya.²¹⁷

Dari perspektif multikulturalisme, sikap pimpinan Ma'had juga mencerminkan prinsip *recognition* atau pengakuan terhadap keberagaman sebagaimana dikemukakan oleh Charles Taylor.²¹⁸ Dalam konteks Ma'had, pengakuan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik sosial yang memberikan ruang bagi setiap mahasiswa untuk menjalankan keyakinannya secara proporsional.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan struktural berupa belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait pembinaan mahasiswa non-Muslim. Di satu sisi, fleksibilitas kebijakan memungkinkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Namun di sisi lain, ketiadaan pedoman tertulis

²¹⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 18–30, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

²¹⁷ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–120, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

²¹⁸ Charles Taylor. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press, hlm. 25–40, <http://ercbgd.org.rs/images/stories/multi-kulti-biblioteka/CHARLES%20TAYLOR%20MULTICULTURALISM%20AND%20POLITICS%20OF%20RECOGNITION.pdf>

berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik pembinaan, terutama dalam jangka panjang atau ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan multikultural belum sepenuhnya terintegrasi secara struktural dalam sistem kelembagaan. Tanpa dukungan kebijakan formal, praktik inklusivitas berisiko bergantung pada pendekatan personal individu, bukan pada sistem yang berkelanjutan.

Sementara itu, dalam perspektif Will Kymlicka, ketiadaan regulasi formal juga dapat melemahkan perlindungan terhadap kelompok minoritas apabila tidak dijamin secara institusional. Oleh karena itu, penguatan kebijakan menjadi penting agar nilai inklusivitas dapat terjaga secara konsisten.²¹⁹

Indikator keberhasilan kehidupan multikultural di Ma'had terlihat dari minimnya konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang harmonis antara mahasantri Muslim dan non-Muslim menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif sosiologi, kondisi tersebut mencerminkan terciptanya integrasi sosial sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Parsons, yaitu kemampuan sistem sosial untuk menjaga keseimbangan melalui penyesuaian antarindividu. Harmoni tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses pembinaan, interaksi sosial, dan internalisasi nilai yang berlangsung secara berkelanjutan.

Lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Ma'had telah membangun sistem sosial yang inklusif, yaitu sistem yang memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh anggota komunitas tanpa diskriminasi. Jika dikaitkan dengan pemikiran Rawls dan

²¹⁹ Nanang Fattah. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 100–110, https://books.google.com/books/about/Sistem_penjaminan_mutu_pendidikan_dalam.html?id=eDAWMwEACA_AJ

Kymlicka, sistem tersebut mencerminkan perpaduan antara prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas.

Dengan demikian, pandangan pimpinan Ma'had terhadap kehidupan multikultural tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah diwujudkan dalam praktik kelembagaan. Pendekatan yang inklusif, humanis, dan moderat menjadi dasar dalam membangun budaya institusi yang responsif terhadap keberagaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ma'had tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pendidikan sosial yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas masyarakat plural secara konstruktif dan berkelanjutan.

B. Pengalaman Sosial, Kultural, dan Religius Mahasantri Non-Muslim dalam Menjalani Kehidupan Berasrama di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim di lingkungan Ma'had menjadi bagian penting dalam memahami penerapan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berasrama mempertemukan individu dari latar belakang agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga membentuk proses interaksi sosial yang intens dan berkelanjutan.

Sebagai ruang kehidupan kolektif, Ma'had tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang pembelajaran sosial. Dalam perspektif pendidikan multikultural, pengalaman hidup bersama dalam lingkungan yang plural dapat membentuk sikap toleransi, keterbukaan, serta kemampuan beradaptasi dengan perbedaan. Selain itu, pengalaman religius mahasantri non-Muslim di lingkungan yang didominasi praktik keagamaan Islam menunjukkan bagaimana prinsip moderasi beragama diterapkan secara nyata, terutama dalam menjaga penghormatan terhadap keyakinan individu tanpa adanya tekanan diskriminatif.

Oleh karena itu, bagian ini menguraikan pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim selama tinggal di Ma'had sebagai bentuk internalisasi nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan berasrama.

1. Alasan Memilih Tinggal di Ma'had meskipun Berstatus Non-Muslim

Keputusan mahasantri non-Muslim untuk tinggal di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya didasarkan pada kewajiban institusi, tetapi juga karena adanya kebutuhan pengembangan diri dan pengalaman sosial. Ma'had dipandang sebagai lingkungan pendidikan yang mampu memberikan pembinaan karakter, kedisiplinan, serta pengalaman hidup bersama dalam keberagaman.

Dalam perspektif John Rawls, keputusan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap sistem sosial yang dianggap adil, di mana individu tetap merasa hak-haknya terlindungi meskipun berada di lingkungan mayoritas yang berbeda agama.²²⁰ Dengan demikian, Ma'had dipandang sebagai institusi yang tidak diskriminatif dan mampu memberikan rasa aman bagi kelompok minoritas.

Mahasantri non-Muslim memaknai Ma'had sebagai ruang pembentukan karakter melalui sistem kehidupan yang terstruktur. Aturan yang jelas, jadwal kegiatan yang terorganisir, serta pendampingan yang intensif membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan manajemen diri. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter yang menekankan pentingnya pembiasaan dalam proses internalisasi nilai-nilai sosial dan moral.²²¹

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi ini menunjukkan bahwa Ma'had telah menjalankan fungsi pendidikan multikultural dengan menyediakan lingkungan belajar

²²⁰ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 54–65, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²²¹ Thomas Lickona. (2012). *Character Matters*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 45–60.

yang setara bagi seluruh mahasantri, termasuk kelompok minoritas.²²² Daya tarik Ma'had tidak hanya terletak pada sistemnya, tetapi juga pada sikap inklusif yang dirasakan oleh mahasantri non-Muslim.

Selain sebagai ruang pembinaan karakter, Ma'had juga menjadi ruang interaksi multikultural. Kehidupan berasrama mempertemukan mahasantri dari berbagai latar belakang agama, budaya, daerah, dan suku sehingga menciptakan proses pembelajaran sosial berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*).²²³ Dalam konteks ini, pemahaman terhadap keberagaman tidak hanya diperoleh secara teoritis, tetapi melalui pengalaman hidup bersama. Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi tersebut mencerminkan adanya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan dalam kehidupan bersama.

Selain itu, kehidupan di Ma'had dipandang sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya dialog antarbudaya secara langsung. Interaksi sehari-hari membuat mahasantri non-Muslim belajar memahami perbedaan dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam perspektif Abdullah, kondisi ini menunjukkan terbentuknya ruang hidup bersama (*shared space*) yang inklusif, di mana setiap individu dapat berinteraksi tanpa kehilangan identitasnya.²²⁴

Dalam perspektif multikulturalisme, pengalaman tersebut menjadi bentuk pembelajaran sosial yang efektif karena melibatkan pengalaman langsung dalam menghadapi keberagaman. Oleh sebab itu, Ma'had dapat dipahami sebagai laboratorium sosial yang mendukung internalisasi nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

²²² James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 20–30, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²²³ H.A.R. Tilaar. (2014). *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, hlm. 75–90.

²²⁴ Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 185–200.

Lebih jauh, keputusan mahasantri non-Muslim untuk tetap tinggal di Ma'had menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengalaman hidup di lingkungan yang beragam merupakan modal sosial penting bagi kehidupan bermasyarakat di masa depan. Dalam perspektif Rawls dan Kymlicka, hal ini menunjukkan bahwa individu tidak hanya mencari kenyamanan, tetapi juga lingkungan yang menjamin keadilan dan pengakuan identitas.

Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, fenomena ini menunjukkan bahwa Ma'had telah bergerak menuju model pendidikan yang lebih inklusif dan multikultural. Ma'had tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembinaan religius, tetapi juga sebagai ruang pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.²²⁵ Jika dikaitkan dengan James A. Banks dan Abdullah, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Ma'had telah bergerak menuju model pendidikan inklusif yang tidak hanya mempertahankan identitas keislaman, tetapi juga membuka ruang bagi keberagaman secara adil dan dialogis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan mahasantri non-Muslim memilih tinggal di Ma'had dipengaruhi oleh kebutuhan pembentukan karakter, pengalaman interaksi multikultural, serta kepercayaan terhadap lingkungan yang inklusif dan moderat. Temuan ini menunjukkan bahwa Ma'had berhasil membangun ekosistem pendidikan yang religius sekaligus adaptif terhadap keberagaman.

2. Kesan Pertama ketika Memasuki Lingkungan Ma'had

Pengalaman awal memasuki Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi fase penting dalam proses adaptasi mahasantri non-Muslim terhadap kehidupan berasrama di lingkungan dengan identitas religius Islam yang kuat. Kesan pertama ini berkaitan dengan bagaimana individu membangun persepsi terhadap nilai, norma, dan budaya yang berlaku di lingkungan baru. Dalam perspektif interaksionisme

²²⁵ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–115, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

simbolik, fase awal perjumpaan berperan penting dalam membentuk makna sosial yang memengaruhi pola interaksi selanjutnya.²²⁶

Secara umum, kesan awal mahasantri non-Muslim ditandai dengan suasana religius yang kuat, kehidupan yang tertib, serta aktivitas yang terstruktur. Pada tahap awal, kondisi tersebut menimbulkan rasa canggung karena adanya perbedaan latar belakang keyakinan. Namun, dalam perspektif psikologi sosial, respons tersebut merupakan bentuk adaptasi yang wajar ketika individu berada dalam lingkungan sosial yang baru.²²⁷

Dalam perspektif John Rawls, fase ini menunjukkan proses penilaian terhadap keadilan institusional, yaitu bagaimana individu melihat apakah lingkungan tersebut memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.²²⁸ Rasa canggung perlahan berkurang ketika mahasantri non-Muslim merasakan adanya penghormatan terhadap hak dan identitas mereka.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kualitas interaksi awal yang positif, terutama melalui sikap ramah, terbuka, dan tidak diskriminatif dari *musyrif*, *musyrifah*, dan mahasantri lainnya. Interaksi yang inklusif ini membangun rasa aman psikologis (*psychological safety*) dan membantu proses penyesuaian diri.

Dalam perspektif Will Kymlicka, pengalaman tersebut menunjukkan adanya pengakuan (*recognition*) terhadap identitas kelompok minoritas sejak awal interaksi.²²⁹ Pengakuan ini penting karena membentuk rasa diterima dan posisi yang setara dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, interaksi awal tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memengaruhi terbentuknya kepercayaan sosial dan hubungan jangka panjang.

²²⁶ George Herbert Mead. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 135–150, <https://web.pdx.edu/~tothm/theory/Excerpt%20from%20Mind%20Self%20and%20Society.doc>

²²⁷ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60–70, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²²⁸ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140–150.

²²⁹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–115, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

Lebih lanjut, suasana religius di Ma'had tidak dipahami sebagai bentuk eksklusivitas, melainkan sebagai karakter institusi yang tetap memberi ruang bagi keberagaman. Dalam perspektif Abdullah, kondisi ini mencerminkan terbentuknya ruang sosial inklusif (*inclusive social space*), di mana identitas mayoritas tidak menjadi alat dominasi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, suasana religius justru menjadi bagian dari pengalaman lintas budaya yang edukatif bagi mahasantri non-Muslim.²³⁰

Dalam kerangka moderasi beragama, kondisi tersebut menunjukkan sikap keberagamaan yang tidak ekstrem dan tidak memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Atmosfer religius di Ma'had tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap perbedaan agama. Hal ini membuat mahasantri non-Muslim dapat beradaptasi tanpa merasa tertekan secara sosial maupun religius.²³¹

Proses adaptasi yang berlangsung melalui interaksi sehari-hari menunjukkan bahwa penerimaan sosial di Ma'had tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata dalam praktik kehidupan bersama. Interaksi yang berlangsung secara natural membantu terbentuknya *sense of belonging*, yaitu perasaan menjadi bagian dari komunitas sosial.

Dalam perspektif Rawls dan Kymlicka, terbentuknya *sense of belonging* menunjukkan bahwa keadilan dan pengakuan identitas telah berjalan secara efektif. Selain itu, pengalaman awal yang positif juga mencerminkan keberhasilan Ma'had dalam membangun budaya organisasi yang inklusif melalui praktik sosial sehari-hari.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Ma'had tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diwujudkan dalam budaya

²³⁰ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140–150.

²³¹ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 18–25, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

institusi.²³² Nilai inklusivitas tidak hanya diajarkan, melainkan dipraktikkan dalam kehidupan berasrama.

Namun demikian, pengalaman awal yang positif perlu dijaga melalui konsistensi praktik sosial dalam jangka panjang. Tanpa konsistensi tersebut, terdapat kemungkinan munculnya kesenjangan antara kesan awal dan pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi dan praktik inklusif tetap diperlukan agar nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dapat terus terpelihara.

Dengan demikian, kesan pertama mahasantri non-Muslim mencerminkan kualitas budaya institusi dalam mengelola keberagaman. Lingkungan yang religius namun tetap inklusif menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta memperkuat internalisasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di lingkungan Ma'had.

3. Bentuk Interaksi Sehari-Hari dengan Mahasantri Muslim

Interaksi sosial sehari-hari menjadi indikator penting dalam melihat implementasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kehidupan berasrama, interaksi berlangsung secara intens melalui berbagai aktivitas akademik, sosial, dan kultural. Karena itu, pola hubungan yang terbentuk mencerminkan tingkat internalisasi nilai toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Berdasarkan temuan penelitian, interaksi antara mahasantri non-Muslim dan Muslim berlangsung secara aktif melalui kegiatan belajar bersama, diskusi kelompok, organisasi, hingga komunikasi informal dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang intens tersebut menciptakan ruang pertemuan sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, nilai, dan perspektif secara langsung. Dalam perspektif sosiologi pendidikan,

²³² James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 30–40, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

kondisi ini merupakan bentuk pembelajaran sosial yang efektif karena melibatkan aspek kognitif, afektif, dan sosial secara bersamaan.²³³

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Ma'had tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui *hidden curriculum* dalam interaksi sosial sehari-hari. Interaksi lintas agama menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran multikultural secara kontekstual.²³⁴

Relasi sosial yang terbentuk tidak didasarkan pada identitas keagamaan, melainkan pada kesamaan posisi sebagai bagian dari komunitas Ma'had. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam membangun hubungan sosial. Dalam perspektif John Rawls, kondisi tersebut mencerminkan adanya kerja sama sosial yang adil (*fair social cooperation*), di mana setiap individu dapat berinteraksi secara setara tanpa dominasi kelompok mayoritas.²³⁵

Lebih lanjut, pola interaksi yang berkembang bersifat egaliter dan inklusif. Mahasantri non-Muslim tidak diposisikan sebagai kelompok luar, tetapi sebagai bagian dari komunitas Ma'had. Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas tanpa tuntutan untuk melebur ke dalam identitas mayoritas. Dengan demikian, integrasi sosial yang terjadi bersifat inklusif, bukan asimilatif.²³⁶

Dalam perspektif multikulturalisme, kondisi tersebut mencerminkan *recognition of diversity*, yaitu pengakuan terhadap keberagaman yang disertai penghormatan terhadap

²³³ H.A.R. Tilaar. (2014). *Multikulturalisme: Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, hlm. 85–95.

²³⁴ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 30–40, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²³⁵ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 70–80, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²³⁶ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–120, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

kesetaraan setiap individu. Relasi sosial yang terbentuk tidak bersifat dominatif, tetapi dibangun atas dasar saling menghargai.

Interaksi yang berlangsung secara natural juga menunjukkan bahwa toleransi telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi tidak hanya dimaknai sebagai sikap membiarkan perbedaan, tetapi diwujudkan melalui komunikasi terbuka, kerja sama, dan sikap saling membantu. Dalam perspektif Abdullah, kondisi ini mencerminkan terbentuknya ruang sosial inklusif (*inclusive shared space*) yang memungkinkan interaksi lintas identitas berlangsung secara dialogis dan setara.

Dalam perspektif Abdullah, kondisi ini menunjukkan terbentuknya ruang sosial inklusif (*inclusive shared space*) yang memungkinkan interaksi lintas identitas berlangsung secara dialogis dan setara.²³⁷ Toleransi yang berkembang tidak hanya normatif, tetapi telah menjadi praktik sosial yang hidup dalam keseharian.

Dalam konteks ini, toleransi dapat dipahami sebagai *active tolerance*, yaitu keterlibatan aktif dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Temuan ini sejalan dengan teori *contact hypothesis* dari Gordon Allport yang menjelaskan bahwa interaksi intensif dalam situasi setara dan kooperatif dapat mengurangi prasangka serta memperkuat kohesi sosial. Kehidupan berasrama di Ma'had mendukung terbentuknya kondisi tersebut melalui interaksi yang berlangsung terus-menerus dalam suasana kolektif.²³⁸

Selain itu, hubungan sosial yang harmonis menunjukkan bahwa Ma'had berhasil menciptakan *inclusive social space* yang aman bagi kelompok minoritas. Mahasantri non-Muslim tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga diakui sebagai bagian dari komunitas. Dalam perspektif Banks dan Kymlicka, kondisi ini menunjukkan terpenuhinya

²³⁷ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 145–155.

²³⁸ Gordon W. Allport. (1954). *The Nature of Prejudice*. Massachusetts: Addison-Wesley, hlm. 281–300, https://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/allport_Nature_of_prejudice.pdf

dua unsur penting pendidikan multikultural, yaitu kesetaraan sosial dan pengakuan identitas.

Relasi mayoritas dan minoritas di Ma'had juga tidak berkembang menjadi hubungan yang hegemonik, melainkan dikelola melalui prinsip kesetaraan dan penghormatan. Dalam perspektif Rawls, kondisi ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam menciptakan sistem sosial yang adil. Sementara itu, dalam perspektif Abdullah, hal tersebut menunjukkan keberhasilan membangun hubungan sosial yang dialogis dan inklusif.

Dengan demikian, interaksi sehari-hari antara mahasantri non-Muslim dan Muslim di Ma'had tidak hanya mencerminkan harmoni sosial, tetapi juga menjadi media utama dalam internalisasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama. Pola interaksi yang inklusif, egaliter, dan partisipatif tersebut berperan penting dalam membentuk sikap toleran, moderat, dan adaptif terhadap keberagaman.

4. Pengalaman Penerimaan dan Penghargaan terhadap Perbedaan

Pengalaman penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi indikator penting dalam melihat keberhasilan implementasi nilai multikulturalisme di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasantri non-Muslim tidak hanya hidup berdampingan dengan mahasantri Muslim, tetapi juga merasakan adanya penerimaan sosial yang nyata. Mereka memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, baik dari sesama mahasantri maupun pengelola Ma'had, sehingga identitas keagamaan tidak dijadikan dasar pembedaan dalam relasi sosial.

Penerimaan tersebut menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak dijadikan sebagai dasar eksklusif sosial, melainkan diposisikan sebagai bagian dari realitas sosial yang diakui secara kolektif. Dalam perspektif pendidikan multikultural, kondisi ini

mencerminkan implementasi prinsip *equality* dan *equity*, yaitu pemberian kesempatan yang sama sekaligus pengakuan terhadap perbedaan sebagai bagian dari struktur sosial.

Dalam kerangka pemikiran James A. Banks, praktik ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Ma'had telah bergerak dari sekadar *content integration* menuju *equity pedagogy*, di mana seluruh peserta didik, termasuk kelompok minoritas, memperoleh perlakuan adil dalam pengalaman belajar dan kehidupan sosial.²³⁹ Dengan demikian, relasi yang terbentuk bersifat inklusif dan partisipatif.

Penerimaan tersebut juga tampak dalam penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan. Mahasantri non-Muslim diberikan ruang untuk menjalankan praktik keagamaannya tanpa tekanan maupun intervensi. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama sebagai hak fundamental manusia sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 18.²⁴⁰ Dalam perspektif John Rawls, kondisi ini mencerminkan prinsip *equal basic liberties*, yaitu bahwa setiap individu memiliki kebebasan dasar yang sama, termasuk kebebasan beragama.²⁴¹

Dalam kerangka moderasi beragama, kondisi ini mencerminkan nilai *tasamuh* (toleransi) dan *al-'adl* (keadilan). Toleransi tidak hanya dimaknai sebagai sikap menerima perbedaan secara pasif, tetapi juga kesediaan aktif untuk menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Sementara itu, keadilan tercermin dalam perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap seluruh mahasantri.²⁴²

Sikap tidak membedakan yang ditunjukkan oleh *musyrif* dan *musyrifah* dan mahasantri lainnya juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas kelompok lain

²³⁹ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 23–30, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁴⁰ United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations, Pasal 18, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

²⁴¹ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²⁴² Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, hlm. 18–25, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation-download/materi-penyuluhan-moderasi-beragama>

sebagai bagian yang setara dalam kehidupan sosial. Dalam teori multikulturalisme, hal ini dikenal sebagai konsep *recognition*. Sejalan dengan pemikiran Will Kymlicka, pengakuan terhadap kelompok minoritas perlu disertai pemberian ruang yang adil untuk mengekspresikan identitasnya.²⁴³ Kondisi ini menunjukkan bahwa Ma'had telah mengarah pada bentuk *multicultural citizenship*, di mana kelompok minoritas tetap menjadi bagian utuh dari komunitas tanpa kehilangan identitasnya.

Dari perspektif konstruksi sosial, pengalaman penerimaan tersebut terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²⁴⁴ Dalam konteks Ma'had, nilai penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi juga dipraktikkan secara nyata sehingga membentuk kesadaran kolektif yang inklusif.

Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan terbentuknya *shared space* sebagaimana dikemukakan oleh M. Amin Abdullah, yaitu ruang pertemuan yang memungkinkan dialog antaridentitas berlangsung secara setara.²⁴⁵ Dengan demikian, Ma'had tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang interkultural yang mendukung tumbuhnya kesalingpahaman dan sikap saling menghargai.

Pengalaman diterima dan dihargai tersebut turut membentuk *sense of belonging* pada mahasiswa non-Muslim. Ketika individu merasa diakui sebagai bagian dari

²⁴³ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 10–18, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

²⁴⁴ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 28–35, https://etheses.iainkediri.ac.id/15100/3/20103035_Bab%202.pdf

²⁴⁵ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 112–120.

komunitas, mereka cenderung memiliki keterikatan emosional yang lebih kuat dan lebih aktif dalam kehidupan sosial.²⁴⁶

Temuan ini memperlihatkan bahwa lingkungan Ma'had telah melampaui toleransi pasif menuju praktik inklusivitas yang nyata. Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya integrasi antara keadilan, pengakuan identitas, dan ruang interaksi yang setara, sehingga Ma'had mampu menjadi lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman secara nyata.²⁴⁷

5. Peran Teman Muslim dalam Mendukung Aktivitas Mahasantri Non-Muslim

Dalam proses adaptasi kehidupan berasrama di lingkungan multikultural, teman sebaya memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi dalam membantu individu memahami norma, nilai, dan budaya yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasantri Muslim berperan aktif dalam mendukung mahasantri non-Muslim, baik dalam aspek akademik maupun kehidupan sosial sehari-hari di Ma'had. Dukungan tersebut terlihat melalui pemberian informasi mengenai tata tertib asrama, kebiasaan kolektif, hingga keterlibatan dalam kegiatan belajar bersama. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini menunjukkan adanya proses *social learning* yang berlangsung secara informal namun efektif dalam membantu adaptasi sosial individu.

Dalam perspektif James A. Banks, fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial yang setara. Dukungan dari mahasantri Muslim mencerminkan penerapan *equity*

²⁴⁶ Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). "The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation." *Psychological Bulletin*, hlm. 497–529, <https://psycnet.apa.org/record/1995-29052-001>

²⁴⁷ Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, hlm. 145–152.

pedagogy, di mana lingkungan sosial turut menjadi ruang pembelajaran yang adil dan inklusif bagi seluruh mahasiswa, termasuk kelompok minoritas.²⁴⁸

Dukungan yang diberikan juga tidak hanya bersifat instrumental, tetapi mencakup dimensi emosional dan psikososial. Mahasiswa Muslim tidak hanya membantu dalam aspek teknis, tetapi juga menciptakan rasa aman, nyaman, dan diterima bagi mahasiswa non-Muslim. Dalam perspektif psikologi sosial, dukungan sosial (*social support*) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu, mengurangi tekanan psikologis, serta memperkuat keterikatan terhadap lingkungan sosial. Sidney Cobb menyatakan bahwa dukungan sosial membuat individu merasa dihargai dan menjadi bagian dari jaringan sosial yang saling peduli. Hal ini diperkuat oleh Sheldon Cohen dan Thomas A. Wills yang menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat menjadi penyangga terhadap stres dalam menghadapi lingkungan baru.²⁴⁹

Jika dianalisis melalui perspektif John Rawls, bentuk dukungan ini mencerminkan praktik keadilan sosial, khususnya prinsip *fair equality of opportunity*. Mahasiswa non-Muslim memperoleh kesempatan yang sama untuk beradaptasi dan berkembang karena adanya dukungan dari lingkungan sosial, sehingga perbedaan latar belakang tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pengalaman sosial yang setara.²⁵⁰

Relasi sosial yang terbentuk di Ma'had juga bersifat egaliter dan partisipatif, bukan relasi hierarkis antara mayoritas dan minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai multikulturalisme tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi telah terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari. Sejalan dengan pemikiran Banks, pendidikan

²⁴⁸ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 45–52, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁴⁹ Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). "Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis." *Psychological Bulletin*, hlm. 310–357, <https://scholar.google.co.id/citations?user=8xLwgYQAAAAJ&hl=id>

²⁵⁰ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 63–70, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

multikultural menekankan pentingnya interaksi yang setara dan penghargaan terhadap keberagaman dalam membangun lingkungan yang inklusif.

Dalam perspektif Will Kymlicka, dukungan dari mahasiswa Muslim terhadap mahasiswa non-Muslim mencerminkan bentuk *recognition* atau pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas. Pengakuan tersebut penting agar kelompok minoritas tidak mengalami marginalisasi, tetapi tetap dapat mempertahankan identitasnya dalam kehidupan bersama.²⁵¹

Selain itu, sikap inklusif yang ditunjukkan mahasiswa Muslim juga mencerminkan implementasi nilai moderasi beragama, khususnya prinsip *tawasuth* dan *tasamuh*. Mahasiswa Muslim tidak menempatkan diri sebagai kelompok dominan, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang setara.²⁵² Dengan demikian, relasi sosial yang terbentuk mencerminkan praktik keberagamaan yang moderat, terbuka, dan tidak diskriminatif.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, interaksi tersebut menunjukkan terbentuknya *inclusive shared space*, yaitu ruang interkultural yang memungkinkan dialog, kerja sama, dan saling memahami lintas perbedaan.²⁵³ Kondisi ini memperkuat posisi Ma'had sebagai ruang pendidikan Islam yang terbuka terhadap pluralitas.

Lebih jauh, peran teman Muslim dalam mendukung adaptasi sosial mahasiswa non-Muslim menunjukkan bahwa internalisasi nilai multikulturalisme tidak hanya berlangsung melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui interaksi interpersonal sehari-hari. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui

²⁵¹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 26–33, <https://www.nzlii.org/nz/journals/OtaLawRw/1996/13.pdf>

²⁵² Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, hlm. 22–27, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation-download/materi-penyuluhan-moderasi-beragama>

²⁵³ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 120–128.

interaksi yang berulang dan bermakna.²⁵⁴ Oleh karena itu, praktik saling membantu dan menghargai menjadi media efektif dalam menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas secara konkret.

Dengan demikian, peran teman Muslim dalam mendukung aktivitas mahasantri non-Muslim tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga edukatif dan transformatif. Dukungan tersebut memperkuat integrasi sosial, meningkatkan kenyamanan adaptasi, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi multikulturalisme dan moderasi beragama di Ma'had tidak hanya bergantung pada kebijakan institusi, tetapi juga pada kualitas relasi sosial antarindividu yang dibangun secara partisipatif dan berkelanjutan.

6. Pengalaman Mahasantri Muslim Berinteraksi dengan Mahasantri Non-Muslim

Interaksi antara mahasantri Muslim dan non-Muslim di lingkungan Ma'had tidak hanya menunjukkan proses adaptasi kelompok minoritas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kelompok mayoritas membangun sikap terhadap perbedaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasantri Muslim tidak bersikap dominatif, melainkan membangun relasi yang terbuka, inklusif, dan setara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola relasi mayoritas–minoritas yang hierarkis menuju hubungan yang lebih dialogis dan egaliter.

Relasi tersebut berkembang melalui aktivitas sehari-hari, seperti belajar bersama, berdiskusi, dan berbagi pengalaman hidup di asrama. Interaksi semacam ini menunjukkan bahwa nilai sosial tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dibentuk melalui pengalaman bersama yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari di Ma'had menjadi media pembelajaran sosial yang efektif dalam menanamkan nilai inklusivitas.

²⁵⁴ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 32–40, https://etheses.iainkediri.ac.id/15100/3/20103035_Bab%202.pdf

Menariknya, perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam membangun kedekatan sosial. Sebaliknya, perbedaan justru menjadi unsur yang memperkaya interaksi. Dalam perspektif Emile Durkheim, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas sosial yang dibangun di atas keberagaman.²⁵⁵ Interaksi di Ma'had lebih mendekati solidaritas organik, yaitu keterikatan sosial yang lahir dari perbedaan dan saling melengkapi antarindividu.

Praktik saling mengingatkan dalam konteks ibadah juga menunjukkan adanya toleransi aktif (*active tolerance*). Sikap tersebut tidak hanya berupa penerimaan pasif terhadap perbedaan, tetapi juga kesadaran untuk menghormati dan menjaga ruang keberagaman orang lain. Dalam kerangka moderasi beragama, kondisi ini mencerminkan nilai *tasamuh* yang bersifat substantif karena diwujudkan melalui tindakan nyata.²⁵⁶

Pola interaksi yang egaliter ini menunjukkan bahwa posisi mayoritas tidak digunakan untuk mendominasi, tetapi untuk menciptakan ruang sosial yang setara. Dalam perspektif John Rawls, kondisi ini mencerminkan praktik *justice as fairness*, yaitu relasi sosial yang dibangun atas dasar kesetaraan dan penghormatan terhadap kebebasan individu.²⁵⁷ Dengan demikian, keadilan tidak hanya hadir dalam aturan formal, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Keterbukaan mahasantri Muslim juga menciptakan rasa aman bagi mahasantri non-Muslim untuk mempertahankan identitasnya. Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas minoritas tanpa adanya tuntutan

²⁵⁵ Emile Durkheim. (1990). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, hlm. 84–92, <https://books.google.co.id/books?id=ocyDAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁵⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, hlm. 20–26, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation-download/materi-penyuluhan-moderasi-beragama>

²⁵⁷ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 63–72, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

asimilasi ke dalam budaya mayoritas.²⁵⁸ Artinya, interaksi yang terbangun tidak menghapus perbedaan, tetapi merawatnya dalam kerangka kebersamaan.

Dalam konteks ini, Ma'had tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya perjumpaan lintas identitas secara intens. Menurut James A. Banks, kondisi tersebut mencerminkan lingkungan pendidikan multikultural yang ideal, di mana interaksi lintas perbedaan berlangsung secara setara dan menjadi bagian dari proses pembelajaran.²⁵⁹

Sejalan dengan itu, M. Amin Abdullah menyebut kondisi tersebut sebagai *shared space*, yaitu ruang perjumpaan interkultural yang memungkinkan identitas berbeda saling berdialog dan membangun pemahaman bersama. Di Ma'had, ruang ini terlihat dalam interaksi sehari-hari yang terbuka dan tidak eksklusif.²⁶⁰

Dari perspektif konstruksi sosial, interaksi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut membentuk realitas sosial yang inklusif. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses interaksi yang berulang dan bermakna.²⁶¹ Oleh karena itu, praktik interaksi yang inklusif tidak hanya menjadi hasil dari sistem sosial, tetapi juga memperkuat budaya inklusivitas itu sendiri.

Dengan demikian, pengalaman mahasantri Muslim dalam berinteraksi dengan mahasantri non-Muslim menunjukkan terbentuknya budaya sosial yang berlandaskan kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa harmoni sosial di Ma'had dibangun melalui integrasi antara keadilan, pengakuan identitas, pendidikan multikultural, dan dialog interkultural. Interaksi

²⁵⁸ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 34–40, <https://www.nzlii.org/nz/journals/OtaLawRw/1996/13.pdf>

²⁵⁹ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 125–132.

²⁶⁰ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 36–45, https://etheses.iainkediri.ac.id/15100/3/20103035_Bab%202.pdf

²⁶¹ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 55–60, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

sederhana dalam kehidupan sehari-hari tersebut pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter moderat dan memperkuat praktik moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam berbasis asrama.

7. Pengalaman yang Menunjukkan Sikap Saling Menghargai antar Mahasantri Lintas Agama

Pengalaman sehari-hari menjadi indikator penting untuk melihat apakah nilai multikulturalisme benar-benar hidup dalam lingkungan Ma'had. Di Pusat Ma'had al-Jami'ah, sikap saling menghargai antar mahasantri lintas agama tidak hanya diajarkan sebagai norma, tetapi juga dipraktikkan secara alami dalam kehidupan bersama. Penghargaan terhadap perbedaan tumbuh melalui pengalaman hidup bersama yang membentuk kesadaran kolektif.

Interaksi yang berlangsung secara intens di lingkungan asrama membentuk sensitivitas sosial terhadap keberagaman. Mahasantri non-Muslim menunjukkan penghormatan terhadap praktik ibadah mahasantri Muslim dengan menjaga suasana kondusif, terutama pada bulan Ramadhan. Sebaliknya, mahasantri Muslim juga menunjukkan sikap terbuka dan tidak eksklusif terhadap mahasantri non-Muslim. Relasi timbal balik ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perbedaan dibangun melalui proses saling memahami dan saling menyesuaikan.

Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk mutual *recognition*, yaitu pengakuan timbal balik antarindividu sebagai subjek yang setara sebagaimana dikemukakan Charles Taylor.²⁶² Dalam konteks Ma'had, pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi tampak dalam tindakan nyata yang menjaga kenyamanan dan martabat masing-masing individu dalam menjalankan keyakinannya.

²⁶² Charles Taylor. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press, hlm. 25–35, <http://ercbgd.org.rs/images/stories/multi-kulti-biblioteka/CHARLES%20TAYLOR%20MULTICULTURALISM%20AND%20POLITICS%20OF%20RECOGNITION.pdf>

Sikap saling menghargai juga terlihat dalam tindakan sederhana, seperti menjaga etika komunikasi, menghindari sikap yang menyinggung keyakinan orang lain, serta saling mengingatkan dalam konteks kebaikan. Praktik sederhana tersebut memiliki makna sosial yang besar karena menunjukkan bahwa relasi yang terbangun tidak sekadar formal, tetapi dilandasi empati dan kepedulian. Dalam perspektif Emile Durkheim, kondisi ini mencerminkan terbentuknya kohesi sosial, di mana keberagaman justru memperkuat keterikatan antarindividu.²⁶³

Jika ditinjau dari perspektif John Rawls, praktik tersebut mencerminkan keadilan sosial karena setiap individu memperoleh ruang yang setara untuk mengekspresikan identitasnya tanpa tekanan maupun diskriminasi.²⁶⁴ Dengan demikian, keadilan tidak hanya hadir dalam aturan formal, tetapi juga dalam etika interaksi sehari-hari.

Keterbukaan yang berkembang dalam interaksi lintas agama juga menunjukkan bahwa kelompok minoritas tidak dipaksa untuk menyesuaikan diri secara berlebihan dengan kelompok mayoritas. Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi ini mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap identitas kelompok minoritas sehingga mereka tetap dapat mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari komunitas.²⁶⁵

Menariknya, sikap saling menghargai di Ma'had tidak bersifat pasif, tetapi berkembang menjadi toleransi aktif (*active tolerance*). Mahasantri tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga berupaya menciptakan suasana sosial yang inklusif dan harmonis. Dalam kerangka moderasi beragama, kondisi ini sejalan dengan nilai *tasamuh*, yaitu sikap

²⁶³ Emile Durkheim. (1990). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, hlm. 84–92, <https://ia601408.us.archive.org/14/items/in.ernet.dli.2015.233884/2015.233884.The-Division.pdf>

²⁶⁴ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60–70, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²⁶⁵ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–45, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

menghargai perbedaan sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dikelola secara bijaksana.²⁶⁶

Dalam perspektif James A. Banks, pengalaman hidup di lingkungan yang beragam menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran multikultural.²⁶⁷ Nilai seperti empati, penghormatan, dan keterbukaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi diinternalisasi melalui pengalaman sosial sehari-hari.

Sejalan dengan itu, M. Amin Abdullah menekankan pentingnya *shared space* atau ruang pertemuan interkultural sebagai media dialog antaridentitas.²⁶⁸ Dalam konteks Ma'had, ruang tersebut tampak dalam interaksi sehari-hari yang memungkinkan setiap individu hadir sebagai dirinya sendiri tanpa rasa terancam oleh perbedaan.

Dengan demikian, pengalaman saling menghargai antar mahasiswa lintas agama di lingkungan Ma'had menunjukkan terbentuknya budaya sosial yang inklusif dan berkeadaban. Temuan ini memperlihatkan bahwa harmoni sosial di Ma'had dibangun melalui integrasi antara pengakuan identitas, keadilan sosial, pendidikan multikultural, dan dialog interkultural. Praktik-praktik sederhana dalam kehidupan sehari-hari tersebut pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membangun sikap toleran, inklusif, dan moderat di lingkungan pendidikan Islam berbasis asrama.

8. Perbedaan Pendapat atau Gesekan Karena Perbedaan Keyakinan

Dalam kehidupan sosial yang melibatkan individu dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun, yang terpenting bukanlah keberadaan perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana perbedaan tersebut

²⁶⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, hlm. 22–28, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation-download/materi-penyuluhan-moderasi-beragama>

²⁶⁷ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 60–66, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁶⁸ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 130–138.

dikelola dalam relasi sosial. Kualitas lingkungan multikultural dapat dilihat dari kemampuannya mengelola potensi gesekan menjadi interaksi yang konstruktif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan di lingkungan Ma'had tidak berkembang menjadi konflik yang signifikan. Perbedaan tersebut cenderung diselesaikan melalui komunikasi terbuka, klarifikasi, dan dialog yang berlangsung secara santai serta tidak konfrontatif. Pola ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk saling memahami daripada mempertentangkan perbedaan. Dengan demikian, interaksi sosial tidak diarahkan untuk memenangkan pendapat, tetapi untuk menemukan titik temu dalam keberagaman.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *tabayyun* dalam ajaran Islam, yaitu upaya melakukan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan tidak hanya dipahami sebagai doktrin, tetapi juga diterapkan sebagai pedoman praktis dalam menjaga harmoni sosial.

Praktik dialogis yang berkembang juga menunjukkan internalisasi nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap terbuka terhadap perbedaan, tidak reaktif, dan mengedepankan musyawarah mencerminkan nilai *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan).²⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di Ma'had tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi telah menjadi etika sosial dalam menyelesaikan persoalan.

Dalam perspektif sosiologi konflik, fenomena ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak selalu bersifat destruktif. Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik dapat memperkuat integrasi sosial apabila dikelola dengan baik.²⁷⁰ Dalam konteks Ma'had,

²⁶⁹ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI, hlm. 18–26, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation-download/materi-penyuluhan-moderasi-beragama>

²⁷⁰ Lewis A. Coser. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press, hlm. 31–38, <https://books.google.co.id/books?id=GvErBayPhcgC&printsec=copyright&hl=id>

perbedaan pendapat justru menjadi ruang pembelajaran sosial yang memperkaya pemahaman antarindividu, bukan pemicu perpecahan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas tidak berkembang menjadi hubungan yang dominatif. Mahasantri non-Muslim tetap memiliki ruang yang aman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa tekanan sosial. Dalam perspektif John Rawls, situasi ini mencerminkan *justice as fairness*, yaitu kondisi di mana setiap individu memperoleh kebebasan yang sama untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa mengalami ketidakadilan struktural.²⁷¹

Dalam perspektif Will Kymlicka, kondisi ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas dalam ruang sosial mayoritas. Perbedaan tidak dipaksa untuk diseragamkan, tetapi diterima sebagai bagian yang sah dalam kehidupan bersama.²⁷²

Dari perspektif pendidikan multikultural, kemampuan mengelola perbedaan melalui dialog menunjukkan bahwa Ma'had telah berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang efektif. Menurut James A. Banks, pengalaman semacam ini mencerminkan praktik pendidikan multikultural yang substantif karena peserta didik belajar menghadapi perbedaan secara langsung dan menyelesaikannya secara konstruktif.²⁷³

Sejalan dengan itu, M. Amin Abdullah menekankan pentingnya *shared space* atau ruang dialog interkultural dalam mengelola perbedaan secara produktif.²⁷⁴ Dalam konteks Ma'had, ruang tersebut terlihat melalui komunikasi terbuka yang memungkinkan perbedaan dibicarakan tanpa rasa takut maupun dominasi.

²⁷¹ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–65, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²⁷² Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–45, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

²⁷³ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 60–70, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁷⁴ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 130–138.

Selain *tabayyun*, penyelesaian perbedaan juga mencerminkan konsep *islah*, yaitu upaya memperbaiki dan mendamaikan hubungan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak berfokus pada siapa yang benar atau salah, tetapi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam kerangka ini, konsep *ukhuwah insaniyah* menjadi landasan penting karena hubungan kemanusiaan ditempatkan di atas perbedaan identitas keagamaan.

Dengan demikian, perbedaan pendapat atau gesekan yang muncul di lingkungan Ma'had tidak berkembang menjadi konflik destruktif, tetapi menjadi bagian dari dinamika sosial yang sehat dan produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan Ma'had dalam mengelola perbedaan merupakan hasil integrasi antara keadilan sosial, pengakuan identitas, pendidikan multikultural, dan dialog interkultural. Penyelesaian melalui komunikasi terbuka, prinsip *tabayyun*, dan nilai moderasi beragama memperlihatkan bahwa kehidupan multikultural di Ma'had telah berkembang secara nyata dalam praktik sosial sehari-hari.

9. Bentuk Interaksi Mahasantri Non-Muslim dengan Mahasantri Muslim

Interaksi antara mahasantri non-Muslim dan mahasantri Muslim di lingkungan Ma'had berlangsung secara alami dan tidak terbatas pada hubungan formal semata. Relasi tersebut tumbuh melalui aktivitas keseharian, seperti diskusi santai, belajar bersama, hingga interaksi spontan dalam kehidupan asrama. Ruang-ruang informal ini justru menjadi dasar terbentuknya kedekatan sosial yang lebih autentik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi batas pemisah, tetapi diterima sebagai bagian dari dinamika sosial sehari-hari. Relasi yang terbangun juga tidak menunjukkan adanya jarak sosial yang signifikan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam perspektif Bhikhu Parekh, masyarakat multikultural yang sehat ditandai oleh hubungan yang setara, dialogis, dan bebas dari dominasi satu kelompok

terhadap kelompok lain.²⁷⁵ Dalam konteks Ma'had, interaksi tersebut mencerminkan relasi horizontal yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang setara dalam kehidupan sosial.

Interaksi yang berlangsung juga memperlihatkan adanya proses *cross-cultural learning* atau pembelajaran lintas budaya yang terjadi secara alami. Rasa ingin tahu mahasantri non-Muslim terhadap praktik keagamaan Islam yang direspons secara terbuka oleh mahasantri Muslim menciptakan ruang dialog yang produktif. Proses ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membangun pemahaman dan empati terhadap perbedaan. Dalam perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, interaksi yang berlangsung secara berulang dan bermakna berperan dalam membentuk realitas sosial yang inklusif.²⁷⁶

Dari sudut pandang sosiologi, pola interaksi tersebut termasuk interaksi sosial asosiatif karena mengarah pada kerja sama, akomodasi, dan integrasi sosial. Hubungan antar mahasantri tidak hanya bersifat praktis, tetapi berkembang menjadi relasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif pendidikan multikultural, pengalaman berinteraksi langsung dengan individu yang berbeda latar belakang menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran pluralitas. H.A.R. Tilaar menegaskan bahwa nilai multikultural tidak cukup diajarkan secara teoritis, tetapi harus dihidupkan melalui pengalaman sosial yang nyata.²⁷⁷ Dalam konteks ini, kehidupan berasrama di Ma'had menjadi ruang pembelajaran yang memungkinkan nilai toleransi dan inklusivitas tumbuh melalui praktik sehari-hari.

²⁷⁵ Bhikhu Parekh. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 49–55, https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/HIA261/Parekh_Rethinking_multiculturalism.pdf

²⁷⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 28–35, https://etheses.iainkediri.ac.id/15100/3/20103035_Bab%202.pdf

²⁷⁷ H. A. R. Tilaar. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, hlm. 82–90, <https://books.google.com/books/about/Multikulturalisme.html?hl=id&id=0z7xAAAACAAJ>

Pola interaksi yang inklusif dan partisipatif ini juga mencerminkan nilai moderasi beragama, khususnya *tasamuh* (toleransi) dan *tawazun* (keseimbangan). Mahasantri tetap menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa kehilangan keterbukaan dalam berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu berjalan berdampingan dengan sikap sosial yang inklusif.

Jika dianalisis lebih jauh, kondisi ini sejalan dengan pemikiran James A. Banks yang menekankan pentingnya interaksi lintas identitas dalam membangun kesadaran multikultural.²⁷⁸ Sementara itu, dalam perspektif Will Kymlicka, interaksi yang setara tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kelompok minoritas tanpa adanya tekanan untuk berasimilasi secara paksa.²⁷⁹

Dengan demikian, bentuk interaksi antara mahasantri non-Muslim dan Muslim di lingkungan Ma'had menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak dibangun melalui penghapusan perbedaan, tetapi melalui kemampuan mengelola perbedaan secara dewasa. Interaksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari menjadi media yang efektif dalam menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai. Kondisi ini menegaskan bahwa kehidupan multikultural yang inklusif lebih ditentukan oleh kualitas relasi sosial sehari-hari daripada aturan formal semata.

10. Penyelesaian Konflik yang Disebabkan oleh Perbedaan Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang secara langsung disebabkan oleh perbedaan agama di lingkungan Ma'had hampir tidak ditemukan. Kondisi ini bukan berarti tidak adanya perbedaan, tetapi menunjukkan bahwa potensi konflik berhasil dikelola dengan baik sebelum berkembang menjadi pertentangan terbuka. Konflik yang muncul

²⁷⁸ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 60–68, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁷⁹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–44, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

umumnya bersifat teknis, seperti perbedaan kebiasaan sehari-hari atau kesalahpahaman dalam interaksi, yang merupakan hal wajar dalam kehidupan bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya integrasi sosial yang cukup matang di antara mahasantri. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, integrasi sosial terbentuk ketika individu memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga keteraturan dan menjunjung norma bersama.²⁸⁰ Di lingkungan Ma'had, kesadaran ini tampak dalam sikap yang lebih mengutamakan harmoni dan menghindari konflik dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui mekanisme informal, seperti diskusi langsung atau “sidang kamar”. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial. Konflik tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi sebagai persoalan yang perlu diselesaikan melalui dialog terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang komunikasi di Ma'had bersifat cair dan memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat tanpa tekanan.

Dalam perspektif Islam, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah sebagai proses penyelesaian masalah secara partisipatif dan kolektif. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 yang menekankan pentingnya konsultasi bersama dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Ma'had tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan nilai keagamaan.

Praktik penyelesaian konflik yang dialogis juga mencerminkan nilai moderasi beragama. Sikap terbuka terhadap perbedaan, tidak reaktif, dan mengutamakan titik temu menunjukkan implementasi prinsip *tawasuth* (jalan tengah) dan *tasamuh* (toleransi). Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya terlihat dalam sikap menerima

²⁸⁰ Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 110–118.

perbedaan, tetapi juga dalam cara menyelesaikan persoalan yang muncul akibat perbedaan tersebut.

Jika dianalisis lebih jauh, minimnya konflik berbasis agama juga menunjukkan bahwa relasi sosial di Ma'had tidak bersifat dominatif. Dalam perspektif John Rawls, kondisi ini mencerminkan *justice as fairness*, yaitu situasi di mana setiap individu memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan struktural. Konflik tidak berkembang karena hubungan sosial dibangun atas dasar kesetaraan dan penghormatan.

Sejalan dengan itu, Will Kymlicka menjelaskan bahwa stabilitas dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas. Dalam konteks Ma'had, minimnya konflik berbasis agama menunjukkan bahwa mahasantri non-Muslim tidak mengalami marginalisasi sehingga tidak muncul resistensi sosial yang berpotensi memicu konflik.

Dari perspektif pendidikan multikultural, kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran sosial berjalan secara efektif. Menurut James A. Banks, kemampuan mengelola konflik melalui dialog merupakan bagian penting dari kompetensi multikultural dalam masyarakat plural. Dengan demikian, kehidupan di Ma'had tidak hanya membentuk sikap toleran, tetapi juga melatih keterampilan penyelesaian konflik secara konstruktif.

Sejalan dengan itu, M. Amin Abdullah menekankan pentingnya *shared space* atau ruang interaksi interkultural yang sehat dalam mengelola perbedaan. Dalam konteks Ma'had, ruang tersebut tampak dalam pola komunikasi yang terbuka dan setara, sehingga perbedaan dapat dibicarakan tanpa rasa takut maupun dominasi.²⁸¹

Dengan demikian, minimnya konflik berbasis agama di lingkungan Ma'had menunjukkan adanya mekanisme sosial yang efektif dalam mengelola perbedaan. Harmoni yang tercipta bukan karena hilangnya potensi konflik, tetapi karena adanya kemampuan

²⁸¹ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 130–138.

untuk menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghargai. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kehidupan multikultural tidak ditentukan oleh ketiadaan perbedaan, melainkan oleh kedewasaan sosial dalam merespons perbedaan secara konstruktif.

11. Pandangan *Murabbiah* terhadap Keberadaan Mahasantri Non-Muslim

Pandangan *murabbiah* yang menerima keberadaan mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya pola pendidikan Islam yang terbuka dan adaptif terhadap realitas sosial yang plural. Keberagaman tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dibatasi, tetapi sebagai kondisi yang perlu dipahami dan dikelola secara konstruktif. Dengan demikian, sikap inklusif tidak hanya bersifat toleran, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran pedagogis dalam menghadapi masyarakat yang beragam.

Sikap penerimaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Ma'had tidak hanya sebagai tempat pembinaan religius, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas identitas. Pendidikan di Ma'had tidak hanya berorientasi pada penguatan nilai keagamaan, tetapi juga pada pembentukan kemampuan sosial dalam menghadapi perbedaan. Oleh karena itu, proses pendidikan yang berlangsung bersifat terbuka dan tidak eksklusif.

Dalam perspektif pendidikan Islam, Abuddin Nata menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu merespons pluralitas dengan menanamkan nilai *tasamuh* (toleransi), *'adl* (keadilan), dan penghormatan terhadap martabat manusia.²⁸² Sikap *murabbiah* yang inklusif menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam praktik pembinaan sehari-hari.

Penerimaan terhadap mahasantri non-Muslim juga mencerminkan pemahaman Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Dalam kerangka ini, keberagaman dipandang sebagai

²⁸² Abuddin Nata. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 45–52.

bagian dari *sunnatullah* yang harus disikapi secara bijaksana. *Murabbiah* tidak melihat perbedaan sebagai ancaman terhadap identitas keislaman, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang perlu dihadapi dengan sikap terbuka.

Jika dianalisis dari perspektif multikulturalisme, sikap tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kelompok lain secara setara. Dalam pandangan Will Kymlicka, pengakuan terhadap kelompok minoritas menjadi syarat penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan stabil.²⁸³ Dalam konteks Ma'had, mahasantri non-Muslim tidak diposisikan sebagai pihak luar, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki hak sosial yang sama.

Keterbukaan *murabbiah* juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam praktik kelembagaan. Dalam perspektif John Rawls, kondisi ini menunjukkan *justice as fairness*, yaitu perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini penting karena kualitas institusi pendidikan tidak hanya diukur dari kurikulum, tetapi juga dari cara institusi memperlakukan individu di dalamnya.²⁸⁴

Dari perspektif pendidikan multikultural, pendekatan *murabbiah* sejalan dengan pemikiran James A. Banks yang menekankan pentingnya lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman.²⁸⁵ Dalam hal ini, *murabbiah* tidak hanya berperan sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang menjaga agar interaksi lintas identitas berlangsung secara sehat dan konstruktif.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, sikap *murabbiah* tersebut menunjukkan terbentuknya *shared space* atau ruang interaksi interkultural dalam pendidikan Islam.

²⁸³ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–44, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

²⁸⁴ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 54–62, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

²⁸⁵ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 60–68, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

Ruang ini memungkinkan perbedaan tidak hanya diakui, tetapi juga dikelola melalui pendekatan dialogis dan humanis.

Dengan demikian, *murabbiah* tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan keagamaan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk budaya sosial yang inklusif di lingkungan Ma'had. Mereka menjadi penghubung antara nilai keislaman dan realitas keberagaman sehingga keduanya dapat berjalan selaras.

Secara keseluruhan, pandangan *murabbiah* terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim menunjukkan arah pendidikan Islam yang lebih terbuka dan kontekstual. Keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan di Ma'had tidak hanya terlihat dari pembinaan religius, tetapi juga dari kemampuannya membentuk individu yang mampu hidup berdampingan secara adil, terbuka, dan berkeadaban di tengah masyarakat plural.

12. Kebijakan Penerimaan Mahasantri Non-Muslim

Kebijakan penerimaan mahasantri non-Muslim di lingkungan Ma'had tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan arah kelembagaan yang terbuka terhadap realitas keberagaman. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa Ma'had tidak menutup diri dari masyarakat yang plural, melainkan meresponsnya melalui pendekatan yang terstruktur dan memiliki orientasi nilai yang jelas. Dengan demikian, inklusivitas yang terbentuk merupakan bagian dari kebijakan institusi, bukan sekadar hasil spontanitas sosial.

Dalam kerangka moderasi beragama, kebijakan ini mencerminkan upaya institusi untuk menyeimbangkan komitmen terhadap identitas keislaman dengan keterbukaan terhadap keberagaman. Nilai *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *tasamuh* (toleransi) tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi diwujudkan dalam bentuk

kebijakan yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama telah diterapkan tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada level kelembagaan.

Dari perspektif pendidikan multikultural, kebijakan ini merupakan bentuk *institutional support* yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Choirul Mahfud menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kebijakan institusi yang menjamin kesetaraan akses dan perlakuan bagi seluruh peserta didik.²⁸⁶ Dengan adanya kebijakan ini, Ma'had tidak hanya membuka ruang secara simbolik, tetapi juga memberikan legitimasi struktural terhadap keberagaman.

Kebijakan tersebut juga memperluas fungsi Ma'had dari sekadar lembaga pembinaan religius menjadi ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas agama secara intensif. Dalam konteks ini, Ma'had menjadi ruang praksis tempat nilai multikulturalisme tidak hanya diajarkan, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dianalisis melalui perspektif keadilan sosial, kebijakan ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam akses pendidikan. Dalam pandangan John Rawls, *justice as fairness* menuntut adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh manfaat dari sistem sosial.²⁸⁷ Dalam konteks ini, penerimaan mahasantri non-Muslim menunjukkan bahwa akses pendidikan di Ma'had tidak dibatasi oleh identitas keagamaan.

Sejalan dengan itu, Will Kymlicka memandang bahwa pengakuan terhadap kelompok minoritas merupakan syarat penting dalam masyarakat multikultural. Kebijakan penerimaan mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas untuk hadir dalam ruang sosial mayoritas tanpa kehilangan

²⁸⁶ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 85–92.

²⁸⁷ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

identitasnya.²⁸⁸ Dengan demikian, kebijakan ini tidak mendorong asimilasi, tetapi mendukung koeksistensi yang setara.

Dari perspektif pendidikan multikultural, kebijakan ini juga sejalan dengan pemikiran James A. Banks yang menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dalam menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif.²⁸⁹ Artinya, transformasi di Ma'had tidak hanya terjadi pada tingkat interaksi sosial, tetapi juga pada tingkat kebijakan sebagai dasar pembentukan budaya institusi.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, kebijakan ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai keislaman dan realitas sosial melalui pendekatan yang dialogis dan terbuka.²⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan Islam mampu bergerak dari pola eksklusif menuju model pendidikan yang lebih inklusif.

Secara teologis, kebijakan ini juga memiliki legitimasi dalam konsep Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penerimaan terhadap mahasiswa non-Muslim tidak bertentangan dengan nilai keislaman, tetapi justru mencerminkan penerapan nilai Islam dalam kehidupan sosial.

Selain itu, kebijakan ini juga merefleksikan nilai kebangsaan, khususnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan bahwa Ma'had tidak hanya bergerak dalam kerangka pendidikan Islam, tetapi juga dalam konteks kebangsaan yang menghargai keberagaman.

Kebijakan tersebut turut memengaruhi terbentuknya kultur institusi yang inklusif. Kebijakan tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi memengaruhi pola interaksi, sistem

²⁸⁸ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–44, <https://www.nzlii.org/nz/journals/OtaLawRw/1996/13.pdf>

²⁸⁹ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 65–72. <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁹⁰ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 130–138.

pembinaan, dan dinamika sosial di lingkungan Ma'had. Dengan demikian, kebijakan berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan praktik sosial agar selaras dengan nilai multikulturalisme dan moderasi beragama.

Kebijakan penerimaan mahasantri non-Muslim menunjukkan bahwa Ma'had memiliki komitmen nyata dalam menerapkan nilai inklusivitas secara struktural. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa keterbukaan terhadap keberagaman tidak cukup diwujudkan melalui wacana, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten agar nilai multikulturalisme dan moderasi beragama dapat terus hidup dalam praktik sehari-hari.

13. Pendampingan *Murabbiah* dalam Proses Adaptasi Mahasantri Non-Muslim

Pendampingan yang dilakukan *murabbiah* terhadap mahasantri non-Muslim menunjukkan bahwa proses pembinaan di Ma'had dilakukan secara adaptif dan tidak kaku. Dalam praktiknya, seluruh mahasantri diperlakukan secara setara tanpa perbedaan berdasarkan latar belakang agama. Kesetaraan tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mahasantri non-Muslim selama menjalani kehidupan di lingkungan Ma'had yang mayoritas Muslim.

Proses adaptasi yang dialami mahasantri non-Muslim tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap aturan formal, tetapi juga kemampuan membangun relasi sosial yang bermakna. Adaptasi berlangsung melalui interaksi yang intens dan berkelanjutan sehingga individu tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga membentuk pengalaman sosialnya sendiri. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, interaksi sehari-hari menjadi ruang utama dalam pembentukan makna sosial.

Pendampingan *murabbiah* juga tidak terbatas pada arahan formal, tetapi hadir melalui aktivitas kolektif seperti olahraga bersama, kerja bakti, dan kegiatan informal lainnya. Aktivitas tersebut menciptakan ruang interaksi yang lebih cair sehingga perbedaan identitas tidak menjadi penghalang dalam membangun kedekatan sosial. Dalam konteks

ini, pembinaan lebih menekankan pengalaman langsung (*experiential learning*) yang efektif dalam membangun pemahaman sosial.

Dari perspektif pendidikan Islam, pendekatan tersebut mencerminkan model *life-based education*, yaitu pendidikan yang menekankan pembentukan karakter melalui pengalaman hidup sehari-hari. Abuddin Nata menjelaskan bahwa pendidikan Islam perlu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial secara seimbang.²⁹¹ Dengan demikian, interaksi sosial yang difasilitasi *murabbiah* menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter yang holistik.

Peran *murabbiah* dalam proses ini juga melampaui fungsi administratif. Mereka bertindak sebagai fasilitator dan mediator sosial yang aktif menciptakan ruang interaksi yang kondusif bagi tumbuhnya sikap inklusif. Dalam perspektif James A. Banks, lingkungan sosial yang mendukung interaksi lintas identitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa *murabbiah* memiliki peran strategis dalam menjaga proses interaksi agar berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pola pendampingan yang tidak diskriminatif mencerminkan prinsip keadilan sosial. Dalam pandangan John Rawls, *justice as fairness* menuntut adanya perlakuan yang setara dalam struktur sosial.²⁹² Dalam konteks ini, perlakuan yang sama terhadap seluruh mahasiswa membantu mencegah marginalisasi terhadap mahasiswa non-Muslim.

Sejalan dengan itu, Will Kymlicka menjelaskan bahwa pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas penting agar mereka dapat hidup berdampingan tanpa

²⁹¹ Abuddin Nata. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 45–52.

²⁹² John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

kehilangan identitasnya.²⁹³ Pendampingan yang dilakukan *murabbiah* menunjukkan adanya penghargaan terhadap perbedaan tanpa adanya tekanan untuk berasimilasi secara paksa.

Pendekatan *murabbiah* juga mencerminkan implementasi nilai moderasi beragama, khususnya *tasamuh* (toleransi) dan *tawazun* (keseimbangan). *Murabbiah* bersikap terbuka, tidak memaksakan keyakinan, tetapi tetap menjaga identitas keislaman institusi. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya menjadi proses sosial, tetapi juga media internalisasi nilai keagamaan yang moderat.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, pola tersebut menunjukkan terbentuknya *shared space* atau ruang interaksi interkultural yang memungkinkan individu dari latar belakang berbeda saling memahami melalui pengalaman bersama.²⁹⁴ Ruang ini penting dalam membangun kesadaran keberagaman yang lahir dari praktik nyata, bukan hanya pemahaman teoritis.

Dengan demikian, pendampingan *murabbiah* dalam proses adaptasi mahasantri non-Muslim tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembinaan, tetapi juga sebagai proses sosial yang membentuk pengalaman keberagaman secara langsung. Keberhasilan membangun lingkungan yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan institusi, tetapi juga oleh peran aktor pendidikan yang mampu menerjemahkan nilai toleransi dan keterbukaan ke dalam praktik sehari-hari secara konsisten.

14. Forum Dialog bagi Mahasantri Non-Muslim

Ketersediaan forum dialog bagi mahasantri non-Muslim di lingkungan Ma'had belum sepenuhnya terlembaga secara sistematis. Meskipun sudah terdapat inisiatif seperti *podcast* dan diskusi informal, ruang dialog tersebut masih bersifat insidental dan belum

²⁹³ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–44, <https://www.nzlii.org/nz/journals/OtaLawRw/1996/13.pdf>

²⁹⁴ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 130–138.

menjadi bagian dari program kelembagaan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa praktik inklusivitas yang telah berjalan secara sosial masih memerlukan penguatan pada level institusi.

Dalam perspektif pendidikan multikultural, forum dialog tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun pemahaman lintas identitas dan mengelola perbedaan secara konstruktif. James A. Banks menegaskan bahwa lingkungan pendidikan yang inklusif memerlukan ruang partisipasi yang setara agar seluruh individu dapat terlibat aktif dalam kehidupan sosial.²⁹⁵ Oleh karena itu, keterbatasan forum dialog dapat memengaruhi optimalisasi partisipasi mahasiswa, khususnya kelompok minoritas.

Dialog juga memiliki dimensi pedagogis yang penting. Paulo Freire menjelaskan bahwa dialog merupakan unsur utama dalam pendidikan karena melalui dialog individu dapat bertukar pengalaman, membangun kesadaran kritis, dan memahami realitas sosial secara lebih mendalam.²⁹⁶ Dalam konteks ini, belum adanya forum dialog yang terstruktur berpotensi membatasi proses pembelajaran sosial dan refleksi bersama di lingkungan Ma'had.

Dari perspektif keadilan sosial, keterbatasan ruang dialog juga berkaitan dengan kesempatan partisipasi. Dalam pandangan John Rawls, *justice as fairness* menuntut adanya kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya.²⁹⁷ Dengan demikian, forum dialog yang belum optimal dapat memengaruhi pemerataan akses partisipasi, terutama bagi mahasiswa non-Muslim.

²⁹⁵ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge, hlm. 60–68, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

²⁹⁶ Paulo Freire. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, hlm. 72–80, [https://files.libcom.org/files/Paulo%20Freire,%20Myra%20Bergman%20Ramos,%20Donaldo%20Macedo%20-%20Pedagogy%20of%20the%20Oppressed,%2030th%20Anniversary%20Edition%20\(2000,%20Bloomsbury%20Academic\).pdf](https://files.libcom.org/files/Paulo%20Freire,%20Myra%20Bergman%20Ramos,%20Donaldo%20Macedo%20-%20Pedagogy%20of%20the%20Oppressed,%2030th%20Anniversary%20Edition%20(2000,%20Bloomsbury%20Academic).pdf)

²⁹⁷ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

Sejalan dengan itu, Will Kymlicka menekankan bahwa pengakuan terhadap kelompok minoritas tidak cukup diwujudkan melalui penerimaan sosial, tetapi juga melalui penyediaan ruang ekspresi yang memungkinkan mereka menyampaikan pengalaman dan perspektifnya secara terbuka.²⁹⁸ Oleh karena itu, forum dialog menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pengakuan terhadap kelompok minoritas bersifat substantif, bukan sekadar simbolik.

Dalam konteks pendidikan Islam, pentingnya dialog juga sejalan dengan konsep musyawarah (*syura*), yang menekankan keterbukaan, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, penguatan forum dialog tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki dasar nilai dalam ajaran Islam.

Selain itu, dalam kerangka moderasi beragama, dialog dipandang sebagai sarana penting untuk menumbuhkan nilai *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (jalan tengah), dan *i'tidal* (keadilan). Tanpa ruang dialog yang memadai, proses internalisasi nilai moderasi beragama berpotensi kurang berkembang secara optimal.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, dialog merupakan bagian dari pendekatan interkoneksi yang memungkinkan terjadinya pertemuan antaridentitas secara konstruktif.²⁹⁹ Oleh karena itu, belum terlembaganya forum dialog menunjukkan bahwa potensi interaksi interkultural di Ma'had masih dapat dikembangkan lebih jauh.

Dengan demikian, keterbatasan forum dialog di Ma'had bukan menunjukkan kegagalan dalam membangun lingkungan yang inklusif, tetapi menandakan adanya kebutuhan penguatan pada aspek kelembagaan. Interaksi sosial yang telah berjalan harmonis perlu didukung oleh forum dialog yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan partisipatif. Kehadiran forum tersebut dapat memperluas ruang partisipasi, memperkuat

²⁹⁸ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 36–44, <https://www.nzlii.org/nz/journals/OtaLawRw/1996/13.pdf>

²⁹⁹ M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 130–138.

internalisasi nilai multikulturalisme dan moderasi beragama, serta mendorong Ma'had menjadi ruang pendidikan Islam yang lebih dialogis, inklusif, dan responsif terhadap masyarakat plural.

C. Faktor-Faktor yang Mendorong serta Menghambat Upaya Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendidikan Multikultural bagi Mahasantri Non-Muslim di Lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah tidak hanya ditentukan oleh program formal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan berasrama. Proses ini berlangsung melalui interaksi antara faktor sosial, kultural, dan struktural yang membentuk pengalaman hidup mahasantri sehari-hari. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan proses multidimensional yang melibatkan individu, lingkungan sosial, dan sistem kelembagaan secara bersamaan.

Kehidupan berasrama yang mempertemukan mahasantri dari latar belakang agama, budaya, dan daerah yang beragam menciptakan ruang interaksi yang intens dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberagaman menjadi sarana pembelajaran sosial yang efektif dalam menanamkan nilai toleransi, keterbukaan, dan sikap saling menghargai. Moderasi beragama tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif pendidikan multikultural, lingkungan sosial yang heterogen memiliki peran penting dalam membentuk sikap individu. H.A.R. Tilaar menjelaskan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal, tetapi juga

melalui pengalaman hidup bersama yang membentuk kesadaran pluralitas, baik secara kognitif maupun afektif.³⁰⁰

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang mendukung penguatan moderasi beragama di lingkungan Ma'had. Pertama, iklim sosial yang inklusif menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mahasantri non-Muslim. Lingkungan yang terbuka dan tidak diskriminatif memungkinkan interaksi sosial berlangsung secara lebih bebas dan setara. Kedua, peran aktif pengelola Ma'had menjadi faktor penting dalam proses internalisasi nilai melalui pendekatan yang humanis dan adaptif. Ketiga, kebijakan kelembagaan yang menerima keberagaman menunjukkan adanya dukungan struktural terhadap pendidikan multikultural. Keempat, sinergi antara Ma'had dan universitas memperkuat legitimasi serta keberlanjutan program moderasi beragama secara institusional. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama membentuk ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya sikap moderat di kalangan mahasantri.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penguatan moderasi beragama. Faktor tersebut antara lain berkaitan dengan aspek psikologis individu, seperti rasa canggung, keterbatasan dalam memahami perbedaan, dan kurangnya keberanian dalam membangun komunikasi lintas agama. Selain itu, komunikasi interpersonal yang belum optimal dalam situasi tertentu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Keterbatasan forum dialog lintas agama yang terstruktur menjadi hambatan lain karena mengurangi kesempatan pertukaran perspektif secara lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan Ma'had secara umum mendukung moderasi beragama, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam komunikasi dan fasilitasi dialog.

³⁰⁰ H.A.R. Tilaar. (2010). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, hlm. 112.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa dinamika sosial dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal individu dan faktor eksternal berupa lingkungan serta struktur sosial. Ketidakseimbangan antara kedua aspek tersebut dapat memengaruhi efektivitas integrasi sosial dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan penguatan moderasi beragama sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola kedua dimensi tersebut secara seimbang.³⁰¹

Dari perspektif Islam, moderasi beragama menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan keterbukaan dalam kehidupan sosial. Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa moderasi beragama mencakup nilai *tawasuth* (jalan tengah), *i'tidal* (keadilan), dan *tasamuh* (toleransi). Nilai-nilai tersebut tidak cukup dipahami secara normatif, tetapi perlu diwujudkan dalam praktik sosial sehari-hari melalui interaksi yang inklusif dan berkeadaban.³⁰²

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural di Ma'had merupakan hasil interaksi antara faktor pendukung dan penghambat yang saling memengaruhi. Upaya penguatan ke depan perlu diarahkan pada pengembangan ruang dialog lintas agama yang lebih sistematis, peningkatan kualitas komunikasi interpersonal, serta penguatan peran pembina sebagai agen moderasi dalam kehidupan berasrama. Pendekatan yang integratif dan berkelanjutan menjadi penting agar nilai moderasi beragama dapat terinternalisasi secara lebih mendalam dalam kehidupan mahasiswa.

1. Iklim Sosial yang Inklusif dalam Kehidupan Berasrama

Iklim sosial yang inklusif menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung penguatan moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Berdasarkan hasil

³⁰¹ Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 58.

³⁰² Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 43, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

penelitian, mahasantri non-Muslim tidak mengalami perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang muncul lebih berupa rasa canggung pada tahap awal adaptasi, yang kemudian berkurang seiring meningkatnya interaksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan Ma'had mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan terbuka terhadap keberagaman.

Dalam perspektif John Rawls, kondisi tersebut mencerminkan prinsip *justice as fairness*, yaitu perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa diskriminasi meskipun berada dalam relasi mayoritas dan minoritas.³⁰³ Dengan demikian, iklim sosial yang inklusif di Ma'had menunjukkan adanya sistem sosial yang berjalan secara adil.

Dari perspektif sosiologi, kondisi ini mencerminkan terjadinya integrasi sosial, yaitu keadaan ketika individu dari latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa kehilangan identitas masing-masing. Integrasi sosial tidak menghapus perbedaan, tetapi mengelolanya menjadi dasar terbentuknya kohesi sosial yang stabil.³⁰⁴

Jika dikaitkan dengan perspektif Will Kymlicka, integrasi sosial di Ma'had bersifat inklusif, bukan asimilatif. Mahasantri non-Muslim tetap diberikan ruang untuk mempertahankan identitasnya tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri secara paksa dengan kelompok mayoritas.³⁰⁵ Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas dalam kehidupan sosial.

Rasa canggung pada awal adaptasi dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian sosial yang wajar dalam masyarakat multikultural. Seiring meningkatnya intensitas interaksi, hubungan antar mahasantri menjadi lebih akrab, terbuka, dan saling

³⁰³ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 52–60, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

³⁰⁴ Emile Durkheim. (1997). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, hlm. 70–85, <https://ia601408.us.archive.org/14/items/in.ernet.dli.2015.233884/2015.233884.The-Division.pdf>

³⁰⁵ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–115, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

percaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berkelanjutan berperan penting dalam mengurangi jarak sosial antarindividu.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori interaksi sosial John Lewis Gillin dan John Philip Gillin yang menjelaskan bahwa interaksi yang berlangsung terus-menerus akan mempercepat proses penyesuaian sosial dan memperkuat solidaritas kelompok.³⁰⁶ Dalam konteks kehidupan asrama, intensitas interaksi sehari-hari menjadi faktor penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah perbedaan agama dan budaya.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, kondisi ini menunjukkan terbentuknya *shared inclusive space*, yaitu ruang sosial bersama yang memungkinkan individu dari latar belakang berbeda membangun relasi secara setara dan dialogis.³⁰⁷ Dengan demikian, interaksi sosial tidak hanya menjadi aktivitas keseharian, tetapi juga sarana pembentukan kesadaran multikultural.

Dari perspektif pendidikan multikultural, iklim sosial yang inklusif merupakan syarat utama dalam membangun kesadaran pluralitas. Lingkungan yang menghargai keberagaman tidak hanya memberikan pemahaman tentang perbedaan secara teoritis, tetapi juga menghadirkan pengalaman nyata hidup bersama secara harmonis. Choirul Mahfud menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus memberikan pengalaman langsung agar individu mampu memahami dan menghargai keberagaman sebagai realitas sosial.³⁰⁸

Sejalan dengan itu, James A. Banks menekankan bahwa pendidikan multikultural yang efektif tidak hanya diajarkan secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, lingkungan Ma'had menunjukkan implementasi

³⁰⁶ John Lewis Gillin & John Philip Gillin. (1954). *Cultural Sociology*. New York: Macmillan, hlm. 489–500, <https://books.google.co.id/books?id=xzSdtgAACAAJ>

³⁰⁷ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140–150.

³⁰⁸ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 85–95.

pendidikan multikultural pada level praksis, di mana nilai kesetaraan dan keadilan benar-benar dialami oleh mahasiswa.³⁰⁹

Dalam perspektif pendidikan Islam, sikap inklusif tersebut sejalan dengan nilai *tasamuh* (toleransi) dan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), yang menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis tanpa membedakan latar belakang agama. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai.³¹⁰

Dengan demikian, iklim sosial yang inklusif di lingkungan Ma'had tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga fondasi utama dalam penguatan moderasi beragama. Lingkungan yang terbuka dan tidak diskriminatif memungkinkan nilai moderasi terinternalisasi secara alami melalui pengalaman hidup bersama, sehingga membentuk karakter mahasiswa yang toleran, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

2. Peran *Musyrif*, *Musyrifah*, dan *Murabbiah*

Peran *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* dalam membina hubungan lintas agama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat strategis dalam memperkuat moderasi beragama. Berdasarkan hasil penelitian, para pembina tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pengawas mahasiswa, tetapi juga berperan sebagai agen internalisasi nilai yang membentuk pola interaksi sosial yang inklusif, toleran, dan harmonis.

Dalam perspektif James A. Banks, peran tersebut menunjukkan bahwa pembina menjadi aktor utama dalam mentransformasikan nilai-nilai multikultural ke dalam praktik

³⁰⁹ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 25–35, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

³¹⁰ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 18–25, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

pendidikan.³¹¹ Mereka tidak sekadar menyampaikan konsep kesetaraan secara teoritis, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan seluruh mahasiswa, termasuk kelompok minoritas, merasakan keadilan secara langsung.

Fungsi keteladanan menjadi aspek yang paling dominan dalam proses pembinaan. Nilai moderasi beragama tidak hanya disampaikan melalui aturan, tetapi diinternalisasikan melalui perilaku nyata para pembina dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini dikenal dengan konsep *uswah hasanah*, yaitu metode pendidikan berbasis keteladanan yang menempatkan pendidik sebagai figur yang ditiru peserta didik.³¹²

Sebagaimana dijelaskan oleh Abuddin Nata, keteladanan merupakan metode pendidikan yang efektif karena nilai moral dan spiritual lebih mudah diinternalisasi melalui praktik nyata dibandingkan penyampaian verbal semata.³¹³ Oleh karena itu, sikap terbuka, adil, dan tidak diskriminatif yang ditunjukkan oleh *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* menjadi faktor penting dalam membentuk karakter moderat mahasiswa.

Dalam perspektif John Rawls, praktik tersebut mencerminkan konsep *justice as fairness*, yaitu perlakuan setara terhadap seluruh mahasiswa tanpa bias mayoritas. Keadilan yang diwujudkan secara nyata akan membangun kepercayaan sosial dan legitimasi moral terhadap otoritas pembina.³¹⁴

Pendekatan pembinaan yang tidak diskriminatif juga menunjukkan kemampuan pembina dalam mengelola keberagaman secara proporsional. Mereka tidak membedakan

³¹¹ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 25–35, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

³¹² Abuddin Nata. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 145–155, https://books.google.co.id/books?id=orJADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

³¹³ Abuddin Nata. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 150–160, https://books.google.co.id/books?id=orJADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

³¹⁴ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60–70, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

perlakuan berdasarkan latar belakang agama, melainkan mengedepankan prinsip keadilan dan profesionalitas. Dalam perspektif moderasi beragama, praktik ini mencerminkan nilai *i'tidal* (keadilan) dan *tawazun* (keseimbangan), yaitu sikap adil tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai keagamaan.

Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa moderasi beragama menuntut keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap hak orang lain.³¹⁵ Karena itu, pembina memiliki peran strategis sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara identitas keislaman institusi dan realitas keberagaman di lingkungan Ma'had.

Dalam perspektif Will Kymlicka, pendekatan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak kelompok minoritas dalam ruang pendidikan. Pembina tidak memaksakan homogenisasi, tetapi memberi ruang bagi identitas yang berbeda untuk tetap diakui sebagai bagian sah dari komunitas.³¹⁶

Hal ini sejalan dengan pandangan Choirul Mahfud yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat dipengaruhi oleh pendidik yang mampu bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak eksklusif dalam interaksi sosial.³¹⁷ Dengan demikian, pembina tidak hanya mentransmisikan nilai, tetapi juga membentuk kultur sosial yang inklusif.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, pembina juga berfungsi sebagai pengelola ruang sosial inklusif (*inclusive shared space*) yang memastikan interaksi lintas budaya

³¹⁵ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 18–25, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

³¹⁶ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 110–120, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

³¹⁷ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90–100.

berlangsung secara dialogis dan setara. Keberagaman tidak hanya diterima, tetapi dikelola secara konstruktif dalam kehidupan sehari-hari.³¹⁸

Selain itu, dalam perspektif sosiologi pendidikan, pembina dapat dipahami sebagai *significant others*, yaitu figur yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku sosial mahasiswa. Interaksi intensif dalam kehidupan berasrama memperkuat proses internalisasi nilai secara berkelanjutan dan kontekstual.³¹⁹

Dengan demikian, peran *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan transformasional. Melalui keteladanan, sikap adil, dan pendekatan inklusif, mereka berkontribusi dalam membangun budaya sosial yang moderat, harmonis, dan berkeadaban. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan moderasi beragama di lingkungan Ma'had tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kualitas aktor pendidikan dalam menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari.

3. Persepsi Positif terhadap Keberagaman

Persepsi positif terhadap keberagaman menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan mahasiswa non-Muslim tidak dipandang sebagai hambatan dalam kehidupan berasrama, tetapi sebagai sumber pembelajaran sosial yang memperluas wawasan dan membentuk sikap yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya diterima secara pasif, tetapi dimaknai sebagai bagian positif dari dinamika sosial. Dalam perspektif Will

³¹⁸ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 145–155.

³¹⁹ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, hlm. 130–145, <https://amstudugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/social-construction-of-reality.pdf>

Kymlicka, kondisi tersebut mencerminkan adanya pengakuan (*recognition*) terhadap identitas kelompok minoritas, di mana keberadaan mereka dipandang sebagai bagian sah dari struktur sosial.³²⁰ Pengakuan ini menjadi dasar penting dalam membangun keadilan multikultural yang menghormati perbedaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Bhikhu Parekh yang menegaskan bahwa masyarakat multikultural yang sehat ditandai dengan adanya penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama sebagai bagian integral kehidupan sosial.³²¹ Pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam sikap saling menghormati dan kesediaan hidup berdampingan tanpa dominasi kelompok tertentu.

Dalam perspektif John Rawls, persepsi positif terhadap keberagaman menunjukkan penerimaan terhadap prinsip keadilan sosial, yaitu kesediaan mengakui hak yang sama bagi orang lain. Hal ini memperkuat terciptanya kerja sama sosial yang adil (*fair social cooperation*) dalam komunitas yang majemuk.³²²

Persepsi positif terhadap keberagaman juga berpengaruh terhadap terbentuknya budaya toleransi. Ketika perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan memperkaya kehidupan bersama, potensi konflik akibat prasangka dan stereotip dapat diminimalisasi. Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini mendorong terbentuknya relasi sosial yang lebih terbuka, adaptif, dan konstruktif sehingga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

Dalam perspektif M. Amin Abdullah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberagaman telah dimaknai sebagai bagian dari *shared inclusive space*, yaitu ruang hidup bersama yang dialogis dan setara. Dengan demikian, perbedaan tidak lagi menjadi sumber

³²⁰ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–115, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

³²¹ Bhikhu Parekh. (2000). *Rethinking Multiculturalism*. London: Macmillan, hlm. 180–195, https://books.google.com/books/about/Rethinking_Multiculturalism.html?id=SwAVngEACAAJ

³²² John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 75–85, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

ketegangan, tetapi menjadi sarana pembelajaran sosial yang memperkaya interaksi antarindividu.³²³

Dalam konteks pendidikan multikultural, persepsi positif terhadap keberagaman terbentuk melalui proses pendidikan dan pengalaman sosial yang berkelanjutan. Choirul Mahfud menegaskan bahwa pendidikan multikultural bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman merupakan kekayaan sosial yang perlu dipahami, dihargai, dan dikembangkan dalam kehidupan bersama. Karena itu, kehidupan heterogen di lingkungan Ma'had menjadi media efektif dalam membentuk cara pandang yang inklusif.³²⁴

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi ini menunjukkan adanya transformasi sikap (*attitude transformation*), yaitu ketika individu tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga menginternalisasikannya sebagai nilai positif dalam kehidupan sosial.³²⁵

Dari perspektif moderasi beragama, persepsi positif terhadap keberagaman menjadi fondasi dalam membangun sikap *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *tawasuth* (jalan tengah). Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa moderasi beragama menuntut kemampuan menerima dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari realitas sosial. Oleh sebab itu, persepsi positif terhadap keberagaman menjadi prasyarat penting dalam menciptakan praktik keberagamaan yang moderat dan inklusif.³²⁶

Dalam perspektif James A. Banks dan Will Kymlicka, persepsi positif tersebut juga berfungsi sebagai modal normatif yang memperkuat keberlanjutan masyarakat multikultural, karena individu tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga memiliki komitmen menjaga keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman secara kolektif.

³²³ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 150–160.

³²⁴ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 95–105.

³²⁵ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 40–50, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

³²⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 20–30, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

Dengan demikian, persepsi positif terhadap keberagaman tidak hanya menjadi sikap individual, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) yang memperkuat integrasi dan harmoni dalam kehidupan berasrama. Sikap ini menjadi fondasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban, serta berkontribusi dalam penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural di lingkungan Ma'had.

4. Harapan Mahasantri terhadap Kehidupan Multikultural

Harapan mahasantri terhadap kehidupan multikultural di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan adanya kesadaran reflektif yang berkembang melalui pengalaman hidup bersama dalam keberagaman. Berdasarkan temuan penelitian, mahasantri tidak hanya menerima perbedaan secara pasif, tetapi juga memiliki keinginan untuk memperkuat toleransi, mengurangi diskriminasi, dan membangun interaksi sosial yang lebih inklusif serta harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa mahasantri telah berperan sebagai subjek aktif dalam penguatan moderasi beragama.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural telah mencapai tahap *empowerment*, yaitu ketika peserta didik tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil dan setara.³²⁷ Dengan demikian, mahasantri tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan multikultural, tetapi juga berupaya memperbaiki kualitas hubungan sosial di dalamnya.

Kesadaran untuk menghindari diskriminasi dan memperkuat toleransi juga mencerminkan adanya kedewasaan sosial (*social maturity*). Mahasantri tidak sekadar merespons realitas keberagaman, tetapi mampu mengantisipasi potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan latar belakang. Dalam konteks ini, nilai moderasi beragama telah

³²⁷ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 45–55, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

terinternalisasi tidak hanya pada aspek pemahaman, tetapi juga dalam sikap dan perilaku sosial sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan teori John Rawls, aspirasi tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya keadilan sebagai *fairness*, yakni perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam kehidupan bersama.³²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan telah dipahami sebagai prinsip moral dalam interaksi sosial di lingkungan Ma'had.

Sejalan dengan itu, Choirul Mahfud menegaskan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya bertujuan mengenalkan keberagaman, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan saling menghargai.³²⁹ Dengan demikian, harapan mahasantri mencerminkan keberhasilan pendidikan multikultural dalam membentuk kesadaran kritis sekaligus tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif Will Kymlicka, harapan tersebut juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kelompok minoritas dalam ruang sosial multikultural.³³⁰ Hal ini memperkuat gagasan bahwa keadilan dalam masyarakat multikultural tidak cukup hanya dengan kesetaraan formal, tetapi juga memerlukan pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Dalam kerangka moderasi beragama, nilai *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) tampak mulai tumbuh sebagai kesadaran kolektif di kalangan mahasantri.³³¹ Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya diterima

³²⁸ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 80–90, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

³²⁹ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 100–110.

³³⁰ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 120–130, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

³³¹ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 25–35, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

sebagai realitas sosial, tetapi juga dikelola secara sadar untuk menciptakan harmoni dan kerukunan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Abdullah, aspirasi tersebut mencerminkan upaya untuk memperkuat ruang sosial yang inklusif (*inclusive shared space*), di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berinteraksi tanpa diskriminasi.³³² Dengan demikian, keberagaman tidak hanya diterima, tetapi juga dikelola secara sadar untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Lebih mendalam, aspirasi tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran dari sikap adaptif menuju sikap transformatif. Mahasantri tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan multikultural, tetapi juga berupaya memperbaiki dan mengembangkan kualitas lingkungan tersebut. Dalam perspektif pendidikan kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki kemampuan reflektif dan partisipatif dalam membentuk realitas sosialnya sendiri.

Dalam perspektif Banks dan Rawls, pergeseran ini merupakan indikator penting bahwa pendidikan telah berhasil membentuk individu yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan inklusif.

Dengan demikian, harapan mahasantri terhadap kehidupan multikultural tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan faktor pendorong internal (*internal driving force*) yang signifikan dalam penguatan moderasi beragama. Aspirasi tersebut mencerminkan adanya kesadaran, komitmen, serta partisipasi aktif dalam membangun budaya sosial yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan di lingkungan Ma'had.

³³² M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 155–165.

5. Tantangan dalam Pembinaan Mahasantri Non-Muslim

Di balik berbagai faktor pendukung penguatan moderasi beragama, temuan penelitian menunjukkan adanya tantangan psikososial dan komunikatif dalam pembinaan mahasantri non-Muslim di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan upaya memastikan bahwa mahasantri non-Muslim tidak mengalami perasaan keterasingan (*alienation*) di lingkungan yang mayoritas dihuni oleh mahasantri Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman tidak cukup dilakukan pada tataran normatif, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap pengalaman emosional dan subjektif individu dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dalam perspektif Will Kymlicka, pengakuan terhadap kelompok minoritas tidak cukup hanya berupa penerimaan formal, tetapi juga harus disertai jaminan pengalaman sosial yang setara.³³³ Tanpa adanya rasa diterima dan dilibatkan secara nyata, kelompok minoritas berpotensi mengalami marginalisasi kultural meskipun tidak mengalami diskriminasi secara terbuka.

Dari sudut pandang psikologi sosial, perasaan keterasingan dapat muncul ketika individu belum sepenuhnya merasa menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Teori identitas sosial (*social identity theory*) menjelaskan bahwa individu membangun identitas dirinya melalui keanggotaan dalam kelompok sosial.³³⁴ Ketika identitas tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam lingkungan baru, maka dapat muncul rasa canggung, sungkan, atau menarik diri dari interaksi sosial. Dalam konteks kehidupan berasrama di Ma'had, kondisi ini umumnya terjadi pada fase awal adaptasi mahasantri non-Muslim sebelum terbentuk hubungan sosial yang lebih stabil dan inklusif.

³³³ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–120, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

³³⁴ Henri Tajfel & John Turner. (1979). *An Integrative Theory of Intergroup Conflict*. London: Brooks/Cole, hlm. 33–47, https://prefeitura.aracaju.se.gov.br/uploaded-files/ityPkb/5AD190/tajfel_turner_1979-an-integrative-theory-of-intergroup-conflict.pdf

Jika dianalisis melalui perspektif John Rawls, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif (*substantive justice*).³³⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya afirmatif agar mahasiswa non-Muslim tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga merasakan kesetaraan dalam pengalaman sosial sehari-hari.

Selain itu, sikap hati-hati, sungkan, atau tertutup dalam berinteraksi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembinaan. Sikap tersebut bukan bentuk resistensi terhadap lingkungan, melainkan bagian dari proses penyesuaian diri (*adjustment*) terhadap budaya dan lingkungan sosial yang baru. Dalam perspektif sosiologi interaksi, proses adaptasi semacam ini memerlukan waktu, intensitas komunikasi, serta dukungan lingkungan yang kondusif.

Dalam perspektif James A. Banks, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural belum sepenuhnya mencapai tahap transformasi struktural, yaitu kondisi ketika seluruh peserta didik benar-benar merasakan posisi yang setara dalam sistem sosial.³³⁶ Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih proaktif untuk mengurangi jarak psikologis antar kelompok dan memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan bersama.

Pada titik ini, peran *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* menjadi sangat strategis dalam menjembatani hambatan psikososial dan komunikasi tersebut. Pendekatan pembinaan yang humanis, dialogis, dan empatik diperlukan untuk membangun rasa aman serta kepercayaan diri mahasiswa non-Muslim. Dalam perspektif pendidikan Islam,

³³⁵ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 65–75, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

³³⁶ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 50–60, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

pendekatan ini sejalan dengan konsep *tarbiyah* yang menekankan pembinaan secara holistik, mencakup aspek emosional, sosial, spiritual, dan intelektual peserta didik.³³⁷

Lebih lanjut, komunikasi interpersonal yang terbuka dan tidak menghakimi menjadi faktor penting dalam membangun relasi sosial yang inklusif. Choirul Mahfud menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural sangat dipengaruhi oleh kemampuan menciptakan komunikasi yang menghargai perbedaan sebagai realitas sosial. Sejalan dengan itu, Abdullah memandang komunikasi inklusif sebagai prasyarat terbentuknya *inclusive shared space*, yaitu ruang sosial bersama yang memungkinkan setiap individu merasa diakui dan dilibatkan secara setara.³³⁸

Dalam kerangka moderasi beragama, tantangan tersebut menunjukkan pentingnya implementasi nilai *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama tidak hanya berarti menerima perbedaan, tetapi juga menghadirkan ruang sosial yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh individu tanpa memandang latar belakang agama.³³⁹ Dengan demikian, pendekatan pembinaan yang sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial mahasiswa menjadi bagian integral dari upaya penguatan moderasi beragama.

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak hanya diukur dari minimnya konflik, tetapi juga dari kualitas pengalaman sosial kelompok minoritas dalam lingkungan tersebut. Dalam perspektif Rawls dan Kymlicka, ukuran keadilan terletak pada sejauh mana kelompok yang rentan merasa diakui, dilindungi, dan diberi kesempatan berpartisipasi secara setara.

³³⁷ Abuddin Nata. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 160–170, <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/474/1/Ilmu%20Pendidikan%20Islam.pdf>

³³⁸ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 110–120.

³³⁹ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, hlm. 30–40, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

Dengan demikian, tantangan dalam pembinaan mahasantri non-Muslim di lingkungan Ma'had lebih bersifat psikososial dan komunikatif daripada struktural. Dalam perspektif Banks, kondisi ini sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat transformasi pendidikan multikultural melalui pembinaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, tantangan yang ada dapat menjadi sarana untuk memperkuat sensitivitas terhadap keberagaman serta membangun lingkungan pendidikan yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadaban.

6. Dukungan Kebijakan Ma'had

Dukungan kebijakan institusional Ma'had merupakan faktor struktural yang memiliki peran penting dalam penguatan moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan yang diterapkan menunjukkan adanya keseimbangan antara penegakan disiplin kehidupan berasrama dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, khususnya dalam aspek akidah. Tidak adanya pemaksaan keyakinan, namun tetap adanya kewajiban menaati aturan bersama, menunjukkan bahwa kebijakan Ma'had dirancang secara adaptif terhadap realitas keberagaman.

Dalam perspektif John Rawls, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *justice as fairness*, yaitu upaya menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif secara proporsional.³⁴⁰ Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan secara formal, tetapi juga sebagai kemampuan institusi mengakomodasi perbedaan kondisi sosial setiap individu.

Dalam perspektif pendidikan Islam, keseimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), yakni memberikan hak dan kewajiban secara proporsional kepada setiap individu. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bermakna persamaan, tetapi juga pengakuan terhadap keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara

³⁴⁰ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 70–80, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

bijaksana.³⁴¹ Oleh karena itu, kebijakan Ma'had tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai etis dalam pengelolaan kehidupan sosial yang berkeadaban.

Jika dianalisis melalui perspektif Will Kymlicka, kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan institusional terhadap hak kelompok minoritas, khususnya dalam kebebasan beragama.³⁴² Hal ini penting karena keberagaman tidak cukup hanya diterima secara sosial, tetapi juga memerlukan perlindungan struktural melalui kebijakan yang menjamin hak setiap individu.

Keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten juga memberikan landasan operasional bagi *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* dalam menjalankan fungsi pembinaan secara profesional. Dalam perspektif sosiologi organisasi, regulasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan serta mengarahkan perilaku kolektif dalam institusi. Dengan adanya aturan yang terstruktur, potensi ambiguitas maupun perlakuan yang tidak konsisten terhadap mahasantri dapat diminimalisasi.³⁴³

Dalam konteks pendidikan multikultural, kebijakan institusional merupakan bentuk *institutional support* yang menentukan keberhasilan implementasi nilai inklusivitas. Choirul Mahfud menegaskan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya bergantung pada interaksi sosial, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang memberikan ruang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.³⁴⁴ Dengan demikian, kebijakan Ma'had menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan nilai multikulturalisme ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

³⁴¹ Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 121, https://books.google.com/books/about/Ilmu_Pendidikan_Islam.html?id=orJADwAAQBAJ

³⁴² Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 115–125, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

³⁴³ Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 213, <https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/565569-pengantar-sosiologi-0be70484.pdf>

³⁴⁴ Mahfud, C. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 94.

Sejalan dengan itu, James A. Banks memandang bahwa kebijakan yang inklusif menunjukkan adanya upaya *institutional reform*, yaitu pembentukan sistem pendidikan yang responsif terhadap keberagaman.³⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dibangun melalui hubungan interpersonal, tetapi juga diperkuat melalui sistem dan struktur kelembagaan yang mendukung kesetaraan.

Dalam kerangka moderasi beragama, kebijakan Ma'had juga selaras dengan nilai *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *tasamuh* (toleransi). Moderasi beragama tidak hanya menuntut sikap individu yang moderat, tetapi juga memerlukan sistem kelembagaan yang mampu membentuk budaya sosial yang inklusif dan harmonis. Oleh karena itu, kebijakan Ma'had berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan kehidupan berasrama agar tetap berada dalam koridor nilai moderasi beragama.

Dalam perspektif Abdullah, kebijakan institusional tersebut turut membentuk *inclusive shared space*, yaitu ruang sosial inklusif yang memungkinkan seluruh individu merasa diakui dan dilibatkan secara setara.³⁴⁶ Dengan demikian, inklusivitas tidak hanya bergantung pada kesadaran personal, tetapi telah menjadi bagian dari struktur kelembagaan Ma'had.

Lebih jauh, dukungan kebijakan yang kuat memastikan bahwa proses pembinaan berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kebijakan menjadi penghubung antara nilai ideal moderasi beragama dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kebijakan yang jelas dan konsisten, proses pembinaan berpotensi berjalan parsial dan tidak memiliki arah yang kuat.

Namun demikian, secara kritis dapat dipahami bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasinya. Dalam perspektif Rawls dan Banks, kesenjangan antara

³⁴⁵ James A. Banks. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, hlm. 55–65, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

³⁴⁶ M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160–170.

kebijakan dan praktik dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar kebijakan benar-benar dirasakan adil oleh seluruh mahasiswa.

Dengan demikian, dukungan kebijakan Ma'had memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi penguatan moderasi beragama. Melalui regulasi yang adil, terstruktur, dan konsisten, Ma'had tidak hanya menjaga ketertiban kehidupan berasrama, tetapi juga membangun budaya institusional yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di lingkungan Ma'had tidak hanya tumbuh secara kultural, tetapi juga diperkuat secara struktural melalui kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai keberagaman.

7. Penguatan Suasana Multikultural

Meskipun suasana multikultural di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah telah terbangun dengan baik, hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus memperkuat kualitas interaksi sosial antar mahasiswa melalui kegiatan non-formal. Aktivitas seperti olahraga, seni, diskusi santai, dan kegiatan berbasis minat bersama memiliki potensi besar dalam membangun kedekatan emosional, mengurangi jarak sosial, serta mempererat hubungan antarindividu yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

Dalam perspektif sosiologi, interaksi sosial yang berlangsung dalam suasana informal memiliki peran penting dalam membentuk solidaritas sosial. Interaksi yang berlangsung secara natural memungkinkan individu lebih terbuka, mengurangi kecanggungan, dan membangun rasa saling percaya. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin menjelaskan bahwa interaksi sosial yang dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas bersama dapat mempercepat proses integrasi sosial dalam masyarakat

majemuk.³⁴⁷ Dengan demikian, kegiatan non-formal tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreatif, tetapi juga menjadi media pembelajaran sosial yang efektif dalam memperkuat kohesi sosial.

Kegiatan bersama yang inklusif juga berperan dalam mengurangi sekat-sekat simbolik maupun psikologis antar kelompok. Ketika mahasiswa terlibat dalam aktivitas kolektif tanpa pembatasan identitas tertentu, hubungan sosial yang terbentuk cenderung lebih egaliter, cair, dan partisipatif. Dalam perspektif pendidikan multikultural, pengalaman semacam ini merupakan bagian dari *experiential learning*, yaitu proses memahami keberagaman melalui pengalaman langsung dalam interaksi sosial.³⁴⁸

Dalam perspektif James A. Banks, aktivitas non-formal yang inklusif merupakan bagian dari pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya pengalaman sosial langsung dalam membangun kesadaran kesetaraan dan keadilan. Kegiatan bersama yang melibatkan seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi menunjukkan adanya praktik *equity pedagogy*, yaitu pemberian kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam ruang sosial bersama.³⁴⁹

Selain itu, penguatan suasana multikultural di Ma'had juga didukung oleh sinergi antara Ma'had dan pihak universitas dalam memenuhi kebutuhan spiritual mahasiswa non-Muslim. Dalam perspektif pendidikan, kondisi ini mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek akademik, tetapi juga dimensi spiritual, emosional, dan psikologis peserta didik.

Dalam perspektif John Rawls, kebijakan yang memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan spiritual seluruh kelompok mencerminkan prinsip *justice as fairness*, khususnya

³⁴⁷ John Lewis Gillin & John Philip Gillin. (1954). *Cultural Sociology*. New York: Macmillan, hlm. 489–491, <https://books.google.co.id/books?id=xzSdtgAACAAJ>

³⁴⁸ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 103–105.

³⁴⁹ James A. Banks. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Pearson, hlm. 47–50, https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Multicultural_Educati.html?hl=id&id=m3wOAQAAMAAJ

dalam aspek *equal basic liberties*. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan maupun dominasi dari kelompok mayoritas.³⁵⁰

Dalam kerangka pendidikan Islam, keberagaman dipahami sebagai bagian dari *sunnatullah* yang harus diterima dan dikelola secara bijaksana. Pandangan ini sejalan dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang menekankan nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap perbedaan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi untuk membangun relasi sosial yang lebih inklusif.

Lebih lanjut, dalam perspektif Will Kymlicka, penguatan aktivitas multikultural tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas (*group-differentiated rights*). Mahasantri non-Muslim tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga difasilitasi untuk terlibat aktif dalam ruang sosial bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Ma'had telah bergerak dari sekadar toleransi menuju pengakuan sosial yang lebih substantif.³⁵¹

Di sisi lain, harapan terhadap pengembangan Ma'had ke depan menunjukkan pentingnya penguatan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengelola keberagaman. Regulasi yang jelas diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban mahasantri, sekaligus memperkuat nilai spiritualitas dan akhlak sebagai fondasi kehidupan berasrama.

Dalam perspektif Abdullah, kebutuhan terhadap penguatan regulasi tersebut menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai normatif Islam dan sistem sosial yang inklusif. *Inclusive shared space* tidak cukup dibangun melalui interaksi kultural semata,

³⁵⁰ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–55, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

³⁵¹ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–112, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

tetapi juga memerlukan dukungan struktural agar keberagaman dapat dikelola secara berkelanjutan.³⁵²

Dengan demikian, penguatan suasana multikultural di lingkungan Ma'had tidak hanya dilakukan melalui interaksi sosial, tetapi juga melalui dukungan kebijakan, aktivitas kolektif yang inklusif, dan komitmen institusional terhadap keberagaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di lingkungan Ma'had dibangun secara kultural sekaligus struktural, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang dialogis, kolaboratif, humanis, dan berkeadaban.

8. Bentuk Dukungan Khusus dari Pengelola Ma'had terhadap Mahasantri Non-Muslim

Dukungan institusional dari pengelola Ma'had terhadap mahasantri non-Muslim merupakan faktor struktural yang berperan penting dalam penguatan moderasi beragama melalui pendekatan pendidikan multikultural. Berdasarkan temuan penelitian, dukungan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh mahasantri tanpa membedakan latar belakang agama. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman di lingkungan Ma'had telah diarahkan secara sistematis melalui kebijakan kelembagaan yang responsif terhadap realitas pluralitas.

Dalam perspektif pendidikan multikultural, dukungan institusional merupakan elemen penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Choirul Mahfud menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural tidak hanya ditentukan oleh hubungan sosial antarindividu, tetapi juga oleh adanya kebijakan yang memberikan ruang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.³⁵³

³⁵² M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, hlm. 80–83.

³⁵³ Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91–94.

Analisis ini dapat diperdalam melalui perspektif James A. Banks yang menempatkan dukungan institusional sebagai bagian dari dimensi *school culture and social structure*. Dalam pandangan Banks, sistem pendidikan harus secara aktif menciptakan struktur yang adil dan inklusif. Kebijakan Ma'had yang menjamin kesetaraan perlakuan menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun *educational equity*, sehingga keadilan tidak hanya bergantung pada hubungan interpersonal, tetapi juga diperkuat melalui sistem kelembagaan.³⁵⁴

Lebih lanjut, arahan kepada *musyrif*, *musyrifah*, dan *murabbiah* untuk menghindari praktik diskriminatif menunjukkan adanya komitmen etis dalam pengelolaan kehidupan berasrama. Pendampingan yang dilakukan secara bijak dan proporsional mencerminkan pendekatan humanis yang menempatkan mahasantri non-Muslim sebagai subjek pendidikan yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang setara dalam komunitas. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *karamah al-insan* (penghormatan terhadap martabat manusia) sebagai dasar pembentukan relasi sosial yang berkeadaban.

Dalam perspektif John Rawls, kondisi tersebut mencerminkan prinsip *justice as fairness*, yaitu tanggung jawab institusi untuk memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang setara dalam struktur sosial. Tidak adanya diskriminasi serta adanya perlindungan terhadap mahasantri non-Muslim menunjukkan bahwa Ma'had telah mengimplementasikan prinsip *equal opportunity* dalam kehidupan berasrama.³⁵⁵

Selain itu, dukungan institusional yang kuat juga memperkuat sinergi antara kebijakan dan praktik pembinaan di lapangan. Kebijakan yang berpihak pada nilai

³⁵⁴ James A. Banks. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Pearson, hlm. 60–63, https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Multicultural_Educational.html?hl=id&id=m3wOAQAAMAAJ

³⁵⁵ John Rawls. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53–55, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>

inklusivitas memberikan legitimasi bagi para pembina untuk menjalankan fungsi mereka secara profesional dan tidak diskriminatif. Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini menunjukkan adanya keselarasan antara struktur sosial dan praktik interaksi, yang menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas serta integrasi sosial dalam komunitas multikultural.

Dalam perspektif Will Kymlicka, dukungan khusus terhadap mahasiswa non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap hak kelompok minoritas (*minority rights*). Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai pemberian ruang yang adil sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan mahasiswa non-Muslim menunjukkan adanya pengakuan substantif terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan.³⁵⁶

Dalam kerangka moderasi beragama, dukungan pengelola Ma'had juga mencerminkan implementasi nilai *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) pada tingkat kelembagaan. Moderasi beragama tidak hanya menuntut sikap individu yang moderat, tetapi juga memerlukan sistem yang mampu membentuk budaya sosial yang inklusif dan harmonis.

Sejalan dengan itu, Abdullah memandang bahwa dukungan institusional berperan penting dalam menciptakan *inclusive shared space* atau ruang sosial yang setara. Dukungan kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa keberagaman benar-benar diakomodasi secara adil dalam struktur pendidikan Islam kontemporer.

Dengan demikian, dukungan pengelola Ma'had terhadap mahasiswa non-Muslim tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai instrumen

³⁵⁶ Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 108–112, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb

strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Dukungan tersebut memperkuat integrasi antara nilai, kebijakan, dan praktik sosial dalam kehidupan berasrama, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang tidak hanya toleran, tetapi juga adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika masyarakat multikultural.

9. Koordinasi dengan Pihak Universitas dalam Pengelolaan Keberagaman

Koordinasi antara Pusat Ma'had al-Jami'ah dan pihak universitas merupakan faktor strategis dalam mendukung penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesadaran kelembagaan bahwa pengelolaan keberagaman memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak dapat dilakukan secara parsial.

Dalam perspektif pendidikan, pendekatan tersebut menunjukkan adanya orientasi holistik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebutuhan peserta didik tidak hanya dipahami dari aspek akademik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis. Pendidikan dalam konteks ini tidak sekadar menjadi proses transfer pengetahuan, melainkan juga ruang pembinaan nilai kemanusiaan yang inklusif dan menghargai pluralitas.³⁵⁷ Oleh karena itu, koordinasi lintas institusi menjadi bagian penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan mahasiswa secara menyeluruh.

Jika dianalisis melalui perspektif James A. Banks, koordinasi tersebut menunjukkan adanya upaya membangun *school culture and social structure* yang inklusif. Pengelolaan keberagaman tidak hanya dibebankan pada interaksi sosial antarindividu, tetapi juga diperkuat melalui kerja sama kelembagaan yang mendukung terciptanya sistem pendidikan yang responsif terhadap pluralitas.

³⁵⁷ Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 78, https://books.google.co.id/books?id=orJADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbp_ge_summary_r&cad=0

Dalam perspektif John Rawls, kerja sama ini juga mencerminkan prinsip *justice as fairness*, khususnya dalam upaya memastikan setiap mahasantri memperoleh hak yang setara dalam pemenuhan kebutuhan spiritualnya. Dukungan terhadap pembinaan lintas agama menunjukkan bahwa institusi tidak bersifat dominatif terhadap kelompok tertentu, tetapi berupaya menjaga keseimbangan hak seluruh peserta didik secara adil.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah terjalin masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan sistematisasi program. Kerja sama yang masih bersifat insidental berpotensi mengurangi efektivitas pembinaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih terstruktur, terencana, dan berkelanjutan agar pengelolaan keberagaman dapat berjalan lebih optimal.

Dalam konteks pendidikan Islam, Muhaimin menegaskan bahwa pendidikan Islam harus adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keberagaman agama secara profesional dan berkelanjutan.³⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam tidak hanya dituntut responsif terhadap pluralitas, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem yang mampu mengakomodasi keberagaman secara terintegrasi.

Dalam perspektif Will Kymlicka, koordinasi lintas institusi tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap hak kelompok minoritas (*minority rights*). Pemenuhan kebutuhan spiritual mahasantri non-Muslim menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya diterima secara simbolik, tetapi juga difasilitasi secara nyata melalui dukungan kelembagaan.

³⁵⁸ Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 67, https://www.researchgate.net/profile/Puspo-Nugroho/publication/356841517_PENGEMBANGAN_KURIKULUM_PENDIDIKAN_AGAMA_ISLAM/links/61b0171168b5ed4ef5efca23/PENGEMBANGAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-AGAMA-ISLAM.pdf

Dalam kerangka moderasi beragama, koordinasi antara Ma'had dan universitas mencerminkan implementasi nilai *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) pada tingkat institusional. Moderasi beragama tidak hanya memerlukan sikap individu yang inklusif, tetapi juga dukungan sistem sosial yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur dalam kehidupan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Abdullah memandang bahwa kolaborasi kelembagaan memiliki peran penting dalam membentuk *inclusive shared space*, yaitu ruang sosial bersama yang memungkinkan seluruh individu merasa diakui dan dilibatkan secara setara. Dengan demikian, koordinasi lintas institusi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi sarana membangun kultur pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Secara keseluruhan, koordinasi antara Ma'had dan pihak universitas memiliki posisi strategis dalam memperkuat pengelolaan keberagaman dan moderasi beragama. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penguatan kelembagaan melalui sistem koordinasi yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, Ma'had berpotensi berkembang sebagai model pendidikan Islam multikultural yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

10. Pandangan terhadap Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pandangan terhadap keberagaman sebagai *sunnatullah* menunjukkan adanya konstruksi teologis yang inklusif dalam praktik Pendidikan Islam di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah. Keberagaman tidak dipahami sebagai penyimpangan dari kesatuan, melainkan sebagai ketetapan Allah yang menjadi bagian inheren dari kehidupan manusia. Perspektif ini menjadi landasan filosofis dalam membangun sikap toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan sosial mahasiswa.

Dalam Al-Qur'an, prinsip keberagaman ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal (*li ta'arafu*), bukan saling menegasikan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perbedaan merupakan realitas ontologis yang harus dikelola secara bijaksana, bukan diseragamkan ataupun dijadikan sumber konflik.³⁵⁹ Dengan demikian, keberagaman dipandang sebagai bagian dari proses sosial yang memiliki nilai edukatif dan kemanusiaan.

Dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer, pemahaman terhadap pluralitas menunjukkan pergeseran dari paradigma eksklusif menuju inklusif. Keberagaman tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan, tetapi sebagai peluang pedagogis untuk memperluas wawasan, memperkaya pengalaman belajar, dan membangun sikap sosial yang lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dituntut mampu merespons realitas sosial secara kontekstual dan adaptif.³⁶⁰

Kesadaran bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan maupun potensi konflik tergantung pada cara pengelolaannya menunjukkan adanya dimensi kritis dalam memahami realitas sosial. Keberagaman akan menjadi kekuatan apabila didukung oleh nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang konstruktif, perbedaan dapat memunculkan prasangka dan konflik sosial. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana membangun harmoni sosial melalui internalisasi nilai-nilai moderasi beragama.

Dalam kerangka pendidikan multikultural, pandangan tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan keberagaman secara konstruktif. Choirul Mahfud menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sosial yang perlu dikembangkan melalui pendidikan

³⁵⁹ Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 18. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>

³⁶⁰ Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 78, https://books.google.com/books/about/Paradigma_pendidikan_Islam.html?hl=id&id=OwGSAAAACAAJ

yang menanamkan nilai toleransi, demokrasi, dan penghargaan terhadap perbedaan.³⁶¹ Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran sosial yang inklusif dan berkeadaban.

Analisis ini dapat diperkuat melalui perspektif James A. Banks yang memandang pendidikan multikultural sebagai upaya membangun sistem pendidikan yang mampu menciptakan kesetaraan dan penghargaan terhadap pluralitas. Dalam konteks Ma'had, pemahaman keberagaman sebagai *sunnatullah* menunjukkan adanya proses internalisasi nilai multikultural melalui pengalaman hidup bersama yang mendorong terbentuknya sikap inklusif dan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa.

Dalam perspektif John Rawls, penghormatan terhadap keberagaman juga mencerminkan prinsip *justice as fairness*, yaitu pengakuan terhadap hak setiap individu untuk hidup dan berinteraksi secara setara tanpa diskriminasi. Sementara itu, Will Kymlicka menegaskan bahwa masyarakat multikultural memerlukan pengakuan terhadap identitas kelompok yang berbeda agar tercipta keadilan sosial yang substantif. Dengan demikian, penerimaan terhadap keberagaman di lingkungan Ma'had tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap eksistensi kelompok minoritas dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif pendidikan Islam, pendekatan tersebut selaras dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* yang menekankan nilai universalitas, kemanusiaan, dan kasih sayang lintas identitas. Abuddin Nata menegaskan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses pembelajarannya. Pandangan ini memperkuat bahwa

³⁶¹ Mahfud, C. (2016). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91.

pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pembentukan kesalehan individual, tetapi juga pada pembentukan kesalehan sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.³⁶²

Dalam perspektif Abdullah, keberagaman yang dikelola secara inklusif akan membentuk *inclusive shared space*, yaitu ruang sosial bersama yang memungkinkan setiap individu berinteraksi secara setara tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman di Ma'had tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial yang dialogis dan partisipatif

Dengan demikian, pandangan terhadap keberagaman dalam perspektif Pendidikan Islam di Ma'had menunjukkan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan transformatif. Keberagaman tidak hanya diterima sebagai realitas sosial, tetapi juga dijadikan sarana pendidikan dalam membangun toleransi, keadilan, dan moderasi beragama. Kondisi ini menegaskan bahwa Ma'had berfungsi sebagai ruang edukatif yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama secara sistematis melalui pengalaman hidup bersama dalam keberagaman.

11. Harapan *Mudir* terhadap Masa Depan Ma'had sebagai Ruang Pendidikan Islam Multikultural

Harapan *mudir* terhadap masa depan Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan adanya orientasi strategis untuk mengembangkan Ma'had sebagai ruang pendidikan Islam yang multikultural, inklusif, dan adaptif terhadap realitas sosial yang plural. Harapan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan visi kelembagaan dalam membangun sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman latar belakang mahasiswa, termasuk mahasiswa non-Muslim, secara adil dan proporsional.

Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya penguatan regulasi terkait hak dan kewajiban mahasiswa non-Muslim. Regulasi berfungsi sebagai instrumen struktural

³⁶² Nata, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 165, https://books.google.com/books/about/Ilmu_Pendidikan_Islam.html?id=orJADwAAQBAJ

untuk menciptakan keteraturan sosial, memberikan kepastian, serta melindungi hak setiap individu dalam lingkungan pendidikan multikultural. Dalam perspektif manajemen pendidikan, regulasi yang jelas dan konsisten merupakan syarat penting bagi terciptanya sistem pengelolaan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.³⁶³

Dalam perspektif James A. Banks, penguatan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya membangun *school culture and social structure* yang inklusif. Sistem pendidikan tidak hanya bertugas mengatur kehidupan akademik, tetapi juga harus menciptakan struktur sosial yang menjamin kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, regulasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan *educational equity* di lingkungan Ma'had.

Selain aspek regulatif, penekanan pada spiritualitas dan akhlak sebagai fondasi bersama menunjukkan bahwa Ma'had tidak hanya berorientasi pada penguatan identitas keislaman secara formal, tetapi juga pada pembentukan karakter universal. Spiritualitas dipahami sebagai kesadaran transendental yang melahirkan tanggung jawab moral, sedangkan akhlak menjadi dasar dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Abuddin Nata yang menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki misi mengembangkan nilai kemanusiaan universal sebagai manifestasi konsep *rahmatan lil 'alamin*. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lebih lanjut, pandangan bahwa kebenaran absolut merupakan ranah Tuhan menunjukkan sikap teologis yang moderat dan inklusif. Sikap ini mencerminkan kesadaran

³⁶³ Muhaimin. (2012). *Manajemen pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah*. Jakarta: Kencana, hlm. 45,
<https://books.google.co.id/books?id=X9YvDwAAQBAJ&printsec=frontcover>

bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran secara utuh, sehingga tidak layak mengklaim kebenaran mutlak terhadap kelompok lain. Dalam masyarakat plural, pandangan semacam ini menjadi fondasi penting dalam mencegah eksklusivisme dan konflik berbasis agama.

Dalam perspektif John Rawls, sikap tersebut menunjukkan penghormatan terhadap prinsip *justice as fairness*, yaitu pengakuan terhadap hak setiap individu untuk hidup dan berkeyakinan secara setara. Sementara itu, dalam perspektif Will Kymlicka, penerimaan terhadap keberagaman menunjukkan adanya pengakuan terhadap identitas kelompok yang berbeda sebagai bagian sah dari kehidupan sosial dalam masyarakat multikultural.

Dalam kerangka moderasi beragama, pandangan *mudir* mencerminkan prinsip *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan). Prinsip-prinsip tersebut menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan pribadi dan keterbukaan terhadap perbedaan.³⁶⁴ Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial dan kebijakan kelembagaan.

Dari perspektif pendidikan multikultural, visi *mudir* juga menunjukkan adanya integrasi antara dimensi struktural, kultural, dan pedagogis. Choirul Mahfud menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang efektif harus didukung oleh kebijakan institusional, budaya inklusif, dan proses pendidikan yang menghargai keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Ma'had tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pembentukan kultur sosial yang dialogis dan humanis.³⁶⁵

Dalam perspektif Abdullah, orientasi tersebut mencerminkan upaya membangun *inclusive shared space*, yaitu ruang sosial yang memungkinkan seluruh mahasiswa

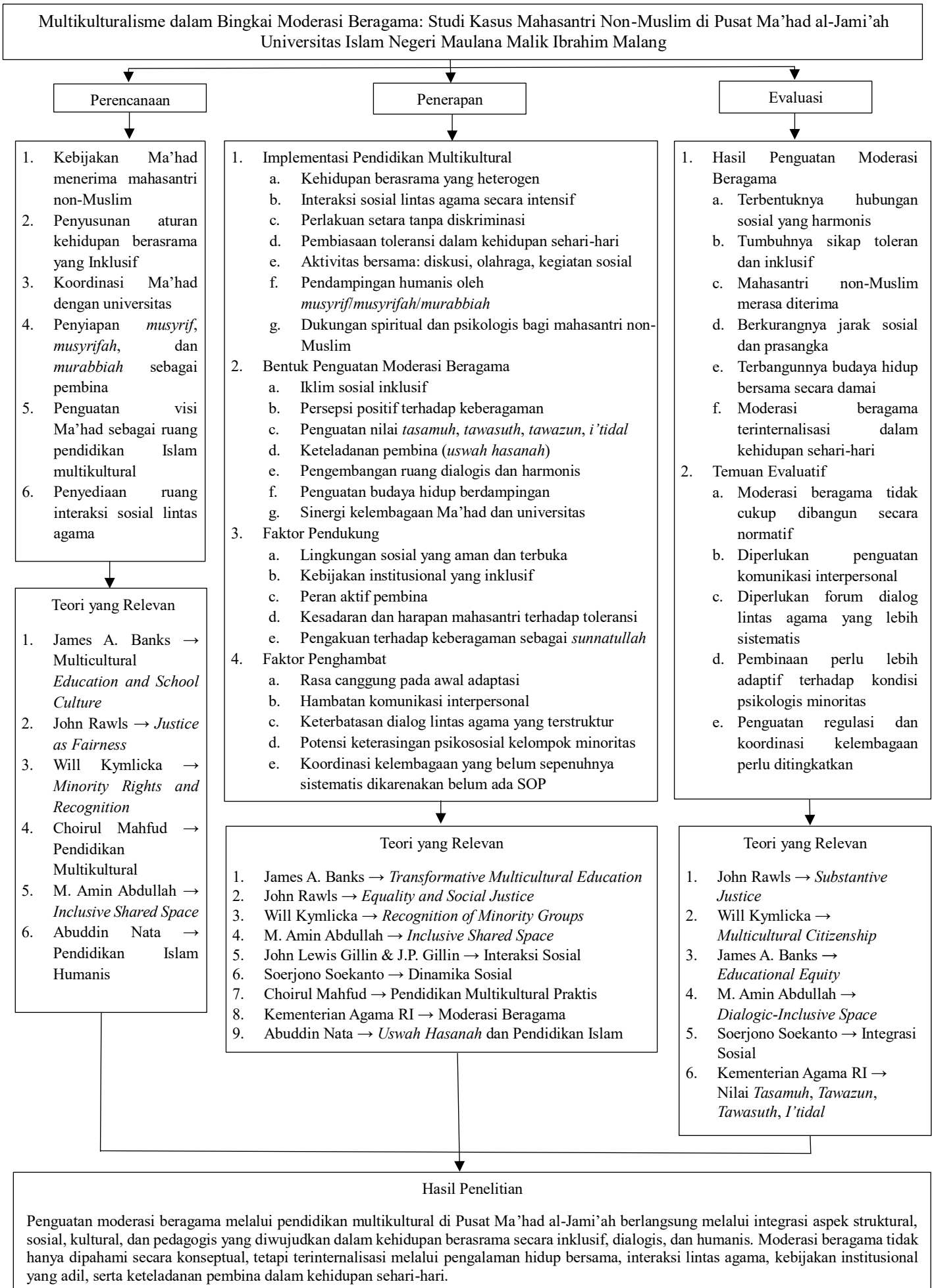
³⁶⁴ Nata, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 167, https://books.google.com/books/about/Ilmu_Pendidikan_Islam.html?id=orJADwAAQBAJ

³⁶⁵ Mahfud, C. (2016). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 103, <https://repository.uindatokarama.ac.id/1762/7/Text%20Lengkap%20Buku%20Pendidikan%20Multikultural.pdf>

berinteraksi secara setara tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya diterima sebagai realitas sosial, tetapi juga dijadikan fondasi dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadaban.

Secara keseluruhan, harapan *mudir* menunjukkan arah pengembangan Ma'had sebagai model pendidikan Islam multikultural yang integratif. Model ini menempatkan keseimbangan antara aspek regulatif, etis, teologis, dan sosial dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan berorientasi pada penguatan moderasi beragama secara berkelanjutan.

Dari pembahasan tersebut, dapat dibuat bagan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Bagan Hasil Penelitian

BAB VI

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama (Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama di lingkungan Pusat Ma'had al-Jami'ah telah terwujud secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak pada pola interaksi sosial yang inklusif, sikap saling menghormati, keterbukaan, serta kemampuan mahasantri Muslim dan non-Muslim untuk hidup berdampingan secara harmonis. Aktivitas keagamaan Islam di lingkungan Ma'had tidak melahirkan eksklusivitas, tetapi dipahami sebagai bagian dari sistem kehidupan bersama yang dihormati secara kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya berada pada tataran normatif, tetapi telah terinternalisasi dalam pengalaman sosial mahasantri melalui interaksi yang berlangsung secara intensif dan berkelanjutan.
2. Pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim menunjukkan adanya proses adaptasi yang konstruktif dalam lingkungan pendidikan berbasis Islam. Mahasantri non-Muslim mampu menjalani kehidupan berasrama tanpa kehilangan identitas keagamaannya, sekaligus merasakan penerimaan sosial, keamanan psikologis, serta ruang interaksi yang terbuka dan dialogis. Pengalaman hidup bersama tersebut turut membentuk kesadaran multikultural yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada saling pengertian. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberagaman di lingkungan Ma'had tidak

dipandang sebagai hambatan sosial, melainkan sebagai ruang pembelajaran bersama dalam membangun toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.

3. Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan multikultural di lingkungan Ma'had dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang bersifat dinamis. Faktor pendukung meliputi iklim sosial yang inklusif, peran aktif musyrif, musyrifah, murabbi, dan *murabbiah* sebagai agen moderasi, dukungan kebijakan kelembagaan, serta berkembangnya budaya saling menghargai antar mahasantri. Selain itu, kegiatan non-formal dan interaksi sehari-hari turut menjadi media efektif dalam memperkuat kedekatan emosional dan kohesi sosial. Adapun faktor penghambat mencakup belum adanya regulasi yang lebih spesifik terkait pembinaan mahasantri non-Muslim, potensi kesalahpahaman dalam komunikasi lintas agama, serta tantangan adaptasi psikologis pada tahap awal kehidupan berasrama.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan multikultural di lingkungan Ma'had tidak hanya bersifat simbolik, tetapi telah bergerak menuju pembentukan budaya sosial yang inklusif dan berkeadaban sebagaimana dikemukakan oleh James A. Banks tentang pentingnya transformasi budaya dan struktur pendidikan dalam membangun kesetaraan sosial. Dalam perspektif John Rawls dan Will Kymlicka, kehidupan multikultural di Ma'had juga menunjukkan adanya upaya menjaga keadilan sosial, penghormatan terhadap hak kelompok minoritas, serta pemberian ruang sosial yang setara bagi seluruh mahasantri tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, ketiga fokus penelitian yang meliputi realisasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama, pengalaman mahasantri non-Muslim, serta faktor-faktor yang memengaruhi penguatan moderasi beragama telah terjawab secara komprehensif. Secara keseluruhan, Pusat Ma'had al-Jami'ah menunjukkan peran strategis sebagai

lingkungan pendidikan Islam yang inklusif, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Keunikan penelitian ini terletak pada temuan bahwa lingkungan pendidikan Islam berbasis Ma'had tidak selalu bersifat eksklusif, tetapi dapat berkembang menjadi ruang sosial yang inklusif dan multikultural melalui praktik kehidupan berasrama yang dialogis, humanis, dan berkeadaban. Kehidupan bersama yang berlangsung secara intensif menjadi media efektif dalam menginternalisasikan nilai toleransi, keadilan, dan moderasi beragama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi penelitian ini mencakup dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam dapat berlangsung secara efektif melalui praktik sosial yang inklusif dan pengalaman hidup bersama dalam lingkungan multikultural. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengelola Ma'had dan lembaga pendidikan tinggi Islam dalam merumuskan kebijakan, strategi pembinaan, serta penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap keberagaman guna menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

B. Saran

Temuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas praktik multikulturalisme dan moderasi beragama di lingkungan Ma'had, tetapi juga menunjukkan berbagai peluang dan tantangan dalam pengelolaan keberagaman di lingkungan pendidikan Islam. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi konstruktif bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan multikultural di masa mendatang:

1. Dalam rangka memperkuat realisasi nilai-nilai multikulturalisme dan moderasi beragama, pengelola Pusat Ma'had al-Jami'ah perlu mengembangkan kebijakan institusional yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi

tertulis yang mengatur kehidupan mahasantri secara inklusif, serta pengembangan program pembinaan berbasis multikulturalisme yang terstruktur, sehingga internalisasi nilai moderasi beragama tidak hanya berlangsung secara kultural, tetapi juga diperkuat secara konseptual dan kelembagaan.

2. Dalam rangka mengoptimalkan pengalaman sosial, kultural, dan religius mahasantri non-Muslim, diperlukan penguatan peran *musyrif*, *musyrifah*, *murabbi*, dan *murabbiah* sebagai pendamping yang adaptif terhadap keberagaman. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan komunikasi lintas budaya, resolusi konflik, dan moderasi beragama menjadi penting agar tercipta ruang interaksi yang lebih dialogis, suportif, dan sensitif terhadap kebutuhan psikososial mahasantri, khususnya pada tahap awal adaptasi kehidupan berasrama.
3. Pengelola Ma'had juga perlu mengembangkan sistem pendampingan adaptasi awal bagi mahasantri non-Muslim agar proses penyesuaian sosial dan psikologis dapat berlangsung lebih optimal. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan personal, forum dialog, maupun kegiatan bersama yang mendorong terbentuknya rasa aman dan kedekatan sosial di lingkungan asrama.
4. Dalam rangka mengatasi faktor penghambat dan memperkuat faktor pendukung moderasi beragama, pengelola Ma'had bersama institusi terkait perlu membangun mekanisme komunikasi lintas agama yang lebih efektif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui forum dialog, evaluasi berkala, serta kegiatan kolaboratif lintas agama yang mampu memperkuat budaya saling menghargai dan meminimalisasi potensi kesalahpahaman dalam kehidupan berasrama.
5. Pengembangan kegiatan non-formal berbasis kolaborasi lintas agama juga perlu diperkuat sebagai media membangun kedekatan emosional, memperluas interaksi sosial, dan memperkuat budaya inklusif di lingkungan Ma'had. Kegiatan seperti olahraga, seni,

diskusi santai, dan aktivitas berbasis minat bersama dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat kohesi sosial antar mahasantri.

6. Bagi institusi pendidikan Islam secara lebih luas, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan model pendidikan berbasis multikulturalisme dalam bingkai moderasi beragama. Lingkungan pendidikan Islam tidak harus bersifat eksklusif, tetapi dapat dikembangkan sebagai ruang yang inklusif, dialogis, dan humanis tanpa kehilangan identitas keislamannya.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan metodologis yang lebih variatif. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program moderasi beragama berbasis Ma'had dalam jangka panjang, serta melibatkan subjek penelitian yang lebih beragam guna memperkaya perspektif analisis terkait pengelolaan keberagaman dalam pendidikan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. (2006), *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge,
<https://books.google.co.id/books?id=cYYqBgAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id>
- Abdullah Saeed. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. London: Routledge,
<https://library.oapen.org/bitstream/id/9c999c2e-ad95-4799-81fd-d24cc6ebed8f/9781317974154.pdf>
- Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani. (1996). *Al-Wasathiyyah fi al-Islam*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan.
- Abdurrahman Mas'ud. (2006). *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LkiS.
- Abdurrahman Wahid. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Abuddin Nata. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana,
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/474/1/Ilmu%20Pendidikan%20Islam.pdf>
- Abuddin Nata. (2012). *Pendidikan Islam di Era Global*. Jakarta: Kencana.
- Abuddin Nata. (2012). *Pendidikan Islam Multikultural*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Ahmad, A. S. (2021). Religious Moderation in Islamic Religious Practices Through Wasathiyah Concept. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 2(2).
- Ainul Yaqin. (2005). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Aksin Wijaya. (2020). *Berislam di Jalur Tengah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Bukhari, M. I., & Muslim, I. H. (2002). *Shahih Bukhari Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alfaini, S. (2022). Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama. *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, 3(1).
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Alwi Shihab. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan
- Amin, Muh. (2018). Pendidikan Multiikultural. *Jurnal Pilar*, 9 (1).

- Amran Suadi. (2022). *Filsafat Agama, Budi Pekerti, dan Toleransi (Nilai-Nilai Moderasi Beragama)*. Jakarta: Kencana.
- Aretsa Zana Ayunda et al., (2022). “Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik,” *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1, hlm. 8, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys>
- Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Azyumardi Azra. (2012). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Azyumardi Azra. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Azyumardi Azra. (2020). *Relevansi Islam Moderat di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, <https://www.bps.go.id>.
- Bangkit Adi Saputra. (2025). Moderasi Beragama dalam Perspektif Realisme Hobbes: Jalan Menuju Harmoni Sosial di Indonesia, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 10, No.1. (Saputra, t.t.)
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching (6th ed.)*. New York: Routledge, <https://doi.org/10.4324/9781315775858>.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Social Psychology*, Boston: Pearson, 2005, <https://www.mchip.net/libweb/u2C9A6/243564/Baron%20And%20Byrne%20Social%20Psychology.pdf>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). “The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation.” *Psychological Bulletin*, <https://psycnet.apa.org/record/1995-29052-001>
- Berger, P. L. (1999). *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. Washington, DC: Ethics and Public Policy Center.
- Bhikhu Parekh. (200). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, London: Macmillan Press, https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/HIA261/Parekh_Rethinking_multiculturalism.pdf
- Biyanto, B. (2023). *Islam Wasathiyah dalam Perdebatan Ulama dan Cendekiawan Muslim*. Depok: Pena Salsabila.

- Charles Taylor. (1994). *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*, Princeton: Princeton University Press, <http://ercbgd.org.rs/images/stories/multi-kulti-biblioteka/CHARLES%20TAYLOR%20MULTICULTURALISM%20AND%20POLITICS%20OF%20RECOGNITION.pdf>
- Choirul Mahfud. (2016). *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). "Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis." *Psychological Bulletin*, <https://scholar.google.co.id/citations?user=8xLwgYQAAAAJ&hl=id>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Diana L. Eck. (2001). *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*, New York: HarperCollins, https://www.academia.edu/8290799/New_Religious_America_How_a_Christian_Country_Has_Now_Become_the_Worlds_Most_Religiously_Diverse_Nation.
- Durkheim, E. (1997). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, <https://ia601408.us.archive.org/14/items/in.ernet.dli.2015.233884/2015.233884.The-Division.pdf>.
- Feny Rita Fiantika et al., (2022), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatr Novita, Rake Sarasin, 1st ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3-4.
- Fitri Nur Hidayat. (2023). Multikulturalisme dalam pendidikan Islam. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 6(2).
- George Herbert Mead. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 135–150, <https://web.pdx.edu/~tothm/theory/Excerpt%20from%20Mind%20Self%20and%20Society.doc>
- Giddens, A. (2006). *Sociology (5th ed.)*. Cambridge: Polity Press, <https://www.shortcutstv.com/text/giddens5th.pdf>.
- Gillin, John L. & Gillin, John Philip. (1954). *Cultural Sociology*. New York: Macmillan.

- Gordon W. Allport. (1954). *The Nature of Prejudice*. Massachusetts: Addison-Wesley, https://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/allport_Nature_of_prejudice.pdf
- H. A. R. Tilaar. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, https://books.google.com/books/about/Multikulturalisme.html?hl=id&id=0z7xAAAACA_AJ
- H.A.R. Tilaar. (2004). *Multikulturalisme*, Jakarta: Grasindo.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, <https://teddykw2.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/jurgen-habermas-theory-of-communicative-action-volume-1.pdf>.
- Hadits riwayat Imam Muslim nomor hadits 4.924, *Hadits Tazkia Online*, diakses pada 8 Oktober 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:1062>
- Hashas, M. (2021). *Pluralism in Islamic Contexts: Ethics, Politics and Modern Challenges*. Cham: Springer.
- Henri Tajfel & John Turner. (1979). *An Integrative Theory of Intergroup Conflict*. London: Brooks/Cole, hlm. 33–47, https://prefeitura.aracaju.se.gov.br/uploaded-files/ityPkb/5AD190/tajfel_turner_1979-an-integrative_theory_of_intergroup-conflict.pdf
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Jack Donnelly. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca: Cornell University Press, http://lib.ysu.am/disciplines_bk/bab6b294756a8d5fc9621362a2bad85a.pdf
- Jalaluddin. (2011). *Psikologi Agama*, Jakarta: RajaGrafindo.
- James A. Banks. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Pearson, https://books.google.com/books/about/An_Introduction_to_Multicultural_Educati.html?hl=id&id=m3wOAQAAMAAJ
- James A. Banks. (2008). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga.

- James A. Banks. (2015), *Cultural Diversity and Education*, New York: Routledge, <https://books.google.co.id/books?id=cDhACwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>
- John Lewis Gillin & John Philip Gillin. (1954). *Cultural Sociology*. New York: Macmillan, <https://books.google.co.id/books?id=xzSdtgAACAAJ>
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 60–65, <https://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2016/06/John-Rawls-A-Theory-of-Justice-Belknap-Press-1999.pdf>
- Jurgen Habermas. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press, <https://teddykw2.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/jurgen-habermas-theory-of-communicative-action-volume-1.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id>
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship*. Oxford University Press, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb
- Lewis A. Coser. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press, <https://books.google.co.id/books?id=GvErbayPhcgC&printsec=copyright&hl=id>
- Littlejohn, Stephen W., & Karen A. Foss. (2009). *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press, https://staibabussalamsula.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/Theories-of-Human-Communication-by-Stephen-W.-Littlejohn-Karen-A.-Foss-John-G.-Oetzel-staibabussalamsula.ac_.id_.pdf
- M. Ainul Yaqin. (2005), *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.
- M. Amin Abdullah. (2014). *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Amin Abdullah. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Studi Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

- M. Quraish Shihab. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Jakarta: Lentera Hati.
- Mahfud, C. (2016). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, <https://repository.uindatokarama.ac.id/1762/7/Text%20Lengkap%20Buku%20Pendidikan%20Multikultural.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Manajemen pendidikan: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah*. Jakarta: Kencana, <https://books.google.co.id/books?id=X9YvDwAAQBAJ&printsec=frontcover>
- Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, https://books.google.com/books/about/Paradigma_pendidikan_Islam.html?hl=id&id=OwGSAAAACAAJ
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, https://www.researchgate.net/profile/Puspo-Nugroho/publication/356841517_PENGEMBANGAN_KURIKULUM_PENDIDIKAN_AGAMA_ISLAM/links/61b0171168b5ed4ef5efca23/PENGEMBANGAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-AGAMA-ISLAM.pdf
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawwir, A. (2001). *Piagam Madinah: Konstitusi Pertama di Dunia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nanang Fattah. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, https://books.google.com/books/about/Sistem_penjaminan_mutu_pendidikan_dalam.html?id=eDAWMwEACAAJ
- Nata, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, https://books.google.com/books/about/Ilmu_Pendidikan_Islam.html?id=orJADwAAQBAJ

- Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. (2017), *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurcholish Madjid. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina, http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Cak_Nur_-_Islamkosmodern.pdf
- Nurlaili, dkk. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. (Islam & Lhokseumawe, t.t.), *Journal of Religious Harmony*, Vol. 1, No. 1.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (2nd ed.). New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-37741-5>
- Parsudi Suparlan. (2002), “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, dalam *Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3*, Denpasar Bali, 16-21 Juli.
- Paulo Freire. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, hlm. 72–80, [https://files.libcom.org/files/Paulo%20Freire,%20Myra%20Bergman%20Ramos,%20Donaldo%20Macedo%20-%20Pedagogy%20of%20the%20Oppressed,%2030th%20Anniversary%20Edition%20\(2000,%20Bloomsbury%20Academic\).pdf](https://files.libcom.org/files/Paulo%20Freire,%20Myra%20Bergman%20Ramos,%20Donaldo%20Macedo%20-%20Pedagogy%20of%20the%20Oppressed,%2030th%20Anniversary%20Edition%20(2000,%20Bloomsbury%20Academic).pdf)
- Paulo Freire. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES.
- Pengertian Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books, <https://amstudugm.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/social-construction-of-reality.pdf>
- Peter L. Berger. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.
- Profil Pusat Ma’had al-Jami’ah, <https://msaa.uin-malang.ac.id/>
- Rahman, Fazlur. (2019). “Kebijakan Pendidikan Islam dan Penguatan Moderasi Beragama.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, <https://giuseppicapograssi.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/rawls99.pdf>.

- Ruslani. (2000), *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: Bentang.
- Sajjad, A. (2021). Developing Wasathiyah Epistemology in the Digital Era. *Journal of Islamic Education Research*, 3(1).
- SETARA Institute. (2023). *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, <https://setara-institute.org>.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 213, <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/565569-pengantar-sosiologi-0be70484.pdf>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, T. (2020). Moderasi Beragama: Antara Konsep dan Praktik. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 43(2).
- Sulalah. (2011), *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-nilai Universalitas Kebangsaan*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Surat Al-A'raf Ayat 31-33: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=31&to=33>
- Surat Al-Baqarah Ayat 143: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=143&to=143>
- Surat Al-Hujurat Ayat 13: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>
- Surat Al-Kafirun Ayat 1-6: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/109?from=1&to=6>
- Surat Al-Maidah Ayat 2: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>
- Surat Al-Qasash Ayat 77: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=77>
- Surat Yusuf Ayat 99: Arab, Latin, dan Terjemah, Quran Kemenag Online*, diakses pada 7 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=99&to=99>

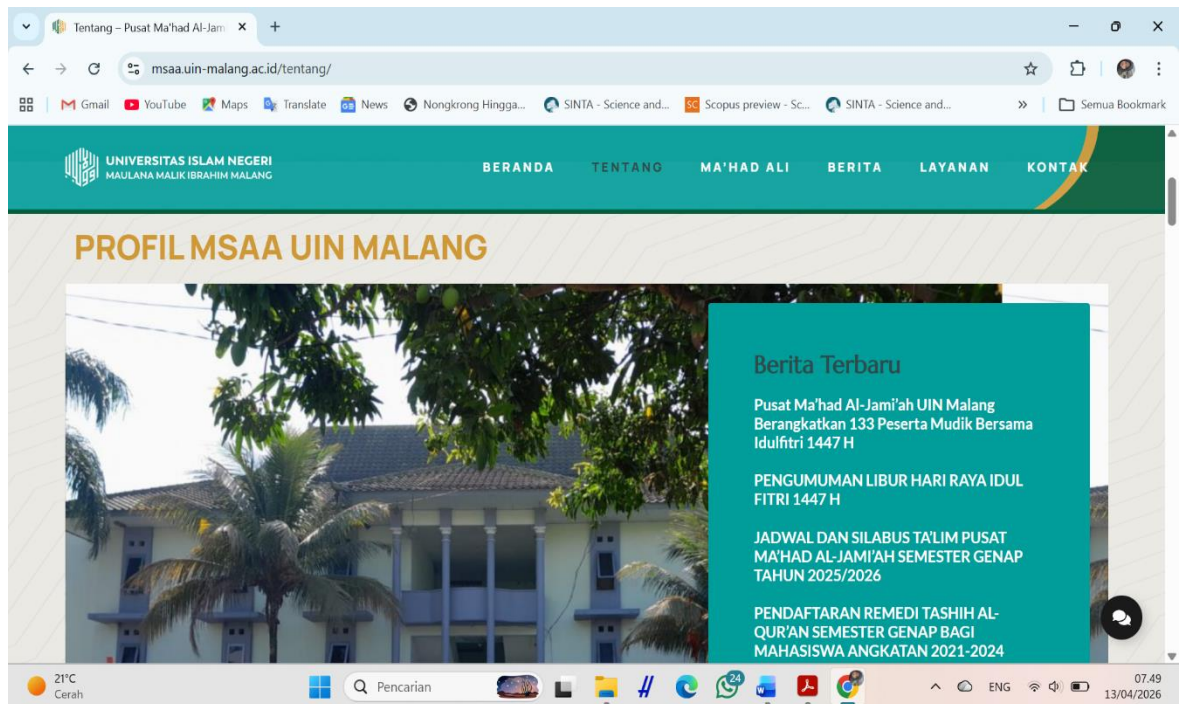
- Tafsir Al-Misbah. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati.
- Talcott Parsons. (1951). *The Social System*. New York: Free Press, <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/The-Social-System-by-Talcott-Parsons.pdf>
- Tambunan, A. (2019). *Islam Wasathiyah: Solusi Indonesia untuk Perdamaian Afghanistan*. Jakarta: MUI Press.
- Thomas Lickona. (2012). *Character Matters*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. *Al-Mu'jam al-Wasith, Juz II*. Kairo: Dar al-Da'wah.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations, Pasal 18, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Validasi Kedatangan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Berjalan Tertib dan Lancar*", msaa.uin-malang.ac.id, <https://msaa.uin-malang.ac.id/validasi-kedatangan-mahasiswa-baru-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-berjalan-tertib-dan-lancar/>, diakses pada 1 Januari 2026.
- Walzer, M. (1997). *On Toleration*. New Haven: Yale University Press.
- Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, https://books.google.co.id/books?id=w5Kaqy-W78C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. Sage Publications.
- Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Zuly Qodir. (2012). *Islam Liberal dan Pluralisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Zuly Qodir. (2019). "Pendidikan Islam Multikultural," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82>.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang http://fitk.uin-malang.ac.id email : fitk@uin-malang.ac.id	
Nomor	: 600/Un.03.1/TL.01.04/02/2026	5 Februari 2026
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	
Kepada		
Yth. Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Malang		
di		
Malang		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:		
Nama	: Gita Selvia	
NIM	: 220101110005	
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam (PAI)	
Semester - Tahun Akademik	: Genap - 2025/2026	
Judul Skripsi	: Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Lama Penelitian	: Februari 2026 sampai dengan April 2026 (3 bulan)	
diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.		
Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik di sampaikan terimakasih.		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
		
Dekan, Muhammad Walid, MA 9730823 200003 1 002		
Tembusan :		
1. Yth. Ketua Program Studi PAI		
2. Arsip		

2. Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



3. Lembar Hasil Observasi

Kegiatan : Observasi

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026, pukul 08.00 WIB.

Lokasi : Mabna Ar-Razi, Kampus 2 UIN Malang, Jl. Raya Ir. Soekarno No. 34, Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

No	Aspek	Indikator	Hasil		Catatan
			Ya	Tidak	
1	Kondisi Lingkungan Ma'had	Tersedia fasilitas umum yang dapat digunakan bersama oleh mahasantri Muslim dan non-Muslim	✓		
		Terdapat simbol-simbol keagamaan yang tampak di lingkungan Ma'had	✓		Tidak ditemukan simbol keagamaan selain Islam, hal ini dikarenakan mayoritas mahasiswa dan civitas akademika UIN Malang beragama Islam.

2	Interaksi Sosial	Mahasantri Muslim dan non-Muslim terlibat dalam aktivitas bersama (belajar, makan, kebersihan)	✓		
		Terlihat adanya sikap saling menghormati antar mahasantri	✓		
		Ada bentuk kerja sama antar mahasantri lintas agama	✓		
3	Kegiatan Akademik dan non-Akademik	Mahasantri non-Muslim ikut serta dalam kegiatan akademik (belajar, diskusi)		✓	Mahasantri non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti kegiatan Taklim.
		Mahasantri non-Muslim hadir dalam kegiatan non-akademik (kebersihan, sosial, olahraga)	✓		
		Ada keterlibatan dalam kegiatan bernuansa Islam (misalnya kajian, doa bersama)	✓		
4	Moderasi Beragama	Pengelola Ma'had menunjukkan sikap menghargai perbedaan keyakinan	✓		
		Aturan Ma'had mendukung kehidupan yang inklusif dan harmonis	✓		
		<i>Musyrif/musyrifah</i> berperan aktif dalam menumbuhkan sikap toleran	✓		

4. Transkrip Wawancara dengan Mahasantri Non-Muslim, Mahasantri Muslim, *Musyrif*, *Murabbiah*, dan *Mudir* Pusat Ma'had al-Jami'ah

a. Identitas Informan

Nama : Rocky Marcelino George Wonda
 Umur : 19 tahun
 Program Studi : Farmasi
 Semester : 2
 Asal Daerah : Kecamatan Ilu, Kabupaten Puncak Jaya,
 Provinsi Papua Tengah
 Latar Belakang Agama : Kristen Katolik

b. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Apa alasan Anda memilih tinggal di Ma'had al-Jami'ah meskipun berstatus non-Muslim?	Saya memilih tinggal di Ma'had al-Jami'ah karena pertimbangan fasilitas, kedisiplinan, dan lingkungan akademik yang mendukung pembentukan karakter. Selain itu, saya melihat Ma'had sebagai ruang belajar toleransi dan keberagaman, sehingga menjadi pengalaman sosial yang berharga bagi saya sebagai non-Muslim.	RM. RM02. 34
2	Bagaimana kesan pertama Anda ketika memasuki lingkungan Ma'had?	Kesan pertama saya adalah lingkungan Ma'had terasa religius, tertib, dan terstruktur. Awalnya saya merasa canggung karena perbedaan keyakinan, namun suasana yang ramah dan sikap terbuka dari penghuni Ma'had membuat saya merasa lebih tenang dan diterima.	RM. RM02. 36
3	Bagaimana bentuk interaksi Anda dengan mahasantri Muslim sehari-hari?	Interaksi saya dengan mahasantri Muslim berjalan dengan baik dan bersifat saling menghormati. Kami berkomunikasi secara normal dalam kegiatan sehari-hari seperti belajar, diskusi, dan aktivitas sosial tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan.	RM. RM02. 38

4	Apakah Anda merasa diterima dan dihargai di lingkungan Ma'had? Mengapa?	Ya, saya merasa diterima dan dihargai. Hal ini terlihat dari sikap teman-teman dan pengelola Ma'had yang tidak membedakan perlakuan, serta tetap memberikan ruang bagi saya untuk menjalankan keyakinan pribadi.	RM. RM02. 40
5	Adakah pengalaman yang membuat Anda merasa kurang nyaman terkait perbedaan keyakinan?	Secara umum tidak ada pengalaman yang signifikan. Jika pun ada, lebih berupa rasa canggung di awal karena perbedaan budaya dan kebiasaan, bukan karena adanya sikap diskriminatif atau penolakan secara langsung.	RM. RM03. 58
6	Bagaimana Anda menanggapi kegiatan keagamaan Islam yang ada di Ma'had?	Saya menanggapi kegiatan keagamaan Islam dengan sikap menghormati. Saya memahami bahwa Ma'had merupakan lingkungan berbasis Islam, sehingga saya menyesuaikan diri tanpa harus terlibat langsung dalam ibadah yang bersifat khusus.	RM. RM01. 01
7	Bagaimana sikap <i>musyrif/musyrifah</i> terhadap keberadaan Anda?	<i>Musyrif dan musyrifah</i> bersikap profesional, terbuka, dan menghargai keberadaan saya. Mereka memberikan arahan yang jelas terkait aturan Ma'had tanpa memaksakan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan saya.	RM. RM01. 13
8	Bagaimana peran teman Muslim dalam membantu atau mendukung aktivitas Anda di Ma'had?	Teman-teman Muslim cukup membantu, baik dalam hal akademik maupun kehidupan sehari-hari. Mereka sering memberi penjelasan tentang aturan Ma'had dan membantu saya beradaptasi dengan lingkungan baru.	RM. RM02. 42
9	Menurut Anda, sejauh mana nilai moderasi beragama diterapkan di Ma'had?	Menurut saya, nilai moderasi beragama sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta tidak adanya pemaksaan	RM. RM01. 03

		keyakinan kepada non-Muslim.	
10	Apa harapan Anda terhadap kehidupan multikultural di Ma'had ke depannya?	Saya berharap kehidupan multikultural di Ma'had semakin berkembang, dengan ruang dialog yang lebih terbuka antaragama, serta kebijakan yang terus mendukung toleransi dan keharmonisan dalam keberagaman.	RM. RM03. 62

c. Identitas Informan

Nama : Apriliano Virgo Manek
 Umur : 18 tahun
 Program Studi : Farmasi
 Semester : 2
 Asal Daerah : Flores, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Latar Belakang Agama : Kristen Protestan

d. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Apa alasan Anda memilih tinggal di Ma'had al-Jami'ah meskipun berstatus non-Muslim?	Alasannya yang pertama karena diwajibkan selama satu tahun, dan yang kedua kalau memang tidak diwajibkan, saya juga tetap memilih tinggal di Ma'had karena menurut saya dengan tinggal di asrama itu kita bisa belajar mengatur waktu, dan kita juga belajar tentang toleransi karena di mana kita berasal dari daerah, suku, ras, dan agama yang berbeda.	AV. RM02. 35
2	Bagaimana kesan pertama Anda ketika memasuki lingkungan Ma'had?	Kesan saya jujur, saya merasa senang, nyaman, karena kakak <i>musyrif/ah</i> di asrama menyambut kedatangan saya dengan sangat ramah, dan juga suasana di asrama juga sungguh menyenangkan.	AV. RM02. 37

3	Bagaimana bentuk interaksi Anda dengan mahasantri Muslim sehari-hari?	Bentuk interaksi, di mana salah satunya saling menghargai dan menghormati satu sama lain karena di mana kita berbeda keyakinan dan masih banyak lagi.	AV. RM02. 39
4	Apakah Anda merasa diterima dan dihargai di lingkungan Ma'had? Mengapa?	Iya, saya merasa sangat dihargai karena saya diperlakukan dengan baik dan adil oleh kakak-kakak <i>musyrif/ah</i> maupun sesama teman tanpa adanya pilih kasih, dan tanpa memandang latar belakang dan perbedaan.	AV. RM02. 41
5	Adakah pengalaman yang membuat Anda merasa kurang nyaman terkait perbedaan keyakinan?	Kalau soal merasa kurang nyaman karena adanya perbedaan keyakinan, jujur itu tidak pernah sama sekali.	AV. RM03. 59
6	Bagaimana Anda menanggapi kegiatan keagamaan Islam yang ada di Ma'had?	Menurut saya baik, karena itu sudah menjadi hak atau kewajiban bagi umat Muslim dan saya sebagai umat Kristiani harus menghargai itu.	AV. RM01. 02
7	Bagaimana sikap <i>musyrif/musyrifah</i> terhadap keberadaan Anda?	Sikap <i>musyrif</i> dan <i>musyrifah</i> sangat baik dan peduli terhadap saya tanpa adanya pilih kasih atau dibedakan karena berbeda keyakinan.	AV. RM01. 14
8	Bagaimana peran teman Muslim dalam membantu atau mendukung aktivitas Anda di Ma'had?	Mereka meyakinkan saya bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang bagi masa depan kita.	AV. RM02. 43
9	Menurut Anda, sejauh mana nilai moderasi beragama diterapkan di Ma'had?	Kalau menurut saya bagus sekali, Kak. Kenapa saya katakan seperti itu, karena yang paling penting dalam hidup beragama itu harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain.	AV. RM01. 04
10	Apa harapan Anda terhadap kehidupan multikultural di Ma'had ke depannya?	Harapan saya semoga ke depannya kita bisa mempertahankan kebaikan yang sudah kita jalankan, dan yang kurang baik kita buat menjadi lebih baik lagi.	AV. RM03. 63

e. Identitas Informan

Nama : Fahmaan Hafizh Nadira
 Umur : 18 tahun
 Program Studi : Farmasi
 Semester : 2
 Asal Daerah : Indramayu, Provinsi Jawa Barat
 Latar Belakang Agama : Islam

f. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma'had?	Saya melihat mereka sebagai saudara dalam kemanusiaan yang memperkaya warna intelektual dan spiritual di Ma'had.	FH. RM01. 05
2	Bagaimana pengalaman Anda berinteraksi dengan mahasantri non-Muslim dalam kehidupan sehari-hari?	Interaksi kami sangat cair dan hangat, kami berteman tanpa sekat, saling bantu dalam akademik, dan berbagi tawa dalam keseharian asrama.	FH. RM02. 44
3	Apakah Anda merasa kehadiran mereka memengaruhi suasana kehidupan di Ma'had?	Kehadiran mereka justru memperluas cakrawala berpikir kami, menjadikan suasana Ma'had lebih dewasa, inklusif, dan penuh toleransi.	FH. RM03. 64
4	Bagaimana sikap Anda dalam menjaga hubungan baik dengan mahasantri non-Muslim?	Kami selalu mengedepankan adab, keramahan, dan empati dalam menghargai keyakinan mereka, yang mana itu adalah wujud nyata dari kematangan iman saya.	
5	Adakah pengalaman yang menunjukkan sikap saling menghargai antar mahasantri lintas agama?	Saat Ramadan, mereka sangat menghormati kami yang berpuasa. Sebaliknya, kami memberi ruang nyaman bagi mereka untuk beribadah. Itulah harmoni.	FH. RM02. 46
6	Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau gesekan karena perbedaan keyakinan? Bagaimana Anda menyikapinya	Nyaris tidak ada. Jika ada beda pendapat, kami menyelesaikannya dengan <i>tabayyun</i> (klarifikasi) dan dialog santai sambil minum kopi.	FH. RM02.48
7	Menurut Anda, apakah kegiatan akademik maupun non-akademik di Ma'had	Gaya hidup dan kegiatan di Ma'had sudah sangat mencerminkan keragaman	FH. RM01. 09

	sudah mencerminkan suasana multikultural?	latar belakang, semuanya dirangkul dalam semangat kebersamaan.	
8	Bagaimana peran <i>musyrif/musyrifah</i> dalam membimbing hubungan antar mahasantri yang berbeda agama?	Mereka adalah teladan dalam menanamkan kasih sayang tanpa memandang perbedaan, selalu menengahi dengan bijak.	FH. RM03. 60
9	Menurut Anda, sejauh mana nilai moderasi beragama diterapkan di Ma'had dalam kehidupan sehari-hari?	Telah mendarah daging. Kami diajarkan teguh dalam keyakinan, namun lembut dalam pergaulan lintas iman.	FH. RM01. 11
10	Apa harapan Anda untuk meningkatkan suasana toleransi dan kerukunan di Ma'had?	Semoga Ma'had terus menjadi asrama yang menyejukkan, di mana perbedaan tidak diperdebatkan melainkan disyukuri sebagai kekayaan.	FH. RM03. 66

g. Identitas Informan

Nama : Jamalul Il Alfian
 Umur : 18 tahun
 Program Studi : Farmasi
 Semester : 2
 Asal Daerah : Kepulauan Tengah, Madura, Provinsi Jawa Timur
 Latar Belakang Agama : Islam

h. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma'had?	Aman saja menurut saya, dan saya dapat mengenal agama yang dianut teman saya seperti apa, dan begitu pun sebaliknya dia tahu seperti apa agama yang saya anut.	Jl. RM01. 06
2	Bagaimana pengalaman Anda berinteraksi dengan mahasantri non-Muslim dalam kehidupan sehari-hari?	Sangat asyik, baik, tidak ada rasis di antara kita, dan kita saling mengingatkan satu sama lain ketika waktunya beribadah.	Jl. RM02. 45
3	Apakah Anda merasa kehadiran mereka memengaruhi suasana kehidupan di Ma'had?	Tidak sama sekali, karena mereka juga sangat toleran.	Jl. RM03. 65
4	Bagaimana sikap Anda dalam menjaga hubungan baik, saya sangat-sangat	Untuk menjaga hubungan baik, saya sangat-sangat	JM. RM01. 08

	baik dengan mahasantri non-Muslim?	toleran terhadap agama yang dianut teman saya, serta tidak ada paksaan untuk mengajak dia mengenal Islam.	
5	Adakah pengalaman yang menunjukkan sikap saling menghargai antar mahasantri lintas agama?	Ada ketika saya ketiduran dan di waktu itu sudah waktunya sholat, dia membangunkan saya untuk sholat dan saya membangunkan dia ketika dia telat bangun untuk beribadah.	Jl. RM02. 47
6	Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau gesekan karena perbedaan keyakinan? Bagaimana Anda menyikapinya	Tidak ada konflik di antara kami, sebab kami merasa bersaudara.	Jl. RM02. 49
7	Menurut Anda, apakah kegiatan akademik maupun non-akademik di Ma'had sudah mencerminkan suasana multikultural?	Iya, karena Ma'had di sini tidak memaksa non-Muslim untuk mengikuti kegiatan Ma'had yang mengandung unsur-unsur Islam.	Jl. RM01. 10
8	Bagaimana peran <i>musyrif/musyrifah</i> dalam membimbing hubungan antar mahasantri yang berbeda agama?	Tidak ada bimbingan yang bersifat membeda-bedakan.	Jl. RM03. 61
9	Menurut Anda, sejauh mana nilai moderasi beragama diterapkan di Ma'had dalam kehidupan sehari-hari?	Iya, sangat baik, karena tidak ada paksaan atau penekanan untuk mengikuti.	Jl. RM01. 12
10	Apa harapan Anda untuk meningkatkan suasana toleransi dan kerukunan di Ma'had?	Jangan sampai terjadinya rasis hanya karena perbedaan agama, dan saya sangat berharap mudah-mudahan sangat tinggi sikap toleransi di Ma'had ini.	Jl. RM03. 67

i. Identitas Informan

Nama : M. Amir Fariq
 Umur : 20 tahun
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Alamat Asal : Dusun Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur
 Semester : 6
 Lama menjadi *musyrif* : 2 tahun

j. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma'had?	Jujur, awalnya mungkin agak kaget, ya. Tapi, kalau menurutku pribadi, keberadaan mereka itu justru keren banget. Ma'had jadi tidak eksklusif. Ini bukti kalau kampus kita emang terbuka buat siapa saja. Malah jadi kesempatan buat kita semua belajar kalau perbedaan itu nyata.	MA. RM01. 15
2	Apakah ada perbedaan perlakuan antara mahasantri Muslim dan non-Muslim?	Kalau soal fasilitas, aturan kamar, atau kebersihan, semuanya sama rata. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Cuma memang ada penyesuaian di ibadah. Mahasantri Muslim kayak biasa ada jamaah dan taklim, nah yang non-Muslim kita kasih ruang buat beribadah sesuai keyakinannya dengan tidak ikut kegiatan jamaah dan juga taklim. Jadi, bedanya cuma di ranah ibadah saja, sisanya sama-sama saudara sekamar.	MA. RM01. 17
3	Bagaimana bentuk interaksi mahasantri non-Muslim dengan teman-teman Muslimnya di Ma'had?	Dampinganku sama teman sekamarnya itu <i>Alhamdulillah</i> akur, meski kadang ada saja berantem karena salah pemahaman dan kurang perhatian terhadap sesama, tapi selebihnya kadang malah kita tidak ingat kalau ada perbedaan agama kalau lagi mengerjakan tugas bareng. Mahasantri non-Muslim ini sering banget tanya-tanya soal kebiasaan kita, dan yang teman Muslim dengan senang hati menjelaskan tanpa maksud menggurui.	MA. RM02. 50
4	Apa tantangan yang Anda hadapi dalam membimbing mahasantri non-Muslim?	Tantangan terbesarnya lebih ke rasa 'tidak enak hati' di awal. Aku harus pastikan kalau dia tidak merasa	MA. RM03. 68

		terasing pas teman-temannya lagi bahas soal agama atau pas lagi jadwal ibadah padat. Aku juga harus rajin-rajin tanya kabar, takutnya dia sungkan mau cerita kalau ada apa-apa. Soalnya anaknya lumayan pendiam kalau sama aku.	
5	Bagaimana Anda menjaga agar hubungan antar mahasantri tetap harmonis?	Intinya atau kuncinya cuma satu sih, yakni komunikasi dan saling menghargai. Aku selalu tekankan di kamar kalau kamar ini adalah rumah bersama. Kita buat aturan main yang disepakati bareng, misalnya saling menjaga ketenangan pas ada yang lagi ibadah atau berdo'a.	MA. RM01. 19
6	Adakah pengalaman khusus yang menurut Anda mencerminkan nilai toleransi di Ma'had?	Ada, pas suatu malam acara <i>muhadharah</i> atau pendampingan bersama pengasuh yang bertempat di masjid, dampinganku yang non-Muslim ini juga ikut hadir dan menyimak hal-hal yang disampaikan oleh pengasuh. Ada juga saat di mana kami ada kumpul yang mengharuskan mengenakan baju putih dan sarung, lalu dampinganku yang non-Muslim ini dengan senang hati juga ikut menaati aturan itu, dan yang paling sering tidak mengajak teman-temannya yang Muslim ke hal-hal yang tidak-tidak.	MA. RM01. 21
7	Bagaimana kebijakan Ma'had mendukung peran Anda dalam pembinaan?	Ma'had sendiri sangat mendukung sih. Pengasuh dan <i>murabbi/ah</i> selalu pesan ke kita para pendamping buat jaga kenyamanan semua mahasantri tanpa terkecuali. Aturannya jelas, tidak ada paksaan dalam hal akidah, tapi tetap harus ikut aturan kedisiplinan Ma'had.	MA. RM03. 70
8	Apakah pernah terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama?	Sejauh ini sih tidak ada konflik besar. Paling cuma salah paham kecil, misal soal	MA. RM02. 52

	Bagaimana cara Anda menyelesaikannya?	suara alarm atau jam tidur. Cara selesainya langsung diajak ngobrol di sidang kamar yang santai. Pokoknya kami selesaikan pakai hati, bukan pakai emosi.	
9	Bagaimana Anda menilai praktik moderasi beragama yang berjalan di Ma'had?	Menurutku sudah berjalan alami. Di sini moderasi itu bukan cuma seminar, tapi dipraktikkan langsung. Kita diajarin buat tetap teguh sama agama sendiri, tapi tetap bisa jadi teman yang asyik buat yang beda keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, tapi tetap bisa ngopi bareng.	MA. RM01. 23
10	Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan untuk membangun suasana multikultural yang lebih baik di Ma'had?	Mungkin perlu lebih banyak kegiatan bersama yang sifatnya umum atau hobi, biar tidak melulu soal kegiatan akademik atau agama. Jadi, ikatan emosionalnya makin kuat lewat olahraga atau seni bareng. Makin banyak interaksi, makin tipis sekat perbedaannya.	MA. RM03. 72

k. Identitas Informan

Nama : Muhammad Hanif
 Umur : 20 tahun
 Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 Alamat Asal : Jakarta
 Semester : 4
 Lama menjadi *musyrif* : 1 tahun

l. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma'had?	Tentu bagi saya ini informasi yang membanggakan untuk UIN dan Ma'had tersendiri, yang di mana kampus kita ini sangat <i>welcome</i> untuk non-Muslim.	MH. RM01. 16

2	Apakah ada perbedaan perlakuan antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim?	Untuk peraturan tetap sama, tidak ada yang dibedakan, mungkin untuk kegiatan sehari-hari mereka baru berbeda dengan teman-temannya yang Muslim.	MH. RM01. 18
3	Bagaimana bentuk interaksi mahasiswa non-Muslim dengan teman-teman Muslimnya di Ma'had?	Interaksinya itu mereka dengan mengerjakan tugas bareng dan mereka berkumpul nongkrong bareng di kafetaria.	MH. RM02. 51
4	Apa tantangan yang Anda hadapi dalam membimbing mahasiswa non-Muslim?	Mungkin dari saya itu untuk mengingatkan mereka pergi beribadah.	MH. RM03. 69
5	Bagaimana Anda menjaga agar hubungan antar mahasiswa tetap harmonis?	Sering menanyakan kabarnya hari ini, dan jika ada mahasiswa yang membutuhkan tempat cerita, ya kita harus siap mendengarkannya.	MH. RM01. 20
6	Adakah pengalaman khusus yang menurut Anda mencerminkan nilai toleransi di Ma'had?	Ada, yaitu saling mengingatkan untuk beribadah.	MH. RM01. 22
7	Bagaimana kebijakan Ma'had mendukung peran Anda dalam pembinaan?	Kebijakan Ma'had sangat mendukung saya dalam pembinaan mahasiswa dengan seluruh kegiatan yang ada di Ma'had ini.	MH. RM03. 71
8	Apakah pernah terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama? Bagaimana cara Anda menyelesaikannya?	<i>Alhamdulillah</i> sampai saat ini tidak ada konflik perbedaan agama.	MH. RM02. 53
9	Bagaimana Anda menilai praktik moderasi beragama yang berjalan di Ma'had?	Dengan melihat keseharian mahasiswa tersebut, apakah sudah memenuhi dalam kriteria yang telah kita tentukan.	MH. RM01. 24
10	Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan untuk membangun suasana multikultural yang lebih baik di Ma'had?	Menurut saya sejauh ini sudah sangat bagus untuk menciptakan suasana multikultural di Ma'had kita ini.	MH. RM03. 73

m. Identitas Informan

Nama : Shofia Alif Masruroh, S.Pd.
 Umur : 24 tahun
 Alamat Asal : Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
 Pendidikan Terakhir : S1
 Lama menjadi *Murabbiah* : 2 tahun

n. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Apa pandangan Anda tentang keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma'had?	Keberadaan mahasantri non-Muslim di Ma'had merupakan bagian dari realitas keberagaman di lingkungan kampus. Hal ini dapat menjadi sarana pembelajaran bersama untuk membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan memahami perbedaan keyakinan. Selama mereka dapat mengikuti aturan umum yang berlaku di Ma'had, keberadaan mereka justru memperkaya pengalaman sosial dan nilai-nilai kebersamaan di lingkungan mahasantri.	SA. RM02. 54
2	Bagaimana kebijakan awal yang membuat Ma'had menerima mahasantri non-Muslim?	Kebijakan ini berangkat dari prinsip moderasi beragama di bawah lingkungan Kementerian. Sehingga hal ini membuat UIN Malang yang notabene kampus Islam negeri membuka lebar pintu diterimanya mahasiswa dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, secara otomatis Ma'had menaungi mahasantri tidak hanya yang beragama Islam saja, tapi juga yang non-Islam.	SA. RM02. 55
3	Bagaimana cara Anda mendampingi mereka dalam kegiatan harian?	Pendampingan terhadap mahasantri non-Muslim dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan humanis. Mereka tetap mengikuti aturan umum kehidupan di Ma'had seperti disiplin waktu, kebersihan, dan kegiatan sosial	SA. RM01. 25

		bersama. Namun, dalam kegiatan yang bersifat ritual keagamaan Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti secara langsung. Pendampingan lebih diarahkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, serta penanaman nilai saling menghormati antaragama.	
4	Apakah terdapat perbedaan dalam pendampingan antara mahasantri yang beragama Islam dan Non-Islam?	Dalam kegiatan keseharian tentu mereka didampingi sama halnya dengan mahasantri lain, seperti kegiatan olahraga, kebersihan lingkungan mabna, kedisiplinan, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas sosial.	SA. RM02. 56
5	Apakah ada kegiatan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi mereka?	Tentu ada, pada kegiatan yang bersifat khusus keagamaan seperti shalat berjamaah atau kajian keislaman tertentu, diberikan penyesuaian. Jika mahasantri Muslim mendapat kewajiban mengikuti sholat jamaah di masjid, namun mahasantri non-Muslim tidak mendapat kewajiban tersebut. Hanya saja, kami melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.	SA. RM01. 26
6	Bagaimana Anda menilai sikap mahasantri Muslim terhadap teman-temannya yang non-Muslim?	Mahasantri Muslim menunjukkan sikap yang cukup baik dan terbuka terhadap teman-teman non-Muslim. Mereka dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menjaga etika pergaulan. Biasanya mereka makan di kantin bareng-bareng, nongkrong dengan menyanyi beberapa lagu sambil main gitar, dan bahkan sering main futsal bareng. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai <i>ukhuwah insaniyah</i> , yaitu persaudaraan dalam kemanusiaan.	SA. RM01. 27

7	Apa tantangan yang Anda hadapi dalam membina kehidupan multikultural di Ma'had?	Beberapa tantangan yang muncul antara lain perbedaan latar belakang budaya dan pemahaman keagamaan para mahasiswa. Selain itu, terkadang masih ada kesalahpahaman atau rasa canggung dalam interaksi awal antara mahasiswa Muslim dan non-Muslim. Namun, melalui pembinaan dan komunikasi yang baik, tantangan tersebut biasanya dapat diatasi.	SA. RM03. 74
8	Bagaimana Anda mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada semua mahasiswa?	Nilai moderasi beragama diajarkan melalui berbagai cara, seperti pembinaan karakter, kajian keislaman yang menekankan nilai <i>rahmatan lil 'alamin</i> , serta kegiatan yang mendorong dialog dan kerja sama antar mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan agar para mahasiswa memahami bahwa Islam mengajarkan sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan.	SA. RM03. 75
9	Apakah ada bentuk dukungan khusus dari pengelola Ma'had untuk keberadaan mahasiswa non-Muslim?	Pengelola Ma'had memberikan dukungan berupa kebijakan yang menjamin kenyamanan dan keamanan mereka selama tinggal di asrama. Selain itu, pengelola juga memberikan arahan kepada <i>musyrif</i> dan <i>musyrifah</i> agar melakukan pendampingan secara bijak serta menghindari tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa non-Muslim.	SA. RM03. 76
10	Bagaimana evaluasi Anda terhadap kehidupan sosial di Ma'had sejauh ini?	Secara umum kehidupan sosial di Ma'had berjalan cukup harmonis. Mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi dengan baik dalam kegiatan sehari-hari. Meski demikian, tetap diperlukan pembinaan yang berkelanjutan agar nilai kebersamaan, toleransi, dan kedisiplinan terus terjaga.	SA. RM01. 28
11	Menurut Anda, apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan	Langkah yang dapat dilakukan antara lain memperbanyak kegiatan dialog lintas budaya dan agama, memperkuat pendidikan	SA. RM03. 77

	keharmonisan multikultural di Ma'had?	karakter berbasis toleransi, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka antar mahasiswa. Dengan demikian, kehidupan multikultural di Ma'had dapat semakin harmonis dan menjadi contoh praktik moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi.	
--	---------------------------------------	--	--

o. Identitas Informan

Nama : Dr. Kiai Ahmad Izzuddin, M.HI.
Pendidikan Terakhir : S3
Jabatan : *Mudir* Ma'had
Lama menjabat *Mudir* : 2 tahun

p. Pertanyaan Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1	Apa dasar nilai atau prinsip Islam yang menjadi pijakan Ma'had dalam menerima mahasiswa non-Muslim?	Sebenarnya prinsip dasarnya <i>وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ</i> (QS. al-Anbiya ayat 107) sebagai prinsip naqlinya, bahwa Islam itu harus menjadi rahmat bagi semesta. Pada aspek historisnya, sebenarnya perguruan tinggi Islam yang ada di Andalusia, itulah yang memberikan nilai perubahan paradigma ilmu pengetahuan yang ada di Eropa. Jadi, kampus-kampus Islam dulu dibangun secara terbuka untuk semua manusia, karena ilmu pengetahuan tidak ada memberikan sekat bahwa kampus Islam hanya boleh dimasuki oleh orang Islam saja. Di zaman Nabi, ketika selesai perang Badar, para tawanan perang dari kaum kafir Quraisy ada yang dibunuh (tapi hanya sedikit sekali), ada yang harus menyerahkan <i>fida'</i> (tebusan perang), dan yang tidak punya, orang-orang kafir	AI. RM01. 29

		Quraisy yang berpendidikan diminta untuk mengajarkan membaca dan menulis anak-anak Muslim di Madinah. Ini artinya untuk ilmu tidak ada batasan ideologi dan Islam sendiri kan agama yang terbuka terhadap peradaban apapun lewat prinsip <i>الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها</i>. Selain itu, UIN ini kan institusi negeri, kita dapat anggaran dari negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka siapa pun setiap individu yang memenuhi kualifikasi akademik menjadi mahasiswa di UIN ya diterima.	
2	Bagaimana Ma'had memaknai konsep ukhwah insaniyah dalam konteks kehidupan pesantren kampus yang multikultural?	Konsep <i>ukhuwah insaniyah</i> dimaknai oleh Ma'had sebagai prinsip persaudaraan kemanusiaan yang menempatkan seluruh manusia pada derajat yang setara tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang budaya. Dalam konteks kehidupan pesantren kampus yang multikultural, prinsip ini diwujudkan melalui penciptaan ruang hidup bersama yang berlandaskan saling menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengedepankan akhlak dalam interaksi sosial.	AI. RM01. 30
3	Apakah penerimaan mahasantri non-Muslim ini dipandang sebagai bagian dari dakwah kultural atau misi pendidikan?	Penerimaan mahasantri non-Muslim di Ma'had lebih diposisikan sebagai bagian dari misi pendidikan Islam yang inklusif, bukan dakwah dalam pengertian konversi keyakinan. Ma'had memandang pendidikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, karakter, dan akhlak mulia yang tidak	AI. RM01. 31

		dibatasi oleh identitas agama tertentu. Nilai-nilai Islam dihadirkan melalui pendekatan kultural yang humanis, keteladanan sikap, serta keterbukaan terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, keberadaan mahasantri non-Muslim justru menjadi bagian dari dakwah kultural yang menampilkan Islam sebagai agama yang ramah, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara universal.	
4	Apakah ada SOP khusus terkait pembinaan mahasantri non-Muslim di Ma'had?	Pernah ada dari Wakil Rektor 1, sudah pernah ditanyakan tapi tidak disebar bagaimana teknisnya. Sampai sekarang kita tidak punya teknis bagaimana memperlakukan mahasantri non-Muslim di Ma'had. Tapi mengalir saja, apa yang harus mereka lakukan dan mereka tidak lakukan, tidak bisa kita paksa mereka untuk mengikuti taklim atau sebagainya.	AI. RM01. 31
5	Bagaimana koordinasi Ma'had dengan pihak Universitas dalam pengelolaan keberagaman agama?	Ada kebijakan khusus. Dulu, setahu <i>Mudir</i>, pertama kali kita menerima mahasantri non-Muslim oleh Wakil Rektor 1, yaitu Prof. Umi Sumbulah. Waktu itu ada kerja sama dengan pemuka agama Kristen Katolik untuk membina aspek spiritualitas mahasiswa dari NTT.	AI. RM03. 78
6	Apakah ada batasan tertentu dalam aktivitas keagamaan non-Muslim di lingkungan Ma'had?	Pada prinsipnya, Ma'had tidak memberikan pembatasan yang bersifat represif terhadap aktivitas keagamaan non-Muslim. Namun, aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap nilai, norma, dan kultur Ma'had sebagai lembaga pendidikan Islam.	AI. RM01. 32

		Mahasantri non-Muslim tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ibadah Islam, tetapi juga diharapkan menjaga sensitivitas sosial serta tidak melakukan aktivitas keagamaan yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan bersama di lingkungan asrama.	
7	Apakah ada forum dialog/ruang curhat khusus bagi mahasantri non-Muslim?	Pernah sekali di ruang <i>podcast</i> diminta untuk berbagi pengalaman menjadi mahasantri non-Muslim di Ma'had. Kalau ruang dialog yang lebih luas atau lebih spesifik untuk mahasiswa non-Muslim kayaknya belum pernah dilakukan.	AI. RM02. 57
8	Apa indikator paling nyata bahwa Ma'had berhasil membangun moderasi beragama?	Saya pantau betul, saya tanya <i>musyrif</i> dan <i>musyrifah</i> itu apakah ada problem terkait mahasantri non-Muslim, baik antara mahasantri Muslim kepada non-Muslim, atau sebaliknya. Sampai saat ini tidak ada kendala sama sekali, dan insyaallah mahasantri kita sudah mengerti bagaimana mereka harus berinteraksi dan membangun komunikasi persahabatan dengan mahasiswa lintas kultural bahkan lintas agama.	AI. RM01. 33
9	Apa harapan <i>Mudir</i> terhadap masa depan Ma'had sebagai ruang Pendidikan Islam yang multikultural?	Memang perlu membuat regulasi tentang hak dan kewajiban mahasantri non-Muslim ketika berada di Ma'had supaya ada kesinambungan dan keselarasan bahwa di Ma'had, baik Muslim maupun non-Muslim, kedalaman spiritualitas dan keagungan akhlak itu menjadi nafas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira, kalau masing-masing punya kedalaman spiritualitas yang	AI. RM03. 80

		bagus, akhlak yang agung, ya masalah-masalah di dunia ini sebenarnya selesai. Untuk benar dan tidaknya, absolutnya nanti Allah yang akan memberikan pengaturan.	
10	Apakah keberagaman ini dipandang sebagai tantangan atau justru menjadi kekuatan bagi Pendidikan Islam?	Sebenarnya ini jadi kekuatan kalau dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi kelemahan. Tapi pada prinsipnya, multikulturalisme adalah kekuatan dan itu merupakan kekuatan manusia dan <i>sunnatullah</i> , dan Islam adalah agama yang pertama kali mungkin yang dianut oleh orang dari berbagai suku dan ras di dunia ini, sehingga Islam itu tidak identik dengan satu suku tertentu atau satu bangsa tertentu. Dia meluas di setiap peradaban, di situ ada jejak sejarah Islam, di India, Mongol, Cina, Eropa, Asia Timur, Asia Barat, Afrika, ada di semua tempat.	AI. RM03. 79

5. Transkrip Dokumentasi



Dokumentasi penyerahan surat izin penelitian kepada Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 12 Februari 2026, pukul 11.56 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Dr. Kiai. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku *Mudir* Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 19 Februari 2026, pukul 14.16 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Shofia Alif Masruroh, S.Pd selaku *Murabbiah* Mabna ar-Razi (Kampus 2), pada tanggal 30 Maret 2026, pukul 14.00 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Rocky Marcelino George Wonda (Mahasantri Non-Muslim), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026, pukul 18.05 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Apriliano Virgo Manek (Mahasantri Non-Muslim), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026, pukul 15.00 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Fahmaan Hafizh Nadira (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026, pukul 18.31 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Jamalul Il Alfian (Mahasantri Muslim Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026, pukul 15.40 WIB.



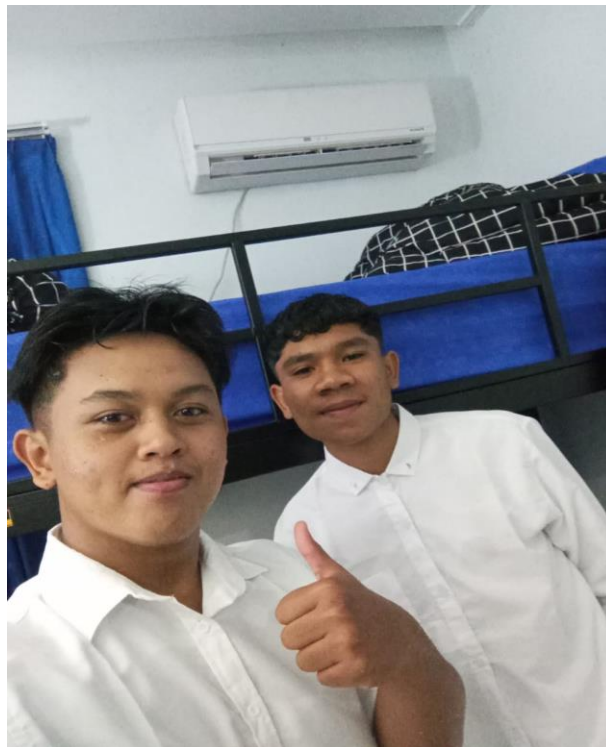
Dokumentasi wawancara dengan M. Amir Fariq (*Musyrif* Mabna Ar-Razi), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026, pukul 13.00 WIB.



Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Hanif (*Musyrif Mabna Ar-Razi*), Wawancara, Kota Batu, 28 Februari 2026, pukul 14.00 WIB.



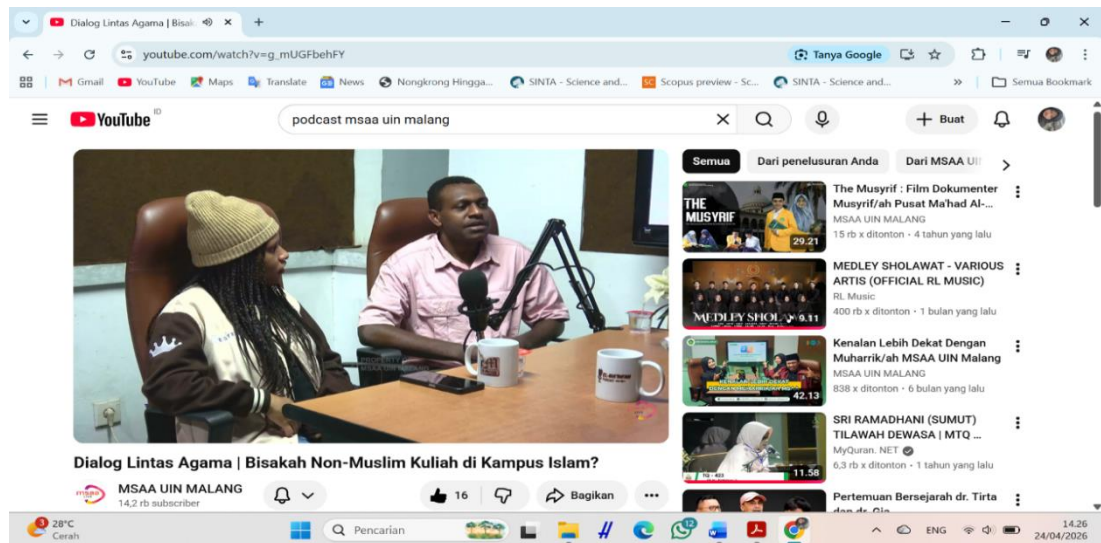
Dokumentasi kegiatan pendampingan rutin yang diikuti oleh semua mahasantri bersama pendamping kamar (*Musyrif*)



Dokumentasi keakraban antara mahasantri Muslim dengan mahasantri non-Muslim.



Dokumentasi kegiatan futsal bersama antara mahasantri non-Muslim dengan mahasantri Muslim.



Dokumentasi podcast “Dialog Lintas Agama: Bisakah Non-Muslim Kuliah di Kampus Islam?”, sumber Youtube MSAA UIN Malang, https://youtu.be/g_mUGFbehFY?si=ud_oTVlojzl2002c, diakses pada 24 April 2026, pukul 14.26 WIB.



Pembinaan rutin seluruh mahasantri Ar-Razi bersama Pengasuh, *Murabbi/ah*, dan *Musyrif/ah* mabna Ar-Razi, sumber Instagram @officialarrazi <https://www.instagram.com/reel/DSMGvOTks8T/?igsh=MmJ3NWphdm0xcXho>, diakses pada 26 April 2026, pukul 14.30 WIB.



Keikutsertaan Mahasantri Non-Muslim dalam kegiatan *Muhadoroh* rutin Mabna Ar-Razi yang disaksikan oleh seluruh mahasantri mabna Ar-Razi, *Murabbi/ah*, dan *Musyrif/ah*, sumber Instagram @officialarrazi, <https://www.instagram.com/reel/DRWT4nrEvql/?igsh=MWZrcW50aXBiYmNhdg==> diakses pada 26 April 2026, pukul 14.35 WIB.



Kegiatan senam dan olahraga bersama mahasantri Ar-Razi, *Murabbi/ah*, serta *Musyrif/ah* mabna Ar-Razi, sumber Instagram @officialarrazi, https://www.instagram.com/reel/DRXbA_1En5s/?igsh=MTBrdG5kb3MzZHVldQ==, diakses pada 26 April 2026, pukul 14.35 WIB.



Masjid Ali-Ashobuni, Kampus 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Observasi yang dilakukan peneliti di Mabna Ar-Razi, Kampus 2 UIN Malang, Kota Batu, tanggal 27 Februari 2026, pukul 08.00 WIB.

docs.google.com/forms/d/

SURVEY MODERASI BERAGAMA
MAHASANTRI 2025/2026

gitafarid25@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

☐ Rekam gitafarid25@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

NIM *

Jawaban Anda

Survey moderasi beragama oleh Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang wajib diisi oleh seluruh mahasiswa, <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQCUv5LHtbaYcXqpOiLNcRmMtINPZ8izQ8vdOV8eabvBMNdw/viewform?usp=publish-editor>



Dokumentasi keakraban dan kebersamaan antara mahasantri Muslim dengan mahasantri non-Muslim dalam mengikuti perlombaan (Dies Natalis Ke-11) Program Studi Farmasi UIN Malang.

tpn.msaa dan 4 lainnya
Westlife · My Love

ROOM OF THE MONTH
MABNA AR-RAZI PUTRA

KAMAR 316 (92,42%)
PENDAMPING KAMAR:
M. AMIR FARIQ

ANGGOTA KAMAR

MUHAMMAD WILDAN ARFIZA [FARMASI]	FAHMAAN HAFIZH NADIRA [FARMASI]
QUBA' MECCA MAHES R. [FARMASI]	APRILIANO VIRGO MANEK [FARMASI]

Penghargaan “Room Of The Month” oleh Tim Pengolah Nilai (TPN) Pusat Ma’had al-Jami’ah yang dinilai berdasarkan keaktifan mahasantri non-Muslim dan Muslim dalam mengikuti kegiatan di mabna, https://www.instagram.com/p/DX9Ptj3j-zX/?img_index=10&igsh=MXd2b3BmaXdzOHhr, diakses pada 5 Mei 2026, pukul 20.00 WIB.



Dokumentasi pelaksanaan ibadah mahasantri Non-Muslim di Gereja Bethany Yestoya Malang dalam rangka Kenaikan Isa Al Masih, pada tanggal 14 Mei 2026 .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Gajayana no 60 Dinoyo Malang Telp. (0341) 565418, Fax. (0341) 565418
email : msaa@uin-malang.ac.id, web: msaa.uin-malang.ac.id

TATA TERTIB MAHASANTRI TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KEWAJIBAN

1. Menjaga nama baik almamater Pusat Mahad Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mematuhi tata tertib dan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Pusat Mahad Al - Jamiah.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan di lingkungan Pusat Mahad Al - Jamiah.
4. Berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik di lingkungan Pusat Mahad Al-Jamiah.
5. Menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan Pusat Mahad Al-Jamiah.
6. Menjaga dan bertanggungjawab atas barang milik pribadi dan inventaris Pusat Ma'had Al - Jami'ah.
7. Menjaga sarana dan atau prasarana Pusat Ma'had Al-Jamiah.
8. Mengikuti seluruh program kegiatan Pusat Mahad Al - Jamiah.
9. Pintu mabna ditutup jam 22.30 WIB dan portal ditutup jam 22.00 WIB untuk area putra, 21.45 untuk area putri dan dibuka kembali pukul 04.00 WIB.
10. Mahasantri wajib berada di mabna sebelum jam penutupan pintu mabna pukul 22.30 WIB untuk putra, dan untuk putri 21.45 WIB.
11. Jika melebihi batas di atas (Point 9 & 10) maka wajib menghubungi Musyri'ah atau Murabbi'ah masing-masing.
12. Melepas alas kaki (sandal / sepatu) ketika memasuki mabna.

LARANGAN

1. Memakai pakaian yang tidak sopan bagi Mahasantri Putra (celana pendek, jeans dan chinos ketat, celana sobek-sobek dan kaos singlet) dan Mahasantri Putri (Pakaian Ketat, Pakaian Terawang, Baju Lengan ¾ atau terompot/kelelawar tanpa handsock, segala jenis celana jeans, Celana Kulot, Celana Jogger, memakai jilbab segi empat/ pashmina tanpa memakai jarum pentul, Rok Span, Rok Berbelah, Pakaian dari bahan sifon dan tidak memakai jilbab di tempat umum.)
2. Membawa aksesoris :
3. Mahasantri Putra : seperti gelang, kalung, anting, cincin, dan aksesoris putri.
4. Mahasantri Putri : aksesoris yang berlebihan.
5. Berambut gondrong,bersemir dan bertato.
6. Mengendarai atau Membawa sepeda motor dan perlengkapan berkendara atau mobil selama tinggal di Mahad.
7. Membawa alat masak dan barang elektronik selain HP, laptop, kamera, kipas angin USB, setrika, lampu belajar portable, sound mp3 dan obat nyamuk elektrik.
8. Membawa senjata api atau senjata tajam dengan tujuan membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
9. Membawa atau memelihara hewan peliharaan.
10. Memasuki lingkungan Mahad putri bagi mahasantri putra dan/atau sebaliknya.
11. Melakukan pelanggaran syari seperti : mencuri, pacaran, berkhawat, merokok/Vape dimanapun bagi perempuan, merokok/vape dikamar bagi laki-laki, berboncengan dengan lawan jenis serta berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram baik di dalam maupun diluar Mahad.
12. Bermalam di luar Mabna atau Mahad tanpa seijin dari Musyri'ah atau

Tata tertib mahasantri tahun akademik 2025/2026 yang harus ditaati oleh seluruh mahasantri di Pusat Ma'had al-Jami'ah, *Tata-Tertib-Mahasantri-MSAA-2025-2026.pdf* <https://share.google/ILJDaJC5QLsFZ1w0K> , diakses pada 3 Mei 2026, pukul 20.00 WIB.



Dokumentasi pelaksanaan ibadah mahasantri Non-Muslim di Gereja Santo Yohanes Pemandi Janti di Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam rangka Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 , pada tanggal 25 Desember 2025.

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341) 551354, Fax: (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 220101110005
 Nama : GITA SELVIA
 Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi : Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama: Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	19 September 2025	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Konsultasi terkait judul skripsi, pemetaan masalah, dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	01 Oktober 2025	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Konsultasi terkait perubahan beberapa kata di judul (Bingkai Pendidikan Islam menjadi Bingkai Moderasi Beragama, Non-Islam menjadi Non-Muslim), latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	03 Oktober 2025	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Konsultasi terkait Bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	10 Oktober 2025	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Konsultasi Bab 2 yang terdiri dari kajian teori, perspektif teori dalam Islam, dan kerangka berpikir.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	13 Oktober 2025	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Konsultasi Bab 3, jumlah informan, perbaikan sistematika penulisan (spasi di dalam tabel), penyempurnaan bab 1, bab 2, bab 3, serta penandatanganan berkas pendaftaran sidang seminar proposal.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	14 Oktober 2025	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	ACC proposal skripsi dari bab 1 sampai bab 3.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	14 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Konsultasi kerangka bab IV, yaitu terkait menentukan struktur hasil penelitian (subbab, alur penyajian data).	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	15 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Penyajian data mentah inti: Diskusi cara menampilkan data (narasi, tabel, kutipan wawancara).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
9	16 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Revisi penyajian data inti, perbaikan sistematika dan kelengkapan data.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
10	20 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Analisis data dan menghubungkan data dengan rumusan masalah.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
11	21 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Pendalaman analisis inti: Mengaitkan hasil dengan teori (Bab II).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
12	22 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Revisi Bab IV keseluruhan (penyempurnaan hasil dan analisis).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
13	23 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Kerangka Bab V, menentukan pola pembahasan (interpretasi hasil).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
14	24 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Penulisan pembahasan awal (menghubungkan temuan dengan konsep/teori).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
15	27 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M.Ag	Menambahkan argumentasi dan perbandingan penelitian terdahulu.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi

16	28 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Revisi bab V, memperjelas alur berpikir dan konsistensi analisis.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
17	29 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Merumuskan jawaban dari rumusan masalah.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
18	30 April 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Menyusun rekomendasi penelitian.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
19	05 Mei 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Cek dari Bab I–VI (konsistensi, typo, sistematika).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
20	06 Mei 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Revisi akhir dan perbaikan berdasarkan catatan dosen.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
21	07 Mei 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Persetujuan akhir dari dosen pembimbing.	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi
22	08 Mei 2026	Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag	Tanda tangan dan administrasi (pengesahan skripsi (lembar pengesahan, dll)).	Genap 2026/2027	Sudah Dikoreksi

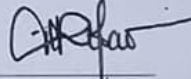
Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

Malang, _____
Dosen Pembimbing 1


Prof. Dr. Hj. SULALAH, M. Ag

Kajur / Kaprodi,



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIT PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR: 1002/UN.03.1/PP.00.9/05/2026

diberikan kepada:

Nama : Gita Selvia
NIM : 220101110005
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Karya Tulis : Multikulturalisme dalam Bingkai Moderasi Beragama (Studi Kasus Mahasantri Non-Muslim di Pusat Ma'had al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Naskah Skripsi/ Tesis sudah memenuhi kriteria anti plagiasi yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Academic Writing, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



Malang, 20 Mei 2026

d.n. bekan

Ketua

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

REPUBLIK INDONESIA

Wahyuningtyas Indah Mala Rohmana, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Gita Selvia
 NIM : 220101110005
 Tempat, Tanggal Lahir : Sitapung, 25 Oktober 2002
 Alamat : Pauh Jorong Lasi Mudo, Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
 Tahun Aktif : 2022-2026
 No. Handphone/WhatsApp : 083184612875
 E-mail : 220101110005@student.uin-malang.ac.id
 Riwayat Pendidikan :

Tahun	Lembaga Pendidikan
2008 – 2009	TK Islam Al-Islah Bukittinggi
2009 – 2015	SD Negeri 11 Balai Gurah
2015 – 2019	MTs Swasta Tarbiyah Islamiyah Candung
2019 – 2022	MA Swasta Tarbiyah Islamiyah Candung
2015 – 2022	Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Candung
2022 – 2023	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2022 – 2026	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang